



FASILITASI

INOVASI DAN TEKNOLOGI KABUPATEN BINTAN



2020



Bintan Gemilang

**BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BINTAN**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penyusunan Laporan Fasilitasi Teknologi dan Inovasi daerah Tahun 2020 dapat diselesaikan.

Dalam penyelenggaraan inovasi pemerintahan daerah, banyak hasil inovasi daerah yang telah dicapai, namun disadari masih banyak hal yang masih perlu perbaikan. Berkenaan dengan itu, mudah-mudahan rekomendasi serta masukan dapat dilakukan untuk proses penyelenggaraan inovasi pemerintahan daerah yang lebih matang.

Pada kesempatan ini, Tim Penyusun mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi memberikan data dalam penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini dapat menjadi masukan bagi upaya perencanaan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan inovasi daerah, dan peningkatan kualitas dari penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Tanjungpinang, 12 Oktober 2020
Plt. KEPALA BADAN PERENCANAAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN BINTAN

Drs. MOHD SETIOSO MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19730617 199311 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR GRAFIK.....	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud dan Tujuan.....	5
1.2.1. Maksud.....	5
1.2.2. Tujuan.....	5
1.3. Sasaran.....	6
1.4. Dasar Hukum.....	6
1.5. Ruang Lingkup.....	7
1.6. Metode Penelitian.....	7
1.6.1. Pendekatan penelitian.....	7
1.6.2. Informan Penelitian.....	8
1.6.3. Teknik Pengumpulan Data.....	8
1.6.4. Jenis Dan Sumber Data.....	9
1.6.5. Teknik analisa data.....	10
1.7. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II.....	13
KERANGKA KONSEPTUAL.....	13
2.1. Konsep Inovasi.....	13
2.1.1. Pengertian Inovasi.....	13
2.1.2. Perilaku Inovasi.....	14
2.2. Inovasi Daerah.....	15
2.2.1. Indikator Inovasi Daerah.....	19
2.2.2. Bentuk Inovasi Daerah.....	21
2.2.3. Kriteria Inovasi Daerah.....	23
BAB III.....	25
KONDISI EKSISTING INOVASI KABUPATEN BINTAN.....	25

3.1	Inovasi Tata Kelola Pemerintah Daerah	25
3.1.1	E – Gemilang	25
3.1.2	E – Planning	28
3.1.3	E – Rapat.....	31
3.1.4	Survey Kepuasan Masyarakat (SYKEMAS)	34
3.1.5	Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pembangunan (SIMONEV).....	39
3.1.6	Data Bintang In Hand.....	43
3.1.7	Digital Guest Book Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bintang	46
3.1.8	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	48
3.1.9	SIMRET (Sistem Informasi dan Retribusi).....	52
3.1.10	Sistem Kewaspadaan Dini Daerah (SIWASPADA).....	55
3.1.11	Sistem Informasi Manajemen ASN Bintang (SIMANTAN)	58
3.1.12	Sistem Ujian Bintang (SIJANTAN).....	62
3.1.13	Pengecekan Berkas Online BKPSDM Kabupaten Bintang (E-Check).....	65
3.1.14	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online Kabupaten Bintang	68
3.1.15	Sistem Informasi Manajemen Tata Ruang Wilayah (SIMTARU)	71
3.2	Inovasi Pelayanan Publik	74
3.2.1	Paralegal.....	74
3.2.2	Kapal Pustaka Apung.....	78
3.2.3	Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis di Puskesmas dan Rawat Inap Kelas III RSUD Bintang	82
3.2.4	Poli Malam di Puskesmas Padat Penduduk (Poli Umum, Kebidanan dan Poli Anak)	86
3.2.5	Posbindu PTM Mobile.....	90
3.2.6	Rumah Singgah Rujukan Luar Daerah	93
3.2.7	SAHARA (Sambungan Hati dan Rasa Masyarakat).....	97
3.2.8	Optimalisasi Corporate Social Responsility (CSR) Kabupaten Bintang	100
3.2.9	Perlengkapan Sekolah Gratis Bagi Siswa Baru (TK/SD/SMP sederajat).....	103
3.2.10	Transportasi Sekolah Gratis Kabupaten Bintang.....	107
3.2.11	Sistem Informasi Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (SIP-BOS) Bintang	111
3.2.12	Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) Online Kabupaten Bintang	114
3.2.13	Sistem Aplikasi Manajemen Pendidikan (SAMPAN)	117
3.2.14	Serving the Villager	121
3.2.15	Percepatan Pelayanan Pengurusan Akta Kelahiran Anak Usia 0-60 Hari	124

3.3	Inovasi Bentuk Lainnya sesuai bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	127
3.3.1	Organisasi Kelitbangan Kabupaten Bintan (ORALIT).....	127
3.3.2	Bank Sampah.....	131
3.3.3	Air Mancur Tasek Tuah Gemilang.....	135
3.3.4	Pelatihan Manajemen Homestay / Pondok Wisata.....	138
3.3.5	Pelatihan Pemandu Wisata Alam / Trekking	143
3.3.6	Pelatihan Pemandu Wisata Budaya Kuliner.....	147
3.3.7	Pelatihan Pemandu Wisata Budaya Pedesaan	152
3.3.8	Pelatihan Tata Kelola Destinasi Wisata	156
3.3.9	Pelatihan Peningkatan Pramuwisata Kabupaten Bintan (Pelatihan Bahasa Inggris)	161
3.3.10	Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS)	166
3.3.11	Desa Wisata.....	170
3.3.12	Fasilitasi dan Mediasi KUR bagi Usaha Mikro	174
3.3.13	Informasi Bahan Pokok dan Penting	176
3.3.14	Jantenkaya (Jaminan Ketenagakerjaan Kader Posyandu)	178
3.3.15	Kartu Kendali Rekomendasi Pembelian Minyak Solar (Gas Oil)	182
3.3.16	Koordinator Pendamping KUBE (Kelompok Usaha Bersama) dan UEP (Usaha Ekonomi Produktif).....	186
3.3.17	Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKSLU) Rumah Bahagia Bintan	190
3.3.18	Patroli Bersepeda	194
3.3.19	Pelayanan Koperasi 24 Jam.....	196
3.3.20	Peningkatan SDM (Sumber Daya manusia) Forum Kewaspadaan Dini Pemerintah Kabupaten Bintan.....	199
3.3.21	Promosi Produk Melalui Chanel Youtube BOESKU INDONESIA	202
3.3.22	Road Show Anti Narkoba.....	205
3.3.23	Rumah Singgah bagi Orang dengan Gangguan Jiwa.....	209
3.3.24	Rumah Singgah Bagi Orang Terlantar.....	213
3.3.25	Secanting Beras	216
3.3.26	SIMPAD (Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah).....	219
3.3.27	Budidaya Ulat Maggot Black Soldier Fly Secara Terpadu Desa Teluk Bakau	223
3.3.28	Kerajinan Cangkang Gonggong Desa Sebong Lagoi.....	227
3.3.29	Budidaya Lebah Madu Kelulut Desa Lancang Kuning.....	230
3.3.30	Dendeng Ikan Tamban Desa Dendun.....	233

3.3.31	Pengolahan Salak Desa Lancang Kuning.....	236
3.3.32	Peningkatan Pemanfaatan Taman Bacaan Masyarakat Desa Toapaya Utara.....	239
3.3.33	Ekowisata Desa Toapaya Selatan.....	242
3.3.34	Destinasi Wisata Telaga Biru Desa Busung.....	246
3.3.35	Teh Ilalang Desa Air Glubi.....	249
3.3.36	Pipanisasi Bawah Laut Desa Kampung Melayu	253
3.3.37	Sedotan Bambu Ramah Lingkungan Desa Pengudang.....	255
3.3.38	Varietas Unggul Baru (VUB) Salak Sari Intan.....	259
3.3.39	Sang Maestro (Alat Peraga KB Pria).....	262
3.4	Rekapitulasi Usulan Inovasi Kabupaten Bintan	266
BAB IV	268
ANALISA INOVASI DAERAH KABUPATEN BINTAN	268
BAB V	294
PENUTUP	294
5.1	Kesimpulan.....	294
5.2	Rekomendasi	296
DAFTAR PUSTAKA	299
Lampiran	300

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Indikator Inovasi Daerah	19
Tabel 3.1	Indeks Inovasi E-Gemilang	26
Tabel 3.2	Indeks Inovasi E-Planning	31
Tabel 3.3	Indeks Inovasi E-Rapat	33
Tabel 3.4	Indeks Inovasi SYKEMAS	37
Tabel 3.5	Indeks Inovasi SIMONEV	41
Tabel 3.6	Indeks Inovasi Data Bintang In Hand	45
Tabel 3.7	Indeks Inovasi Digital Guest Book Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bintan	47
Tabel 3.8	Indeks Inovasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	50
Tabel 3.9	Indeks Inovasi SIMRET (Sistem Informasi dan Retribusi)	53
Tabel 3.10	Indeks Inovasi SIWASPADA	56
Tabel 3.11	Indeks Inovasi Sistem Informasi Manajemen ASN Bintang (SIMANTAN)	60
Tabel 3.12	Indeks Inovasi Sistem Ujian Bintang (SIJANTAN)	63
Tabel 3.13	Indeks Inovasi Pengecekan Berkas Online BKPSDM Kabupaten Bintang (E- Check).....	67
Tabel 3.14	Indeks Inovasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online Kabupaten Bintang	70
Tabel 3.15	Indeks Inovasi Sistem Informasi Manajemen Tata Ruang Wilayah (SIMTARU)	73
Tabel 3.16	Indeks Inovasi Paralegal	77
Tabel 3.17	Indeks Inovasi Kapal Pustaka Apung	80
Tabel 3.18	Indeks Inovasi Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis di Puskesmas dan Rawat Inap Kelas III RSUD Bintan	83
Tabel 3.19	Indeks Inovasi Poli Malam di Puskesmas Padat Penduduk (Poli Umum, Kebidanan dan Poli Anak).....	88
Tabel 3.20	Indeks Inovasi Posbindu PTM Mobile.....	91
Tabel 3.21	Indeks Inovasi Rumah Singgah Rujukan Luar Daerah.....	95
Tabel 3.22	Indeks Inovasi SAHARA (Sambungan Hati dan Rasa Masyarakat)	99
Tabel 3.23	Indeks Inovasi Optimalisasi Corporate Social Responsibility (CSR) Kabupaten Bintan.....	102
Tabel 3.24	Indeks Inovasi Perlengkapan Sekolah Gratis Bagi Siswa Baru (TK/SD/SMP sederajat)	105
Tabel 3.25	Indeks Inovasi Transportasi Sekolah Gratis Kabupaten Bintan.....	109
Tabel 3.26	Indeks Inovasi Sistem Informasi Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (SIP-BOS) Bintan	113

Tabel 3.27	Indeks Inovasi Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) Online Kabupaten Bintan	116
Tabel 3.28	Indeks Inovasi Sistem Aplikasi Manajemen Pendidikan (SAMPAN)	119
Tabel 3.29	Indeks Inovasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	123
Tabel 3.30	Indeks Inovasi Percepatan Pelayanan Pengurusan Akta Kelahiran Anak Usia 0- 60 Hari.....	126
Tabel 3.31	Indeks Inovasi Organisasi Kelitbangan Kabupaten Bintan (ORALIT)	129
Tabel 3.32	Indeks Inovasi Bank Sampah	134
Tabel 3.33	Indeks Inovasi Air Mancur Tasek Tuah Gemilang	137
Tabel 3.34	Indeks Inovasi Pelatihan Manajemen Homestay / Pondok Wisata.....	141
Tabel 3.35	Indeks Inovasi Pelatihan Pemandu Wisata Alam / Trekking	146
Tabel 3.36	Indeks Inovasi Pelatihan Pemandu Wisata Budaya Kuliner.....	150
Tabel 3.37	Indeks Inovasi Pelatihan Pemandu Wisata Budaya Pedesaan.....	155
Tabel 3.38	Indeks Inovasi Pelatihan Tata Kelola Destinasi Wisata.....	159
Tabel 3.39	Indeks Inovasi Pelatihan Peningkatan Pramuwisata Kabupaten Bintan (Pelatihan Bahasa Inggris)	164
Tabel 3.40	Indeks Inovasi POKDARWIS	168
Tabel 3.41	Indeks Inovasi Desa Wisata	172
Tabel 3.42	Indeks Inovasi Fasilitasi dan Mediasi KUR bagi Usaha Mikro.....	175
Tabel 3.43	Indeks Inovasi Informasi Bahan Pokok dan Penting.....	177
Tabel 3.44	Indeks Inovasi Jantenkaya (Jaminan Ketenagakerjaan Kader Posyandu)	180
Tabel 3.45	Indeks Inovasi Kartu Kendali Rekomendasi Pembelian Minyak Solar (Gas Oil).....	184
Tabel 3.46	Indeks Inovasi Koordinator Pendamping KUBE (Kelompok Usaha Bersama) dan UEP (Usaha Ekonomi Produktif)	188
Tabel 3.47	Indeks Inovasi LKSLU Rumah Bahagia Bintan	192
Tabel 3.48	Indeks Inovasi Patroli Bersepeda	195
Tabel 3.49	Indeks Inovasi Pelayanan Koperasi 24 Jam	198
Tabel 3.50	Indeks Inovasi Peningkatan SDM (Sumber Daya manusia) Forum Kewaspadaan Dini Pemerintah Kabupaten Bintan	200
Tabel 3.51	Indeks Inovasi Promosi Produk Melalui Chanel Youtube BOESKU INDONESIA.....	204
Tabel 3.52	Indeks Inovasi Road Show Anti Narkoba	207
Tabel 3.53	Indeks Inovasi Rumah Singgah bagi Orang dengan Gangguan Jiwa	211
Tabel 3.54	Indeks Inovasi Rumah Singgah Bagi Orang Terlantar	214
Tabel 3.55	Indeks Inovasi Secanting Beras	217
Tabel 3.56	SIMPAD (Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah)	221
Tabel 3.57	Indeks Inovasi Budidaya Ulat Maggot Black Soldier Fly Secara Terpadu Desa Teluk Bakau.....	225
Tabel 3.58	Indeks Inovasi Kerajinan Cangkang Gonggong Desa Sebong Lagoi	229
Tabel 3.59	Indeks Inovasi Budidaya Lebah Madu Kelulut Desa Lancang Kuning	232

Tabel 3.60	Indeks Inovasi Dendeng Ikan Tamban Desa Dendun	235
Tabel 3.61	Indeks Inovasi Pengolahan Salak Desa Lancang Kuning	238
Tabel 3.62	Indeks Inovasi Peningkatan Pemanfaatan Taman Bacaan Masyarakat Desa Toapaya Utara	241
Tabel 3.63	Indeks Inovasi Ekowisata Desa Toapaya Selatan	245
Tabel 3.64	Indeks Inovasi Destinasi Wisata Telaga Biru Desa Busung	248
Tabel 3.65	Indeks Inovasi Teh Ilalang Desa Air Glubi	252
Tabel 3.66	Indeks Inovasi Pipanisasi Bawah Laut Desa Kampung Melayu	255
Tabel 3.67	Indeks Inovasi Sedotan Bambu Ramah Lingkungan Desa Pengudang	258
Tabel 3.68	Indeks Inovasi Varietas Unggul Baru (VUB) Salak Sari Intan	261
Tabel 3.69	Indeks Inovasi Sang Maestro (Alat Peraga KB Pria)	272
Tabel 3.70	Rekapitulasi Usulan Inovasi Kabupaten Bintan	264
Tabel 4.1	Daftar Usulan Inovasi berdasarkan Desk-Interview di Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2020	286
Tabel 4.2	Ranking Indeks Inovasi Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020	288
Tabel 4.3	Ranking Per-Indikator Satuan Pemda Kabupaten Bintan didalam Indeks Inovasi Daerah Tahun 2020	290
Tabel 4.4	Ranking Per-Indikator Inovasi Kabupaten Bintan didalam Indeks Inovasi Daerah Tahun 2020	291
Tabel 4.5	Komparasi Capaian Indikator SPD-Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Bintan dengan Kab/Kota di Provinsi Kepulauan Riau	292
Tabel 4.6	Komparasi Capaian Indikator Inovasi Daerah-Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Bintan dengan Kab/Kota di Provinsi Kepulauan Riau	293

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Urgensi Inovasi Dalam Kerangka Desentralisasi	4
Gambar 1.2.	Sistematika Penulisan	12
Gambar 4.1.	Inovasi Daerah di Kabupaten Bintan pada Tahun 2019	288

DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1. Perbandingan Capaian Indeks Inovasi Berdasarkan Ranking, Jumlah Inovasi dan Skor Inovasi Daerah Tahun 2020	289
--	-----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Inovasi merupakan faktor penting dalam mendukung perkembangan ekonomi dan daya saing daerah. Terjadinya pergeseran ekonomi berbasis industri menuju ekonomi berbasis pengetahuan menunjukkan bahwa pengetahuan dan inovasi merupakan faktor yang semakin menentukan dalam kemajuan ekonomi (Bapelitbang, 2019). Inovasi tidak hanya didengungkan di pusaran pemerintahan pusat saja, namun inovasi juga perlu ditumbuhkembangkan melalui daerah-daerah karena pembangunan negara bermuara ke daerah (Tedjo, 2017). Pembangunan suatu negara sangat tergantung pada perkembangan dan kebaruan daerah didalamnya, maka inovasi menjadi sangat penting untuk menggali sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam (SDA) demi meningkatkan daya saing atau nilai tambah pembangunan daerah tersebut.

Urgensi daripada Inovasi bagi pemerintah daerah sejalan dengan prinsip-prinsip *good governance* yang sejatinya mendorong nilai-nilai perubahan dalam rangka mendorong budaya organisasi publik berkualitas. Hal ini sejalan pula dengan semangat reformasi birokrasi dengan tujuan peningkatan profesionalisme aparatur sipil negara oleh karena itu dengan adanya kreatifitas serta terobosan didalam pemerintahan daerah memiliki kepentingan strategis memacu tumbuh berkembangnya ide dan gagasan dalam akselerasi tugas-tugas pemerintahan daerah. Sebagai landasan hukum awal berkenaan dengan pelaksanaan inovasi di tataran pemerintah daerah telah diatur didalam Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Didalam UU 23/2014 inilah yang memberikan peluang pemerintah daerah untuk melakukan inovasi khususnya pada pasal 386 yang menyatakan bahwa "dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi". Inovasi yang dimaksud adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang

berpedoman pada prinsip sebagai berikut: peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan, tidak ada konflik kepentingan, berorientasi kepada kepentingan umum, dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai-nilai kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

Spirit Inovasi selanjutnya tertuang didalam ragam kebijakan baik itu Undang-Undang, Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah hingga pada tataran pemerintah daerah sebagai bentuk komitmen legalitas guna mendukung secara serius pelaksanaan inovasi. Dalam NAWACITA Presiden Republik Indonesia terdapat 5 (lima) kata kunci yang menyebutkan Inovasi mulai dari Nawacita 2: “peningkatan kualitas RB melalui peningkatan kualitas pelayanan publik”, Nawacita 3: “peletakan dasar desentralisasi asimetris melalui peningkatan kualitas pemda”, Nawacita 3: “pemerataan pembangunan antar wilayah melalui peningkatan keterkaitan desa-kota”, Nawacita 6: “akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional melalui penguasaan iptek/inovasi”, Nawacita 8: “meningkatkan budaya inovasi di masyarakat melalui peningkatan iklim yang kondusif bagi inovasi”. Ini semua terdapat didalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 yang berkelanjutan diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang ke-IV untuk tahun 2020-2024.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah yang ditetapkan berdasarkan ketentuan pasal 390 UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadikan kerangka structural pelaksanaan Inovasi oleh Pemerintah Daerah semakin jelas. Tujuan utama dari Peraturan Pemerintah ini untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan diarahkan pada 3 (tiga) hal bagi mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui serangkaian akselerasi seperti (a) peningkatan pelayanan publik, (b) pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan (c) peningkatan daya saing daerah.

Bertalian dengan hal diatas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2020 dalam narasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang ke-IV untuk tahun 2020-2024 mengangkat idelisme tentang “Indonesia Berpenghasilan Menengah - Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan” bertitik tolak dari ini maka tidak pelak lagi bahwasanya peran strategis pemerintah daerah terutamanya kerjasama lintas sektoral lini-lini pengambilan kebijakan akan memerlukan inovasi mumpuni guna memastikan tujuan nasional bagi seluruh rakyat Indonesia ini akan tercapai dengan hasil yang maksimal. Ini juga penting bahwa Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata pada konteks ketahanan ekonomi.

Agenda inovasi daerah mesti berubah dari sekedar hanya hegemoni melahirkan produk namun juga mesti didukung usaha-usaha yang berkesinambungan untuk ekosistem postif inovasi daerah. Dalam catatan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) inovasi daerah akan menjadi daya ungkit yang berdampak kepada peningkatan daya saing daerah dimasa depan. Dimulai dengan membentuk suatu sistem yang mendukung Inovasi daerah di setiap organisasi perangkat daerah, ini sama dengan menyamakan frekwensi tentang inovasi itu sendiri. Dengan sejumlah potensi baik dari sisi sumber daya manusia yang dimiliki setiap daerah ditambah dengan karakteristiknya masing-masing tentu ini akan menjadi modal utama pengembangan potensi serta penataan inovasi daerah.

Pada perspektif tata kelola pemerintahan daerah terutamanya era desentralisasi di Indonesia, inovasi memiliki urgensi sehingga pembangunannya juga begitu konstruktif. Lembaga pemerintah dan non pemerintah serta masyarakat didorong untuk terus melakukan inovasi karena adanya tuntutan perubahan yang sangat cepat dewasa ini. Namun demikian, inovasi tersebut tetap harus menganut prinsip kehati-hatian dan dalam koridor peraturan dan tata kelola pemerintahan yang baik Badan Perencanaan Pembangunan Nasional pada tahun 2018 mengemukakan

bahwa didalam implementasi inovasi akan selaras dengan kapasitas pemerintah sebagaimana terdapat pada gambar dibawah ini:

Gambar 1.1
Urgensi Inovasi Dalam Kerangka Desentralisasi



Sumber: Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional Indonesia (Suhada, 2018)

Salah satu tantangan didalam pelaksanaan inovasi selain daripada mendorong kegiatan maupun aktivitas inovasi itu sendiri adalah pada tataran sinergitas kelembagaan mesti ada stimulus dalam pengintegrasian kebijakan inovasi daerah serta database inovasi daerah. Berangkat dari pendataan inilah kemudian fasilitasi pengembangan inovasi daerah diberbagai bidang pelayanan publik baik itu memanfaatkan teknologi informasi maupun alternative lainnya esensi pentingnya dapat juga berupa dalam tata kelola hingga optimalisasi subsistem yang mendukung terselenggaranya inovasi. Ini juga menjadi perhatian dari Kementerian PPN/Kepala Bappenas di tahun 2017 yang lalu bahwa perlunya Sinergi dan harmonisasi kebijakan lintas pemangku kepentingan untuk mengembangkan inovasi daerah penting untuk mencapai output dan outcome pembangunan yang lebih optimal. Untuk itu juga didalam

implementasi inovasi daerah dapat melakukan proses replikasi sehingga kedepannya dapat pula menjadikan daerah-daerah yang melaksanakan smart practices sebagai teladan dan contoh sehingga pelaksanaan inovasi yang dinilai berhasil dapat diduplikasi dan diimplementasikan oleh daerah-daerah lainnya.

Untuk menggalang inisiatif inovasi daerah didalam PP 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah dapat berasal dari 5 (Lima) komponen mulai dari Kepala Daerah, DPRD, ASN, Perangkat Daerah hingga partisipasi dari masyarakat. Setiap rancangan inovasi akan melalui *Business Process* untuk menilai serta mempersiapkan implementasi hingga nantinya dilanjutkan dengan hasil inovasi daerah. Bahkan pemerintah daerah didalam penerapan hasil inovasi daerah dapat memberikan payung hukum melalui Peraturan Daerah (PERDA) ataupun Peraturan Kepala Daerah (PERKADA) sehingga menjamin pengembangan lingkungan strategis penerapan inovasi daerah sebagaimana terdapat dalam Pasal 20 PP 38 Tahun 2017.

1.2. Maksud dan Tujuan

1.2.1. Maksud

Adapun Maksud Penyelenggaraan Dan Fasilitasi Inovasi Dan Teknologi adalah membantu penyelenggaraan inovasi yang ingin dicapai dan gambaran sektor apa saja yang akan dikembangkan agar tujuan pembangunan daerah dapat tercapai serta memberikan arahan tentang tahapan pencapaian, strategi, serta kerangka pelaksanaan inovasi yang akan dilaksanakan.

1.2.2. Tujuan

Adapun tujuan daripada pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Dan Fasilitasi Inovasi Dan Teknologi adalah untuk menjadi panduan dalam menciptakan dan mengembangkan inovasi yang akan di laksanakan baik ide dan gagasan individu organisasi ataupun perangkat daerah.

1.3. Sasaran

Sasaran kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Hasil Penelitian Pengembangan Dan Teknologi adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Bintan, Masyarakat, Dunia usaha dan Perguruan Tinggi.

1.4. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Indeks Inovasi Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 Tentang Penilaian Dan Pemberian Penghargaan dan/Atau Insentif Daerah

1.5. Ruang Lingkup

Adapun lingkup pekerjaan Penyelenggaraan dan Fasilitasi Inovasi dan Teknologi Kabupaten Bintan harus sesuai dengan peraturan perundangan Penyelenggaraan dan Fasilitasi Inovasi dan Teknologi, tidak terbatas dengan muatan sebagai berikut:

1. Melakukan inventarisasi terhadap Inovasi yang telah dilaksanakan;
2. Melakukan identifikasi terhadap inovasi yang telah di laksanakan serta rancangan usulan inovasi;
3. Menyusun dan menganalisis inovasi yang telah dilaksanakan;
4. Menyusun serta melakukan analisis regulasi inovasi yang telah di laksanakan;
5. Menyusun dan menganalisis tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan penguatan inovasi yang akan dilaksanakan;

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah eksploratif dengan metode penelitian gabungan kualitatif. Creswell (2014) menjelaskan bahwa penelitian eksploratif merupakan jenis penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan permasalahan dengan mengidentifikasi dan mengeksplorasi konsep atau fenomena. Jenis penelitian ini memungkinkan peneliti untuk membentuk kerangka penelitian yang lebih mendalam dengan pengumpulan data kualitatif.

Berdasarkan kerangka pengertian mengenai penelitian eksploratif tersebut, tujuan pendekatan ini jelas untuk menemukan dan mengidentifikasi keberadaan fenomena-fenomena yang selanjutnya dapat dijadikan rujukan pada tingkat penelitian lanjutan atau perumusan terhadap permasalahan yang ada di lapangan (Cresswell, 2014).

1.6.2. Informan Penelitian

Informan didalam penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan. Teknik penentuan sampel pada penelitian ini menggunakan purposive sampling. Teknik ini merupakan salah satu tipe sampling non-probabilitas (nonprobability sampling) di mana hasil penelitian ini akan memberikan kemungkinan bagi peneliti untuk memahami permasalahan dan mencapai tujuan penelitian (Creswell, 2014).

1.6.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data tahap awal yang akan digunakan pada penelitian ini adalah indepth interview untuk mengumpulkan data kualitatif tentang berbagai potensi dan inovasi daerah yang prospektif dikembangkan di Kabupaten Bintan. Sedangkan Focus Group Discussion (FGD) dilakukan setelah data awal diperoleh. Data dari pengumpulan awal digunakan untuk menyusun pedoman FGD. Penggunaan metode FGD dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai potensi inovasi dan kolaborasi guna mendukung rangkaian inovasi daerah di Kabupaten Bintan.

a. Indepth Interview

Pada pengambilan data, dilakukan metode indepth interview yang mana merupakan cara mengambil data/keterangan dengan memberikan sejumlah pertanyaan sesuai pedoman pertanyaan yang telah disusun pada informan yang telah dipilih mengenai penelitian dengan cara berinteraksi secara langsung. Pertanyaan yang diajukan berkisar mengenai kerjasama yang dilakukan untuk SIDA, potensi ector apa saja yang mampu dikembangkan, tantangan dan kendala, rencana ke depannya, hingga kolaborasi antara pihak terkait SIDA.

Data yang diperoleh dari hasil indepth interview dan focus group discussion (FGD) akan diolah dengan teknik coding sederhana sebagai data primer penelitian. Sedangkan Microsoft Excel akan digunakan untuk tabulasi data hasil analisis. Metode tersebut digunakan dengan alasan kesesuaian fitur

dengan tujuan/luaran (outcome) penelitian; memetakan kondisi eksisting inovasi yang terdapat di Pemerintah Kabupaten Bintan.

b. Focus Group Discussion (FGD)

Focus Group Discussion (FGD) dilakukan sebagai proses pengumpulan informasi terkait dengan fasilitasi inovasi dan teknologi ini. Secara spesifik, FGD berbentuk diskusi kelompok yang terarah. Diskusi ini dipinpin oleh moderator yang mendorong peserta diskusi agar berargumentasi mengenai inovasi daerah. Interaksi antara setiap peserta diskusi merupakan hal penting untuk memperoleh informasi, peserta diskusi mempunyai kesempatan yang sama untuk mengajukan dan memberi pertanyaan, memberikan sebuah tanggapan atau komentar dalam diskusi ini.

Adapun tujuan Focus Group Discussion ini adalah untuk memperoleh informasi maupun masukan dari suatu permasalahan yang menyangkut Inovasi Daerah, baik yang sudah berjalan maupun yang belum berjalan dengan baik serta inovasi yang mengalami kevakuman. Berbagai permasalahan yang terungkap akan didiskusikan lebih lanjut oleh peserta FGD lainnya. Dengan demikian, hal-hal krusial terkait berbagai kendala dan permasalahan dapat ditangani bersama-sama.

1.6.4. Jenis Dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yang digunakan pada penelitian ini adalah data kualitatif hasil wawancara mendalam dan FGD. Data primer digunakan sebagai acuan penyusunan strategi jangka panjang terkait penguatan SIDA di Kabupaten Bintan.

b. Data Sekunder

Guna meningkatkan hasil analisis dan kesesuaian cakupan penelitian atau fasilitasi inovasi dan teknologi di Kabupaten Bintan, tim peneliti melakukan analisis terhadap beberapa laporan resmi yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan, diantaranya adalah:

1. Kabupaten Bintan Dalam Angka 2019
2. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Bintan tahun 2019.
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bintan 2016-2021.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bintan Tahun 2019
5. Roadmap Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Bintan

Laporan-laporan tersebut digunakan sebagai data awal penyusunan Fasilitasi Inovasi dan Teknologi Kabupaten Bintan Tahun 2019. Kesesuaian data sekunder akan membantu peneliti melakukan pengkajian lebih lanjut terhadap analisis data primer sehingga hasil penelitian ini lebih reliable dan applicable.

1.6.5. Teknik analisa data

Teknik analisis data merupakan kegiatan analisis-analisis dalam penelitian yang dilakukan dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari instrumen penelitian yang digunakan, yang dapat berupa catatan, rekaman, dokumen, tes, dan lain sebagainya. Adapun langkah yang akan dilakukan dalam menganalisis data tersebut berdasarkan pendapat Miles dan Huberman (Augusta, I., 2003) melalui tiga jalur yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

1) Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar atau data mentah yang muncul atau data didapatkan dari catatan-catatan tertulis di lapangan dan berlangsung secara terus menerus selama penelitian berlangsung sampai data benar-benar telah terkumpul sesuai dengan kerangka konseptual yang telah ditetapkan (instrumen inovasi daerah). Adapun cara dalam mereduksi data yaitu: (1). Melakukan

seleksi data inovasi daerah secara ketat, (2). Membuat ringkasan atau uraian singkat tentang setiap inovasi daerah yang ada, dan (3) menggolongkannya dalam pola yang lebih luas.

2) Penyajian Data

Penyajian data merupakan kegiatan pada saat sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Adapun bentuk penyajiannya berupa teks naratif (benbetuk catatan lapangan) dan matrik guna untuk memberikan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih sehingga memudahkan untuk melihat apa yang sedang terjadi.

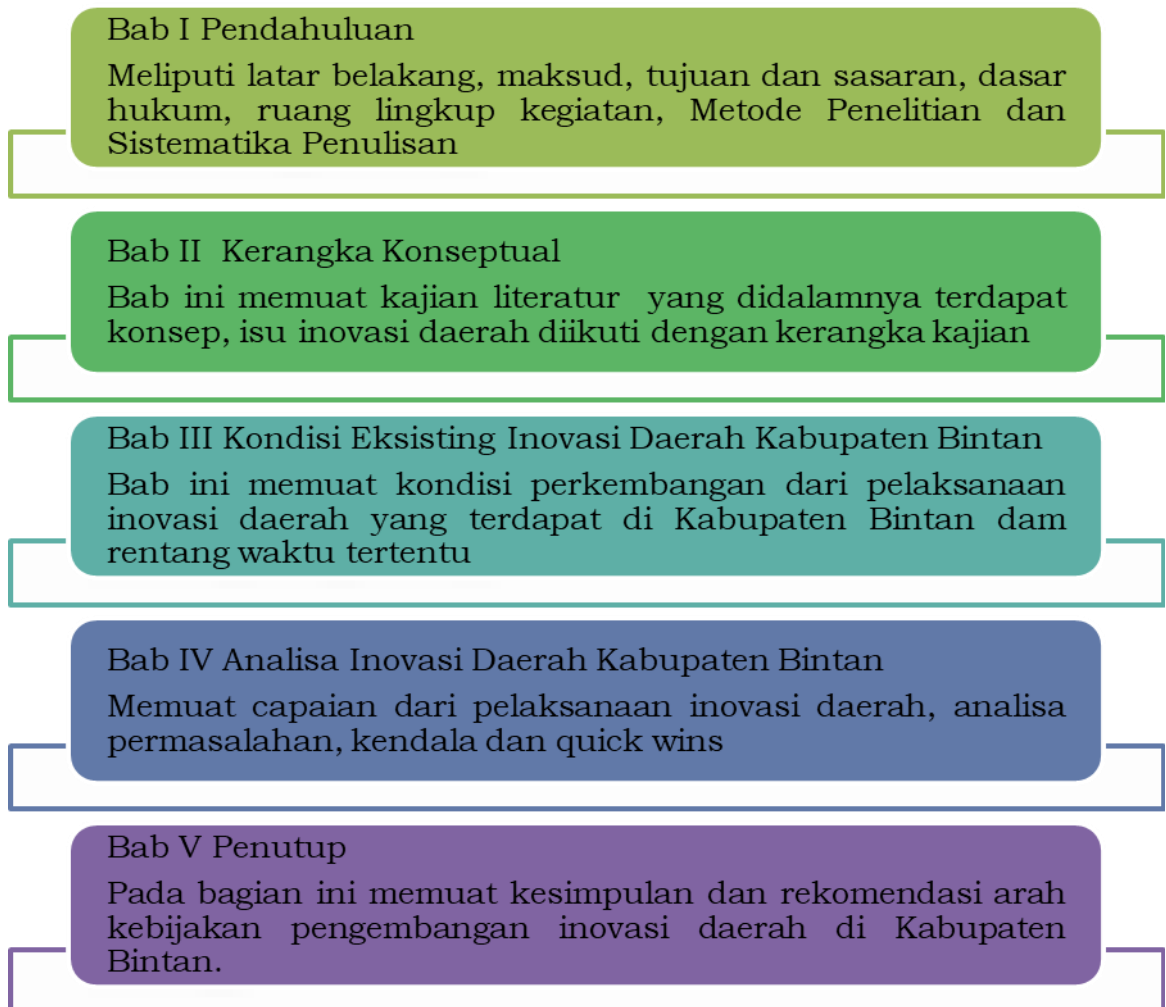
3) Penarikan Kesimpulan

Upaya penarikan kesimpulan akan dilakukan selama melakukan penggalian informasi inovasi daerah dilapangan. Mulai dari pengumpulan data inovasi daerah yang menghasilkan informasi yang belum jelas hingga meningkat menjadi lebih rinci dan semakin kokoh. Selama melakukan penelitian maka kesimpulan tersebut akan dilakukan tahapan verifikasi dengan cara (a). Memikir ulang selama penulisan, (b). meninjau kembali catatan lapangan, (c). Meninjau kembali dan mendiskusikan pikiran bersama tim ahli untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif, dan (d). Berupaya secara luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang telah ditetapkan.

1.7. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dalam penyusunan kegiatan pelaksanaan pekerjaan penyelenggaraan dan fasilitasi inovasi dan teknologi di Kabupaten Bintan adalah sebagai berikut:

Gambar 1.2
Sistematika Penulisan



BAB II

KERANGKA KONSEPTUAL

2.1. Konsep Inovasi

2.1.1. Pengertian Inovasi

Istilah inovasi dalam organisasi pertama kali diperkenalkan oleh Schumpeter pada tahun 1934. Inovasi dipandang sebagai kreasi dan implementasi 'kombinasi baru'. Istilah kombinasi baru ini dapat merujuk pada produk, jasa, proses kerja, pasar, kebijakan dan sistem baru. Dalam inovasi dapat diciptakan nilai tambah, baik pada organisasi, pemegang saham, maupun masyarakat luas. Oleh karenanya sebagian besar definisi dari inovasi meliputi pengembangan dan implementasi sesuatu yang baru (dalam de Jong & den Hartog, 2003) sedangkan istilah 'baru' dijelaskan Adair (1996) bukan berarti *original* tetapi lebih ke *newness* (kebaruan).

Arti kebaruan ini, diperjelas oleh pendapat Schumpeter bahwa inovasi adalah mengkreasikan dan mengimplementasikan sesuatu menjadi satu kombinasi. Dengan inovasi maka seseorang dapat menambahkan nilai dari produk, pelayanan, proses kerja, pemasaran, sistem pengiriman, dan kebijakan, tidak hanya bagi perusahaan tapi juga stakeholder dan masyarakat (dalam de Jong & Den Hartog, 2003)

Ruang lingkup inovasi dalam organisasi (Axtell dkk dalam Janssen, 2003), bergerak mulai dari pengembangan dan implementasi ide baru yang mempunyai dampak pada teori, praktek, produk, atau skala yang lebih rendah yaitu perbaikan proses kerja sehari-hari dan desain kerja. Oleh karenanya, penelitian inovasi dalam organisasi dapat dilakukan dalam 3 level yaitu inovasi level individu, kelompok, dan organisasi (Adair, 1996; de Jong & Den Hartog, 2003).

Jika dilihat dari kecepatan perubahan dalam proses inovasi ada dua macam inovasi yaitu inovasi radikal dan inovasi inkremental (Scot & Bruece, 1994). Inovasi radikal dilakukan dengan skala besar, dilakukan oleh para ahli dibidangnya dan biasanya dikelola oleh departemen penelitian dan

pengembangan. Inovasi radikal ini sering kali dilakukan di bidang manufaktur dan lembaga jasa keuangan. Sedangkan inovasi inkremental merupakan proses penyesuaian dan mengimplementasikan perbaikan yang berskala kecil. Yang melakukan inovasi ini adalah semua pihak yang terkait sehingga pendekatan pemberdayaan sesuai dengan model inovasi inkremental ini (Bryd & Brown, 2003; Jones, 2004)

2.1.2. Perilaku Inovasi

Pengertian perilaku inovatif menurut Wess & Farr (dalam De Jong & Kemp, 2003) adalah semua perilaku individu yang diarahkan untuk menghasilkan, memperkenalkan, dan mengaplikasikan hal-hal 'baru', yang bermanfaat dalam berbagai level organisasi. Beberapa peneliti menyebutnya sebagai *shop-floor innovation* (e.g., Axtell et al., 2000 dalam De Jong & Den Hartog, 2003). Pendapat senada dikemukakan oleh Stein & Woodman (Brazeal & Herbert, 1997) mengatakan bahwa inovasi adalah implementasi yang berhasil dari ide-ide kreatif. Bryd & Bryman (2003) mengatakan bahwa ada dua dimensi yang mendasari perilaku inovatif yaitu kreativitas dan pengambilan resiko. Demikian halnya dengan pendapat Amabile dkk (de Jong & Kamp, 2003) bahwa semua inovasi diawali dari ide yang kreatif. Kreativitas adalah kemampuan untuk mengembangkan ide baru yang terdiri dari 3 aspek yaitu keahlian, kemampuan berfikir fleksibel dan imajinatif, dan motivasi internal (Bryd & Bryman, 2003). Dalam proses inovasi, individu mempunyai ide-ide baru, berdasarkan proses berfikir imajinatif dan didukung oleh motivasi internal yang tinggi. Namun demikian sering kali, proses inovasi berhenti dalam tataran menghasilkan ide kreatif saja dan hal ini tidak dapat dikategorikan dalam perilaku inovatif.

Dalam mengimplementasikan ide diperlukan keberanian mengambil resiko karena memperkenalkan 'hal baru' mengandung suatu resiko. Yang dimaksud dengan pengambilan resiko adalah kemampuan untuk mendorong ide baru menghadapi rintangan yang menghadang sehingga pengambilan resiko merupakan cara mewujudkan ide yang kreatif menjadi realitas (Bryd & Brown, 2003).

2.2. Inovasi Daerah

Inovasi daerah telah diatur pada Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 Pasal 386, pada ayat 1 diatur bahwa, inovasi yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah merupakan dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inovasi-inovasi tersebut merupakan semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Mengacu pada Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 1 Tentang Inovasi Daerah maka yang dimaksud dengan Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Bentuk-bentuk pembaharuan dapat dilakukan dengan penerapan atas hasil-hasil ilmu pengetahuan dan teknologi dan temuan-temuan baru dalam penyelenggaraan pemerintahan (Resen, 2015). Pengaturan ini mempertegas upaya sinergisitas antara pemerintah daerah dengan berbagai *stakeholders* dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah serta daya saing daerah. Adapun tujuannya adalah untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui (a). Peningkatan Pelayanan Publik; (b). Pemberdayaan dan Peran serta Masyarakat; dan (c). Peningkatan Daya Saing Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 pasal 386 bahwa Inovasi Daerah bermakna bentuk pembaruan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Kemudian, jika meninjau pada pasal 388 mengemukakan mekanisme inovasi daerah sebagai berikut:

- a) Inisiatif inovasi dapat berasal dari kepala daerah, anggota DPRD, aparatur sipil negara, Perangkat Daerah, dan anggota masyarakat.
- b) Usulan inovasi yang berasal dari anggota DPRD ditetapkan dalam rapat paripurna.
- c) Usulan inovasi disampaikan kepada kepala daerah untuk ditetapkan dalam Perkada sebagai Inovasi Daerah.

- d) Usulan inovasi yang berasal dari aparatur sipil negara harus memperoleh izin tertulis dari pimpinan Perangkat Daerah dan menjadi inovasi Perangkat Daerah.
- e) Usulan inovasi yang berasal dari anggota masyarakat disampaikan kepada DPRD dan/atau kepada Pemerintah Daerah.
- f) Jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- g) Kepala daerah melaporkan inovasi Daerah yang akan dilaksanakan kepada Mendagri
- h) Laporan paling sedikit meliputi cara melakukan inovasi, dokumentasi bentuk inovasi, dan hasil inovasi yang akan dicapai.
- i) Pemerintah Pusat melakukan penilaian terhadap inovasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Selanjutnya, Dalam merumuskan kebijakan inovasi, pemerintahan daerah mengacu pada prinsip sebagai berikut (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 38 Tahun 2017; Setiawan, 2017) :

1) Peningkatan efisiensi;

Peningkatan efisiensi terlihat pada hal yang terkait pada kegunaan pemaksimalan serta pemanfaatan seluruh sumber daya dalam proses produksi barang dan jasa pemerintah, yang bekerja dengan menggunakan sumber daya dan energi yang sesuai tanpa pemborosan.

2) Perbaikan efektivitas;

Perbaikan efektivitas terlihat pada terlaksananya semua kegiatan pemerintahan, tercapainya tujuan, ketepatan waktu, dan partisipasi aktif dari sumber daya yang ada serta merupakan keterkaitan antara visi misi kegiatan dan outcome yang dihasilkan, dan menunjukkan derajat kesesuaian antara tujuan yang dinyatakan dengan hasil yang dicapai oleh penyelenggara pemerintah daerah

3) *Perbaiki kualitas pelayanan;*

Perbaiki kualitas pelayanan terlihat pada upaya peningkatan metode dan teknik serta sumber daya pelayanan yang dilakukan pemerintah daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.

4) *Tidak ada konflik kepentingan;*

Kemampuan Pemerintah daerah dalam mengembangkan daerahnya dengan menggunakan sumber daya yang ada tanpa adanya pilih kasih terhadap pelaku inovasi di daerah

5) *Berorientasi kepada kepentingan umum;*

Inovasi di daerah dilakukan dengan memperhatikan kepentingan yang lebih besar dan umum dibanding dengan kepentingan pribadi atau golongan

6) *Dilakukan secara terbuka;*

Penyeleksian terhadap Inovasi yang akan digunakan daerah dilakukan dengan terbuka dengan melibatkan berbagai unsur termasuk masyarakat pengguna

7) *Memenuhi nilai-nilai kepatutan; dan*

Bahwa inovasi yang dilakukan memang selayaknya dilaksanakan dengan mendengar berbagai pendapat stakeholder yang ada di daerah

8) *Dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.*

Inovasi yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya walaupun tidak dapat memenuhi target, namun dilakukan untuk kepentingan bersama.

Pelaksanaan Inovasi Daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah terkadang mengalami hambatan seperti tidak bisa berkembang atau inovasi tersebut tidak berkembang, inovasi yang sulit diterima oleh masyarakat dan bahkan menuai pro dan kontra sehingga menuai respon yang negatif dari

masyarakat. Adapun penyebab berkembang atau tidaknya inovasi daerah dapat dipengaruhi beberapa hal sebagai berikut (Setiawan, 2017):

1) *Tidak sesuai dengan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat,*

Hal ini terjadi karena pengembangan inovasi daerah yang akan diterapkan dilakukan tanpa memperhatikan kajian terhadap nilai dan norma yang berlaku di masyarakat setempat. Karena dari satu sisi penerapan kadang dianggap baik oleh pemerintah sebagai pelaksana, namun ternyata inovasi yang dikembangkan banyak memberikan efek negatif bagi nilai dan norma yang berlaku di daerah tersebut. Sebagai contoh, Misalkan pengembangan wisata pantai di Aceh dengan mengadopsi atau mencontoh penerapan di kawasan wisata pantai Bali, ataupun sebaliknya.

2) *Ketidak pahaman unsur pelaksana,*

Program inovasi yang akan diterapkan di suatu daerah, hendaknya memperhatikan tingkat kemampuan sumber daya manusia yang ada sebagai pelaksana. Misalkan penerapan program layanan internet guna percepatan layanan kependudukan di wilayah daerah yang luas dan berjauhan dengan kota kabupaten, namun aparat pelaksana di desa atau dusun tidak dapat mengimplementasikan program tersebut dengan baik, tentunya menjadi unsur penghambat bagi pelaksanaan inovasi tersebut.

3) *Ketidak profesionalismenya penggunaan sumber daya manusia pengelola,*

Pelaksanaan inovasi daerah kadang berhasil pada awalnya, namun ketika berjalan setahun atau 2 tahun, saat sumber daya manusia pengelola mendapatkan promosi atau mutasi dan digantikan dengan pegawai baru yang belum mengerti mengimplementasikan program inovasi tersebut, tentunya mengakibatkan terhambatnya inovasi tersebut karena arus menunggu penyesuaian atau pembelajaran dari pegawai pengganti pengelola tersebut.

4) *Hambatan kepentingan*

Hambatan kepentingan terjadi bila inovasi daerah yang diajukan oleh inovator, tidak sejalan dengan kepentingan Kepala Daerah yang bersangkutan. Atau dapat juga terjadi adanya kepentingan berbeda diantara aktor politik lokal di daerah.

5) *Penggunaan sumber daya yang begitu besar*

Pemerintah daerah kadang begitu menggebu-gebu dalam melakukan inovasi tanpa melihat cost dan benefit pada pelaksanaan inovasi tersebut. Penggunaan sumber daya yang begitu besar dengan mengerahkan sebagian besar unsur pemerintahan daerah untuk mensukseskan inovasi tersebut, tentunya akan berdampak pada pelaksanaan program kegiatan pemerintahan lainnya.

6) *Tidak sesuai dengan budaya organisasi*

Tidak semua yang berhasil di daerah lain akan berhasil juga di daerah kita. Hal ini kadang disebabkan karena budaya organisasi yang diterapkan berbeda dengan kondisi daerah lainnya yang berhasil menerapkan inovasi tersebut. Banyak daerah yang hanya mengcopy paste program inovasi daerah lainnya tanpa melihat budaya kerja yang berlaku di daerahnya, sehingga dukungan sumber daya tidak dapat berjaan maksimal.

2.2.1. Indikator Inovasi Daerah

Indikator Inovasi Daerah merupakan gabungan dari beberapa indikator yang terdapat pada Indeks Inputan Satuan Pemda dan Indkes Inputan Satuan Inovasi Daerah. Adapun indikator Inovasi Daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel.2.1
Indikator Inovasi Daerah

NO	Indeks Inputan Satuan Pemda	+	NO	Indkes Inputan Satuan Inovasi Daerah
1	Visi Misi		1	Regulasi Inovasi Daerah
2	Lembaga Kelitbangan		2	Ketersediaan SDM terhadap Inovasi Daerah
3	Jumlah Inovasi Daerah yang dihasilkan		3	Dukungan Anggaran
4	Kualitas		4	Penggunaan IT

	Peningkatan Perizinan			
5	Jumlah Pendapatan Perkapita		5	Sosialisasi Kebijakan
6	Jumlah Lapangan Kerja		6	Bimtek Inovasi
7	Jumlah Peningkatan Investasi		7	Program dan Kegiatan di Renstra OPD
8	Jumlah Peningkatan PAD		8	Jejaring Inovasi
9	Opini BPK		9	Replika
10	Nilai Capaian Lakip		10	Kualitas Inovasi Daerah
11	Nilai IPM		11	Pedoman Teknis
12	Penghargaan Bagi Inovator		12	Pengelola Inovasi
13	Optimalisasi CSR		13	Ketersediaan Informasi Layanan
14	Inovasi Daerah di RPJMD		14	Penyelesaian Layanan Pengaduan
15	-		15	Tingkat Partisipasi Stakeholder
16	-		16	Kemudahan Informasi Layanan
17	-		17	Kemudahan Proses Inovasi yang dihasilkan
18	-		18	Online Sistem
19	-		19	Kecepatan Inovasi
20	-		20	Kemanfaatan Inovasi
21	-		21	Tingkat Kepuasan Penggunaan Inovasi Daerah

Dari tabel indikator inovasi daerah diatas selanjutnya diuraikan secara rinci berdasarkan 4 aspek yaitu Input, Proses, Output dan Outcome sebagai berikut:

1. *Input*

- a. Visi-Misi
- b. Lembaga Kelitbangan
- c. Penghargaan Bagi Inovator
- d. Regulasi
- e. Kepedulian Sumber Daya Manusia
- f. Dukungan Anggaran
- g. CSR
- h. Pengelolal Inovasi

2. Proses

- a. Sosialisasi Kebijakan
- b. Bimtek Inovasi
- c. Inovasi di RPJMD
- d. Program Inovasi di Renstra
- e. Jejaring Inovasi
- f. Replikasi
- g. Pedoman Teknis
- h. Tingkat Partisipasi Stakeholder

3. Output

- a. Jumlah Inovasi Daerah
- b. Jumlah Pendapatan Perkapita
- c. Jumlah Lapangan Kerja
- d. Jumlah Peningkatan Investasi
- e. Jumlah Peningkatan PAD
- f. Opini BPK
- g. Nilai LAKIP
- h. Nilai IPM

4. Outcome

- a. Kualitas Peningkatan perizinan
- b. Kualitas Inovasi Daerah
- c. Ketersediaan Layanan Informasi
- d. Penyelesaian Pengaduan
- e. Kemudahan Informasi Layanan
- f. Online Sistem
- g. Kecepatan Inovasi Daerah
- h. Kemandirian Inovasi
- i. Tingkat Kepuasan Masyarakat

2.2.2. Bentuk Inovasi Daerah

Adapun bentuk inovasi daerah terbagi menjadi 3 kategori yaitu dalam bentuk:

1. Inovasi Tata Kelola Pemerintah Daerah

Adapun yang termasuk dalam Inovasi Tata Kelola Pemerintah Daerah meliputi penataan tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen E-Planning, E-Budgeting dan lain sebagainya.

2. Inovasi Pelayanan Publik

merupakan inovasi dalam penyediaan layanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian layanan barang/jasa publik, serta inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik, yang memberi pelayanan langsung kepada masyarakat seperti: inovasi dalam pelayanan perijinan, inovasi dalam pelayanan kesehatan, inovasi dalam pelayanan pendidikan dan lain sebagainya.

3. Inovasi Bentuk Lainnya sesuai bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

Adapun yang termasuk dalam Inovasi Bentuk Lainnya meliputi Segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, seperti: inovasi dalam bidang urusan pekerjaan umum, inovasi dalam bidang urusan lingkungan hidup dan lain sebagainya.

Pada dasarnya, ketiga bentuk inovasi daerah tersebut harus memenuhi prinsip-prinsip yang telah dituangkan pada Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. Selain itu, ketiga bentuk Inovasi daerah tersebut merupakan poin penilaian untuk Penghargaan Pemerintah Daerah Inovatif (Indeks Inovasi Daerah) yang menekankan pada penilaian berbasis inovasi daerah dalam berbagai bentuk/bidang inovasi daerah yang telah berhasil dilakukan oleh Pemerintah Daerah baik dari aspek Input, Proses, Output, Outcome.

2.2.3. Kriteria Inovasi Daerah

kriteria Inovasi Daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 38 Tahun 2017 pasal 6 dan berdasarkan buku petunjuk Teknis Indeks Daerah meliputi :

a. Mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi;

Setiap program/kegiatan inovasi daerah yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah harus “mengandung unsur pembaharuan seluruh atau sebagian” artinya bahwa rancang bangun dalam Inovasi Daerah tersebut seluruhnya atau sebagian berbeda dengan rancang bangun yang telah ada.

b. Memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat;

Program/kegiatan inovasi daerah yang telah berhasil dilakukan oleh Pemerintah Daerah diharapkan “memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat” antara lain menambah Pendapatan Asli Daerah, menghemat belanja Daerah, meningkatkan capaian kinerja Pemerintah Daerah, dan meningkatkan mutu pelayanan publik dan/atau ditujukan bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya.

c. Tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Program/kegiatan inovasi daerah yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah yang telah berhasil dilakukan “tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” artinya bahwa inovasi daerah dimaksud:

1. Tidak menimbulkan pungutan dan/atau kewajiban lainnya bagi warga negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, misalnya menetapkan pajak atau retribusi Daerah; dan,

2. Membatasi akses warga negara untuk mendapat pelayanan atau menggunakan hak-haknya sebagai warga negara, misalnya menambah persyaratan untuk memperoleh kartu tanda penduduk yang mengakibatkan sebagian warga negara tidak dapat memenuhinya.

d. Merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;

Artinya bahwa program/kegiatan inovasi daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah masih dalam koridor yang “merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah” baik kewenangan Provinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga program/kegiatan inovasi daerah itu memiliki unsur keberlanjutan, yang berlangsung dalam jangka waktu panjang dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara berkesinambungan.

e. Dapat direplikasi.

Program/kegiatan inovasi daerah yang telah berhasil dilakukan oleh Pemerintah Daerah dapat direplikasi di Daerah lain melalui tahapan prosedur dan mekanisme tertentu dengan mempertimbangkan kondisi dan karakteristik wilayah, sosiologis dan kebudayaan, serta potensi daerah yang akan mereplikasi inovasi daerah.

BAB III

KONDISI EKSISTING INOVASI KABUPATEN BINTAN

3.1 Inovasi Tata Kelola Pemerintah Daerah

3.1.1 E – Gemilang

1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi

E-GEMILANG

1.2. Tahapan Inovasi

Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah

OPD – Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah

1.4. Jenis Inovasi

Digital

1.5. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah.

1.6. Urusan Inovasi Daerah

Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan.

1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Belum terintegrasinya sistem perencanaan (E-Planning) dan sistem keuangan (E-Budgetting) beberapa daerah yang akhirnya mendapat perhatian dari Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memotivasi beberapa daerah khususnya di Provinsi Kepulauan Riau untuk memiliki suatu sistem perencanaan dan sistem keuangan yang terintegrasi. Untuk proses integrasi E-Planning, E-Budgeting tersebut, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bintan mengembangkan portal e-gemilang, Portal E-Gemilang ini digunakan untuk memudahkan akses antar sistem yang terintegrasi seperti yang diamanatkan oleh Komisi Pemberantasan

Korupsi pada Kegiatan Renaksi PPK.

E-Gemilang memiliki fungsi sebagai web service yang menjembatani data antar aplikasi tersebut. Saat ini E- Gemilang juga mengintegrasikan Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi yang juga dikembangkan oleh Bapelitbang Bintan.

1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Mengintegrasikan sistem perencanaan dan sistem keuangan daerah sesuai amanat KPK.

1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Memudahkan akses sistem perencanaan dan sistem keuangan , dan Terintegrasinya data dua sistem tersebut.

1.10. Hasil Inovasi

Terintegrasinya data perencanaan dan data keuangan Kabupaten Bintan.

2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.1
Indeks Inovasi E-Gemilang

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	Perkada	Pengelolaan Sistem Rencana Kerja Pemerintah Daerah Berbasis Teknologi Informasi Secara Daring (e-Planning) Kabupaten Bintan
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	11-30 SDM	Penunjukan Tim Operator Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah (Simrenbangda) Kabupaten Bintan Tahun 2018
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran untuk kegiatan inovasi dalam tahapan sudah dilaksanakan dan sudah di evaluasi	Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

			Bintan
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja di lingkungan pemerintah daerah sudah didukung system informasi online/ daring	Layar E-Gemilang
5.	Bimtek Inovasi	Pernah 1 tahun 2 Kali melakukan Bimtek	Dokumentasi Bimtek
6.	Program Dan Kegiatan Di Renstra OPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan pengembangan inovasi ke dalam Resntra dan telah dilaksanakan	Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Daerah Kabupaten Bintan tahun 2016-2021
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi hanya berjalan 3 OPD atau lebih	Dokumentasi Jejaring Inovasi
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman Teknis	Petunjuk Teknis Sistem Rencana Kerja Pemerintah Daerah Berbasis Teknologi Informasi Secara Daring (e-Planning) Kabupaten Bintan Pada Badan Perencanaan
10.	Pengelola Inovasi	ada pengelola dan Ditetapkan dengan SK kepala daerah	Penunjukan Tenaga Ahli Pengelola Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tahun 2020
11.	Ketersediaan Informasi Layanan	informasi diakses melalui telp	screenshot wa group Program Bintan
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	terdapat layanan pengaduan pengguna melalui "media sosial"	screenshot wa group Program Bintan
13.	Tingkat Partisipasi Stakeholder	inovasi dilakukan dengan melibatkan masyarakat dan akademisi serta media massa	dokumentasi Partisipasi stakeholder
14.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Email/Media Sosial	screenshot wa group Program Bintan
15.	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	Hasil inovasi dapat dilakukan dalam waktu	dokumen Laporan E-Gemilang

		hitungan 1-2 hari	
16.	Online Sistem	ada dukungan melalui perangkat web aplikasi dan aplikasi mobile (android atau ios)	screenshot Web E-Gemilang
17.	Kecepatan Inovasi	Proses inovasi dapat dilakukan dalam waktu hitungan 1-2 bulan	dokumentasi akses inovasi daerah dalam satuan waktu
18.	Kemanfaatan Inovasi	hasil manfaatnya dirasakan diatas 201 orang ketas	screenshot penerima manfaat (pengguna aplikasi)
19.	Tingkat Kepuasan penggunaan inovasi daerah	-	Tidak Tersedia
20.	Sosialisasi Kebijakan	Ada Foto	Dokumentasi Sosialisasi Kebijakan
21.	Kualitas Inovasi Daerah	Ada Upload Video	E-GEMILANG

3.1.2 E – Planning

1. PROFIL INOVASI

1.1 Nama Inovasi

E-Planning

1.2 Tahapan Inovasi

Implementasi

1.3 Inisiator Inovasi Daerah

OPD – Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah

1.4 Jenis Inovasi

Digital

1.5 Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah.

1.6 Urusan Inovasi Daerah

Penelitian dan Pengembangan, Perencanaan.

1.7 Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses perencanaan pembangunan yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan menuju

arah perkembangan yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah dan lingkungannya dalam wilayah / daerah tertentu dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumberdaya yang ada dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap tetapi tetap berpegang pada azas prioritas.

Dalam pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah, Bapelitbang dan OPD menghadapi beberapa kendala terutama validitas data. Untuk mengatasi masalah tersebut, Bapelitbang mencoba menyiapkan sistem perencanaan dan pelaporan pembangunan daerah berbasis perencanaan elektornik (Eplanning) untuk mengatasi kelemahan data yang dimiliki.

1.8 Tujuan Inovasi Daerah

Melalui E- Planning diharapkan sistem perencanaan yang disusun oleh pemerintah tingkat akurasi yang tinggi atau selisih data yang “error” (salah) makin kecil, membantu mewujudkan kedisiplinan SKPD dalam pengajuan usulan Rencana Kerja (Renja) dan hanya mengakomodir usulan program yang sesuai dengan RPJMD.

1.9 Manfaat Yang Diperoleh

Penyusunan RKPD s/d KUA PPAS Kabupaten Bintan dapat terselesaikan dengan mudah, cepat, tepat dan sesuai dengan arahan yang terkandung dalam Permendagri 54 tahun 2010 dan Permendagri 86 tahun 2017. Serta memaksimalkan fungsi Bapelitbang sebagai fungsi perencana, pengendali dan evaluator.

1.10 Hasil Inovasi

Penyusunan RKPD s/d KUA PPAS dapat selesai tepat waktu.

2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.2
Indeks Inovasi E-Planning

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	Perkada	Pengelolaan Sistem Rencana Kerja Pemerintah Daerah

			Berbasis Teknologi Informasi Secara Daring (e-Planning) Kabupaten Bintan
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	11-30 SDM	PENUNJUKAN TIM OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (SIMRENBANGDA) KABUPATEN BINTAN TAHUN 2018
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran untuk kegiatan inovasi dalam tahapan sudah dilaksanakan dan sudah di evaluasi	Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bintan
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja di lingkungan pemerintah daerah sudah didukung system informasi online/ daring	Dashboard aplikasi E-Planning
5.	Bimtek Inovasi	Pernah 1 tahun 2 Kali melakukan Bimtek	Dokumentasi Bimtek
6.	Program Dan Kegiatan Di Renstra OPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan pengembangan inovasi ke dalam Resntra dan telah dilaksanakan	Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Daerah Kabupaten Bintan tahun 2016-2021
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi hanya berjalan 3 OPD atau lebih	Dokumentasi Jejaring Inovasi
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman Teknis	Petunjuk Teknis Sistem Rencana Kerja Pemerintah Daerah Berbasis Teknologi Informasi Secara Daring (e-Planning) Kabupaten Bintan Pada Badan Perencanaan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2017

10.	Pengelola Inovasi	ada pengelola dan Ditetapkan dengan SK kepala daerah	Penunjukan Tenaga Ahli Pengelola Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tahun 2020
11.	Ketersediaan Informasi Layanan	informasi diakses melalui telp	screenshot wa group
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	terdapat layanan pengaduan pengguna melalui "media sosial"	WA Group layanan pengaduan
13.	Tingkat Partisipasi Stakeholder	inovasi dilakukan dengan melibatkan masyarakat dan akademisi serta media massa	dokumentasi Partisipasi stakeholder
14.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Email/Media Sosial	WA Group layanan pengaduan
15.	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	Hasil inovasi dapat dilakukan dalam waktu hitungan 1-2 hari	Deskripsi Kemudahan Proses Inovasi E-Planning
16.	Online Sistem	ada dukungan melalui perangkat web aplikasi dan aplikasi mobile (android atau ios)	screenshot online system
17.	Kecepatan Inovasi	Proses inovasi dapat dilakukan dalam waktu hitungan 1-2 bulan	dokumentasi akses inovasi daerah dalam satuan waktu
18.	Kemanfaatan Inovasi	hasil manfaatnya dirasakan diatas 201 orang ketas	screenshot Pengguna website E- Planning
19.	Tingkat Kepuasan penggunaan inovasi daerah	-	Tidak Tersedia
20.	Sosialisasi Kebijakan	Ada Foto	Dokumentasi Sosialisasi Kebijakan E-Planning
21.	Kualitas Inovasi Daerah	Ada Upload Video	E-Planning

3.1.3 E – Rapat

1. PROFIL INOVASI

1.1 Nama Inovasi

E-RAPAT

1.2 Tahapan Inovasi

Implementasi

1.3 Inisiator Inovasi Daerah

OPD – Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah

1.4 Jenis Inovasi

Digital

1.5 Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah.

1.6 Urusan Inovasi Daerah

Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan.

1.7 Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Kebutuhan akan data peserta rapat yang bisa didapat secara cepat pada saat peserta rapat melakukan pendaftaran. Dengan data peserta yang sudah didapatkan sebelum tanggal rapat dimulai maka kebutuhan akomodasi untuk rapat dapat diketahui dan dipesan dengan lebih tepat. Kebutuhan data lain seperti NPWP, No.Rekening juga dapat didata sesuai dengan waktu yang ditentukan penyelenggara.

E-Rapat ini dikembangkan berbasis web, yang dapat berjalan multi platform. Data-data yang dibutuhkan penyelenggara rapat dapat diterima pada saat peserta rapat melakukan registrasi selain itu peserta juga dapat memilih posisi kursi sendiri dari saat registrasi aplikasi e-rapat. Print kartu peserta rapat juga dapat dicetak untuk kebutuhan-kebutuhan lain yang dibutuhkan penyelenggara rapat.

1.8 Tujuan Inovasi Daerah

Memberi Informasi data peserta rapat di Bapelitbang Bintan Bintan.

1.9 Manfaat Yang Diperoleh

Mempermudah penyelenggara rapat mendapat informasi yang dibutuhkan dari peserta rapat.

1.10 Hasil Inovasi

Terkoordinasinya rapat-rapat yang diselenggarakan BAPELITBANG.

2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.3
Indeks Inovasi E-Rapat

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK OPD	Penunjukan/Penetapan Tim Kelompok Kerja Pengelolaan Aplikasi E- Rapat Bapelitbang Bintan
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	11-30 SDM	Penunjukan/Penetapan Tim Kelompok Kerja Pengelolaan Aplikasi E- Rapat Bapelitbang Bintan
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran untuk kegiatan inovasi dalam tahapan sudah dilaksanakan dan sudah di evaluasi	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Kelitbang
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja di lingkungan pemerintah daerah sudah didukung system informasi online/daring	screenshot aplikasi E-Rapat, screenshot website E-Rapat
5.	Bimtek Inovasi	Pernah 1 tahun 2 Kali melakukan Bimtek	Dokumentasi Bimtek
6.	Program Dan Kegiatan Di Renstra OPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan pengembangan inovasi ke dalam Resntra dan telah dilaksanakan	Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Daerah Kabupaten Bintan tahun 2016-2021
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi hanya berjalan 1 OPD	Dokumentasi Jejaring Inovasi
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman Teknis	Petunjuk Teknis Aplikasi E- RAPAT Bapelitbang Bintan
10.	Pengelola Inovasi	ada pengelola dan Ditetapkan dengan SK OPD	Penunjukan/Penetapan Tim Kelompok Kerja Pengelolaan Aplikasi E- Rapat Bapelitbang Bintan
11.	Ketersediaan Informasi Layanan	informasi layanan dapat diakses secara online	screenshot Web ketersediaan layanan informasi

12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	terdapat layanan pengaduan melalui pengguna "aplikasi pengaduan"	screenshot aplikasi layanan Pengaduan E-Rapat
13.	Tingkat Partisipasi Stakeholder	inovasi dilakukan dengan melibatkan masyarakat dan akademisi serta media massa	foto kegiatan E-Rapat
14.	Kemudahan Informasi Layanan	layanan melalui aplikasi online	screenshot aplikasi layanan informasi E-Rapat
15.	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	-	Tidak Tersedia
16.	Online Sistem	ada dukungan melalui perangkat web aplikasi dan aplikasi mobile (android atau ios)	screenshot online system
17.	Kecepatan Inovasi	-	Tidak Tersedia
18.	Kemanfaatan Inovasi	hasil manfaatnya dirasakan 1-100 orang	dokumentasi kemanfaatan Inovasi
19.	Tingkat Kepuasan penggunaan inovasi daerah	-	Tidak Tersedia
20.	Sosialisasi Kebijakan	Ada Foto	Dokumentasi Sosialisasi Kebijakan
21.	Kualitas Inovasi Daerah	Ada Upload Video	E-Rapat

3.1.4 Survey Kepuasan Masyarakat (SYKEMAS)

1. PROFIL INOVASI

1.1 Nama Inovasi

Survey Kepuasan Masyarakat (SYKEMAS)

1.2 Tahapan Inovasi

Implementasi

1.3 Inisiator Inovasi Daerah

OPD – Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah

1.4 Jenis Inovasi

Digital

1.5 Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah.

1.6 Urusan Inovasi Daerah

Penelitian dan Pengembangan, Fungsi Penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.7 Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Dalam peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik Indonesia nomor 14 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik yang menjelaskan bahwa untuk peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, perlu dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun. Survei dilakukan untuk memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat. Penyelenggara pelayanan publik juga diwajibkan mempublikasikan hasil Survei Kepuasan Masyarakat, Selanjutnya Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat dilaporkan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Laporan hasil Survei Kepuasan Masyarakat sebagaimana dimaksud digunakan sebagai dasar penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat secara nasional oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pada Undang-undang republik Indonesia nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik juga dijelaskan bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik serta sebagai upaya untuk mempertegas hak dan kewajiban setiap warga negara dan penduduk serta terwujudnya tanggung jawab negara dan korporasi dalam

penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan norma hukum yang memberi pengaturan secara jelas.

Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan survei kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan dengan mengukur kepuasan masyarakat pengguna layanan. Mengingat unit layanan publik sangat beragam, untuk memperoleh Indeks Pelayanan Publik secara nasional maka dalam melakukan Survei Kepuasan Masyarakat diperlukan metode survei yang seragam sebagaimana diatur didalam peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik Indonesia nomor 14 tahun 2017. Hal ini lah yang menjadikan dasar Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan Menyusun pedoman penyusunan survey kepuasan masyarakat lingkup Kabupaten Bintan untuk dapat mewujudkan visi, misi, program dan kegiatan serta untuk memberikan arahan dan pedoman yang jelas dan tegas bagi penyelenggara pelayanan public untuk mewujudkan pembangunan Bintan gemilang.

1.8 Tujuan Inovasi Daerah

Tujuan kegiatan ini adalah:

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan.
2. Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
3. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik.
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Meningkatkan pemahaman akan penyelenggaraan fungsi kelitbangan sesuai permendagri nomor 17 tahun 2016.

1.9 Manfaat Yang Diperoleh

Adapun manfaat yang ingin dicapai pada kegiatan pedoman penyusunan survey kepuasan masyarakat adalah untuk mengukur tingkat kepuasan

masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

1.10 Hasil Inovasi

Keluaran dari kegiatan Penyelenggaraan Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat (SYKEMAS) adalah tersedianya dokumen Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat dan Aplikasi SKM.

2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.4
Indeks Inovasi SYKEMAS

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	Perkada	Penerapan Survey Kepuasan Masyarakat Berbasis Aplikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	11-30 SDM	Penunjukan Tim Penyusunan Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Kabupaten Bintan Tahun 2019
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran untuk kegiatan inovasi dalam tahapan sudah dilaksanakan dan sudah di evaluasi	Kajian Survey Kepuasan Masyarakat
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja di lingkungan pemerintah daerah sudah didukung system informasi online/ daring	Screenshoot Layar SYKEMAS
5.	Bimtek Inovasi	Pernah 1 tahun 2 Kali melakukan Bimtek	Dokumentasi Bimtek SYKEMAS
6.	Program Dan Kegiatan Di Renstra OPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan pengembangan inovasi ke dalam Resntra dan telah dilaksanakan	Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Daerah Kabupaten Bintan tahun 2016-2021

7.	Jejaring Inovasi	Inovasi hanya berjalan 3 OPD atau lebih	Dokumentasi Jejaring Inovasi SYKEMAS
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman Teknis	Penerapan Survey Kepuasan Masyarakat Berbasis Aplikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan
10.	Pengelola Inovasi	ada pengelola dan Ditetapkan dengan SK kepala daerah	Peraturan Bupati Bintan Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penerapan Survey Kepuasan Masyarakat Berbasis Aplikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan
11.	Ketersediaan Informasi Layanan	informasi layanan dapat diakses secara online	screenshot aplikasi SYKEMAS
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	terdapat layanan pengaduan pengguna melalui "aplikasi pengaduan"	screenshot aplikasi layanan informasi SYKEMAS
13.	Tingkat Partisipasi Stakeholder	inovasi dilakukan dengan melibatkan masyarakat dan akademisi	dokumentasi Partisipasi stakeholder
14.	Kemudahan Informasi Layanan	layanan melalui aplikasi online	screenshot aplikasi layanan informasi SYKEMAS
15.	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	Hasil inovasi dapat dilakukan dalam waktu hitungan 1-2 hari	Deskripsi Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan SYKEMAS
16.	Online Sistem	ada dukungan melalui perangkat web aplikasi dan aplikasi mobile (android atau ios)	screenshot aplikasi SYKEMAS
17.	Kecepatan Inovasi	Proses inovasi dapat dilakukan dalam waktu hitungan 1-2 bulan	screenshot aplikasi SYKEMAS
18.	Kemanfaatan Inovasi	hasil manfaatnya dirasakan diatas 201 orang ketas	pemanfaat inovasi merupakan OPD yang memberikan pelayanan di Kabupaten Bintan

19.	Tingkat Kepuasan penggunaan daerah inovasi	-	Tidak Tersedia
20.	Sosialisasi Kebijakan	Ada Foto	Dokumentasi Sosialisasi Kebijakan
21.	Kualitas Inovasi Daerah	Ada Upload Video	SYKEMAS

3.1.5 Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pembangunan (SIMONEV)

1. PROFIL INOVASI

1.1 Nama Inovasi

Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pembangunan (SIMONEV)

1.2 Tahapan Inovasi

Implementasi

1.3 Inisiator Inovasi Daerah

OPD – Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah

1.4 Jenis Inovasi

Digital

1.5 Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah.

1.6 Urusan Inovasi Daerah

Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan.

1.7 Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2006, tentang “Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan” yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017, pemerintah daerah diminta untuk melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan daerah secara bertahap. Sehingga setiap instansi pemerintah didorong untuk dapat akuntabel dan

meningkatkan kinerjanya secara berkelanjutan. Untuk itu inovasi dalam memonitor dan mengevaluasi perlu dilakukan, salah satunya adalah dengan menerapkan teknologi informasi dalam proses monitoring dan evaluasi kinerja pemerintah daerah melalui pengembangan aplikasi Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pembangunan (SIMONEV).

SIMONEV merupakan perangkat lunak berbasis web yang digunakan untuk memonitor kegiatan yang telah dilakukan dan melakukan evaluasi terhadap masing-masing kegiatan secara transparan, cepat, terintegrasi, konsisten dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Keberadaan aplikasi SIMONEV saat ini menjadi sebuah kebutuhan dan keharusan bagi pemerintah daerah, khususnya Kabupaten Bintan untuk memudahkan dan mempercepat proses pelaporan kegiatan pembangunan karena selama ini pemerintah daerah selalu kesulitan untuk menghasilkan laporan monitoring dan kegiatan pembangunan secara cepat dan tepat waktu serta merupakan standar bagi seluruh OPD.

1.8 Tujuan Inovasi Daerah

Adapun tujuan Aplikasi SIMONEV ini adalah untuk menjaga konsistensi antara pelaksanaan (realisasi) sesuai dengan rencana dan mengetahui perkembangan kemajuan fisik kegiatan, serapan dana serta penilaian kinerja OPD.

1.9 Manfaat Yang Diperoleh

Manfaat penggunaan Aplikasi SIMONEV adalah:

1. Mendapatkan informasi perkembangan pelaksanaan kegiatan, pencapaian indikator kinerja dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.
2. Semakin mudah dan cepat dalam mendapatkan data/Informasi realisasi anggaran dan capaian output yang digunakan sebagai bahan rapat evaluasi kegiatan pembangunan Kabupaten Bintan.
3. Membantu Penyusunan Laporan Fisik dan Keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan.

1.10 Hasil Inovasi

Keluaran dari Aplikasi SIMONEV adalah Laporan Fisik dan Keuangan OPD dan Laporan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bintan.

2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.5
Indeks Inovasi SIMONEV

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK OPD	Penunjukan /Penetapan Kembali Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Laporan Bulanan Skpd Kabupaten Bintan
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	11-30 SDM	Penunjukan /Penetapan Kembali Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Laporan Bulanan Skpd Kabupaten Bintan
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran untuk kegiatan inovasi dalam tahapan sudah dilaksanakan dan sudah di evaluasi	Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja di lingkungan pemerintah daerah sudah didukung system informasi online/daring	screenshot aplikasi SIMONEV
5.	Bimtek Inovasi	Pernah 1 tahun 2 Kali melakukan Bimtek	Dokumentasi Bimtek
6.	Program Dan Kegiatan Di Renstra OPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan pengembangan inovasi ke dalam Resntra dan	Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

		telah dilaksanakan	(Bapelitbang) Daerah Kabupaten Bintan tahun 2016- 2021
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi hanya berjalan 3 OPD atau lebih	Dokumentasi Jejaring Inovasi
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	-	Tidak Tersedia
10.	Pengelola Inovasi	ada pengelola dan Ditetapkan dengan SK OPD	Penunjukan /Penetapan Kembali Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Laporan Bulanan Skpd Kabupaten Bintan
11.	Ketersediaan Informasi Layanan	informasi diakses melalui telp	screenshot aplikasi layanan informasi SIMONEV
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	terdapat layanan pengaduan pengguna melalui "media sosial"	screenshot aplikasi layanan Pengaduan SIMONEV
13.	Tingkat Partisipasi Stakeholder	inovasi dilakukan dengan melibatkan masyarakat dan akademisi serta media massa	dokumentasi Partisipasi stakeholder
14.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Email/Media Sosial	screenshot Layanan SIMONEV melalui Media Sosial (WA Group SIMONEV)
15.	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	Hasil inovasi dapat dilakukan dalam waktu hitungan 1-2 hari	screenshot aplikasi SIMONEV
16.	Online Sistem	ada dukungan melalui perangkat web aplikasi dan aplikasi mobile (android atau ios)	screenshot aplikasi SIMONEV
17.	Kecepatan Inovasi	Proses inovasi dapat dilakukan dalam waktu hitungan 1-2 bulan	screenshot aplikasi SIMONEV
18.	Kemanfaatan Inovasi	hasil manfaatnya	Dokumentasi

		dirasakan 1-100 orang	Pengguna
19.	Tingkat Kepuasan penggunaan inovasi daerah	-	Tidak Tersedia
20.	Sosialisasi Kebijakan	Ada Foto	Foto Rapat Koordinasi dan Sosialisasi SIMONEV
21.	Kualitas Inovasi Daerah	Ada Upload Video	Sistem Monitoring Dan Evaluasi (SIMONEV)

3.1.6 Data Bintang In Hand

1. PROFIL INOVASI

1.1 Nama Inovasi

Data Bintang In Hand

1.2 Tahapan Inovasi

Implementasi

1.3 Inisiator Inovasi Daerah

OPD – Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah

1.4 Jenis Inovasi

Digital

1.5 Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah.

1.6 Urusan Inovasi Daerah

Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan.

1.7 Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Perencanaan pada suatu organisasi merupakan langkah awal untuk mengatur dan mengendalikan kegiatan- kegiatan yang akan dilaksanakan guna tercapainya visi dan misi yang ditetapkan. Untuk mendukung Bapelitbang sebagai perencana yang handal dibutuhkan data yang akurat dan dapat diakses dengan mudah dan cepat. Sebagai salah satu penyedia

data dan informasi di Kabupaten Bintan.

Pengembangan Kabupaten Bintan akan memberikan kemudahan dalam akses data-data makro di Kabupaten Bintan. Melalui Kegiatan Peningkatan dan Penyusunan sistem Peragaan Data Daerah yang merupakan kegiatan penting dalam Penyediaan data-data dan informasi daerah.

Penyediaan data dan informasi oleh pemerintah/government, merupakan upaya yang ditempuh untuk mewujudkan akuntabilitas publik serta membangun citra pemerintah yang bersih, berwibawa dan bertanggungjawab. Definisi tentang Data dan Informasi Seperti tertuang dalam Pasal 31 UU 25/2004 tentang SPNN (Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional) adalah Keterangan objektif tentang suatu fakta baik dalam bentuk kuantitatif, kualitatif maupun gambar visual(images) yang diperoleh baik melalui observasi langsung maupun dari yang sudah terkumpul dalam bentuk cetakan atau perangkat lainnya. Sedangkan Informasi adalah data yang sudah terolah yang digunakan untuk mendapatkan interpretasi tentang suatu fakta. Pada Kegiatan ini data yang dipergunakan berasal dari OPD se Kabupaten Bintan yang diolah menjadi informasi Kabupaten Bintan. Kegiatan Peragaan Data Daerah diperlukan untuk memudahkan berbagai pihak mengetahui potensi dan permasalahan di Kabupaten Bintan.

1.8 Tujuan Inovasi Daerah

Aplikasi ini mempublikasikan berbagai data umum penting yang diambil dari berbagai sumber resmi.

1.9 Manfaat Yang Diperoleh

Aplikasi ini mempublikasikan berbagai data umum penting yang diambil dari berbagai sumber resmi. Data yang dipublikasikan merupakan data terbaru yang ditampilkan dalam bentuk table dan grafik lengkap dengan deskripsinya. Selain itu terdapat data visual dalam bentuk video dan publikasi ekspose Pembangunan.

1.10 Hasil Inovasi

Tersedianya data dan informasi makro Kabupaten Bintan dengan

mengadopsi Teknologi Informasi.

2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.6
Indeks Inovasi Data Bintang In Hand

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	-	Tidak Tersedia
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	-	Tidak Tersedia
3.	Dukungan Anggaran	-	Tidak Tersedia
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja di lingkungan pemerintah daerah sudah didukung system informasi online/ daring	screenshot aplikasi Bintang In Hand
5.	Bimtek Inovasi	Pernah 1 tahun 2 Kali melakukan Bimtek	Dokumentasi Bimtek
6.	Program Dan Kegiatan Di Renstra OPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan pengembangan inovasi ke dalam Resntra dan telah dilaksanakan	Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Daerah Kabupaten Bintang tahun 2016-2021
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi hanya berjalan 3 OPD atau lebih	Dokumentasi Jejaring Inovasi
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	-	Tidak Tersedia
10.	Pengelola Inovasi	-	Tidak Tersedia
11.	Ketersediaan Informasi Layanan	informasi diakses melalui telp	Screenshoot WA Group Program Bintang
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	terdapat layanan pengaduan pengguna melalui "media sosial"	screenshoot wa group Program Bintang
13.	Tingkat Partisipasi Stakeholder	inovasi dilakukan dengan melibatkan masyarakat dan akademisi serta media massa	Deskripsi Partisipasi Stakeholders Data Bintang In Hand
14.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Email/Media Sosial	screenshoot wa group Program Bintang
15.	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	Hasil inovasi dapat dilakukan dalam waktu hitungan 1-2 hari	dokumentasi deskripsi Kemudahan Proses Inovasi yang di hasilkan Data Bintang

			In Hand
16.	Online Sistem	ada dukungan melalui perangkat web aplikasi dan aplikasi mobile (android atau ios)	screenshot aplikasi Data Bintang In Hand
17.	Kecepatan Inovasi	Proses inovasi dapat dilakukan dalam waktu hitungan 1-2 bulan	deskripsi Kecepatan Inovasi Data Bintang In Hand
18.	Kemanfaatan Inovasi	hasil manfaatnya dirasakan diatas 201 orang kemas	Deskripsi Penerima Manfaat Data Bintang In Hand
19.	Tingkat Kepuasan penggunaan inovasi daerah	-	Tidak Tersedia
20.	Sosialisasi Kebijakan	Ada Foto	Dokumentasi Sosialisasi Kebijakan
21.	Kualitas Inovasi Daerah	Ada Upload Video	Data Bintang In Hand

3.1.7 Digital Guest Book Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bintang

1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi

Digital Guest Book Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bintang

1.2. Tahapan Inovasi

Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah

OPD – Dinas Komunikasi dan Informatika

1.4. Jenis Inovasi

Digital

1.5. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi tata kelola pemerintahan daerah

1.6. Urusan Inovasi Daerah

Komunikasi dan informatika

1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Sistem buku tamu elektronik atau *electronic guestbook (E-Guestbook)* merupakan sebuah aplikasi buku tamu digital untuk memudahkan dalam melakukan registrasi atau pendataan tamu maupun pengunjung yang datang. *E-Guestbook* ini sebagai pengganti buku tamu konvensional. Buku tamu elektronik ini dinilai lebih akurat dan valid dibandingkan buku tamu konvensional. Kelebihan inovasi ini adalah bias mendeteksi masuk dan keluarnya pengunjung yang datang dan bisa terekapitulasi dengan baik.

1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Memberikan kemudahan dalam pencatatan tamu.

1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Memberikan kemudahan kepada bagian terkait untuk memperoleh data tamu yang berkunjung.

1.10. Hasil Inovasi

Identitas dan data pengunjung terekam dengan baik.

2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.7

Indeks Inovasi Digital Guest Book Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bintan

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	-	Tidak Tersedia
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	-	Tidak Tersedia
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran untuk kegiatan inovasi sudah ada sampai tahap pelaksanaan inovasi	Pengelolaan Informasi Pemerintah Kabupaten Bintan
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja di lingkungan pemerintah daerah menggunakan perangkat elektronik	Aplikasi Digital Guest Book Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bintan
5.	Bimtek Inovasi	-	Tidak Tersedia
6.	Program Dan Kegiatan Di Renstra OPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan pengembangan inovasi	Pengelolaan Informasi Pemerintah Kabupaten Bintan

		ke dalam Resntra	
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi hanya berjalan 1 OPD	Inovasi hanya digunakan di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bintan
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	-	Tidak Tersedia
10.	Pengelola Inovasi	-	Tidak Tersedia
11.	Ketersediaan Informasi Layanan	informasi layanan dapat diakses secara online	informasi layanan dapat diakses secara online
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	terdapat "call center" layanan pengaduan pengguna	call center
13.	Tingkat Partisipasi Stakeholder	-	Tidak Tersedia
14.	Kemudahan Informasi Layanan	-	Tidak Tersedia
15.	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	Hasil inovasi dapat dilakukan dalam waktu hitungan 1-2 hari	Tidak Tersedia
16.	Online Sistem	ada dukungan melalui web aplikasi	Digital Guest Book Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bintan
17.	Kecepatan Inovasi	Proses inovasi dapat dilakukan dalam waktu hitungan 3-7 bulan	Tidak Tersedia
18.	Kemanfaatan Inovasi	-	Tidak Tersedia
19.	Tingkat Kepuasan penggunaan inovasi daerah	-	Tidak Tersedia
20.	Sosialisasi Kebijakan	-	Tidak Tersedia
21.	Kualitas Inovasi Daerah	Ada Upload Video	Digital Guest Book

3.1.8 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

1.2. Tahapan Inovasi

Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah

OPD – Dinas Komunikasi dan Informatika

1.4. Jenis Inovasi

Digital

1.5. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi tata kelola pemerintahan daerah

1.6. Urusan Inovasi Daerah

Komunikasi dan informatika, kearsipan

1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

PPID adalah kepanjangan dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dimana PPID berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh badan publik sesuai dengan amanat UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan keberadaan PPID maka masyarakat yang akan menyampaikan permohonan informasi lebih mudah dan tidak berbelit karena dilayani lewat satu pintu.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik. Dengan adanya web ini, pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Bintan untuk dapat memberikan informasi terkait pembangunan di Kabupaten Bintan melalui media informasi milik pemerintah tersebut.

1.8. Tujuan Inovasi Daerah

1. mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu yang transparan, efektif, dan efisien, akuntabel serta dapat

dipertanggungjawabkan;

2. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah untuk menghasilkan layanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas.

1.9. Manfaat Yang Diperoleh

1. penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih transparan, efektif, dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
2. layanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas dari hasil pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah.

1.10. Hasil Inovasi

1. mewujudkan pemerintahan yang transparan, efektif, dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
2. meningkatnya pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah untuk menghasilkan layanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas.

2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.8

Indeks Inovasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	Perkada	Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 31 keatas	Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Bintan
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran untuk kegiatan inovasi sudah ada sampai tahap pelaksanaan inovasi	Pengelolaan Informasi Pemerintah Kabupaten Bintan
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja di lingkungan pemerintah daerah sudah didukung	web PPID Kabupaten Bintan

		system informasi online/ daring	
5.	Bimtek Inovasi	-	Tidak Tersedia
6.	Program Dan Kegiatan Di Renstra OPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan pengembangan inovasi ke dalam Resntra dan telah dilaksanakan	Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bintan
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi hanya berjalan 3 OPD atau lebih	Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Bintan
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman Teknis dan dapat diakses secara online	Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik
10.	Pengelola Inovasi	ada pengelola dan Ditetapkan dengan SK kepala daerah	Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Bintan
11.	Ketersediaan Informasi Layanan	informasi layanan dapat diakses secara online	Informasi dapat diakses di web PPID Kabupaten Bintan (http://ppid.bintankab.go.id/)
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	terdapat "call center" layanan pengaduan pengguna	call center
13.	Tingkat Partisipasi Stakeholder	inovasi dilakukan dengan melibatkan masyarakat	masyarakat dapat mengakses web PPID Kabupaten Bintan (http://ppid.bintankab.go.id/)
14.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Email/Media Sosial	Layanan email
15.	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	Hasil inovasi dapat dilakukan dalam waktu hitungan 1-2 hari	Dapat langsung mengakses Web PPID Kabupaten Bintan (http://ppid.bintankab.go.id/)
16.	Online Sistem	ada dukungan melalui web aplikasi	web PPID Kabupaten Bintan (http://ppid.bintankab.go.id/)
17.	Kecepatan Inovasi	Proses inovasi dapat	Tidak Tersedia

		dilakukan dalam waktu hitungan 3-7 bulan	
18.	Kemanfaatan Inovasi	-	Tidak Tersedia
19.	Tingkat Kepuasan penggunaan inovasi daerah	-	Tidak Tersedia
20.	Sosialisasi Kebijakan	-	Tidak Tersedia
21.	Kualitas Inovasi Daerah	Ada Upload Video	PPID

3.1.9 SIMRET (Sistem Informasi dan Retribusi)

1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi

Sistem Informasi dan Retribusi (SIMRET)

1.2. Tahapan Inovasi

Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah

OPD – Badan Pendapatan Daerah

1.4. Jenis Inovasi

Digital

1.5. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi tata kelola pemerintahan daerah

1.6. Urusan Inovasi Daerah

Keuangan

1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Di Kabupaten Bintan ada beberapa OPD (Organisasi Perangkat Daerah) sebagai penerima

retribusi yakni Dinas Perhubungan; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Dinas Kesehatan (10 Puskesmas); Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan; dan Dinas Penanaman Modal, Layanan Terpadu Satu Pintu. Selama ini pelaporan dilakukan secara manual sehingga tidak efektif dan efisien karena memerlukan waktu yang lama dan pemeriksaan yang berulang.

1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Mempermudah pelaporan retribusi dari Dinas Perhubungan; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Dinas Kesehatan (10 Puskesmas); Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan; dan Dinas Penanaman Modal, Layanan Terpadu Satu Pintu.

1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Pengumpulan laporan retribusi menjadi lebih efektif.

1.10. Hasil Inovasi

Meminimalisir kendala dalam melakukan pelaporan retribusi dan mempermudah dalam melakukan pemeriksaan laporan.

2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.9
Indeks Inovasi SIMRET (Sistem Informasi dan Retribusi)

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	-	Tidak Tersedia
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	-	Tidak Tersedia
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran untuk kegiatan inovasi dalam tahapan sudah dilaksanakan dan sudah di evaluasi	Dukungan Anggaran
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja di lingkungan pemerintah daerah sudah didukung system informasi online/ daring	Pelaksanaan kerja di lingkungan pemerintah daerah sudah didukung system informasi online/ daring

5.	Bimtek Inovasi	-	Tidak Tersedia
6.	Program Dan Kegiatan Di Renstra OPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan pengembangan inovasi ke dalam Resntra dan telah dilaksanakan	Renstra Badan Pendapatan Daerah 2016-2021
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi hanya berjalan 3 OPD atau lebih	Inovasi hanya berjalan 3 OPD atau lebih
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	-	Tidak Tersedia
10.	Pengelola Inovasi	-	Tidak Tersedia
11.	Ketersediaan Informasi Layanan	informasi layanan dapat diakses secara online	informasi layanan dapat diakses secara online
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	terdapat "call center" layanan pengaduan pengguna	terdapat "call center" layanan pengaduan pengguna
13.	Tingkat Partisipasi Stakeholder	-	Tidak Tersedia
14.	Kemudahan Informasi Layanan	layanan melalui aplikasi online	layanan melalui aplikasi online
15.	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	-	Tidak Tersedia
16.	Online Sistem	ada dukungan melalui web aplikasi	web SIMRET Bintan
17.	Kecepatan Inovasi	-	Tidak Tersedia
18.	Kemanfaatan Inovasi	-	Tidak Tersedia
19.	Tingkat Kepuasan penggunaan inovasi daerah	-	Tidak Tersedia
20.	Sosialisasi Kebijakan	-	Tidak Tersedia
21.	Kualitas Inovasi Daerah	Ada Upload Video	SIMRET (Sistem Informasi dan Retribusi)

3.1.10 Sistem Kewaspadaan Dini Daerah (SIWASPADA)

1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi

Sistem Kewaspadaan Daerah (SIWASPADA)

1.2. Tahapan Inovasi

Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah

OPD – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

1.4. Jenis Inovasi

Digital

1.5. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi tata kelola pemerintahan daerah

1.6. Urusan Inovasi Daerah

Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, sosial, persandian, Pendidikan dan Pelatihan

1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Bahaya ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat merupakan kondisi yang perlu menjadi perhatian pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan. Untuk mengatasi hal tersebut, dibuatlah satu kelompok yang disebut dengan Kominda (Komunitas Intelijen Daerah). Namun, pada tahun 2018 berubah nama dari Kominda (Komunitas Intelijen Daerah) menjadi Forum Kewaspadaan Dini. Perubahan nama ini juga berimplikasi terhadap perubahan kegiatan yang terjadi di lapangan. Dimana pada forum ini lebih menitikberatkan pada keterlibatan masyarakat dalam upaya deteksi dini dan cegah dini situasi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan di lingkungan masyarakat. Mengingat masyarakatlah yang paling mengetahui situasi dan kondisi yang terjadi di lapangan, maka untuk mempermudah hal tersebut

maka dibuatlah aplikasi SI WASPADA ini. Sehingga laporan dari masyarakat ini bisa segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Bintan.

1.8. Tujuan Inovasi Daerah

SIWASPADA ini bertujuan agar masyarakat dapat mendeteksi lebih awal kejadian-kejadian yang terjadi di masyarakat baik berupa ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan untuk dapat segera ditindaklanjuti di tingkat berikutnya.

1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Membantu masyarakat dalam deteksi dini dan memberikan laporan terhadap kejadian yang terjadi di tengah masyarakat baik berupa ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan untuk dapat dijadikan data dan informasi bagi pihak Pemerintah dalam pengambilan keputusan demi mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

1.10. Hasil Inovasi

Tercapainya deteksi dini dan pencegahan dini situasi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang terjadi di masyarakat.

2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.10
Indeks Inovasi SIWASPADA

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	Perkada	Pembentukan Pusat Komunikasi, Informasi Kewaspadaan Dini Kabupaten Bintan
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	-	Tidak Tersedia
3.	Dukungan Anggaran	-	Tidak Tersedia
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja di lingkungan pemerintah daerah sudah didukung	Aplikasi web SIWASPADA siwaspada.bintankab.

		system informasi online/ daring	go.id
5.	Bimtek Inovasi	-	Tidak Tersedia
6.	Program Dan Kegiatan Di Renstra OPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan pengembangan inovasi ke dalam Resntra dan telah dilaksanakan	Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bintan Tahun 2016-2021
7.	Jejaring Inovasi	2016-2021	Keterlibatan OPD dan masyarakat dalam SIWASPADA (hal 7-9 pada user manual SIWASPADA)
8.	Replikasi	Inovasi hanya berjalan 3 OPD atau lebih	Studi Komparatif
9.	Pedoman Teknis	Pernah 1 Kali di replikasi di daerah lain	User Manual SIWASPADA
10.	Pengelola Inovasi	Telah terdapat Pedoman Teknis	Ada admin sebagai pengelola inovasi (usermanual SIWASPADA hal 7-9)
11.	Ketersediaan Informasi Layanan	ada Pengelola namun Tidak ditetapkan dengan SK OPD	Informasi Layanan bisa didapatkan melalui aplikasi web
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	informasi layanan dapat diakses secara online	Pengaduan dapat dilakukan langsung melalui aplikasi web
13.	Tingkat Partisipasi Stakeholder	inovasi dilakukan dengan melibatkan masyarakat	Keterlibatan masyarakat dalam SIWASPADA
14.	Kemudahan Informasi Layanan	layanan melalui aplikasi online	Informasi layanan dapat diakses di Aplikasi web SIWASPADA siwaspada.bintankab.go.id
15.	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	Hasil inovasi dapat dilakukan dalam waktu	Inovasi dapat diakses melalui Aplikasi web

		hitungan 1-2 hari	SIWASPADA siwaspada.bintankab. go.id
16.	Online Sistem	ada dukungan melalui web aplikasi	Aplikasi web SIWASPADA siwaspada.bintankab. go.id
17.	Kecepatan Inovasi	Proses inovasi dapat dilakukan dalam waktu hitungan 3-7 bulan	Tidak Tersedia
18.	Kemanfaatan Inovasi	-	Tidak Tersedia
19.	Tingkat Kepuasan penggunaan inovasi daerah	-	Tidak Tersedia
20.	Sosialisasi Kebijakan	Ada Foto	Sosialisasi SIWASPADA
21.	Kualitas Inovasi Daerah	Ada Upload Video	SIWASPADA

3.1.11 Sistem Informasi Manajemen ASN Bintan (SIMANTAN)

1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi

Sistem Informasi Manajemen ASN Bintan (SIMANTAN)

1.2. Tahapan Inovasi

Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah

OPD - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

1.4. Jenis Inovasi

Digital

1.5. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi tata kelola pemerintahan daerah

1.6. Urusan Inovasi Daerah

Kepegawaian

1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Salah satu dasar dalam penetapan sebuah kebijakan dibidang kepegawaian adalah data individu ASN yang lengkap dengan riwayat hidup dan karirnya. Kegiatan administrasi kepegawaian akan berpengaruh pada keadaan data ASN individu, serta pada keadaan data ASN secara keseluruhan. Namun, seringkali perubahan-perubahan pada data ASN yang terjadi tidak segera diketahui oleh para pelaksana administrasi kepegawaian. Dalam hal ini, keberadaan perangkat komputer tidak terlalu banyak membantu, karena data disimpan dan dikelola oleh masing-masing pelaksana serta tidak dalam satu kesatuan *platform*. Akibatnya, dalam hal data pokok atau data induk sekalipun, memerlukan waktu yang lama untuk dapat di akses, dan tidak menutup kemungkinan terjadi kesalahan pada data tersebut.

Berdasarkan pada latar belakang tersebut, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bintan mengembangkan serta mengimplementasikan Sistem Informasi Manajemen ASN Bintan (SIMANTAN). SIMANTAN adalah sebuah sistem yang berfungsi untuk mengelola data, manajemen, dan administrasi kepegawaian ASN di Kabupaten Bintan. SIMANTAN mencakup

Melalui SIMANTAN, ASN Kabupaten Bintan dapat dengan mudah melakukan pencarian data pribadi, misalnya bagi keperluan kenaikan pangkat secara berkala, maupun dalam penetapan waktu pensiun. Tidak hanya itu, SIMANTAN juga memudahkan pekerjaan yang berhubungan dengan bidang kepegawaian, dan pelaksana bidang kepegawaian dapat dengan mudah melihat informasi kepegawaian ASN dengan akurat serta mampu merencanakan kebutuhan ASN dimasa mendatang.

1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Tujuan inovasi ini adalah:

1. Menyediakan data dan informasi pegawai yang akurat dan terintegras;

2. Memudahkan dan mempercepat pengurusan dari manual (pengumpulan berkas) menuju Online (*paperless*);
3. Pemanfaatan teknologi informasi sebagai dukungan perwujudan perencanaan daerah smart city.

1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Manfaat yang diperoleh adalah: tersedianya data dan informasi pegawai yang akurat dan terintegrasi; pengurusan administrasi kepegawaian lebih mudah dan cepat karena menggunakan sistem online (*paperless*); serta dimanfaatkannya teknologi informasi sebagai dukungan perwujudan perencanaan daerah *smart city* di Kabupaten Bintan.

1.10. Hasil Inovasi

Hasil inovasi adalah: data dan informasi ASN tersedia secara akurat dan terintegrasi dalam satu sistem; administrasi kepegawaian ASN lebih mudah dan cepat, serta dapat dilakukan dimana saja (online); dan dimanfaatkannya teknologi informasi secara optimal bagi mendukung Kabupaten Bintan menuju daerah *smart city*.

2. INDIKATOR INOVASI

Tabel 3.11

Indeks Inovasi Sistem Informasi Manajemen ASN Bintan (SIMANTAN)

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	-	Tidak Tersedia
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 31 keatas	Sistem Informasi Manajemen Aparatur Sipil Negara Kabupaten Bintan
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran untuk kegiatan inovasi sudah ada sampai tahap pelaksanaan inovasi	Rencana Strategis BKPSDM Kabupaten Bintan
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja di lingkungan pemerintah daerah sudah didukung system informasi online/ daring	Modul Panduan SIMANTAN

5.	Bimtek Inovasi	Pernah 2 tahun 4 Kali melakukan Bimtek	Pelaksanaan Sosialisasi Aplikasi SIMANTAN
6.	Program Dan Kegiatan Di Renstra OPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan pengembangan inovasi ke dalam Resntra dan telah dilaksanakan	Rencana Strategis BKPSDM Kabupaten Bintan
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi hanya berjalan 3 OPD atau lebih	Pelaksanaan Sosialisasi Aplikasi SIMANTAN (Melibatkan Seluruh OPD)
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	-	Tidak Tersedia
10.	Pengelola Inovasi	ada pengelola dan Ditetapkan dengan SK kepala daerah	Peraturan Bupati Sistem Informasi Manajemen Aparatur Sipil Negara Kabupaten Bintan
11.	Ketersediaan Informasi Layanan	informasi layanan dapat diakses secara online	Tampilan SI-MANTAN
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	terdapat layanan pengaduan melalui "aplikasi pengguna pengaduan"	Layanan Pengaduan Online SIMANTAN
13.	Tingkat Partisipasi Stakeholder	-	Tidak Tersedia
14.	Kemudahan Informasi Layanan	layanan melalui aplikasi online	Layanan Pengaduan Online SIMANTAN
15.	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	-	Tidak Tersedia
16.	Online Sistem	ada dukungan melalui web aplikasi	Tampilan SIMANTAN (Online)
17.	Kecepatan Inovasi	-	Tidak Tersedia
18.	Kemanfaatan Inovasi	hasil manfaatnya dirasakan diatas 201 orang ketas	Inovasi memberikan manfaat ke seluruh ASN Bintan (3.190 ASN)
19.	Tingkat Kepuasan penggunaan inovasi daerah	-	Tidak Tersedia
20.	Sosialisasi Kebijakan	Ada Foto	Pelaksanaan Sosialisasi Aplikasi

			SIMANTAN
21.	Kualitas Inovasi Daerah	Ada Upload Video	SIMANTAN BKPSDM Kabupaten Bintan

3.1.12 Sistem Ujian Bintan (SIJANTAN)

1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi

Sistem Ujian Bintan (SIJANTAN)

1.2. Tahapan Inovasi

Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah

OPD - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

1.4. Jenis Inovasi

Digital

1.5. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi tata kelola pemerintahan daerah

1.6. Urusan Inovasi Daerah

Kepegawaian

1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Aplikasi SIJANTAN (Sistem Ujian Bintan) adalah inovasi sistem ujian off-line yang dikembangkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bintan. Inovasi ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan BKPSDM untuk mempermudah pelaksanaan uji kompetensi pindah masuk ASN ke Kabupaten Bintan, serta untuk mempermudah pelaksanaan uji kompetensi calon ASN di Kabupaten Bintan.

1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Tujuan inovasi adalah untuk mempermudah pelaksanaan uji kompetensi yang dilakukan dengan model Computer Assisted Test (CAT) di Kabupaten Bintan, terutama untuk uji kompetensi pindah masuk ASN ke Kabupaten Bintan, dan untuk pelaksanaan uji kompetensi calon ASN dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan.

1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Manfaat inovasi adalah mempermudah pelaksanaan uji kompetensi yang dilakukan dengan model Computer Assisted Test (CAT) di Kabupaten Bintan, terutama untuk uji kompetensi pindah masuk ASN ke Kabupaten Bintan, dan untuk pelaksanaan uji kompetensi calon ASN dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan.

1.10. Hasil Inovasi

Hasil inovasi adalah dimudahkannya pelaksanaan uji kompetensi pindah masuk ASN ke Kabupaten Bintan, serta dimudahkannya pelaksanaan uji kompetensi calon ASN dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan.

2. INDIKATOR INOVASI

Tabel 3.12
Indeks Inovasi Sistem Ujian Bintan (SIJANTAN)

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	Perkada	Draft SK Bupati Bintan Tentang Sistem Ujian Bintan
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	1-10 SDM	Pembentukan Tim Penguji dan Sekretariat Uji Kompetensi
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran untuk kegiatan inovasi sudah ada sampai tahap pelaksanaan inovasi	Rencana Strategis BKPSDM Kabupaten Bintan
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja di lingkungan pemerintah daerah menggunakan perangkat elektronik	Penggunaan Teknologi Informasi
5.	Bimtek Inovasi	-	Tidak Tersedia

6.	Program Dan Kegiatan Di Renstra OPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan pengembangan inovasi ke dalam Resntra dan telah dilaksanakan	RENSTRA BKPSDM Kabupaten Bintan
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi hanya berjalan 1 OPD	Jejaring Inovasi
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman Teknis	Standar Operasional Prosedur (SOP) Seleksi/Uji Kompetensi Pindah Masuk Pegawai Negeri Sipil ke Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan, Standar Operasional Prosedur (SOP) Seleksi/Uji Kompetensi Mutasi Internal Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan
10.	Pengelola Inovasi	ada pengelola dan Ditetapkan dengan SK kepala daerah	Pembentukan Tim Penguji dan Sekretariat Uji Kompetensi, Draft SK Bupati Bintan Tentang Sistem Ujian Bintan
11.	Ketersediaan Informasi Layanan	informasi melalui datang langsung	Informasi Layanan
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	terdapat "call center" layanan pengaduan pengguna	Layanan Pengaduan
13.	Tingkat Partisipasi Stakeholder	-	Tidak Tersedia
14.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Email/Media Sosial	Kemudahan Informasi Layanan
15.	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	-	Tidak Tersedia

16.	Online Sistem	ada dukungan melalui web aplikasi	Online Sistem
17.	Kecepatan Inovasi	-	Tidak Tersedia
18.	Kemanfaatan Inovasi	hasil manfaatnya dirasakan diatas 201 orang ketas	Kemanfaatan Inovasi
19.	Tingkat Kepuasan penggunaan inovasi daerah	-	Tidak Tersedia
20.	Sosialisasi Kebijakan	Ada Foto	Sosialisasi Kebijakan
21.	Kualitas Inovasi Daerah	Ada Upload Video	Sistem Ujian Bintang (SIJANTAN)

3.1.13 Pengecekan Berkas Online BKPSDM Kabupaten Bintang (E-Check)

1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi

Pengecekan Berkas Online BKPSDM Kabupaten Bintang (E-Check)

1.2. Tahapan Inovasi

Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah

OPD - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

1.4. Jenis Inovasi

Digital

1.5. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi tata kelola pemerintahan daerah

1.6. Urusan Inovasi Daerah

komunikasi dan informatika

1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi di era digital seperti sekarang ini mendorong alur dokumen surat-menyurat menjauh

dari cara-cara manual dan konvensional. Untuk itu, diperlukan perubahan cara pandang agar lebih efektif dan efisien, serta mendekati ke cara-cara modern dan digital, serta berbasis online.

Dengan latar belakang tersebut, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bintan mengembangkan aplikasi berbasis online untuk mempermudah pengelolaan serta pelacakan surat menyurat yang menjadi tugas, tanggungjawab, dan wewenang BKPSDM. Aplikasi tersebut diberi nama Aplikasi Pengecekan Berkas BKPSDM Kabupaten Bintan, atau E-Check.

E-Check adalah sebuah aplikasi yang dikembangkan untuk memberikan kemudahan tentang berbagai macam informasi terkait surat-menyurat, berkas surat (dokumen), dan alur disposisi yang akurat, efektif dan efisien. E-Check dapat diakses secara online dimanapun dan kapanpun, melalui website yang dapat diakses dengan mudah (<https://bkpsdm.bintankab.go.id/e-check/>).

1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Tujuan inovasi adalah untuk memberikan kemudahan tentang berbagai macam informasi terkait surat-menyurat, berkas surat (dokumen), dan alur disposisi yang akurat, efektif dan efisien. Tujuan lainnya adalah agar berbagai macam informasi dapat diakses secara online dimanapun dan kapanpun, melalui website E-Check yang dapat diakses dengan mudah.

1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Manfaat yang diperoleh adalah terpenuhinya informasi terkait surat-menyurat, berkas surat (dokumen), dan alur disposisi yang akurat, efektif dan efisien. Manfaat lainnya adalah agar berbagai macam informasi dapat diakses secara online dimanapun dan kapanpun, melalui website E-Check yang dapat diakses dengan mudah.

1.10. Hasil Inovasi

Hasil inovasi adalah sebuah aplikasi online berbasis website yang dapat memberikan informasi terkait surat- menyurat, berkas surat (dokumen),

dan alur disposisi yang akurat, efektif dan efisien. Hasil lainnya adalah agar berbagai macam informasi dapat diakses secara online dimanapun dan kapanpun, melalui website E-Check yang dapat diakses dengan mudah.

2. INDIKATOR INOVASI

Tabel 3.13

Indeks Inovasi Pengecekan Berkas Online BKPSDM Kabupaten Bintan (E-Check)

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	-	Tidak Tersedia
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	-	Tidak Tersedia
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran untuk kegiatan inovasi sudah ada sampai tahap pelaksanaan inovasi	Rencana Strategis BKPSDM Kabupaten Bintan
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja di lingkungan pemerintah daerah sudah didukung system informasi online/daring	Sistem Online E-Check
5.	Bimtek Inovasi	-	Tidak Tersedia
6.	Program Dan Kegiatan Di Renstra OPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan pengembangan inovasi ke dalam Resntra dan telah dilaksanakan	Rencana Strategis BKPSDM Kabupaten Bintan
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi hanya berjalan 3 OPD atau lebih	Interaksi dengan OPD-OPD terkait
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	-	Tidak Tersedia
10.	Pengelola Inovasi	-	Tidak Tersedia
11.	Ketersediaan Informasi Layanan	informasi melalui datang langsung	Informasi Layanan E-Check
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	terdapat "call center" layanan pengaduan pengguna	Layanan Pengaduan
13.	Tingkat Partisipasi Stakeholder	-	Tidak Tersedia

14.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Email/Media Sosial	Kemudahan Layanan Informasi
15.	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	-	Tidak Tersedia
16.	Online Sistem	ada dukungan melalui informasi website atau sosial media	Jaringan Prosedur
17.	Kecepatan Inovasi	-	Tidak Tersedia
18.	Kemanfaatan Inovasi	hasil manfaatnya dirasakan diatas 201 orang ketas	Manfaat E-Check
19.	Tingkat Kepuasan penggunaan inovasi daerah	-	Tidak Tersedia
20.	Sosialisasi Kebijakan	Ada Foto	Sosialisasi Inovasi
21.	Kualitas Inovasi Daerah	Ada Upload Video	E-Check BKPSDM Kabupaten Bintan

3.1.14 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online Kabupaten Bintan

1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online Kabupaten Bintan

1.2. Tahapan Inovasi

Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah

OPD - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

1.4. Jenis Inovasi

Digital

1.5. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi tata kelola pemerintahan daerah

1.6. Urusan Inovasi Daerah

Keuangan

1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

SP2D Online Kabupaten Bintan merupakan aplikasi layanan perbankan untuk memperlancar pelaksanaan transaksi pencairan. SP2D dapat mempercepat proses pengelolaan keuangan daerah yang terkait dengan pencairan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke rekening tujuan (rekening Perangkat Daerah dan Pihak Ketiga) di bank secara *real time*. Melalui penggunaan SP2D Online yang terintegrasi dengan Aplikasi SIMDA, diharapkan proses pencairan SP2D akan lebih cepat, akurat dan valid tanpa harus melakukan proses *double input* pada dua aplikasi yang berbeda.

Manfaat SP2D Online adalah: pencairan SP2D dapat dilakukan tepat waktu (tanpa harus dikirim ke bank terlebih dahulu; mengurangi resiko pengembalian berkas SP2D dikarenakan adanya kesalahan nomor rekening atau nama rekening tujuan; pemerintah daerah dapat memantau kondisi keuangan kas daerah terkini; monitoring terhadap Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) di bank dapat dilakukan secara online dari kantor sub-bagian kas daerah pada Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bintan.

1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Tujuan dari SP2D Online adalah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah, serta untuk mempercepat proses pengelolaan keuangan daerah.

1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Manfaat dari SP2D Online adalah meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah, serta mempercepat proses pengelolaan keuangan daerah.

1.10. Hasil Inovasi

Hasil dari SP2D Online adalah lebih cepatnya proses pengelolaan keuangan daerah yang terkait dengan pencairan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke rekening tujuan (rekening Perangkat Daerah dan Pihak Ketiga) di

bank secara *real time*. Hasil lainnya adalah proses pencairan SP2D akan lebih cepat, akurat dan valid tanpa harus melakukan proses *double input* pada dua aplikasi yang berbeda.

2. INDIKATOR INOVASI

Tabel 3.14

Indeks Inovasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online Kabupaten Bintan

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	Perkada	Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Pada Setiap Tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	-	Tidak Tersedia
3.	Dukungan Anggaran	-	Tidak Tersedia
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja di lingkungan pemerintah daerah sudah didukung system informasi online/daring	Penggunaan IT SP2D Online
5.	Bimtek Inovasi	-	Tidak Tersedia
6.	Program Dan Kegiatan Di Renstra OPD	-	Tidak Tersedia
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi hanya berjalan 3 OPD atau lebih	Jejaring Inovasi SP2D Online
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	-	Tidak Tersedia
10.	Pengelola Inovasi	-	Tidak Tersedia
11.	Ketersediaan Informasi Layanan	informasi layanan dapat diakses secara online	Ketersediaan Informasi Layanan SP2D Online
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	terdapat "call center" layanan pengaduan pengguna	Penyelesaian Layanan Pengaduan SP2D Online
13.	Tingkat Partisipasi Stakeholder	inovasi dilakukan dengan melibatkan masyarakat dan akademisi serta media massa	Tingkat Partisipasi Stakeholder

14.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Email/Media Sosial	Kemudahan Informasi Layanan SP2D Online
15.	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	-	Tidak Tersedia
16.	Online Sistem	ada dukungan melalui web aplikasi	Sistem Online SP2D
17.	Kecepatan Inovasi	-	Tidak Tersedia
18.	Kemanfaatan Inovasi	hasil manfaatnya dirasakan diatas 201 orang ketas	Kemanfaatan Inovasi SP2D Online
19.	Tingkat Kepuasan penggunaan inovasi daerah	-	Tidak Tersedia
20.	Sosialisasi Kebijakan	Ada Foto	Sosialisasi Kebijakan
21.	Kualitas Inovasi Daerah	Ada Upload Video	SP2D Kabupaten Bintan

3.1.15 Sistem Informasi Manajemen Tata Ruang Wilayah (SIMTARU)

1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi

Sistem Informasi Manajemen Tata Ruang Wilayah (SIMTARU)

1.2. Tahapan Inovasi

Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah

OPD – Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

1.4. Jenis Inovasi

Digital

1.5. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

1.6. Urusan Inovasi Daerah

pekerjaan umum dan penataan ruang

1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Sistem Informasi Tata Ruang Wilayah (SIMTARU) adalah sistem informasi berbasis web GIS (Geographic Informasi System) yang dikembangkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Bintan.

Pemanfaatan SIMTARU dilatarbelakangi oleh masalah-masalah yang berhubungan dengan tumpang tindih penggunaan atau pemanfaatan lahan di wilayah Kabupaten Bintan. Untuk itu, SIMTARU dimanfaatkan oleh Dinas PUPR untuk memberikan informasi tentang fungsi, penggunaan, serta pemanfaatan lahan di Kabupaten Bintan.

SIMTARU Kabupaten Bintan telah di tingkatkan kemampuan dan tampilannya pada tahun 2019.

1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Tujuan SIMTARU adalah untuk menyediakan informasi tentang fungsi, penggunaan, serta pemanfaatan lahan di Kabupaten Bintan.

1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Manfaat SIMTARU adalah untuk memberikan informasi tentang fungsi, penggunaan, serta pemanfaatan lahan di Kabupaten Bintan. Manfaat lainnya adalah Dinas PUPR Kabupaten Bintan dapat membantu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM PTSP).

1.10. Hasil Inovasi

Hasil dari SIMTARU adalah tersedianya informasi tentang fungsi, penggunaan, serta pemanfaatan lahan di Kabupaten Bintan.

2. INDIKATOR INOVASI

Tabel 3.15
Indeks Inovasi Sistem Informasi Manajemen Tata Ruang Wilayah
(SIMTARU)

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	Perda	Retribusi Perizinan Tertentu, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2020-2040
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	1-10 SDM	Penetapan Tim Pengelola Operator Aplikasi Sistem Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2020
3.	Dukungan Anggaran	-	Tidak Tersedia
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja di lingkungan pemerintah daerah sudah didukung system informasi online/daring	Penggunaan IT SIMTARU
5.	Bimtek Inovasi	-	Tidak Tersedia
6.	Program Dan Kegiatan Di Renstra OPD	-	Tidak Tersedia
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi hanya berjalan 2 OPD	Jejaring Inovasi
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	-	Tidak Tersedia
10.	Pengelola Inovasi	ada pengelola dan Ditetapkan dengan SK OPD	Penetapan Tim Pengelola Operator Aplikasi Sistem Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2020

11.	Ketersediaan Informasi Layanan	informasi layanan dapat diakses secara online	Ketersediaan Informasi Layanan SIMTARU
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	terdapat "call center" layanan pengaduan pengguna	Layanan Pengaduan
13.	Tingkat Partisipasi Stakeholder	-	Tidak Tersedia
14.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Email/Media Sosial	Kemudahan Informasi Layanan
15.	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	-	Tidak Tersedia
16.	Online Sistem	ada dukungan melalui web aplikasi	Online Sistem
17.	Kecepatan Inovasi	-	Tidak Tersedia
18.	Kemanfaatan Inovasi	hasil manfaatnya dirasakan diatas 201 orang ketas	Kemanfaatan Inovasi
19.	Tingkat Kepuasan penggunaan inovasi daerah	-	Tidak Tersedia
20.	Sosialisasi Kebijakan	Ada Foto	Sosialisasi Kebijakan
21.	Kualitas Inovasi Daerah	Ada Upload Video	SIMTARU Kabupaten Bintan

3.2 Inovasi Pelayanan Publik

3.2.1 Paralegal

1. PROFIL INOVASI

1.1 Nama Inovasi

PARALEGAL

1.2 Tahapan Inovasi

Implementasi

1.3 Inisiator Inovasi Daerah

OPD – Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

1.4 Jenis Inovasi

Non Digital

1.5 Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi pelayanan publik

1.6 Urusan Inovasi Daerah

Pemberdayaan masyarakat dan Desa, Sosial, Hukum

1.7 Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Desa sebagai struktur organisasi pemerintahan menjadi garda terdepan pelayanan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Maka kemampuan dan kapasitas aparatur pemerintah desa maupun masyarakat memegang peranan yang sangat penting. Pemerintah desa dituntut untuk memiliki perhatian dan tanggungjawab terhadap masyarakat desa terutama dalam menyikapi permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi didesa. Pelatihan paralegal memberikan kesempatan bagi mereka yang tidak berlatar belakang pendidikan hukum namun memiliki kepedulian yang tinggi terhadap penyelesaian permasalahan hukum dan menjadi seorang para legal sesuai dengan Permenkumham nomor 1 tahun 2018 tentang Paralegal.

Banyaknya permasalahan hukum yang terjadi di tingkat Desa dan Banyak masyarakat yang tidak paham dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang sedang dihadapi serta belum tersedianya Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang terakreditasi di Kabupaten Bintan menyebabkan perlunya membentuk dan memberikan pelatihan paralegal yang merupakan bentuk inovasi pelayanan publik. Pelatihan paralegal ini bertujuan untuk menghadirkan agen-agen hukum di pedesaan di seluruh Kabupaten Bintan yang berperan untuk dapat membantu mengatasi permasalahan hukum atau untuk menangani perkara non-litigasi maupun litigasi yang ada di masyarakat desa.

1.8 Tujuan Inovasi Daerah

Adapun tujuan diselenggarakannya kegiatan pelatihan Paralegal ini sebagai berikut:

1. Menciptakan paralegal yang memiliki keterampilan di bidang hukum Pedesaan
2. Meningkatkan mutu, kualitas, serta jangkauan pemberian bantuan huku
3. Meningkatkan pemikiran masyarakat yang sadar hukum, bersikap kritis, analisis, dan solutif terhadap berbagai permasalahan yang timbul di pedesaan,
4. Meningkatkan kepedulian atas problematika hukum bagi setiap peserta pelatihan Paralegal

1.9 Manfaat Yang Diperoleh

Hasil yang dicapai pada kegiatan pelatihan Paralegal desa Se-Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut:

1. Terlaskananya program pelatihan paralegal desa se-Kabupaten Bintan
2. Meningkatnya pemahaman masyarakat desa terhadap peran peran dan fungsi paralegal
3. Meningkatnya pemahaman hukum masyarakat desa
4. Meningkatnya pemahaman masyarakat desa dalam penyusunan produk hukum desa
5. Menciptakan paralegal di desa se-Kabupaten Bintan sebagai mitra diskusi hukum dan penyelesaian permasalahan tindak pidana ringan melalui musyawarah bagi masyarakat di desanya masing-masing.
6. Terciptanya forum diskusi melalui media whatapp yag bertujuan sebagai sarana tukar menukar informasi hukum dan juga sharing pengalaman dan penyelesaian permasalahan hukum, sehingga ketika permasalahan yang sama terjadi di desa lain, maka paralegal dapt menjadi inisiator penyelesaian permasalahan
7. Membangun hubungan antara paralegal desa dengan narasumber sebagai pembina paralegal desa se- kabupaten Bintan

1.10 Hasil Inovasi

Adapun hasil inovasi yang dicapai melalui kegiatan pelatihan paralegal ini adalah

1. Terdapatnya hasil pre test dan post test pelaksanaan kegiatan paralegal
2. Tersedianya paralegal yang berjumlah 69 orang dengan rincian: 33 paralegal dari masyarakat dan 36 paralegal dari perangkat desa.

2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.16
Indeks Inovasi Paralegal

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	Perkada	Penetapan Tenaga Paralegal Desa Kabupaten Bintan
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 31 keatas	Penetapan Tenaga Paralegal Desa Kabupaten Bintan
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran untuk kegiatan inovasi dalam tahapan sudah dilaksanakan dan sudah di evaluasi	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja di lingkungan pemerintah daerah dilakukan secara manual	bukti dukungan teknologi masih secara manual
5.	Bimtek Inovasi	Pernah 1 tahun 2 Kali melakukan Bimtek	Foto Bimtek Paralegal
6.	Program Dan Kegiatan Di Renstra OPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan pengembangan inovasi ke dalam Resntra dan telah dilaksanakan	Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bintan Tahun 2016-2021
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi hanya berjalan 3 OPD atau lebih	Foto Stakeholder
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman Teknis dan dapat diakses secara online	Proses Hukum Pidana, Perdata dan Pengorganisasian Rakyat untuk Advokasi

10.	Pengelola Inovasi		ada pengelola dan Ditetapkan dengan SK kepala daerah	Keputusan Bupati Bintan Nomor 323/VII/2020 Tentang Penetapan Tenaga Paralegal Desa Kabupaten Bintan, Penetapan Tenaga Paralegal Desa Kabupaten Bintan
11.	Ketersediaan Layanan	Informasi	informasi diakses melalui telp	layanan informasi melalui WA Group Paralegal
12.	Penyelesaian Pengaduan	Layanan	terdapat layanan pengaduan pengguna melalui "media sosial"	Layanan Pengaduan melalui WA Group Paralegal
13.	Tingkat Stakeholder	Partisipasi	inovasi dilakukan dengan melibatkan masyarakat dan akademisi	Foto Stakeholder
14.	Kemudahan Layanan	Informasi	Layanan Email/Media Sosial	media layanan informasi melalui WA Group Paralegal
15.	Kemudahan Inovasi Yang Dihasilkan	Proses	Hasil inovasi dapat dilakukan dalam waktu hitungan 1-2 hari	dokumentasi kemudahan proses inovasi
16.	Online Sistem		ada dukungan melalui informasi website atau sosial media	layanan informasi melalui WA Group Paralegal
17.	Kecepatan Inovasi		Proses inovasi dapat dilakukan dalam waktu hitungan 1-2 bulan	bukti akses inovasi daerah dalam satuan waktu
18.	Kemanfaatan Inovasi		hasil manfaatnya dirasakan diatas 201 orang ketas	Kemanfaatan Inovasi Paralegal
19.	Tingkat penggunaan daerah	Kepuasan inovasi	-	Tidak Tersedia
20.	Sosialisasi Kebijakan		Ada Foto	Sosialisasi Paralegal melalui kegiatan Pelatihan Paralegal Se-Kabupaten Bintan
21.	Kualitas Inovasi Daerah		Ada Upload Video	PARALEGAL DESA

3.2.2 Kapal Pustaka Apung

1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi

Kapal Pustaka Apung

1.2. Tahapan Inovasi

Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah

OPD – Dinas Perpustakaan dan Arsip

1.4. Jenis Inovasi

Non Digital

1.5. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi pelayanan publik

1.6. Urusan Inovasi Daerah

Perpustakaan

1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Perpustakaan memiliki fungsi penting dalam perkembangan ilmu, hal ini karena kebutuhan sumber daya informasi bagi masyarakat dapat dilakukan dengan maksimal melalui lembaga seperti perpustakaan dan pusat informasi.

Kemajuan teknologi yang pesat dan meningkatnya kebutuhan informasi di era globalisasi ini, pada umumnya masyarakat perkotaan dan pedesaan semakin haus akan informasi yang tepat, cepat dan akurat, baik cetak maupun elektronik.

Namun demikian, mengingat keterbatasan sarana dan prasarana masyarakat pedesaan agak lamban dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan. Maka diadakan perpustakaan ditengah-tengah masyarakat tentang informasi dan ilmu pengetahuan; Untuk itu dibutuhkan pembaharuan yang dapat menunjang kinerja perpustakaan; salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menghadirkan "Kapal Pustaka Apung".

Kapal Pustaka Apung merupakan perpustakaan atau tempat yang melayani pemustaka diluar gedung perpustakaan daerah. Kapal Pustaka

Apung ini melayani beberapa pulau terutama di Kecamatan Mantang dan Bintang Pesisir yang dilakukan seminggu 1 kali atau 2 kali pada jam sekolah.

1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Memberikan pelayanan perpustakaan bagi masyarakat Bintang yang berada di pulau-pulau khususnya di Kecamatan Bintang Pesisir dan Kecamatan Mantang sehingga dapat meningkatkan minat baca masyarakat sehingga dapat meningkatkan minat baca masyarakat.

1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Terlaksananya pelayanan perpustakaan bagi masyarakat Kabupaten Bintang terutama bagi masyarakat yang berada di pulau-pulau dan wilayah pesisir.

1.10. Hasil Inovasi

Terpenuhinya sumber literasi bagi masyarakat Bintang terutama yang berada di pulau-pulau dan wilayah pesisir.

2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.17
Indeks Inovasi Kapal Pustaka Apung

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	-	Tidak Tersedia
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	1-10 SDM	Susunan Panitia Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Perpustakaan Keliling terhadap Masyarakat
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran untuk kegiatan inovasi dalam tahapan sudah dilaksanakan dan sudah di evaluasi	Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Thn. 2016-2021
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja di lingkungan pemerintah daerah dilakukan secara	Pelayanan Pustaka Apung dilakukan

		manual	secara manual
5.	Bimtek Inovasi	-	Tidak Tersedia
6.	Program Dan Kegiatan Di Renstra OPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan pengembangan inovasi ke dalam Resntra dan telah dilaksanakan	Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Thn. 2016-2021
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi hanya berjalan 3 OPD atau lebih	Inovasi hanya berjalan 3 OPD
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman Teknis	Pedoman Teknis Pelayanan
10.	Pengelola Inovasi	ada pengelola dan Ditetapkan dengan SK OPD	Susunan Panitia Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Perpustakaan Keliling terhadap Masyarakat
11.	Ketersediaan Informasi Layanan	informasi melalui datang langsung	Informasi mengenai Pustaka Apung dengan cara datang langsung
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	-	Tidak Tersedia
13.	Tingkat Partisipasi Stakeholder	inovasi dilakukan dengan melibatkan masyarakat	Inovasi dilakukan dengan melibatkan masyarakat
14.	Kemudahan Informasi Layanan	-	Tidak Tersedia
15.	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	Hasil inovasi dapat dilakukan dalam waktu hitungan 1-2 hari	Hasil inovasi dapat dilakukan dalam waktu hitungan 1-2 hari
16.	Online Sistem	-	Tidak Tersedia
17.	Kecepatan Inovasi	-	Tidak Tersedia
18.	Kemanfaatan Inovasi	hasil manfaatnya dirasakan diatas 201 orang ketas	hasil manfaatnya dirasakan diatas 201 orang ketas

19.	Tingkat Kepuasan penggunaan inovasi daerah	-	Tidak Tersedia
20.	Sosialisasi Kebijakan	Ada Foto	Sosialisasi dilakukan langsung pada saat pelayanan Pustaka Apung
21.	Kualitas Inovasi Daerah	Ada Upload Video	Kapal Pustaka Apung

3.2.3 Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis di Puskesmas dan Rawat Inap Kelas III RSUD Bintang

1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi

Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis di Puskesmas dan Rawat Inap Kelas III RSUD Bintang

1.2. Tahapan Inovasi

Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah

OPD – Dinas Kesehatan

1.4. Jenis Inovasi

Non Digital

1.5. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi pelayanan publik

1.6. Urusan Inovasi Daerah

Kesehatan

1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Pelayanan Kesehatan merupakan pelayanan dasar yang wajib diberikan oleh pemerintah. Pemerintah Pusat telah merealisasikan itu dalam bentuk program BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan. Namun, masih ada masyarakat Kabupaten Bintang yang

tidak terdaftar dalam BPJS Kesehatan sehingga tidak bisa mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis. Oleh karena itu, program ini diinisiasi oleh Dinas Kesehatan untuk memberikan pelayanan prima kepada seluruh masyarakat Bintan yang membutuhkan pelayanan kesehatan secara gratis (terutama bagi masyarakat yang tidak terdaftar di BPJS). Masyarakat yang tidak terdaftar di BPJS Kesehatan hanya perlu menunjukkan KTP Kabupaten Bintan untuk bisa mendapatkan pelayanan kesehatan dasar ini.

1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Meringankan beban masyarakat Kabupaten Bintan yang tidak terdaftar pada BPJS Kesehatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dasar gratis baik di Puskesmas maupun di RSUD Bintan; Meningkatkan akses masyarakat Kabupaten Bintan ke pelayanan kesehatan; Selektif dalam pelaksanaan integrasi BPJS.

1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Agar masyarakat yang tidak terdaftar pada BPJS Kesehatan tetapi memiliki KTP Bintan tetap bisa mendapatkan pelayanan kesehatan dasar secara gratis; Agar masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan dasar yang baik.

1.10. Hasil Inovasi

Masyarakat merasa terbantu meskipun tidak terdaftar pada BPJS Kesehatan tetapi masyarakat tetap bisa mendapatkan pelayanan kesehatan dasar secara gratis dari Pemerintah Kabupaten Bintan.

2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.18

Indeks Inovasi Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis di Puskesmas dan Rawat Inap Kelas III RSUD Bintan

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	Perda	Peraturan Bupati Bintan Nomor 35

			Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis Di Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Rawat Inap Kelas III Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bintan
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	-	Tidak Tersedia
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran untuk kegiatan inovasi dalam tahapan sudah dilaksanakan dan sudah di evaluasi	Dukungan Anggaran
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja di lingkungan pemerintah daerah dilakukan secara manual	Pelaksanaan kerja di lingkungan pemerintah daerah dilakukan secara manual
5.	Bimtek Inovasi	Pernah 1 tahun 2 Kali melakukan Bimtek	Anggaran BIMTEK
6.	Program Dan Kegiatan Di Renstra OPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan pengembangan inovasi ke dalam Resntra dan telah dilaksanakan	Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi hanya berjalan 3 OPD atau lebih	Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan dengan Rumah Sakit Umum Daerah Engku Haji Daud Tanjung Uban Provinsi Kepulauan Riau, Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan dengan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Azis

			Singkawang, Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan dengan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bintan,
8.	Replikasi	Pernah 1 Kali di replikasi di daerah lain	Kunjungan Kerja Komisi I DPRD Kota Tanjungpinang
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman Teknis	Asuhan Keperawatan Pasien Rawat Inap
10.	Pengelola Inovasi	Ada pengelola dan Ditetapkan dengan SK kepala daerah	Peraturan Bupati Bintan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis Di Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Rawat Inap Kelas III Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bintan
11.	Ketersediaan Layanan Informasi	informasi melalui datang langsung	Informasi tentang pelayanan bisa didapatkan dengan datang langsung ke fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Bintan
12.	Penyelesaian Pengaduan Layanan	terdapat "call center" layanan pengaduan pengguna	Call Center Pelayanan Kesehatan Gratis dapat dilakukan melalui RSUD Bintan
13.	Tingkat Stakeholder Partisipasi	inovasi dilakukan dengan melibatkan masyarakat	Pelayanan Inovasi dapat dirasakan oleh masyarakat
14.	Kemudahan Layanan Informasi	Layanan Telp	Kemudahan informasi layanan melalui

			telepon
15.	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	Hasil inovasi dapat dilakukan dalam waktu hitungan 1-2 hari	Hasil inovasi dapat dilakukan dalam waktu hitungan 1-2 hari
16.	Online Sistem	-	Tidak Tersedia
17.	Kecepatan Inovasi	Proses inovasi dapat dilakukan dalam waktu hitungan 3-7 bulan	Tidak Tersedia
18.	Kemanfaatan Inovasi	hasil manfaatnya dirasakan diatas 201 orang ketas	Inovasi ini dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Bintan
19.	Tingkat Kepuasan penggunaan inovasi daerah	-	Tidak Tersedia
20.	Sosialisasi Kebijakan	Ada Foto	Sosialisasi Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis bagi Masyarakat Kabupaten Bintan
21.	Kualitas Inovasi Daerah	Ada Upload Video	Innovative Government Award# Program Kesehatan Gratis Kabupaten Bintan

3.2.4 Poli Malam di Puskesmas Padat Penduduk (Poli Umum, Kebidanan dan Poli Anak)

1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi

Poli Malam di Puskesmas Padat Penduduk (Poli Umum, Kebidanan dan Poli Anak)

1.2. Tahapan Inovasi

Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah

OPD – Dinas Kesehatan

1.4. Jenis Inovasi

Non Digital

1.5. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi pelayanan publik

1.6. Urusan Inovasi Daerah

Kesehatan

1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Selama ini jam pelayanan puskesmas terbatas hanya pada jam pelayanan yakni pukul 08.00-14.00 wib. Waktu tersebut menjadi halangan bagi segelintir orang untuk berobat karena terbentur dengan jam kerja mereka yang biasanya dari pagi hingga sore hari terutama bagi para pekerja di sektor swasta. Ada beberapa daerah di Kabupaten Bintan yang mayoritas masyarakatnya merupakan pekerja sehingga tidak bisa meninggalkan pekerjaan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan pada jam kerja normal. Adapun daerah-daerah tersebut adalah Tanjung Uban, Teluk Sasah, Kawal dan Kijang. Maka inovasi ini dikembangkan agar dapat membantu masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan setelah mereka selesai bekerja. Poli malam ini berlaku pukul 14.00 s/d 22.00 wib. Dalam pelayanan ini melibatkan dokter umum, perawat dan bidan dalam pelaksanaannya. Selain itu poli malam memberikan pelayanan opetek maupun rujukan ke rumah sakit jika memang diperlukan.

1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Memberikan kemudahan kepada masyarakat yang bekerja pada pagi hingga sore hari dengan tetap memperoleh pelayanan kesehatan di malam hari ketika mereka membutuhkan termasuk bagi ibu hamil yang akan bersalin.

1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Masyarakat Bintan yang membutuhkan pelayanan kesehatan lebih mudah

dijangkau dan mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis.

1.10. Hasil Inovasi

Masyarakat yang ingin berobat lebih dekat dan tidak perlu khawatir dengan jam pelayanan yang diperpanjang sampai dengan pukul 22.00 wib.

2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.19

Indeks Inovasi Poli Malam di Puskesmas Padat Penduduk (Poli Umum, Kebidanan dan Poli Anak)

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK OPD	Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan Nomor: 177/SK/2017 tentang Pembentukan Poli Malam
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 31 keatas	Pembentukan Poli Malam
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran untuk kegiatan inovasi dalam tahapan sudah dilaksanakan dan sudah di evaluasi	Dukungan Anggaran
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja di lingkungan pemerintah daerah dilakukan secara manual	Pelayanan Poli Malam dilakukan secara manual
5.	Bimtek Inovasi	Pernah 1 tahun 2 Kali melakukan Bimtek	Anggaran BIMTEK
6.	Program Dan Kegiatan Di Renstra OPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan pengembangan inovasi ke dalam Resntra dan telah dilaksanakan	Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi hanya berjalan 3 OPD atau lebih	Puskesmas Pelaksana Poli Malam
8.	Replikasi	Pernah 1 Kali di replikasi	Kunjungan Kerja Komisi I DPRD Kota

		di daerah lain	Tanjungpinang
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman Teknis	Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan Nomor: 177/SK/2017 tentang Pembentukan Poli Malam
10.	Pengelola Inovasi	ada pengelola dan Ditetapkan dengan SK OPD	Ada 4 UPTD Puskesmas yang mengelola Pelayanan Poli Malam
11.	Ketersediaan Informasi Layanan	informasi melalui datang langsung	Informasi bisa didapatkan dengan mendatangi UPTD Puskesmas Pelaksana Poli Malam
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	terdapat "call center" layanan pengaduan pengguna	terdapat "call center" layanan pengaduan pengguna
13.	Tingkat Partisipasi Stakeholder	inovasi dilakukan dengan melibatkan masyarakat	Inovasi poli malam dapat dirasakan oleh masyarakat
14.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Telp	Layanan Telp
15.	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	Hasil inovasi dapat dilakukan dalam waktu hitungan 1-2 hari	Manfaat poli malam bisa langsung dirasakan masyarakat pada saat mereka datang
16.	Online Sistem	-	Tidak Tersedia
17.	Kecepatan Inovasi	Proses inovasi dapat dilakukan dalam waktu hitungan 3-7 bulan	Tidak Tersedia
18.	Kemanfaatan Inovasi	hasil manfaatnya dirasakan diatas 201 orang ketas	Poli malam ini dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Bintan
19.	Tingkat Kepuasan penggunaan inovasi daerah	-	Tidak Tersedia

20.	Sosialisasi Kebijakan	Ada Foto	Sosialisasi Poli Malam
21.	Kualitas Inovasi Daerah	Ada Upload Video	Innovative Government Award# Program - Layanan Puskesmas Jam 10 Malam Kabupaten Bintan

3.2.5 Posbindu PTM Mobile

1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi

Posbindu PTM Mobile

1.2. Tahapan Inovasi

Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah

OPD – Dinas Kesehatan

1.4. Jenis Inovasi

Non Digital

1.5. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi pelayanan publik

1.6. Urusan Inovasi Daerah

Kesehatan

1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Kesehatan merupakan hal terpenting dalam hidup ini. Pemeriksaan terhadap penyakit harus sering dilakukan untuk mendeteksi lebih awal. Biasanya, pemeriksaan hanya dilakukan pada tempat-tempat konvensional seperti rumah sakit dan puskesmas atau pusat-pusat kesehatan lainnya. Sehingga Posbindu PTM Mobile menjadi terobosan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan agar pemeriksaan dapat

dilakukan di berbagai tempat dan dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas.

Pemeriksaan kesehatan masyarakat yang disejalankan dengan event (kegiatan) baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah maupun pihak swasta dengan catatan adanya permintaan dari pihak penyelenggara kegiatan. Sehingga dengan adanya Posbindu PTM Mobile masyarakat tetap dapat mengikuti kegiatan sekaligus melakukan pemeriksaan.

1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Memberikan pemeriksaan kesehatan PTM (Penyakit Tidak Menular) yang dibutuhkan masyarakat di luar gedung yang berusia 15 tahun keatas.

1.9. Manfaat Yang Diperoleh

1. Pelayanan kesehatan dapat lebih mudah dijangkau oleh masyarakat untuk mendapatkan pemeriksaan PTM (Penyakit Tidak Menular) Mobile;
2. Masyarakat tetap dapat mengikuti event (kegiatan) sekaligus dapat melakukan pemeriksaan kesehatan secara gratis

1.10. Hasil Inovasi

Masyarakat tetap dapat memeriksakan diri berkaitan dengan PTM (Penyakit Tidak Menular) Mobile tanpa harus mengunjungi fasilitas kesehatan.

2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.20
Indeks Inovasi Posbindu PTM Mobile

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	Perkada	Surat Edaran Nomor: 192 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kamis IVA (Inspeksi Visual dengan Asam Asetat) di Kabupaten Bintan
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi	-	Tidak Tersedia

	Daerah		
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran untuk kegiatan inovasi dalam tahapan sudah dilaksanakan dan sudah di evaluasi	Rencana Strategis Kabupaten Bintan
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja di lingkungan pemerintah daerah dilakukan secara manual	Pelayanan Posbindu Mobile dilakukan secara manual
5.	Bimtek Inovasi	-	Tidak Tersedia
6.	Program Dan Kegiatan Di Renstra OPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan pengembangan inovasi ke dalam Resntra dan telah dilaksanakan	Rencana Strategis Kabupaten Bintan
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi hanya berjalan 3 OPD atau lebih	Surat Edaran Nomor: 192 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kamis IVA (Inspeksi Visual dengan Asam Asetat) di Kabupaten Bintan
8.	Replikasi	informasi melalui datang langsung	Pelaksanaan Posbindu Mobile
9.	Pedoman Teknis	terdapat "call center" layanan pengaduan pengguna	terdapat "call center" layanan pengaduan pengguna
10.	Pengelola Inovasi	ada pengelola dan Ditetapkan dengan SK OPD	Surat Edaran Nomor: 192 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kamis IVA (Inspeksi Visual dengan Asam Asetat) di Kabupaten Bintan
11.	Ketersediaan Layanan Informasi	informasi melalui datang langsung	Pelaksanaan Posbindu Mobile
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	terdapat "call center" layanan pengaduan pengguna	terdapat "call center" layanan pengaduan pengguna

13.	Tingkat Partisipasi Stakeholder	inovasi dilakukan dengan melibatkan masyarakat	Sasaran Posbindu Mobile adalah masyarakat
14.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Telp	Layanan Telp
15.	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	Hasil inovasi dapat dilakukan dalam waktu hitungan 1-2 hari	Dokumentasi Posbindu Mobile
16.	Online Sistem	-	Tidak Tersedia
17.	Kecepatan Inovasi	Proses inovasi dapat dilakukan dalam waktu hitungan 3-7 bulan	Tidak Tersedia
18.	Kemanfaatan Inovasi	hasil manfaatnya dirasakan diatas 201 orang ketas	Dokumentasi Posbindu Mobile
19.	Tingkat Kepuasan penggunaan inovasi daerah	-	Tidak Tersedia
20.	Sosialisasi Kebijakan	Ada Foto	Sosialisasi dilakukan pada saat pelaksanaan Posbindu Mobile
21.	Kualitas Inovasi Daerah	Ada Upload Video	Innovative Goverment Award# Program - Layanan Posbindu Mobile

3.2.6 Rumah Singgah Rujukan Luar Daerah

1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi

Rumah Singgah Rujukan Luar Daerah

1.2. Tahapan Inovasi

Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah

OPD – Dinas Kesehatan

1.4. Jenis Inovasi

Non Digital

1.5. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi pelayanan publik

1.6. Urusan Inovasi Daerah

Kesehatan

1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Banyak penyakit yang di derita oleh masyarakat, baik penyakit yang tergolong ringan hingga penyakit beresiko tinggi dan memerlukan penanganan secara serius baik oleh tenaga dokter (dokter ahli) hingga peralatan pendukung yang menggunakan teknologi canggih. Penyakit beresiko tinggi ini terkadang tidak dapat ditangani oleh rumah sakit yang ada di Kabupaten Bintan maupun rumah sakit yang berada di Kota Tanjungpinang. Oleh karena itu dibuatlah terobosan dengan melakukan Kerjasama dengan RS Cipto Mangunkusumo Jakarta dan RS Abdul Azis Singkawang Kalimantan Barat. Rumah sakit ini menjadi rujukan bagi masyarakat Kabupaten Bintan yang penyakitnya tidak mampu ditangani oleh rumah sakit baik di Kabupaten Bintan maupun di Kota Tanjungpinang. Khusus RS Abdul Azis Singkawang Kalimantan Barat, dijadikan rujukan berkaitan dengan lokasi dan jarak tempuh Kecamatan Tambelan yang merupakan bagian dari Kabupaten Bintan karena lebih dekat secara geografis.

1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Memberikan kemudahan kepada masyarakat Kabupaten Bintan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan di luar daerah; Untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat Kabupaten Bintan.

1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Inovasi ini memberikan manfaat berupa beberapa fasilitas kepada pasien dan pendamping pasien yang dirujuk ke luar daerah, antara lain: 1. Tempat tinggal selama menjalani pengobatan; 2. Transportasi darat, laut dan udara untuk satu pasien dan satu orang pendamping pasien; 3. Antar

jemput dengan menggunakan mobil ambulans selama pasien membutuhkan pengobatan di luar daerah; 4. Uang makan untuk pasien sebesar Rp. 25.000/pasien dan satu orang pendamping.

1.10. Hasil Inovasi

Memberikan kemudahan akses bagi masyarakat Kabupaten Bintan yang membutuhkan pengobatan tingkat lanjut di luar daerah dengan lebih mudah dan tanpa harus memikirkan biaya.

2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.21
Indeks Inovasi Rumah Singgah Rujukan Luar Daerah

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	Perkada	Petunjuk Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2019
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	11-30 SDM	Penunjukan Tenaga Pengawas Lapangan , Sopir Mobil Operasional, Petugas Keamanan dan Kebersihan, Rumah Singgah Kabupaten Bintan di Singkawang Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2019, Pengelolaan Rumah Singgah Kabupaten Bintan di Jakarta
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran untuk kegiatan inovasi dalam tahapan sudah dilaksanakan dan sudah di evaluasi	Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja di lingkungan pemerintah	Pelayanan Kesehatan Gratis dilakukan

		daerah dilakukan secara manual	secara manual
5.	Bimtek Inovasi	-	Tidak Tersedia
6.	Program Dan Kegiatan Di Renstra OPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan pengembangan inovasi ke dalam Resntra dan telah dilaksanakan	Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi hanya berjalan 3 OPD atau lebih	Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan dengan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Azis Singkawang
8.	Replikasi	Pernah 1 Kali di replikasi di daerah lain	Direplikasi oleh Kabupaten Siak
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman Teknis	Bagan Alur Pelayanan Rumah Singgah Rujukan Luar Daerah
10.	Pengelola Inovasi	ada pengelola dan Ditetapkan dengan SK OPD	Penunjukan Tenaga Pengawas Lapangan , Sopir Mobil Operasional, Petugas Keamanan dan Kebersihan, Rumah Singgah Kabupaten Bintan di Singkawang Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2019
11.	Ketersediaan Layanan Informasi	informasi diakses melalui telp	Call Center RSUD Bintan
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	terdapat "call center" layanan pengaduan pengguna	Call Center RSUD Bintan
13.	Tingkat Stakeholder Partisipasi	inovasi dilakukan dengan melibatkan masyarakat	Rumah Singgah Rujukan Luar Daerah dapat dirasakan oleh masyarakat

14.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Telp	Call Center RSUD Bintan
15.	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	Hasil inovasi dapat dilakukan dalam waktu hitungan 1-2 hari	Dokumentasi Rumah Singgah
16.	Online Sistem	-	Tidak Tersedia
17.	Kecepatan Inovasi	Proses inovasi dapat dilakukan dalam waktu hitungan 3-7 bulan	Tidak Tersedia
18.	Kemanfaatan Inovasi	hasil manfaatnya dirasakan diatas 201 orang ketas	Manfaat rumah singgah
19.	Tingkat Kepuasan penggunaan inovasi daerah	-	Tidak Tersedia
20.	Sosialisasi Kebijakan	Ada Foto	Sosialisasi Program Rumah Singgah Rujukan Luar Daerah dilakukan di setiap program- program yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan maaupun rumah sakit
21.	Kualitas Inovasi Daerah	Ada Upload Video	Rumah Singgah Rujukan Luar Daerah

3.2.7 SAHARA (Sambungan Hati dan Rasa Masyarakat)

1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi

SAHARA (Sambungan Hati dan Rasa Masyarakat)

1.2. Tahapan Inovasi

Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah

OPD – Dinas Komunikasi dan Informatika

1.4. Jenis Inovasi

Digital

1.5. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi pelayanan publik

1.6. Urusan Inovasi Daerah

Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, sosial, komunikasi dan informatika

1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Pemerintah Kabupaten Bintan Melalui Dinas Kominfo Bintan telah melaunching aplikasi layanan aduan masyarakat yang diberi nama "SAHARA".

SAHARA merupakan aplikasi aduan masyarakat yang berbasis aplikasi, program aduan ini merupakan perwujudan dari keinginan Bupati Bintan Dan Wakil Bupati Bintan dalam menyerap aspirasi dan aduan masyarakat, penggunaannya sangat mudah, hanya tinggal meng-klik ke link sahara.bintankab.go.id dan bisa juga menuliskan aduan beserta foto atau SMS Sahara_aduan kirim ke 1708.

1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mencari informasi yang dibutuhkan

1.9. Manfaat Yang Diperoleh

- (1). memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai Kabupaten Bintan dan dapat menyampaikan informasi, keluhan, aspirasi dan aduan; dan
- (2). Memudahkan informasi bagi setiap OPD terhadap informasi yang disampaikan oleh masyarakat.

1.10. Hasil Inovasi

Menghasilkan sebuah wadah informasi yang bisa diakses pada :
<http://sahara.bintankab.go.id/>

2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.22

Indeks Inovasi SAHARA (Sambungan Hati dan Rasa Masyarakat)

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	-	Tidak Tersedia
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	-	Tidak Tersedia
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran untuk kegiatan inovasi sudah ada sampai tahap pelaksanaan inovasi	Pengelolaan Informasi Pemerintah Kabupaten Bintan
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja di lingkungan pemerintah daerah sudah didukung system informasi online/ daring	web SAHARA
5.	Bimtek Inovasi	-	Tidak Tersedia
6.	Program Dan Kegiatan Di Renstra OPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan pengembangan inovasi ke dalam Resntra dan telah dilaksanakan	Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bintan
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi hanya berjalan 3 OPD atau lebih	Keterlibatan OPD lainnya dapat dilihat pada web SAHARA dimana terdapat web OPD, web Pemerintah Desa dan aplikasi yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	terdapat "Rancangan" Pedoman Teknis	Tidak Tersedia
10.	Pengelola Inovasi	ada Pengelola namun Tidak ditetapkan dengan SK OPD	Tidak Tersedia
11.	Ketersediaan Informasi Layanan	informasi layanan dapat diakses secara online	Informasi layanan bisa diakses melalui web SAHARA
12.	Penyelesaian Pengaduan Layanan	terdapat "call center" layanan pengaduan pengguna	Layanan pengaduan dapat langsung disampaikan melalui web

13.	Tingkat Stakeholder Partisipasi	inovasi dilakukan dengan melibatkan masyarakat	masyarakat dapat mengakses web sahara untuk mendapatkan informasi maupun memberi informasi
14.	Kemudahan Layanan Informasi	layanan melalui aplikasi online	Layanan langsung didapatkan dengan akses web SAHARA
15.	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	Hasil inovasi dapat dilakukan dalam waktu hitungan 1-2 hari	Layanan langsung didapatkan dengan akses web SAHARA
16.	Online Sistem	ada dukungan melalui web aplikasi	web SAHARA
17.	Kecepatan Inovasi	Proses inovasi dapat dilakukan dalam waktu hitungan 3-7 bulan	Tidak Tersedia
18.	Kemanfaatan Inovasi	-	Tidak Tersedia
19.	Tingkat Kepuasan penggunaan inovasi daerah	-	Tidak Tersedia
20.	Sosialisasi Kebijakan	Ada Foto	Sosialisasi web SAHARA
21.	Kualitas Inovasi Daerah	Ada Upload Video	SAHARA (Sambungan Hati dan Rasa Masyarakat)

3.2.8 Optimalisasi Corporate Social Responsilitiy (CSR) Kabupaten Bintan

1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi

Optimalisasi Corporate Social Responsilitiy (CSR) Kabupaten Bintan

1.2. Tahapan Inovasi

Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah

OPD- Sekretariat Daerah bagian Perekonomian

1.4. Jenis Inovasi

Digital

1.5. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi pelayanan publik

1.6. Urusan Inovasi Daerah

Sosial

1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Inovasi ini dilatar belakangi oleh keinginan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan untuk melakukan sinergi bersama seluruh stakeholder yang memiliki keterkaitan dalam pengelolaan Corporate Social Responsibility (CSR)/ Tanggungjawab Sosial Perusahaan. Masalah yang dihadapi adalah: selama ini, perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Bintan dirasa kurang tanggap dalam menyalurkan dana CSR sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan.

Umumnya, dana CSR disalurkan sesuai dengan agenda, kegiatan, atau program perusahaan untuk lingkungan sekitar perusahaan dengan masyarakat diwilayah sekitar perusahaan sebagai target sasaran CSR. Padahal, tantangan pembangunan masyarakat Kabupaten Bintan secara keseluruhan cukup banyak seperti tantangan kesehatan, pendidikan, dan urusan sosial kemasyarakatan yang jika mendapat bantuan CSR, tentunya akan mengurangi beban pemerintah daerah serta bermanfaat bagi masyarakat Bintan secara menyeluruh. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan berinovasi dengan menyediakan platform secara online dalam bentuk sebuah website CSR untuk dapat meningkatkan kerjasama dan sinergitas bagi pihak-pihak terkait.

Website CSR ini menampung aspirasi serta usulan kegiatan atau usulan program oleh masyarakat Kabupaten Bintan untuk mendapat bantuan pembiayaan melalui CSR. Harapannya adalah agar terjalin konektivitas antara harapan- harapan masyarakat Bintan secara keseluruhan, memudahkan akses penyaluran pembiayaan kegiatan atau program oleh perusahaan, serta meningkatkan sinergitas antar berbagai pihak-pihak yang berkepentingan.

1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Tujuan inovasi CSR adalah untuk menjalin konektivitas antara masyarakat Kabupaten Bintan secara keseluruhan; memudahkan akses penyaluran pembiayaan kegiatan atau program oleh perusahaan; serta meningkatkan sinergitas antar berbagai pihak-pihak yang berkepentingan.

1.9 Manfaat Yang Diperoleh

Manfaat yang diperoleh melalui inovasi pengelolaan CSR adalah terjalinnya konektivitas antara masyarakat Kabupaten Bintan secara keseluruhan; mudahnya akses penyaluran pembiayaan kegiatan atau program oleh perusahaan; serta meningkatnya sinergitas antar berbagai pihak-pihak yang berkepentingan.

1.10 Hasil Inovasi

Salah satu keberhasilan inovasi ini adalah dalam penyaluran bantuan APD, masker dan bantuan alat kesehatan lainnya dalam penanganan pandemi COVID19; terjalinnya koordinasi antar stakeholder (pemerintah daerah, perusahaan, dan masyarakat) dalam penyaluran bantuan dana CSR; serta terbentuknya Forum CSR Kabupaten Bintan yang mencakup unsur pemerintah daerah, perusahaan-perusahaan di Kabupaten Bintan, serta perwakilan masyarakat Kabupaten Bintan.

2. INDIKATOR INOVASI

Tabel 3.23
Indeks Inovasi Optimalisasi Corporate Social Responsibility (CSR)
Kabupaten Bintan

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	-	Tidak Tersedia
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	-	Tidak Tersedia
3.	Dukungan Anggaran	-	Tidak Tersedia
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja di lingkungan pemerintah daerah sudah didukung system informasi online/ daring	Tampilan Website CSR Bintan
5.	Bimtek Inovasi	-	Tidak Tersedia

6.	Program Dan Kegiatan Di Renstra OPD	-	Tidak Tersedia
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi hanya berjalan 3 OPD atau lebih	Pelibatan Stakeholder CSR Bintang
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	-	Tidak Tersedia
10.	Pengelola Inovasi	-	Tidak Tersedia
11.	Ketersediaan Informasi Layanan	informasi layanan dapat diakses secara online	Kontak CSR Bintang (Telepon dan Email)
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	terdapat "call center" layanan pengaduan pengguna	Layanan Pengaduan CSR Bintang (Telepon dan Email)
13.	Tingkat Partisipasi Stakeholder	inovasi dilakukan dengan melibatkan masyarakat	Pelibatan masyarakat dalam Kegiatan CSR Bintang
14.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Email/Media Sosial	Kontak CSR Bintang (Telepon dan Email)
15.	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	-	Tidak Tersedia
16.	Online Sistem	ada dukungan melalui informasi website atau sosial media	Dukungan Prosedur melalui (Website, Email, dan Sosial Media)
17.	Kecepatan Inovasi	-	Tidak Tersedia
18.	Kemanfaatan Inovasi	hasil manfaatnya dirasakan diatas 201 orang ketas	Manfaat Inovasi CSR Bintang
19.	Tingkat Kepuasan penggunaan inovasi daerah	-	Tidak Tersedia
20.	Sosialisasi Kebijakan	Ada Foto	Penyebarluasan Informasi CSR Bintang
21.	Kualitas Inovasi Daerah	Ada Upload Video	Optimalisasi CSR Bintang

3.2.9 Perlengkapan Sekolah Gratis Bagi Siswa Baru (TK/SD/SMP sederajat)

1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi

Perlengkapan Sekolah Gratis Bagi Siswa Baru (TK/SD/SMP sederajat)

1.2. Tahapan Inovasi

Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah

OPD – Dinas Pendidikan

1.4. Jenis Inovasi

Non Digital

1.5. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi pelayanan publik

1.6. Urusan Inovasi Daerah

pendidikan

1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Inovasi ini dilatarbelakangi oleh mahalunya pemenuhan kebutuhan perlengkapan masuk sekolah bagi siswa baru untuk jenjang pendidikan PAUD, SD, dan SMP sederajat di Kabupaten Bintan. Oleh karena itu, untuk meringankan beban para orang tua, Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan mengambil inisiatif dalam bentuk sebuah program inovatif, yaitu Program Penyediaan Perlengkapan Sekolah Siswa Baru untuk jenjang pendidikan PAUD (sekolah negeri), SD (sekolah negeri dan swasta), serta SMP (sekolah negeri dan swasta) sederajat. Program ini mencakup penyediaan tas, sepatu, dan seragam sekolah secara gratis. Target atau sasaran penerima manfaat program ini adalah seluruh orang tua masyarakat Kabupaten Bintan yang memiliki anak usia sekolah yang baru akan masuk sekolah di tahun ajaran baru untuk jenjang PAUD, SD, dan SMP sederajat.

1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Tujuan inovasi ini adalah untuk meringankan beban orang tua siswa di Kabupaten Bintan dalam memenuhi kebutuhan perlengkapan masuk sekolah bagi siswa baru di tahun ajaran baru, serta bertujuan untuk

meningkatkan tingkat partisipasi sekolah di Kabupaten Bintan. Program ini mencakup penyediaan tas, sepatu, dan seragam sekolah secara gratis.

1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Manfaat yang diperoleh adalah beban orang tua siswa di Kabupaten Bintan dalam memenuhi kebutuhan perlengkapan masuk sekolah bagi siswa baru di tahun ajaran baru dapat berkurang, serta siswa baru di tahun ajaran baru untuk jenjang pendidikan PAUD, SD, dan SMP sederajat, dapat menerima bantuan tas, sepatu, dan seragam sekolah secara gratis. Manfaat lainnya adalah dengan program inovatif ini, tingkat partisipasi sekolah di Kabupaten Bintan dapat meningkat.

1.10. Hasil Inovasi

Hasil inovasi adalah tersedianya keperluan perlengkapan sekolah siswa baru di tahun ajaran baru seperti tas, sepatu, dan seragam sekolah secara gratis. Hasil lainnya adalah meningkatnya angka partisipasi sekolah di Kabupaten Bintan.

2. INDIKATOR INOVASI

Tabel 3.24

Indeks Inovasi Perlengkapan Sekolah Gratis Bagi Siswa Baru (TK/SD/SMP sederajat)

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK OPD	Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan Tahun 2018, Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan Tahun 2019

2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	1-10 SDM	Penetapan Pejabat Pelaksana Kegiatan Dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bintang Tahun 2018, Penetapan Pejabat Pelaksana Kegiatan Dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bintang Tahun 2019
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran untuk kegiatan inovasi dalam tahapan sudah dilaksanakan dan sudah di evaluasi	RKA Dinas Pendidikan - Perlengkapan Sekolah SD 2018, RKA Dinas Pendidikan - Perlengkapan Sekolah SD 2019, RKA Dinas Pendidikan - Perlengkapan Sekolah SMP 2018
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja di lingkungan pemerintah daerah dilakukan secara manual	Pelaksanaan Inovasi
5.	Bimtek Inovasi	-	Tidak Tersedia
6.	Program Dan Kegiatan Di Renstra OPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan pengembangan inovasi ke dalam Resntra dan telah dilaksanakan	Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Bintang
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi hanya berjalan 3 OPD atau lebih	Jejaring Inovasi
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	-	Tidak Tersedia

10.	Pengelola Inovasi	ada pengelola dan Ditetapkan dengan SK OPD	Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan Tahun 2019, Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan Tahun 2018
11.	Ketersediaan Informasi Layanan	informasi diakses melalui telp	Ketersediaan Informasi Layanan
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	terdapat "call center" layanan pengaduan pengguna	Penyelesaian Layanan Pengaduan
13.	Tingkat Partisipasi Stakeholder	inovasi dilakukan dengan melibatkan masyarakat	Partisipasi Masyarakat
14.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Telp	Kemudahan Informasi Layanan
15.	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	-	Tidak Tersedia
16.	Online Sistem	-	Tidak Tersedia
17.	Kecepatan Inovasi	-	Tidak Tersedia
18.	Kemanfaatan Inovasi	hasil manfaatnya dirasakan diatas 201 orang ketas	Penerima Manfaat
19.	Tingkat Kepuasan penggunaan inovasi daerah	-	Tidak Tersedia
20.	Sosialisasi Kebijakan	Ada Foto	Penyebarluasan Informasi Bantuan Perlengkapan Sekolah Gratis
21.	Kualitas Inovasi Daerah	Ada Upload Video	Perlengkapan Sekolah Gratis Bagi Siswa Baru (TK/SD/SMP sederajat)

3.2.10 Transportasi Sekolah Gratis Kabupaten Bintan

1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi

Transportasi Sekolah Gratis Kabupaten Bintan

1.2. Tahapan Inovasi

Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah

OPD – Dinas Pendidikan

1.4. Jenis Inovasi

Non Digital

1.5. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi pelayanan publik

1.6. Urusan Inovasi Daerah

pendidikan

1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Inovasi ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan sarana transportasi, khususnya untuk wilayah pesisir bagi siswa di Kabupaten Bintan. Hal ini karena kondisi geografis Kabupaten Bintan di wilayah pesisir yang terdiri dari daerah aliran sungai serta kepulauan, menyebabkan keterbatasan untuk sarana transportasi umum yang dapat diakses, baik di darat maupun di laut, terutama bagi siswa yang tinggal dan bersekolah di wilayah pesisir Kabupaten Bintan. Oleh karenanya, Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan, dengan semangat untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah dan meningkatkan akses terhadap pendidikan, menyediakan sarana transportasi antar jemput secara gratis bagi wilayah disekitar daerah pesisir bagi siswa sekolah untuk seluruh jenjang pendidikan (SD, SMP, dan SMA) di Kabupaten Bintan.

Inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan akses siswa menuju ke sekolah, meringankan beban para orang tua siswa, khususnya untuk biaya transportasi antar-jemput baik di darat maupun di laut, serta bertujuan untuk meningkatkan tingkat partisipasi sekolah di Kabupaten Bintan.

1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan akses siswa menuju ke sekolah, meringankan beban para orang tua siswa, khususnya untuk transportasi antar-jemput baik di darat maupun di laut, serta bertujuan untuk meningkatkan tingkat partisipasi sekolah di Kabupaten Bintan.

1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Manfaat yang diperoleh adalah meningkatnya akses siswa ke sekolah, serta meringankan beban para orang tua siswa, khususnya pengeluaran biaya pada transportasi untuk antar-jemput, baik di darat maupun di laut. Manfaat lainnya adalah, dengan mudahnya akses transportasi siswa untuk menuju ke sekolah, tingkat partisipasi sekolah di Kabupaten Bintan dapat meningkat.

1.10. Hasil Inovasi

Hasil inovasi adalah meningkatnya akses terhadap pendidikan terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir, berkurangnya biaya transportasi antar-jemput yang harus dikeluarkan oleh orang tua siswa, serta meningkatnya tingkat partisipasi sekolah di Kabupaten Bintan.

2. INDIKATOR INOVASI

Tabel 3.25
Indeks Inovasi Transportasi Sekolah Gratis Kabupaten Bintan

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK OPD	Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan Tahun 2019, Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan

			Tahun 2018
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	1-10 SDM	Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bintang Tahun 2018, Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bintang Tahun 2019
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran untuk kegiatan inovasi dalam tahapan sudah dilaksanakan dan sudah di evaluasi	RKA SKPD - Dinas Pendidikan
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja di lingkungan pemerintah daerah dilakukan secara manual	Pelaksanaan Inovasi
5.	Bimtek Inovasi	-	Tidak Tersedia
6.	Program Dan Kegiatan Di Renstra OPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan pengembangan inovasi ke dalam Resntra dan telah dilaksanakan	Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Bintang
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi hanya berjalan 3 OPD atau lebih	Jejaring Inovasi
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	-	Tidak Tersedia
10.	Pengelola Inovasi	ada pengelola dan Ditetapkan dengan SK OPD	Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bintang Tahun 2018, Penetapan Pejabat

			Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan Tahun 2019
11.	Ketersediaan Informasi Layanan	informasi diakses melalui telp	Ketersediaan Informasi Layanan
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	terdapat "call center" layanan pengaduan pengguna	Penyelesaian Layanan Pengaduan
13.	Tingkat Partisipasi Stakeholder	inovasi dilakukan dengan melibatkan masyarakat	Partisipasi Masyarakat
14.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Telp	Kemudahan Informasi Layanan
15.	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	-	Tidak Tersedia
16.	Online Sistem	-	Tidak Tersedia
17.	Kecepatan Inovasi	-	Tidak Tersedia
18.	Kemanfaatan Inovasi	hasil manfaatnya dirasakan diatas 201 orang ketas	Manfaat Inovasi
19.	Tingkat Kepuasan penggunaan inovasi daerah	-	Tidak Tersedia
20.	Sosialisasi Kebijakan	Ada Foto	Sosialisasi Inovasi
21.	Kualitas Inovasi Daerah	Ada Upload Video	Transportasi Sekolah (Darat dan Laut) Gratis

3.2.11 Sistem Informasi Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (SIP-BOS) Bintan

1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi

Sistem Informasi Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (SIP-BOS) Bintan

1.2. Tahapan Inovasi

Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah

OPD – Dinas Pendidikan

1.4. Jenis Inovasi

Digital

1.5. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

1.6. Urusan Inovasi Daerah pendidikan

1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Sistem Informasi Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (SIPBOS) adalah salah satu inovasi yang di implementasikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten. Dinas Pendidikan berharap bahwa Aplikasi SIPBOS dapat mempermudah serta mengurangi kesalahan dalam pelaporan dana BOS baik dari segi susunan laporan, perhitungan, serta pembelanjaan dana BOS yang tepat dan sesuai dengan RKAS yang telah dibuat.

Aplikasi SIPBOS sendiri merupakan sistem informasi yang didedikasikan untuk membantu sekolah dalam pembuatan pengajuan RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah), dan penyusunan realisasi pelaporan penggunaan dana BOS setiap triwulannya sehingga memudahkan BPKAD dalam mengontrol sekolah yang telah mendapatkan penyaluran dana BOS. Hal ini dilakukan tentunya dalam rangka tertib administrasi pengelolaan aset daerah, khususnya yang berhubungan dengan pengadaan barang daerah melalui dana Biaya Operasional Sekolah (BOS).

1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Tujuan inovasi ini adalah untuk membantu sekolah dalam pembuatan serta pengajuan RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah), serta penyusunan realisasi pelaporan penggunaan dana BOS setiap triwulan.

1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Manfaat yang diperoleh dari penerapan Aplikasi SIP-BOS adalah mempermudah perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan dari berbagai

program kegiatan, serta hasil yang diperoleh juga lebih efektif dan akurat sehingga terhindar dari kesalahan administrasi.

1.10. Hasil Inovasi

Hasil inovasi adalah terbantunya sekolah dalam pembuatan serta pengajuan RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah), serta penyusunan realisasi pelaporan penggunaan dana BOS setiap triwulan.

2. INDIKATOR INOVASI

Tabel 3.26
Indeks Inovasi Sistem Informasi Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (SIP-BOS) Bintang

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	Perkada	Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah dan Block Grant Sekolah Kabupaten Bintang Tahun Anggaran 2018
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	11-30 SDM	Penetapan Tim Bantuan Operasional Sekolah Reguler Kabupaten Bintang Tahun 2019
3.	Dukungan Anggaran	-	Tidak Tersedia
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja di lingkungan pemerintah daerah sudah didukung system informasi online/daring	Penggunaan Teknologi Informasi SIP-BOS
5.	Bimtek Inovasi	-	Tidak Tersedia
6.	Program Dan Kegiatan Di Renstra OPD	-	Tidak Tersedia
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi hanya berjalan 3 OPD atau lebih	Jejaring Inovasi
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	-	Tidak Tersedia
10.	Pengelola Inovasi	-	Tidak Tersedia

11.	Ketersediaan Informasi Layanan	informasi diakses melalui telp	Informasi Layanan SIP-BOS
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	terdapat "call center" layanan pengaduan pengguna	Layanan Pengaduan Aplikasi SIP- BOS
13.	Tingkat Partisipasi Stakeholder	-	Tidak Tersedia
14.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Telp	Kemudahan Informasi Layanan
15.	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	-	Tidak Tersedia
16.	Online Sistem	ada dukungan melalui web aplikasi	Sistem Online Aplikasi
17.	Kecepatan Inovasi	-	Tidak Tersedia
18.	Kemanfaatan Inovasi	hasil manfaatnya dirasakan diatas 201 orang ketas	Tidak Tersedia
19.	Tingkat Kepuasan penggunaan inovasi daerah	-	Tidak Tersedia
20.	Sosialisasi Kebijakan	Ada Foto	Sosialisasi Kebijakan
21.	Kualitas Inovasi Daerah	Ada Upload Video	SIP-BOS Kabupaten Bintan

3.2.12 Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) Online Kabupaten Bintan

1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi

Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) Online Kabupaten Bintan

1.2. Tahapan Inovasi

Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah

OPD – Dinas Pendidikan

1.4. Jenis Inovasi

Digital

1.5. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi pelayanan publik

1.6. Urusan Inovasi Daerah

pendidikan

1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) Online adalah sebuah sistem yang dirancang sebagai sumber atau pusat informasi dan pengelolaan proses seleksi penerimaan siswa baru jenjang SD dan SMP sederajat. Melalui PPDB secara online, maka, proses pendaftaran, proses seleksi sampai dengan pengumuman hasil seleksi dilakukan secara online. Kemudahan yang diberikan oleh PPDB Online Kabupaten Bintan salah satunya adalah karena PPDB Online berbasis web sehingga dapat di akses oleh orang tua calon peserta didik, maupun calon peserta didik itu sendiri dimana saja, dan kapan saja.

Melalui PPDB Online, tujuan-tujuan seperti: peningkatan mutu layanan pendidikan dapat dicapai; sistem penerimaan siswa baru yang terintegrasi, akurat, dan transparan dapat dibentuk; penerimaan siswa baru dapat dilakukan dengan lebih praktis dan efisien; tersedianya basis data sekolah yang akurat; serta dapat disediakannya fasilitas akses informasi bagi masyarakat dengan cepat, mudah, dan akurat.

1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Secara umum, tujuan PPDB Online adalah untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan. Disamping itu, tujuan lainnya adalah untuk membentuk sistem penerimaan siswa baru yang terintegrasi, akurat, dan transparan; terbentuknya sistem penerimaan siswa baru yang praktis dan efisien; serta, tersedianya fasilitas akses informasi bagi masyarakat dengan cepat, mudah, dan akurat.

1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Secara umum, manfaat PPDB Online adalah meningkatnya mutu layanan pendidikan, terutama dalam penerimaan siswa di Tahun Ajaran baru. Manfaat lainnya adalah untuk membentuk sistem penerimaan siswa baru yang terintegrasi, akurat, dan transparan; terbentuknya sistem penerimaan siswa baru yang praktis dan efisien; serta, tersedianya fasilitas akses informasi bagi masyarakat dengan cepat, mudah, dan akurat.

1.10. Hasil Inovasi

Secara umum, hasil PPDB Online adalah meningkatnya mutu layanan pendidikan, terutama terutama dalam penerimaan siswa di Tahun Ajaran baru. Hasil lainnya adalah terbentuknya sistem penerimaan siswa baru yang terintegrasi, akurat, dan transparan; terbentuknya sistem penerimaan siswa baru yang praktis dan efisien; serta, tersedianya fasilitas akses informasi bagi masyarakat dengan cepat, mudah, dan akurat.

2. INDIKATOR INOVASI

Tabel 3.27

Indeks Inovasi Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) Online Kabupaten Bintan

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	-	Tidak Tersedia
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	-	Tidak Tersedia
3.	Dukungan Anggaran	-	Tidak Tersedia
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja di lingkungan pemerintah daerah sudah didukung system informasi online/ daring	Penggunaan IT PPDB Online
5.	Bimtek Inovasi	-	Tidak Tersedia
6.	Program Dan Kegiatan Di Renstra OPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan pengembangan inovasi ke dalam Resntra dan telah dilaksanakan	Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi hanya berjalan 3 OPD atau lebih	Jejaring Inovasi
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	-	Tidak Tersedia

10.	Pengelola Inovasi	ada pengelola dan Ditetapkan dengan SK OPD	SK Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan
11.	Ketersediaan Informasi Layanan	informasi layanan dapat diakses secara online	Ketersediaan Informasi Layanan PPDB Online
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	terdapat layanan pengaduan pengguna melalui "aplikasi pengaduan"	Layanan Pengaduan PPDB Online
13.	Tingkat Partisipasi Stakeholder	inovasi dilakukan dengan melibatkan masyarakat	Tingkat Partisipasi Stakeholder
14.	Kemudahan Informasi Layanan	layanan melalui aplikasi online	Kemudahan Informasi Layanan PPDB Online
15.	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	-	Tidak Tersedia
16.	Online Sistem	ada dukungan melalui perangkat web aplikasi dan aplikasi mobile (android atau ios)	Online Sistem PPDB Online
17.	Kecepatan Inovasi	-	Tidak Tersedia
18.	Kemanfaatan Inovasi	hasil manfaatnya dirasakan diatas 201 orang ketas	Kemanfaatan Inovasi PPDB Online
19.	Tingkat Kepuasan penggunaan inovasi daerah	-	Tidak Tersedia
20.	Sosialisasi Kebijakan	Ada Foto	Sosialisasi Kebijakan
21.	Kualitas Inovasi Daerah	Ada Upload Video	PPDB Online Kabupaten Bintan

3.2.13 Sistem Aplikasi Manajemen Pendidikan (SAMPAN)

1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi

Sistem Aplikasi Manajemen Pendidikan (SAMPAN)

1.2. Tahapan Inovasi

Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah

OPD – Dinas Pendidikan

1.4. Jenis Inovasi

Digital

1.5. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi pelayanan publik

1.6. Urusan Inovasi Daerah

pendidikan

1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Pengembangan sistem aplikasi ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan akan sebuah bank data yang terintegrasi dalam bentuk platform digital yang dapat menampung serta menyediakan data administrasi manajemen pendidikan agar akses data yang terdiri dari: data guru (biodata guru), data siswa (biodata siswa), serta sarana sekolah, dapat disimpan dan diakses dengan mudah. Disamping sebagai platform bank data, Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan juga memerlukan suatu aplikasi yang dapat berfungsi sebagai platform pembelajaran secara online/elektronik untuk siswa, serta dapat dipantau oleh orang tua siswa, dan dapat di update oleh guru. Untuk itu, dikembangkanlah Sistem Aplikasi Manajemen Pendidikan, atau yang dikenal dengan nama SAMPAN.

SAMPAN adalah sistem manajemen pendidikan berbasis online yang terintegrasi dengan orang tua, siswa, guru, sekolah, dan dinas pendidikan. SAMPAN mencakup data pokok sekolah; kurikulum sekolah (jadwal pelajaran, mata pelajaran, dan lainnya); absensi sekolah; serta tugas sekolah. SAMPAN juga mencakup fasilitas e-learning yang dapat diakses oleh orang tua, siswa, maupun guru, seperti bank soal dan materi pelajaran sekolah, ujian harian secara online, Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester online, hingga try out ujian online.

1.8. Tujuan Inovasi Daerah

SAMPAN bertujuan agar tersedianya data administrasi manajemen pendidikan di Kabupaten Bintan, bagi keperluan manajemen pendidikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan untuk tingkat SD dan SMP sederajat. Disamping itu, SAMPAN juga memiliki tujuan sebagai penyedia fasilitas pembelajaran secara online/elektronik bagi siswa di Kabupaten Bintan.

1.9. Manfaat Yang Diperoleh

SAMPAN bermanfaat sebagai bank data/penyedia data guru, data siswa, dan data sarana sekolah bagi keperluan manajemen pendidikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan untuk tingkat SD dan SMP sederajat. SAMPAN juga bermanfaat sebagai penyedia fasilitas pembelajaran secara online/elektronik bagi siswa di Kabupaten Bintan.

1.10. Hasil Inovasi

Hasil dari pemanfaatan SAMPAN adalah tersedianya data guru, data siswa, serta data sarana sekolah secara akurat dan mudah diakses bagi keperluan manajemen pendidikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan pada tingkat SD dan SMP sederajat di Kabupaten Bintan. Hasil lainnya adalah siswa di Kabupaten Bintan memiliki platform pembelajaran online/elektronik yang dapat dipantau oleh orang tua siswa, serta dapat di update oleh guru sekolah.

2. INDIKATOR INOVASI

Tabel 3.28

Indeks Inovasi Sistem Aplikasi Manajemen Pendidikan (SAMPAN)

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK OPD	Tentang Pengelola Aplikasi Sistem Administrasi Manajemen Pendidikan Dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan Tahun 2019

2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	1-10 SDM	Tentang Pengelola Aplikasi Sistem Administrasi Manajemen Pendidikan Dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan Tahun 2019
3.	Dukungan Anggaran	-	Tidak Tersedia
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja di lingkungan pemerintah daerah sudah didukung system informasi online/ daring	Penggunaan IT
5.	Bimtek Inovasi	-	Tidak Tersedia
6.	Program Dan Kegiatan Di Renstra OPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan pengembangan inovasi ke dalam Resntra dan telah dilaksanakan	Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan Tahun 2016-2021
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi hanya berjalan 3 OPD atau lebih	Jejaring Inovasi
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	-	Tidak Tersedia
10.	Pengelola Inovasi	ada pengelola dan Ditetapkan dengan SK OPD	Pengelola Aplikasi Sistem Administrasi Manajemen Pendidikan Dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan Tahun 2019
11.	Ketersediaan Informasi Layanan	informasi layanan dapat diakses secara online	Ketersediaan Informasi Layanan
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	terdapat "call center" layanan pengaduan pengguna	Penyelesaian Layanan Pengaduan
13.	Tingkat Partisipasi Stakeholder	inovasi dilakukan dengan melibatkan masyarakat	Tingkat Partisipasi Stakeholder
14.	Kemudahan Informasi Layanan	layanan melalui aplikasi online	Kemudahan Informasi Layanan
15.	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	-	Tidak Tersedia

16.	Online Sistem	ada dukungan melalui perangkat web aplikasi dan aplikasi mobile (android atau ios)	Online Sistem
17.	Kecepatan Inovasi	-	Tidak Tersedia
18.	Kemanfaatan Inovasi	hasil manfaatnya dirasakan diatas 201 orang ketas	Kemanfaatan Inovasi
19.	Tingkat Kepuasan penggunaan inovasi daerah	-	Tidak Tersedia
20.	Sosialisasi Kebijakan	Ada Foto	Sosialisasi Kebijakan
21.	Kualitas Inovasi Daerah	Ada Upload Video	SAMPAN Kabupaten Bintan

3.2.14 Serving the Villager

1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi

Serving the Villager (Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil ke Desa)

1.2. Tahapan Inovasi

Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah

OPD - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1.4. Jenis Inovasi

Non Digital

1.5. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi pelayanan publik

1.6. Urusan Inovasi Daerah

administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Serving the Villager Kabupaten Bintan hadir sebagai program inovatif dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan untuk memperpendek jarak tempuh pelayanan, khususnya dalam pelayanan administrasi kependudukan, agar masyarakat dapat dilayani secara langsung di desa. Melalui program *Serving the Villager*, masyarakat Kabupaten Bintan diharapkan akan lebih mudah mendapatkan akses pelayanan serta meningkatkan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan secara lengkap di dalam rumah tangganya. Dokumen tersebut adalah biodata anggota keluarga, Kartu Tanda Penduduk-elektronik, Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, akta kematian bagi keluarga yang telah meninggal dunia, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, dan Kartu Identitas Anak (KIA).

Pelayanan administrasi kependudukan sendiri adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan di sektor lainnya.

1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Tujuan dari *Serving the Villager* adalah untuk mempercepat proses pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat di desa-desa di Kabupaten Bintan. Tujuan lainnya adalah untuk mempermudah akses pelayanan administrasi kependudukan, serta meningkatkan kepemilikan dokumen-dokumen kependudukan.

1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Manfaat dari *Serving the Villager* adalah proses pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat di desa- desa di Kabupaten Bintan lebih cepat. Manfaat lainnya adalah mempermudah akses pelayanan administrasi kependudukan, serta meningkatnya kepemilikan dokumen-dokumen kependudukan.

1.10. Hasil Inovasi

Hasil dari *Serving the Villager* adalah proses pelayanan administrasi kependudukan di desa-desa dapat dilakukan dengan cepat. Hasil lainnya adalah akses pelayanan administrasi kependudukan lebih mudah dijangkau oleh masyarakat, serta tingkat kepemilikan dokumen-dokumen kependudukan di Kabupaten Bintan dapat meningkat.

2. INDIKATOR INOVASI

Tabel 3.29
Indeks Inovasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	-	Tidak Tersedia
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	-	Tidak Tersedia
3.	Dukungan Anggaran	-	Tidak Tersedia
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja di lingkungan pemerintah daerah menggunakan perangkat elektronik	Penggunaan IT <i>Serving the Villager</i>
5.	Bimtek Inovasi	-	Tidak Tersedia
6.	Program Dan Kegiatan Di Renstra OPD	-	Tidak Tersedia
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi hanya berjalan 3 OPD atau lebih	Jejaring <i>Serving the Villager</i>
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	-	Tidak Tersedia
10.	Pengelola Inovasi	-	Tidak Tersedia
11.	Ketersediaan Informasi Layanan	informasi diakses melalui telp	Ketersediaan Informasi Layanan <i>Serving the Villager</i>
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	terdapat layanan pengaduan pengguna melalui "aplikasi pengaduan"	Penyelesaian Layanan Pengaduan <i>Serving the Villager</i>
13.	Tingkat Partisipasi Stakeholder	inovasi dilakukan dengan melibatkan masyarakat	Tingkat Partisipasi Stakeholder <i>Serving the Villager</i>
14.	Kemudahan Informasi Layanan	layanan melalui aplikasi online	Kemudahan Informasi Layanan <i>Serving the Villager</i>
15.	Kemudahan Proses Inovasi Yang	-	Tidak Tersedia

	Dihasilkan		
16.	Online Sistem	ada dukungan melalui web aplikasi	Online Sistem Serving the Villager
17.	Kecepatan Inovasi	-	Tidak Tersedia
18.	Kemanfaatan Inovasi	hasil manfaatnya dirasakan diatas 201 orang ketas	Kemanfaatan Inovasi Serving the Villager
19.	Tingkat Kepuasan penggunaan inovasi daerah	-	Tidak Tersedia
20.	Sosialisasi Kebijakan	Ada Foto	Sosialisasi Kebijakan Serving the Villager
21.	Kualitas Inovasi Daerah	Ada Upload Video	Serving the Villager Kabupaten Bintan

3.2.15 Percepatan Pelayanan Pengurusan Akta Kelahiran Anak Usia 0-60 Hari

1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi

Percepatan Pelayanan Pengurusan Akta Kelahiran Anak Usia 0-60 Hari

1.2. Tahapan Inovasi

Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah

Kepala Daerah

1.4. Jenis Inovasi

Non Digital

1.5. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi pelayanan publik

1.6. Urusan Inovasi Daerah

administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan melakukan inovasi pelayanan dalam rangka pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan dan percepatan cakupan kepemilikan akta kelahiran anak di Kabupaten Bintan.

Inovasi pelayanan ini dimulai dengan Instruksi Bupati Bintan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Peningkatan Mutu Pelayanan dan Kelahiran Anak di Kabupaten Bintan. Instruksi Bupati Bintan memberikan instruksi kepada beberapa kepala dinas khususnya kepala Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kepala Dinas Kesehatan, Lurah, serta Camat Kabupaten Bintan untuk mendukung peningkatan mutu pelayanan pembuatan akta kelahiran bagi anak usia 0-60 hari.

Disamping itu, Bupati Bintan juga membentuk kelompok kerja dengan mengeluarkan Keputusan Bupati Bintan Nomor: 491/X/2017 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Inovasi Pelayanan Akta Kelahiran bagi mendukung koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan.

1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Tujuan inovasi pelayanan ini adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan serta mempercepat pelayanan pengurusan akta kelahiran bagi anak usia 0-60 hari di Kabupaten Bintan.

1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Manfaat inovasi pelayanan ini adalah untuk meningkatkan cakupan kepemilikan akta kelahiran anak di Kabupaten Bintan. Manfaat lainnya adalah meningkatnya mutu pelayanan serta mempercepat pelayanan pengurusan akta kelahiran bagi anak usia 0-60 hari di Kabupaten Bintan.

1.10. Hasil Inovasi

Hasil inovasi pelayanan ini adalah cakupan kepemilikan akta kelahiran anak usia 0-60 hari di Kabupaten Bintan meningkat.

2. INDIKATOR INOVASI

Tabel 3.30
Indeks Inovasi Percepatan Pelayanan Pengurusan Akta Kelahiran Anak
Usia 0-60 Hari

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	Perkada	Peningkatan Mutu Pelayanan dan Percepatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Anak di Kabupaten Bintan, Pembentukan Kelompok Kerja Inovasi pelayanan Akta Kelahiran
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 31 keatas	Pembentukan Kelompok Kerja Inovasi Pelayanan Akta Kelahiran
3.	Dukungan Anggaran	-	Tidak Tersedia
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja di lingkungan pemerintah daerah dilakukan secara manual	Penggunaan IT
5.	Bimtek Inovasi	-	Tidak Tersedia
6.	Program Dan Kegiatan Di Renstra OPD	-	Tidak Tersedia
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi hanya berjalan 3 OPD atau lebih	Jejaring Inovasi
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman Teknis	Pembentukan Kelompok Kerja Inovasi Pelayanan Akta kelahiran
10.	Pengelola Inovasi	ada pengelola dan Ditetapkan dengan SK kepala daerah	Pengelola Inovasi Pelayanan
11.	Ketersediaan Informasi Layanan	informasi layanan dapat diakses secara online	Ketersediaan Informasi Layanan
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	terdapat layanan pengaduan melalui pengguna "aplikasi pengaduan"	Penyelesaian Layanan Pengaduan

13.	Tingkat Partisipasi Stakeholder	inovasi dilakukan dengan melibatkan masyarakat dan akademisi serta media massa	Tingkat Partisipasi Stakeholder
14.	Kemudahan Informasi Layanan	layanan melalui aplikasi online	Kemudahan Informasi Layanan
15.	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	-	Tidak Tersedia
16.	Online Sistem	-	Tidak Tersedia
17.	Kecepatan Inovasi	-	Tidak Tersedia
18.	Kemanfaatan Inovasi	hasil manfaatnya dirasakan diatas 201 orang ketas	Kemanfaatan Inovasi
19.	Tingkat Kepuasan penggunaan inovasi daerah	-	Tidak Tersedia
20.	Sosialisasi Kebijakan	Ada Foto	Sosialisasi Inovasi Pelayanan
21.	Kualitas Inovasi Daerah	Ada Upload Video	Inovasi Percepatan Pelayanan Pembuatan Akta Kelahiran Anak Usia 0-60 Hari

3.3 Inovasi Bentuk Lainnya sesuai bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

3.3.1 Organisasi Kelitbangan Kabupaten Bintan (ORALIT)

1. PROFIL INOVASI

1.1 Nama Inovasi

Organisasi Kelitbangan Kabupaten Bintan (Oralit)

1.2 Tahapan Inovasi

Implementasi

1.3 Inisiator Inovasi Daerah

OPD – Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah

1.4 Jenis Inovasi

Non Digital

1.5 Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

1.6 Urusan Inovasi Daerah

Penelitian dan Pengembangan

1.7 Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan daerah Kabupaten Bintan membentuk organisasi kelitbangan (ORALIT) sebagai penguatan sistem inovasi daerah dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah terutama pada penelitian dan pengembangan. Adapun kegiatan organisasi kelitbangan yang terdiri dari kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian dan evaluasi kebijakan yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain itu tujuan daripada ORALIT sebagai bentuk implementasi *Penta Helix* yang mampu mengoptimalisasi potensi-potensi yang ada di daerah dan pada saat bersamaan dengan adanya ORALIT sinergi terhadap arah Penelitian dan Pengembangan didaerah dan perwujudan Tridharma Perguruan Tinggi dapat terwujud. Keberadaan ORALIT adalah aktualisasi dari "*collaborative think tank*" antara pemerintah daerah Kabupaten Bintan bersama tenaga kelitbangan dari perguruan tinggi dalam rangka menyikapi dinamika dan permasalahan yang berkembang di daerah yang kemudian dapat memberikan stimulus rancang bangun serta budaya riset dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

1.8 Tujuan Inovasi Daerah

Adapun tujuan utama ORALIT dapat menghasilkan rekomendasi bagi penetapan kebijakan dikabupaten Bintan disamping itu juga menjembatani riset dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah untuk dapat harus saling mendukung dalam pelaksanaan program di lapangan. perkembangan daripada penelitian dan pengembangan di era globalisasi saat ini sangat dibutuhkan oleh pemerintah daerah. Pemerintah

dihadapkan dengan berbagai tantangan dan permasalahan yang semakin berat dan semakin kompleks. Olehnya itu berbagai langkah dan kebijakan akan kita tempuh yang didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tepat, cepat, dan lugas yang mampu menyelesaikan masalah. Sehingga dengan adanya ORALIT dapat memberikan alternatif solusi yang terbaik bagi masyarakat dan organisasi perangkat daerah di Kabupaten Bintan

1.9 Manfaat Yang Diperoleh

Penelitian dan Pengembangan memainkan peran penting dalam proses inovasi. Ini pada dasarnya adalah investasi

dalam teknologi dan kemampuan masa depan yang diubah menjadi produk, proses, dan layanan baru. Inovasi tidak hanya menghasilkan produk baru dan metode produksi yang lebih efisien, tetapi juga menyebabkan perubahan dramatis dalam cara bisnis diatur dan dikelola, menyoroti hubungan antara ide dan metode baru serta struktur organisasi yang diperlukan untuk menerapkannya. Dengan adanya ORALIT yang diisi oleh unsur perguruan tinggi dapat secara langsung membantu pemerintah daerah Kabupaten Bintan dalam menganalisa persoalan-persoalan dan tantangan daerah didalam penyelenggaraan urusan pemerintahan

1.10 Hasil Inovasi

Hasil inovasi daerah melalui ORALIT adalah analisa terhadap kajian-kajian yang dilakukan serta membantu penyusunan dokumen-dokumen yang didalamnya terdapat analisa yang sangat membantu pemerintah didalam proses pengambilan kebijakan.

2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.31

Indeks Inovasi Organisasi Kelitbangan Kabupaten Bintan (ORALIT)

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	Perkada	Surat Keputusan Tim Kelitbangan Kabupaten Bintan, KELITBANGAN di Lingkungan Kabupaten Bintan

2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	11-30 SDM	Organisasi Kelitbangan
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran untuk kegiatan inovasi dalam tahapan sudah dilaksanakan dan sudah di evaluasi	RKA Kelitbangan Kabupaten Bintan
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja di lingkungan pemerintah daerah sudah didukung system informasi online/ daring	Penggunaan IT
5.	Bimtek Inovasi	Pernah 1 tahun 2 Kali melakukan Bimtek	Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Kelembagaan Kelitbangan di Kabupaten Bintan
6.	Program Dan Kegiatan Di Renstra OPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan pengembangan inovasi ke dalam Resntra dan telah dilaksanakan	Renstra Bappelitbang 2016-2021
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi hanya berjalan 3 OPD atau lebih	Fasilitasi rancang bangun inovasi Bappelitbang Kabupaten Bintan - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bintan - Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Kepulauan Riau
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman Teknis dan dapat diakses secara online	Pedoman Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bintan
10.	Pengelola Inovasi	ada pengelola dan Ditetapkan dengan SK kepala daerah	SK Bupati Organisasi Kelitbangan
11.	Ketersediaan Informasi Layanan	informasi layanan dapat diakses secara online	Informasi Layanan
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	terdapat layanan pengaduan pengguna melalui "media sosial"	Media Sosial yang dapat diakses oleh semua kalangan dari hasil inovasi ORALIT Kabupaten Bintan
13.	Tingkat Partisipasi Stakeholder	inovasi dilakukan dengan melibatkan masyarakat dan akademisi	Partisipasi Stakeholder dalam Kelitbangan

14.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Email/Media Sosial	Akses informasi layanan melalui Media Sosial
15.	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	-	Tidak Tersedia
16.	Online Sistem	ada dukungan melalui informasi website atau sosial media	Dukungan Informasi ORALIT melalui Website Bappelitbang Bintan
17.	Kecepatan Inovasi	-	Tidak Tersedia
18.	Kemanfaatan Inovasi	hasil manfaatnya dirasakan diatas 201 orang ketas	Dokumentasi kemanfaatan ORALIT di Kabupaten Bintan
19.	Tingkat Kepuasan penggunaan inovasi daerah	-	Tidak Tersedia
20.	Sosialisasi Kebijakan	Ada Foto	Fasilitasi rancang bangun inovasi Bappelitbang Kabupaten Bintan - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bintan - Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Kepulauan Riau
21.	Kualitas Inovasi Daerah	Ada Upload Video	Organisasi Kelitbangan

3.3.2 Bank Sampah

1. PROFIL INOVASI

1.1 Nama Inovasi

Bank Sampah

1.2 Tahapan Inovasi

Implementasi

1.3 Inisiator Inovasi Daerah

OPD – Dinas Lingkungan Hidup

1.4 Jenis Inovasi

Non Digital

1.5 Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

1.6 Urusan Inovasi Daerah

Lingkungan Hidup, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

1.7 Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Permasalahan sampah dari waktu ke waktu semakin kompleks namun pengelolaannya masih belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan. Menurut Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, diperlukan perubahan cara pandang masyarakat mengenai sampah dan cara memperlakukan atau mengelola sampah. Dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, maka praktek mengolah dan memanfaatkan sampah harus menjadi langkah nyata dalam mengelola sampah. Hal ini bertujuan untuk mengejar target pengurangan sampah sebesar 30% dan target penanganan sampah sebesar 70% sehingga tahun 2025 Indonesia zero sampah.

Dengan demikian, masyarakat harus meninggalkan cara lama yang hanya membuang sampah dengan mendidik dan membiasakan masyarakat memilah, memilih dan menghargai sampah sekaligus mengembangkan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan bank sampah. Hal ini khususnya dalam pengelolaan sampah rumah tangga berbasis komunitas dikarenakan sumber sampah domestik perlu dikelola secara mandiri. Bank Sampah merupakan salah satu solusi pengelolaan sampah yang efektif dan sebuah kreasi inovatif yang dilakukan dengan melibatkan masyarakat dalam memanfaatkan nilai ekonomi yang terkandung dalam sampah dengan menggunakan

pendekatan metode 3R (Reduce, Reuse and Recycle).

Adaptasi bank sampah pada setiap komunitas sangat ditentukan partisipasi warga yang juga akan menentukan keberlanjutan program bank sampah sehingga pengelolaan berbasis komunitas menjadi perlu diperhatikan.

Pengembangan bank sampah juga akan membantu pemerintah Kabupaten Bintan dalam pemberdayaan masyarakat untuk mengelola sampah berbasis komunitas secara bijak dan dapat mengurangi sampah yang diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Inovasi pengolahan sampah dengan program bank sampah menjadi inovasi di tingkat akar rumput yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan akan menjadikan lingkungan Kabupaten Bintan menjadi lebih sehat..

1.8 Tujuan Inovasi Daerah

Adapun tujuan dibentuknya Bank Sampah sebagai berikut :

1. Untuk memberdayakan masyarakat dalam mengelola sampah sehingga dapat membangun budaya memilah sampah dengan metode 3R (Reduce, Reuse and Recycle).
2. Untuk membantu menangani dan mendukung pengelolaan sampah secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir mulai dari sumbernya yaitu skala rumah tangga.
3. Untuk menyadarkan masyarakat pentingnya memiliki lingkungan yang sehat, rapi, dan bersih.
4. Untuk mengubah sampah menjadi sesuatu yang lebih berguna dalam masyarakat, misalnya untuk kerajinan dan pupuk yang memiliki nilai ekonomis.

1.9 Manfaat Yang Diperoleh

Adapun manfaat keberadaan Bank Sampah di Kabupaten Bintan sebagai berikut :

1. Manfaat bagi manusia dan lingkungan hidup, seperti membuat lingkungan lebih bersih, menyadarkan masyarakat

akan pentingnya kebersihan, dan membuat sampah menjadi barang ekonomis.

- Manfaat bank sampah untuk masyarakat adalah dapat menambah penghasilan masyarakat karena saat mereka menukarkan sampah mereka akan mendapatkan imbalan berupa uang yang dikumpulkan dalam rekening yang mereka miliki.

1.10 Hasil Inovasi

Terbentuk dan tersedianya Bank Sampah sebagai wadah untuk mengelola sampah di Kabupaten Bintan.

2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.32
Indeks Inovasi Bank Sampah

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK OPD	Pengelolaan Bank Sampah
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 31 keatas	Pengelola Bank Sampah
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran untuk kegiatan inovasi dalam tahapan sudah dilaksanakan dan sudah di evaluasi	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja di lingkungan pemerintah daerah dilakukan secara manual	dokumentasi teknologi secara manual
5.	Bimtek Inovasi	Pernah 2 tahun 4 Kali melakukan Bimtek	Dokumentasi Bimtek
6.	Program Dan Kegiatan Di Renstra OPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan pengembangan inovasi ke dalam Resntra dan telah dilaksanakan	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi hanya berjalan 3 OPD atau lebih	Dokumentasi Jejaring Inovasi
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia

9.	Pedoman Teknis	-	Tidak Tersedia
10.	Pengelola Inovasi	ada pengelola dan Ditetapkan dengan SK OPD	SK pengelola
11.	Ketersediaan Informasi Layanan	informasi diakses melalui telp	WA Group Bank Sampah
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	terdapat layanan pengaduan pengguna melalui "media sosial"	WA Group Bank Sampah
13.	Tingkat Partisipasi Stakeholder	inovasi dilakukan dengan melibatkan masyarakat dan akademisi	dokumentasi Partisipasi masyarakat
14.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Email/Media Sosial	media layanan informasi melalui WA Group Bank Sampah
15.	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	Hasil inovasi dapat dilakukan dalam waktu hitungan 1-2 hari	dokumentasi kemudahan proses inovasi
16.	Online Sistem	ada dukungan melalui informasi website atau sosial media	WA Group Bank Sampah
17.	Kecepatan Inovasi	Proses inovasi dapat dilakukan dalam waktu hitungan 1-2 bulan	dokumentasi akses inovasi daerah dalam satuan waktu
18.	Kemanfaatan Inovasi	hasil manfaatnya dirasakan diatas 201 orang kemas	Dokumentasi penerima manfaat
19.	Tingkat Kepuasan penggunaan inovasi daerah	-	Tidak Tersedia
20.	Sosialisasi Kebijakan	Ada Foto	Dokumentasi Sosialisasi Kebijakan
21.	Kualitas Inovasi Daerah	Ada Upload Video	Bank Sampah

3.3.3 Air Mancur Tasek Buah Gemilang

1. PROFIL INOVASI

1.1 Nama Inovasi

Air Mancur Tasek Buah Gemilang

1.2 Tahapan Inovasi

Implementasi

1.3 Inisiator Inovasi Daerah

OPD – Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

1.4 Jenis Inovasi

Non Digital

1.5 Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

1.6 Urusan Inovasi Daerah

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Pariwisata.

1.7 Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Pariwisata di Kabupaten Bintan berkonsentrasi di wilayah Kecamatan Guning Kijang (trikora), Kecamatan Teluk Sebong (lagoi) dan Bintan Utara (pantai Sakera). Dengan adanya Air mancur di Bintan Timur, menambah objek wisata yang dapat di nikmati masyarakat.. Kolam Bekas Galian antam sudah ada sejak lama, namun belum termanfaatkan secara maksimal, dengan adanya Air Mancur Tuah Tasek Gemilang, potensi yang yang dapat di kembangkan di sekitar kolam serta meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar.

1.8 Tujuan Inovasi Daerah

Menciptakan objek wisata baru di kecamatan Bintan Timur serta meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar.

1.9 Manfaat Yang Diperoleh

Manfaat inovasi adalah mengelola lokasi bekas galian tambang Bouksit yang membentuk telaga (danau) sebagai lokasi wisata bagi wisatawan.

1.10 Hasil Inovasi

Hasil inovasi adalah terciptanya tempat wisata baru dan meningkatnya

perekonomian.

2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.33
Indeks Inovasi Air Mancur Tasek Buah Gemilang

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	-	Tidak Tersedia
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	11-30 SDM	Penetapan Tenaga Kerja Harian/Petugas Taman Dan Ruang Terbuka Hijau di Lingkungan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bintan
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran untuk kegiatan inovasi dalam tahapan sudah dilaksanakan dan sudah di evaluasi	Pembangunan dan Pengelolaan Taman dan Ruang Terbuka Hijau
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja di lingkungan pemerintah daerah dilakukan secara manual	dokumentasi teknologi secara manual
5.	Bimtek Inovasi	Pernah 1 tahun 2 Kali melakukan Bimtek	Dokumentasi Bimtek
6.	Program Dan Kegiatan Di Renstra OPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan pengembangan inovasi ke dalam Resntra dan telah dilaksanakan	Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kabupaten Bintan Tahun 2016-2020
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi hanya berjalan 3 OPD atau lebih	Dokumentasi Jejaring Inovasi
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	-	Tidak Tersedia
10.	Pengelola Inovasi	ada pengelola dan Ditetapkan dengan SK OPD	PENETAPAN TENAGA KERJA HARIAN/PETUGAS TAMAN DAN RUANG TERBUKA HIJAU DILINGKUNGAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BINTAN

11.	Ketersediaan Informasi Layanan	-	Tidak Tersedia
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	-	Tidak Tersedia
13.	Tingkat Partisipasi Stakeholder	inovasi dilakukan dengan melibatkan masyarakat dan akademisi serta media massa	dokumentasi Partisipasi stakeholder
14.	Kemudahan Informasi Layanan	-	Tidak Tersedia
15.	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	-	Tidak Tersedia
16.	Online Sistem	-	Tidak Tersedia
17.	Kecepatan Inovasi	-	Tidak Tersedia
18.	Kemanfaatan Inovasi	hasil manfaatnya dirasakan diatas 201 orang ketas	dokumentasi penerima Manfaat inovasi (Masyarakat Kabupaten Bintan dan Sekitarnya)
19.	Tingkat Kepuasan penggunaan inovasi daerah	-	Tidak Tersedia
20.	Sosialisasi Kebijakan	Ada Foto	dokumentasi Air Mancur Tasek Tuah Gemilang
21.	Kualitas Inovasi Daerah	Ada Upload Video	Air Mancur Tasek Tuah Gemilang

3.3.4 Pelatihan Manajemen Homestay / Pondok Wisata

1. PROFIL INOVASI

1.1 Nama Inovasi

Pelatihan Manajemen Homestay / Pondok Wisata

1.2 Tahapan Inovasi

Implementasi

1.3 Inisiator Inovasi Daerah

OPD – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

1.4 Jenis Inovasi

Non Digital

1.5 Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

1.6 Urusan Inovasi Daerah

Pariwisata, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pendidikan dan Pelatihan

1.7 Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Pariwisata pada awalnya lebih dipandang sebagai kegiatan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi semata. Padahal, jika dipahami dari sudut pandang yang lebih luas, pariwisata adalah fenomena perjalanan manusia baik secara individual maupun kolektif, dengan berbagai macam motivasi dan tujuan yang melibatkan berbagai macam keperluan. Oleh karena itu, belakangan ini aspek nilai dan etika mulai diperhatikan dalam pembangunan pariwisata. Di kalangan para ahli pembangunan mulai muncul wacana bahwa pembangunan sesungguhnya adalah untuk manusia sehingga manusia merupakan pusat dan penggerak, sekaligus untuk siapa pembangunan tersebut dilakukan.

Dalam era globalisasi dan teknologi informasi seperti sekarang ini, SDM dituntut untuk lebih memiliki kompetensi dalam berbagai aspek terutama pada dunia industri pariwisata, walaupun diyakini bahwa dari aspek sumber daya alam dan budaya, Kabupaten Bintan memiliki keunggulan komperatif sebagai tempat tujuan wisata, karena mempunyai alam dan pantai serta pasir putih yang indah sebagai anugerah dari Allah SWT serta peradaban Kebudayaan Melayu yang termasyur dikawasan perbatasan negara tetangga seperti Malaysia, Singapura dan negara jiran lainnya. Keunggulan aspek alam dan budaya yang dimiliki merupakan daya tarik tersendiri bagi wisatawan

Walaupun demikian, pengalaman membuktikan bahwa industri pariwisata Kabupaten Bintan masih kurang dalam kemampuan untuk mengemas dan melayani wisatawan. Kata Kunci utamanya adalah pada kesiapan sumber daya manusia (SDM) industri pariwisata. Sebagaimana disyaratkan dalam UU nomor 9 tahun 2010 tentang kepariwisataan, sertifikasi kompetensi

dan serifikasi usaha pariwisata menjadi suatu keharusan, karena pariwisata adalah bisnis pelayanan (hospitality industry) sehingga kompetensi merupakan hal mutlak/mendasar yang harus diperhatikan.

Selanjutnya dalam membangun industri pariwisata juga perlu dilakukan upaya kemitraan kelembagaan pariwisata. Hal ini sangat penting dalam mendorong kemampuan potensi pariwisata yang akan dikembangkan sebagai daya tariknya. Tentu upaya ini harus dapat melibatkan para pemangku kepentingan (stakeholder) sebagai pemain utama (Key Players) dalam pengembangan pariwisata dapat dilakukan melalui program kemitraan baik usaha pariwisata maupun kelembagaan pariwisata. Perencanaan, pengelolaan destinasi dan daya tarik wisata serta pengembangan industri hospitality adalah aspek yang membutuhkan pemikiran, pengetahuan dan peranserta dari masyarakat dalam mendukung kepariwisataan di daerah.

Tentu diskusi atau dialog serta kesepakatan bersama stakeholder dalam merencanakan dan mengembangkan pariwisata menjadi kekuatan utama kemitraan. Kemitraan dapat dilakukan antara suatu institusi atau perusahaan dengan institusi lainnya melalui pendekatan formal dan informal. Maka dari itu dalam meningkatkan pengembangan pariwisata di Kabupaten Bintan, sesuai dengan visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Bintan yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Bintan. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pariwisata Kabupaten Bintan memprogramkan kegiatan “Pelatihan Manajemen Homestay / Pondok Wisata”. Kegiatan ini berupa pelatihan pengembangan sumberdaya manusia dan kemitraan usaha masyarakat di destinasi pariwisata Kabupaten Bintan “.

1.8 Tujuan Inovasi Daerah

Adapun tujuan kegiatan pengembangan sumberdaya manusia dan profesionalisme di bidang pariwisata Kabupaten Bintan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengetahuan dan kompetensi sumber daya manusia di bidang pariwisata;
2. Meningkatkan pengetahuan dan kapasitas pengembangan kemitraan

usaha pariwisata melalui kelembagaan pariwisata dan peran serta masyarakat;

3. Memahami dan mendukung arah kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan dalam pengembangan kepariwisataan daerah.

1.9 Manfaat Yang Diperoleh

Masyarakat dapat menerapkan materi atau mengaplikasikan ilmu yang telah didapat untuk meningkatkan kualitas pelayanan di bidang pariwisata.

1.10 Hasil Inovasi

Terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) Industri Pariwisata yang berdaya saing tinggi untuk meningkatkan kualitas kepariwisataan di Kabupaten Bintan.

2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.34
Indeks Inovasi Pelatihan Manajemen Homestay / Pondok Wisata

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK OPD	Penunjukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pelatihan Manajemen Homestay Pondok Wisata Tahun 2019
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	11-30 SDM	Penunjukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pelatihan Manajemen Homestay Pondok Wisata Tahun 2019
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran untuk kegiatan inovasi dalam tahapan sudah dilaksanakan dan sudah di evaluasi	Pelatihan Manajemen Homestay/ Pondok Wisata/Rumah Wisata (DAK Non Fisik)
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja di lingkungan pemerintah daerah dilakukan secara manual	dokumentasi penggunaan teknologi secara manual
5.	Bimtek Inovasi	Pernah 1 tahun 2 Kali melakukan Bimtek	Dokumentasi Bimtek Pelatihan Manajemen Homestay / Pondok Wisata

6.	Program Dan Kegiatan Di Renstra OPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan pengembangan inovasi ke dalam Resntra dan telah dilaksanakan	Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi hanya berjalan 3 OPD atau lebih	Dokumentasi Jejaring Inovasi
8.	Replikasi	Pernah 1 Kali di replikasi di daerah lain	Pemerintah Kabupaten Siak Adopsi Inovasi Kabupaten Bintan
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman Teknis	Materi Pelatihan Manajemen Homestay / Pondok Wisata
10.	Pengelola Inovasi	ada pengelola dan Ditetapkan dengan SK OPD	Penunjukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pelatihan Manajemen Homestay Pondok Wisata
11.	Ketersediaan Informasi Layanan	informasi diakses melalui telp	WA Group Forum Layanan Pelatihan
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	terdapat layanan pengaduan pengguna melalui "media sosial"	WA Group Forum Layanan Pelatihan
13.	Tingkat Partisipasi Stakeholder	inovasi dilakukan dengan melibatkan masyarakat dan akademisi serta media massa	dokumentasi Partisipasi stakeholder
14.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Email/Media Sosial	media layanan informasi melalui WA Group Forum Layanan Pelatihan
15.	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihadirkan	Hasil inovasi dapat dilakukan dalam waktu hitungan 1-2 hari	dokumentasi kemudahan proses inovasi
16.	Online Sistem	ada dukungan melalui informasi website atau sosial media	WA Group Forum Layanan Pelatihan
17.	Kecepatan Inovasi	Proses inovasi dapat dilakukan dalam waktu hitungan 1-2 bulan	Dokumentasi akses inovasi daerah dalam satuan waktu
18.	Kemanfaatan Inovasi	hasil manfaatnya dirasakan 1-100 orang	Dokumentasi Peserta Penerima Manfaat Pelatihan Manajemen Homestay / Pondok

			Wisata
19.	Tingkat Kepuasan penggunaan inovasi daerah	-	Tidak Tersedia
20.	Sosialisasi Kebijakan	Ada Foto	Dokumentasi Sosialisasi Kebijakan pada saat pelatihan
21.	Kualitas Inovasi Daerah	Ada Upload Video	Pelatihan Manajemen Homestay / Pondok Wisata

3.3.5 Pelatihan Pemandu Wisata Alam / Trekking

1. PROFIL INOVASI

1.1 Nama Inovasi

Pelatihan Pemandu Wisata Alam/Trekking

1.2 Tahapan Inovasi

Implementasi

1.3 Inisiator Inovasi Daerah

OPD – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

1.4 Jenis Inovasi

Non Digital

1.5 Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

1.6 Urusan Inovasi Daerah

Pariwisata, pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pendidikan dan Pelatihan

1.7 Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Pariwisata pada awalnya lebih dipandang sebagai kegiatan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi semata. Padahal, jika dipahami dari sudut pandang yang lebih luas, pariwisata adalah fenomena perjalanan manusia baik secara individual maupun kolektif, dengan berbagai macam

motivasi dan tujuan yang melibatkan berbagai macam keperluan. Oleh karena itu, belakangan ini aspek nilai dan etika mulai diperhatikan dalam pembangunan pariwisata. Di kalangan para ahli pembangunan mulai muncul wacana bahwa pembangunan sesungguhnya adalah untuk manusia sehingga manusia merupakan pusat dan penggerak, sekaligus untuk siapa pembangunan tersebut dilakukan.

Dalam era globalisasi dan teknologi informasi seperti sekarang ini, SDM dituntut untuk lebih memiliki kompetensi dalam berbagai aspek terutama pada dunia industri pariwisata, walaupun diyakini bahwa dari aspek sumber daya alam dan budaya, Kabupaten Bintan memiliki keunggulan komperatif sebagai tempat tujuan wisata, karena mempunyai alam dan pantai serta pasir putih yang indah sebagai anugerah dari Allah SWT serta peradaban Kebudayaan Melayu yang termasyur dikawasan perbatasan negara tetangga seperti Malaysia, Singapura dan negara jiran lainnya. Keunggulan aspek alam dan budaya yang dimiliki merupakan daya tarik tersendiri bagi wisatawan

Walaupun demikian, pengalaman membuktikan bahwa industri pariwisata Kabupaten Bintan masih kurang dalam kemampuan untuk mengemas dan melayani wisatawan. Kata Kunci utamanya adalah pada kesiapan sumber daya manusia (SDM) industri pariwisata. Sebagaimana disyaratkan dalam UU nomor 9 tahun 2010 tentang kepariwisataan, sertifikasi kompetensi dan serifikasi usaha pariwisata menjadi suatu keharusan, karena pariwisata adalah bisnis pelayanan (hospitality industry) sehingga kompetensi merupakan hal mutlak/mendasar yang harus diperhatikan.

Selanjutnya dalam membangun industri pariwisata juga perlu dilakukan upaya kemitraan kelembagaan pariwisata. Hal ini sangat penting dalam mendorong kemampuan potensi pariwisata yang akan dikembangkan sebagai daya tariknya. Tentu upaya ini harus dapat melibatkan para pemangku kepentingan (stakeholder) sebagai pemain utama (Key Players) dalam pengembangan pariwisata dapat dilakukan melalui program kemitraan baik usaha pariwisata maupun kelembagaan pariwisata. Perencanaan, pengelolaan destinasi dan daya tarik wisata serta pengembangan industri hospitality adalah aspek yang membutuhkan

pemikiran, pengetahuan dan peranserta dari masyarakat dalam mendukung kepariwisataan di daerah.

Tentu diskusi atau dialog serta kesepakatan bersama stakeholder dalam merencanakan dan mengembangkan pariwisata menjadi kekuatan utama kemitraan. Kemitraan dapat dilakukan antara suatu institusi atau perusahaan dengan institusi lainnya melalui pendekatan formal dan informal. Maka dari itu dalam meningkatkan pengembangan pariwisata di Kabupaten Bintan, sesuai dengan visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Bintan yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Bintan. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pariwisata Kabupaten Bintan memprogramkan kegiatan “Pelatihan Pemandu Wisata Alam/Trekking”. Kegiatan ini berupa pelatihan pengembangan sumberdaya manusia dan kemitraan usaha masyarakat di destinasi pariwisata Kabupaten Bintan.

1.8 Tujuan Inovasi Daerah

Adapun tujuan kegiatan pengembangan sumberdaya manusia dan profesionalisme di bidang pariwisata Kabupaten Bintan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengetahuan dan kompetensi sumber daya manusia di bidang pariwisata;
2. Meningkatkan pengetahuan dan kapasitas pengembangan kemitraan usaha pariwisata melalui kelembagaan pariwisata dan peran serta masyarakat;
3. Memahami dan mendukung arah kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan dalam pengembangan kepariwisataan daerah.

1.9 Manfaat Yang Diperoleh

Masyarakat dapat menerapkan materi atau mengaplikasikan ilmu yang telah didapat untuk meningkatkan kualitas pelayanan di bidang pariwisata.

1.10 Hasil Inovasi

Terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) Industri Pariwisata yang berdaya saing tinggi untuk meningkatkan kualitas kepariwisataan di

Kabupaten Bintan.

2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.35

Indeks Inovasi Pelatihan Pemandu Wisata Alam / Trekking

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK OPD	Penunjukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pelatihan Pemandu Wisata Alam / Trekking Tahun 2019
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	11-30 SDM	Penunjukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pelatihan Pemandu Wisata Alam / Trekking Tahun 2019
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran untuk kegiatan inovasi dalam tahapan sudah dilaksanakan dan sudah di evaluasi	Pelatihan Pemandu Wisata Alam / Trekking (DAK Non Fisik)
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja di lingkungan pemerintah daerah dilakukan secara manual	dokumentasi teknologi secara manual
5.	Bimtek Inovasi	Pernah 1 tahun 2 Kali melakukan Bimtek	Dokumentasi Bimtek
6.	Program Dan Kegiatan Di Renstra OPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan pengembangan inovasi ke dalam Resntra dan telah dilaksanakan	Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Bintan Tahun 2016-2021
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi hanya berjalan 3 OPD atau lebih	Dokumentasi Jejaring Inovasi
8.	Replikasi	Pernah 1 Kali di replikasi di daerah lain	Pemerintah Kabupaten Siak Adopsi Inovasi Kabupaten Bintan
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman Teknis	Materi Mountain Trekking Training Program
10.	Pengelola Inovasi	ada pengelola dan Ditetapkan dengan SK OPD	Penunjukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pelatihan Pemandu Wisata Alam / Trekking Tahun 2019

11.	Ketersediaan Informasi Layanan	informasi diakses melalui telp	screenshot wa group Forum Layanan Pelatihan
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	terdapat layanan pengaduan pengguna melalui "media sosial"	screenshot wa group Forum Layanan Pelatihan
13.	Tingkat Partisipasi Stakeholder	inovasi dilakukan dengan melibatkan masyarakat dan akademisi serta media massa	partisipasi stakeholder
14.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Email/Media Sosial	screenshot wa group Forum Layanan Pelatihan
15.	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	Hasil inovasi dapat dilakukan dalam waktu hitungan 1-2 hari	dokumentasi kemudahan proses inovasi
16.	Online Sistem	ada dukungan melalui informasi website atau sosial media	screenshot wa group Forum Layanan Pelatihan
17.	Kecepatan Inovasi	Proses inovasi dapat dilakukan dalam waktu hitungan 1-2 bulan	bukti akses inovasi daerah dalam satuan waktu
18.	Kemanfaatan Inovasi	hasil manfaatnya dirasakan 1-100 orang	Dokumentasi penerima manfaat pelatihan pemandu wisata Alam / Trekking
19.	Tingkat Kepuasan penggunaan inovasi daerah	-	Tidak Tersedia
20.	Sosialisasi Kebijakan	Ada Foto	Dokumentasi Sosialisasi Kebijakan pada saat pelatihan
21.	Kualitas Inovasi Daerah	Ada Upload Video	Pemandu Wisata Alam / Trekking

3.3.6 Pelatihan Pemandu Wisata Budaya Kuliner

1. PROFIL INOVASI

1.1 Nama Inovasi

Pelatihan Pemandu Wisata Budaya Kuliner

1.2 Tahapan Inovasi

Implementasi

1.3 Inisiator Inovasi Daerah

OPD – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

1.4 Jenis Inovasi

Non Digital

1.5 Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

1.6 Urusan Inovasi Daerah

Pariwisata, pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pendidikan dan Pelatihan

1.7 Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Pariwisata pada awalnya lebih dipandang sebagai kegiatan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi semata. Padahal, jika dipahami dari sudut pandang yang lebih luas, pariwisata adalah fenomena perjalanan manusia baik secara individual maupun kolektif, dengan berbagai macam motivasi dan tujuan yang melibatkan berbagai macam keperluan. Oleh karena itu, belakangan ini aspek nilai dan etika mulai diperhatikan dalam pembangunan pariwisata. Di kalangan para ahli pembangunan mulai muncul wacana bahwa pembangunan sesungguhnya adalah untuk manusia sehingga manusia merupakan pusat dan penggerak, sekaligus untuk siapa pembangunan tersebut dilakukan.

Dalam era globalisasi dan teknologi informasi seperti sekarang ini, SDM dituntut untuk lebih memiliki kompetensi dalam berbagai aspek terutama pada dunia industri pariwisata, walaupun diyakini bahwa dari aspek sumber daya alam dan budaya, Kabupaten Bintan memiliki keunggulan komperatif sebagai tempat tujuan wisata, karena mempunyai alam dan pantai serta pasir putih yang indah sebagai anugerah dari Allah SWT serta peradaban Kebudayaan Melayu yang termasyur dikawasan perbatasan negara tetangga seperti Malaysia, Singapura dan negara jiran lainnya. Keunggulan aspek alam dan budaya yang dimiliki merupakan daya tarik

tersendiri bagi wisatawan.

Walaupun demikian, pengalaman membuktikan bahwa industri pariwisata Kabupaten Bintan masih kurang dalam kemampuan untuk mengemas dan melayani wisatawan. Kata Kunci utamanya adalah pada kesiapan sumber daya manusia (SDM) industri pariwisata. Sebagaimana disyaratkan dalam UU nomor 9 tahun 2010 tentang kepariwisataan, sertifikasi kompetensi dan serifikasi usaha pariwisata menjadi suatu keharusan, karena pariwisata adalah bisnis pelayanan (*hospitality industry*) sehingga kompetensi merupakan hal mutlak/mendasar yang harus diperhatikan.

Selanjutnya dalam membangun industri pariwisata juga perlu dilakukan upaya kemitraan kelembagaan pariwisata. Hal ini sangat penting dalam mendorong kemampuan potensi pariwisata yang akan dikembangkan sebagai daya tariknya. Tentu upaya ini harus dapat melibatkan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) sebagai pemain utama (*Key Players*) dalam pengembangan pariwisata dapat dilakukan melalui program kemitraan baik usaha pariwisata maupun kelembagaan pariwisata. Perencanaan, pengelolaan destinasi dan daya tarik wisata serta pengembangan industri *hospitality* adalah aspek yang membutuhkan pemikiran, pengetahuan dan peranserta dari masyarakat dalam mendukung kepariwisataan di daerah.

Tentu diskusi atau dialog serta kesepakatan bersama *stakeholder* dalam merencanakan dan mengembangkan pariwisata menjadi kekuatan utama kemitraan. Kemitraan dapat dilakukan antara suatu institusi atau perusahaan dengan institusi lainnya melalui pendekatan formal dan informal. Maka dari itu dalam meningkatkan pengembangan pariwisata di Kabupaten Bintan, sesuai dengan visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Bintan yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Bintan. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pariwisata Kabupaten Bintan memprogramkan kegiatan “Pelatihan Pemandu Wisata Budaya Kuliner”. Kegiatan ini berupa pelatihan pengembangan sumberdaya manusia dan kemitraan usaha masyarakat di destinasi pariwisata Kabupaten Bintan.

1.8 Tujuan Inovasi Daerah

Adapun tujuan kegiatan pengembangan sumberdaya manusia dan profesionalisme di bidang pariwisata Kabupaten Bintan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengetahuan dan kompetensi sumber daya manusia di bidang pariwisata;
2. Meningkatkan pengetahuan dan kapasitas pengembangan kemitraan usaha pariwisata melalui kelembagaan pariwisata dan peran serta masyarakat;
3. Memahami dan mendukung arah kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan dalam pengembangan kepariwisataan daerah.

1.9 Manfaat Yang Diperoleh

Masyarakat dapat menerapkan materi atau mengaplikasikan ilmu yang telah didapat untuk meningkatkan kualitas pelayanan di bidang pariwisata.

1.10 Hasil Inovasi

Terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) Industri Pariwisata yang berdaya saing tinggi untuk meningkatkan kualitas kepariwisataan di Kabupaten Bintan.

2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.36
Indeks Inovasi Pelatihan Pemandu Wisata Budaya Kuliner

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK OPD	Penunjukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pelatihan Pemandu Wisata Budaya Kuliner Tahun 2019
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	11-30 SDM	Penunjukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pelatihan Pemandu Wisata Budaya Kuliner Tahun 2019
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran untuk kegiatan inovasi dalam tahapan sudah dilaksanakan dan sudah di evaluasi	Pelatihan Pemandu Wisata Budaya Kuliner

4.	Penggunaan IT		Pelaksanaan kerja di lingkungan pemerintah daerah dilakukan secara manual	dokumentasi teknologi secara manual
5.	Bimtek Inovasi		Pernah 1 tahun 2 Kali melakukan Bimtek	Dokumentasi Bimtek
6.	Program Dan Kegiatan Di Renstra OPD		Pemerintah daerah sudah menuangkan pengembangan inovasi ke dalam Resntra dan telah dilaksanakan	Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
7.	Jejaring Inovasi		Inovasi hanya berjalan 1 OPD	Dokumentasi Jejaring Inovasi
8.	Replikasi		Pernah 1 Kali di replikasi di daerah lain	Pemerintah Kabupaten Siak Adopsi Inovasi Kabupaten Bintan
9.	Pedoman Teknis		Telah terdapat Pedoman Teknis	pelatihan pemandu wisata budaya kuliner
10.	Pengelola Inovasi		ada pengelola dan Ditetapkan dengan SK OPD	Penunjukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pelatihan Pemandu Wisata Budaya Kuliner Tahun 2019
11.	Ketersediaan Layanan	Informasi	informasi diakses melalui telp	screenshot Group WA Forum layanan pelatihan
12.	Penyelesaian Pengaduan	Layanan	terdapat layanan pengaduan pengguna melalui "media sosial"	WA Group Forum Layanan Pelatihan
13.	Tingkat Stakeholder	Partisipasi	inovasi dilakukan dengan melibatkan masyarakat dan akademisi serta media massa	dokumentasi Partisipasi stakeholder
14.	Kemudahan Layanan	Informasi	Layanan Email/Media Sosial	media layanan informasi melalui WA Group Forum Layanan Pelatihan
15.	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan		Hasil inovasi dapat dilakukan dalam waktu hitungan 1-2 hari	dokumentasi kemudahan proses inovasi
16.	Online Sistem		ada dukungan melalui informasi website atau sosial media	screenshot Group WA Forum layanan pelatihan
17.	Kecepatan Inovasi		Proses inovasi dapat dilakukan dalam waktu hitungan 1-2 bulan	dokumentasi akses inovasi daerah dalam satuan waktu

18.	Kemanfaatan Inovasi	hasil manfaatnya dirasakan 1-100 orang	Dokumentasi penerima manfaat
19.	Tingkat Kepuasan penggunaan inovasi daerah	-	Tidak Tersedia
20.	Sosialisasi Kebijakan	Ada Foto	Dokumentasi Sosialisasi Kebijakan pada saat pelatihan
21.	Kualitas Inovasi Daerah	Ada Upload Video	Pelatihan Pemandu Wisata Budaya Kuliner

3.3.7 Pelatihan Pemandu Wisata Budaya Pedesaan

1. PROFIL INOVASI

1.1 Nama Inovasi

Pelatihan Pemandu Wisata Budaya Pedesaan

1.2 Tahapan Inovasi

Implementasi

1.3 Inisiator Inovasi Daerah

OPD – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

1.4 Jenis Inovasi

Non Digital

1.5 Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

1.6 Urusan Inovasi Daerah

Pariwisata, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pendidikan dan Pelatihan

1.7 Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Pariwisata pada awalnya lebih dipandang sebagai kegiatan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi semata. Padahal, jika dipahami dari sudut pandang yang lebih luas, pariwisata adalah fenomena perjalanan manusia baik secara individual maupun kolektif, dengan berbagai macam motivasi dan tujuan yang melibatkan berbagai macam keperluan. Oleh

karena itu, belakangan ini aspek nilai dan etika mulai diperhatikan dalam pembangunan pariwisata. Di kalangan para ahli pembangunan mulai muncul wacana bahwa pembangunan sesungguhnya adalah untuk manusia sehingga manusia merupakan pusat dan penggerak, sekaligus untuk siapa pembangunan tersebut dilakukan.

Dalam era globalisasi dan teknologi informasi seperti sekarang ini, SDM dituntut untuk lebih memiliki kompetensi dalam berbagai aspek terutama pada dunia industri pariwisata, walaupun diyakini bahwa dari aspek sumber daya alam dan budaya, Kabupaten Bintan memiliki keunggulan komperatif sebagai tempat tujuan wisata, karena mempunyai alam dan pantai serta pasir putih yang indah sebagai anugerah dari Allah SWT serta peradaban Kebudayaan Melayu yang termasyur dikawasan perbatasan negara tetangga seperti Malaysia, Singapura dan negara jiran lainnya. Keunggulan aspek alam dan budaya yang dimiliki merupakan daya tarik tersendiri bagi wisatawan

Walaupun demikian, pengalaman membuktikan bahwa industri pariwisata Kabupaten Bintan masih kurang dalam kemampuan untuk mengemas dan melayani wisatawan. Kata Kunci utamanya adalah pada kesiapan sumber daya manusia (SDM) industri pariwisata. Sebagaimana disyaratkan dalam UU nomor 9 tahun 2010 tentang kepariwisataan, sertifikasi kompetensi dan serifikasi usaha pariwisata menjadi suatu keharusan, karena pariwisata adalah bisnis pelayanan (*hospitality industry*) sehingga kompetensi merupakan hal mutlak/mendasar yang harus diperhatikan.

Selanjutnya dalam membangun industri pariwisata juga perlu dilakukan upaya kemitraan kelembagaan pariwisata. Hal ini sangat penting dalam mendorong kemampuan potensi pariwisata yang akan dikembangkan sebagai daya tarik nya. Tentu upaya ini harus dapat melibatkan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) sebagai pemain utama (*Key Players*) dalam pengembangan pariwisata dapat dilakukan melalui program kemitraaan baik usaha pariwisata maupun kelembagaan pariwisata. Perencanaan, pengelolaan destinasi dan daya tarik wisata serta pengembangan industri *hospitality* adalah aspek yang membutuhkan pemikiran, pengetahuan dan peranserta dari masyarakat dalam

mendukung kepariwisataan di daerah.

Tentu diskusi atau dialog serta kesepakatan bersama stakeholder dalam merencanakan dan mengembangkan pariwisata menjadi kekuatan utama kemitraan. Kemitraan dapat dilakukan antara suatu institusi atau perusahaan dengan institusi lainnya melalui pendekatan formal dan informal. Maka dari itu dalam meningkatkan pengembangan pariwisata di Kabupaten Bintan, sesuai dengan visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Bintan yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Bintan. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pariwisata Kabupaten Bintan memprogramkan kegiatan “Pelatihan Pemandu Wisata Budaya Pedesaan”. Kegiatan ini berupa pelatihan pengembangan sumberdaya manusia dan kemitraan usaha masyarakat di destinasi pariwisata Kabupaten Bintan.

1.8 Tujuan Inovasi Daerah

Adapun tujuan kegiatan pengembangan sumberdaya manusia dan profesionalisme di bidang pariwisata Kabupaten Bintan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengetahuan dan kompetensi sumber daya manusia di bidang pariwisata;
2. Meningkatkan pengetahuan dan kapasitas pengembangan kemitraan usaha pariwisata melalui kelembagaan pariwisata dan peran serta masyarakat;
3. Memahami dan mendukung arah kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan dalam pengembangan kepariwisataan daerah.

1.9 Manfaat Yang Diperoleh

Masyarakat dapat menerapkan materi atau mengaplikasikan ilmu yang telah didapat untuk meningkatkan kualitas pelayanan di bidang pariwisata.

1.10 Hasil Inovasi

Terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) Industri Pariwisata yang berdaya saing tinggi untuk meningkatkan kualitas kepariwisataan di Kabupaten Bintan.

2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.37
Indeks Inovasi Pelatihan Pemandu Wisata Budaya Pedesaan

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK OPD	Penunjukkan Panitia Pelaksana Kegiatan Pelatihan Pemandu Budaya Wisata Pedesaan Tahun 2019
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	11-30 SDM	Penunjukkan Panitia Pelaksana Kegiatan Pelatihan Pemandu Budaya Wisata Pedesaan Tahun 2019
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran untuk kegiatan inovasi dalam tahapan sudah dilaksanakan dan sudah di evaluasi	Pelatihan Pemandu Wisata Budaya Pedesaan (DAK Non Fisik)
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja di lingkungan pemerintah daerah dilakukan secara manual	foto kegiatan
5.	Bimtek Inovasi	Pernah 1 tahun 2 Kali melakukan Bimtek	Dokumentasi Bimtek
6.	Program Dan Kegiatan Di Renstra OPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan pengembangan inovasi ke dalam Resntra dan telah dilaksanakan	Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi hanya berjalan 3 OPD atau lebih	Dokumentasi Jejaring Inovasi
8.	Replikasi	Pernah 1 Kali di replikasi di daerah lain	Pemerintah Kabupaten Siak Adopsi Inovasi Kabupaten Bintan
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman Teknis	Pengembangan Usaha Pramuwisata Pedesaan dan Teknik Pemanduan Wisata
10.	Pengelola Inovasi	ada pengelola dan Ditetapkan dengan SK OPD	Penunjukkan Panitia Pelaksana Kegiatan Pelatihan Pemandu Budaya Wisata Pedesaan Tahun 2019
11.	Ketersediaan Informasi Layanan	informasi diakses melalui telp	screenshot wa group

			Forum Layanan Pelatihan
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	terdapat layanan pengaduan pengguna melalui "media sosial"	WA Group Forum Layanan Pelatihan
13.	Tingkat Partisipasi Stakeholder	inovasi dilakukan dengan melibatkan masyarakat dan akademisi serta media massa	partisipasi stakeholder
14.	Kemudahan Layanan Informasi	Layanan Email/Media Sosial	media layanan informasi melalui WA Group Forum Layanan Pelatihan
15.	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	Hasil inovasi dapat dilakukan dalam waktu hitungan 1-2 hari	dokumentasi kemudahan proses inovasi
16.	Online Sistem	ada dukungan melalui informasi website atau sosial media	screenshot wa group Forum Layanan Pelatihan
17.	Kecepatan Inovasi	Proses inovasi dapat dilakukan dalam waktu hitungan 1-2 bulan	dokumentasi akses inovasi daerah dalam satuan waktu
18.	Kemanfaatan Inovasi	hasil manfaatnya dirasakan 1-100 orang	Dokumentasi penerima manfaat
19.	Tingkat Kepuasan penggunaan inovasi daerah	-	Tidak Tersedia
20.	Sosialisasi Kebijakan	Ada Foto	Dokumentasi Sosialisasi Kebijakan pada saat pelatihan
21.	Kualitas Inovasi Daerah	Ada Upload Video	Pemandu Wisata Budaya Pedesaan

3.3.8 Pelatihan Tata Kelola Destinasi Wisata

1. PROFIL INOVASI

1.1 Nama Inovasi

Pelatihan Tata Kelola Destinasi Wisata

1.2 Tahapan Inovasi

Implementasi

1.3 Inisiator Inovasi Daerah

OPD – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

1.4 Jenis Inovasi

Non Digital

1.5 Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

1.6 Urusan Inovasi Daerah

Pariwisata, pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pendidikan dan Pelatihan

1.7 Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Pariwisata pada awalnya lebih dipandang sebagai kegiatan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi semata. Padahal, jika dipahami dari sudut pandang yang lebih luas, pariwisata adalah fenomena perjalanan manusia baik secara individual maupun kolektif, dengan berbagai macam motivasi dan tujuan yang melibatkan berbagai macam keperluan. Oleh karena itu, belakangan ini aspek nilai dan etika mulai diperhatikan dalam pembangunan pariwisata. Di kalangan para ahli pembangunan mulai muncul wacana bahwa pembangunan sesungguhnya adalah untuk manusia sehingga manusia merupakan pusat dan penggerak, sekaligus untuk siapa pembangunan tersebut dilakukan.

Dalam era globalisasi dan teknologi informasi seperti sekarang ini, SDM dituntut untuk lebih memiliki kompetensi dalam berbagai aspek terutama pada dunia industri pariwisata, walaupun diyakini bahwa dari aspek sumber daya alam dan budaya, Kabupaten Bintan memiliki keunggulan komperatif sebagai tempat tujuan wisata, karena mempunyai alam dan pantai serta pasir putih yang indah sebagai anugerah dari Allah SWT serta peradaban Kebudayaan Melayu yang termasyur dikawasan perbatasan negara tetangga seperti Malaysia, Singapura dan negara jiran lainnya. Keunggulan aspek alam dan budaya yang dimiliki merupakan daya tarik tersendiri bagi wisatawan

Walaupun demikian, pengalaman membuktikan bahwa industri pariwisata Kabupaten Bintan masih kurang dalam kemampuan untuk mengemas dan melayani wisatawan. Kata Kunci utamanya adalah pada kesiapan sumber

daya manusia (SDM) industri pariwisata. Sebagaimana disyaratkan dalam UU nomor 9 tahun 2010 tentang kepariwisataan, sertifikasi kompetensi dan serifikasi usaha pariwisata menjadi suatu keharusan, karena pariwisata adalah bisnis pelayanan (hospitality industry) sehingga kompetensi merupakan hal mutlak/mendasar yang harus diperhatikan.

Selanjutnya dalam membangun industri pariwisata juga perlu dilakukan upaya kemitraan kelembagaan pariwisata. Hal ini sangat penting dalam mendorong kemampuan potensi pariwisata yang akan dikembangkan sebagai daya tariknya. Tentu upaya ini harus dapat melibatkan para pemangku kepentingan (stakeholder) sebagai pemain utama (Key Players) dalam pengembangan pariwisata dapat dilakukan melalui program kemitraan baik usaha pariwisata maupun kelembagaan pariwisata. Perencanaan, pengelolaan destinasi dan daya tarik wisata serta pengembangan industri hospitality adalah aspek yang membutuhkan pemikiran, pengetahuan dan peranserta dari masyarakat dalam mendukung kepariwisataan di daerah.

Tentu diskusi atau dialog serta kesepakatan bersama stakeholder dalam merencanakan dan mengembangkan pariwisata menjadi kekuatan utama kemitraan. Kemitraan dapat dilakukan antara suatu institusi atau perusahaan dengan institusi lainnya melalui pendekatan formal dan informal. Maka dari itu dalam meningkatkan pengembangan pariwisata di Kabupaten Bintan, sesuai dengan visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Bintan yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Bintan. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pariwisata Kabupaten Bintan memprogramkan kegiatan “Pelatihan Tata Kelola Destinasi Wisata”. Kegiatan ini berupa pelatihan pengembangan sumberdaya manusia dan kemitraan usaha masyarakat di destinasi pariwisata Kabupaten Bintan.

1.8 Tujuan Inovasi Daerah

Adapun tujuan kegiatan pengembangan sumberdaya manusia dan profesionalisme di bidang pariwisata Kabupaten Bintan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengetahuan dan kompetensi sumber daya manusia di

bidang pariwisata;

2. Meningkatkan pengetahuan dan kapasitas pengembangan kemitraan usaha pariwisata melalui kelembagaan pariwisata dan peran serta masyarakat;
3. Memahami dan mendukung arah kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan dalam pengembangan kepariwisataan daerah.

1.9 Manfaat Yang Diperoleh

Masyarakat dapat menerapkan materi atau mengaplikasikan ilmu yang telah didapat untuk meningkatkan kualitas pelayanan di bidang pariwisata.

1.10 Hasil Inovasi

Terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) Industri Pariwisata yang berdaya saing tinggi untuk meningkatkan kualitas kepariwisataan di Kabupaten Bintan.

2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.38
Indeks Inovasi Pelatihan Tata Kelola Destinasi Wisata

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK OPD	Kegiatan Pelatihan Tata Kelola Destinasi
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	11-30 SDM	Penunjukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pelatihan Tata Kelola Destinasi Wisata Tahun 2019
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran untuk kegiatan inovasi dalam tahapan sudah dilaksanakan dan sudah di evaluasi	Pelatihan Tata Kelola Destinasi Wisata (DAK Non Fisik)
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja di lingkungan pemerintah daerah dilakukan secara manual	dokumentasi teknologi secara manual
5.	Bimtek Inovasi	Pernah 1 tahun 2 Kali melakukan Bimtek	bimtek pelatihan tata kelola destinasi wisata
6.	Program Dan Kegiatan Di Renstra OPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan pengembangan inovasi	Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata

		ke dalam Resntra dan telah dilaksanakan	Kabupaten Bintang Tahun 2016-2021
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi hanya berjalan 3 OPD atau lebih	foto kegiatan yang melibatkan jejaring inovasi
8.	Replikasi	Pernah 1 Kali di replikasi di daerah lain	pengelolaan destinasi dan even pariwisata berbasis masyarakat
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman Teknis	Pelatihan Tata Kelola Destinasi Wisata
10.	Pengelola Inovasi	ada Pengelola namun Tidak ditetapkan dengan SK OPD	Pelatihan Tata Kelola Destinasi
11.	Ketersediaan Informasi Layanan	informasi diakses melalui telp	screenshot wa group Forum Layanan Pelatihan
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	terdapat layanan pengaduan pengguna melalui "media sosial"	screenshot wa group Forum Layanan Pelatihan
13.	Tingkat Partisipasi Stakeholder	inovasi dilakukan dengan melibatkan masyarakat dan akademisi serta media massa	dokumentasi Partisipasi stakeholder
14.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Email/Media Sosial	screenshot wa group Forum Layanan Pelatihan
15.	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	Hasil inovasi dapat dilakukan dalam waktu hitungan 1-2 hari	dokumentasi kemudahan proses inovasi
16.	Online Sistem	ada dukungan melalui informasi website atau sosial media	screenshot wa group Forum Layanan Pelatihan
17.	Kecepatan Inovasi	Proses inovasi dapat dilakukan dalam waktu hitungan 1-2 bulan	dokumentasi akses inovasi daerah dalam satuan waktu
18.	Kemanfaatan Inovasi	hasil manfaatnya dirasakan 1-100 orang	Dokumentasi penerima manfaat
19.	Tingkat Kepuasan penggunaan inovasi daerah	-	Tidak Tersedia
20.	Sosialisasi Kebijakan	Ada Foto	Dokumentasi Sosialisasi pada saat pelatihan
21.	Kualitas Inovasi Daerah	Ada Upload Video	Tata Kelola Destinasi Wisata

3.3.9 Pelatihan Peningkatan Pramuwisata Kabupaten Bintan (Pelatihan Bahasa Inggris)

1. PROFIL INOVASI

1.1 Nama Inovasi

Pelatihan Peningkatan Pramuwisata Kabupaten Bintan (Pelatihan Bahasa Inggris)

1.2 Tahapan Inovasi

Implementasi

1.3 Inisiator Inovasi Daerah

OPD – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

1.4 Jenis Inovasi

Non Digital

1.5 Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

1.6 Urusan Inovasi Daerah

Pariwisata, pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pendidikan dan Pelatihan

1.7 Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Pariwisata merupakan salah satu sektor pembangunan yang berpotensi menciptakan pertumbuhan yang progresif di Kabupaten Bintan. Pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan yang dimiliki Kabupaten Bintan sebagai sumber PAD dengan sajian wisata bahari dan sport tourism. Tidak hanya memiliki kawasan wisata Internasional Lagoi yang sangat terkemuka. Sejumlah desa di Kabupaten Bintan kini dikreasikan menjadi desa wisata yang menarik untuk dikunjungi baik wisatawan lokal maupun mancanegara.

Selain terus mengembangkan objek wisata yang memiliki daya tarik bagi wisatawan, ada unsur lain yang perlu disiapkan untuk mendukung tercapainya pertumbuhan dunia pariwisata di Kabupaten Bintan. Salah

satu unsur yang tidak kalah penting dalam pengembangan kepariwisataan adalah seorang pramuwisata atau yang biasa disebut pemandu wisata. Suatu obyek wisata akan berkembang dengan baik apabila didukung oleh pemandu wisata yang baik pula. Rendahnya kemampuan penguasaan bahasa Inggris pemandu wisata lokal diyakini dapat mempengaruhi dan menghambat upaya pengembangan potensi pariwisata di Bintan.

Banyaknya wisatawan mancanegara datang tidak sebanding dengan banyaknya pemandu wisata yang mampu berbahasa Inggris sehingga terkadang mereka menyesuaikan dengan keadaan dimana mereka menggunakan bahasa Inggris yang dikombinasikan dengan bahasa isyarat. Hal itu memberikan kesan yang kurang baik bagi wisatawan mancanegara. Kendala tersebut terjadi karena latar belakang pendidikan para pemandu di Wirawisata masih sangat minim.

Pada dunia industri pariwisata ini dibutuhkan sumber daya manusia yang dituntut untuk lebih memiliki kompetensi dalam berbagai aspek khususnya dalam hal meningkatkan kualitas pramuwisata di Kabupaten Bintan yang sudah memiliki keunggulan destinasi wisata yang sangat berpotensi dikalangan industri pariwisata.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Bintan melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berupaya melakukan pengembangan sumber daya manusia bagi Pramuwisata dalam meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris dengan mengadakan Pelatihan Bahasa Inggris bagi pramuwisata se-Kabupaten Bintan. Melalui kegiatan ini diharapkan agar dapat meningkatkan kualitas SDM Pramuwisata dengan memiliki kemampuan berbahasa Inggris apabila sedang memandu wisatawan mancanegara.

1.8 Tujuan Inovasi Daerah

Adapun tujuan Pelatihan Peningkatan Kualitas Pramuwisata Kabupaten Bintan (Pelatihan Bahasa Inggris) yaitu :

1. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam berkomunikasi menggunakan Bahasa Inggris;
2. Memahami dan mendukung arah kebijakan Pemerintah Daerah

Kabupaten Bintan dalam pengembangan kepariwisataan;

3. Pramuwisata dalam menjalankan tugasnya harus mampu menguasai diri, senang, segar, rapi, bersih serta berpenampilan yang simpatik (Menghindari bau badan, perhiasan dan parfum yang berlebihan);
4. Pramuwisata harus mampu menciptakan kesan penilaian yang baik atas daerah, negara, bangsa dan kebudayaan;
5. Pramuwisata harus mampu menciptakan suasana gembira dan sopan menurut kepribadian Indonesia;
6. Pramuwisata harus mampu memahami latar belakang, asal usul wisatawan serta mengupayakan untuk meyakinkan wisatawan agar mematuhi hukum peraturan, adat kebiasaan yang berlaku dan ikut melestarikan objek;
7. Pramuwisata mampu menghindari timbulnya pembicaraan serta pendapat yang mengundang perdebatan mengenai kepercayaan, adat istiadat, agama, ras dan system politik sosial negara asal wisatawan;
8. Pramuwisata berusaha memberikan keterangan yang baik dan benar. Apabila ada hal-hal yang belum dapat dijelaskan maka pramuwisata harus berusaha mencari keterangan mengenai hal tersebut dan selanjutnya menyampaikan kepada wisatawan dalam kesempatan berikutnya;
9. Pramuwisata tidak dibenarkan untuk menceritakan masalah pribadinya yang bertujuan untuk menimbulkan rasa belas kasihan dari wisatawan;
10. Pramuwisata saat perpisahan mampu memberikan kesan yang baik agar wisatawan ingin berkunjung kembali.

1.9 Manfaat Yang Diperoleh

Pelaku usaha pariwisata baik yang sudah berjalan dan yang baru merintis dan pemandu wisata (pramuwisata) dapat menerapkan materi ataupun ilmu guna meningkatkan kualitas pelayanan di bidang pariwisata.

1.10 Hasil Inovasi

Terwujudnya SDM Pramuwisata yang berdaya saing tinggi guna meningkatkan kualitas kepariwisataan di Kabupaten Bintan.

2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.39
Indeks Inovasi Pelatihan Peningkatan Pramuwisata Kabupaten Bintan
(Pelatihan Bahasa Inggris)

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK OPD	Penunjukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kualitas Pramuwisata Kabupaten Bintan (Pelatihan Bahasa Inggris) Tahun 2017
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	11-30 SDM	Penunjukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kualitas Pramuwisata Kabupaten Bintan (Pelatihan Bahasa Inggris) Tahun 2017
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran untuk kegiatan inovasi dalam tahapan sudah dilaksanakan dan sudah di evaluasi	Program Pengembangan Kemitraan kegiatan Pelatihan Peningkatan Kualitas Pramuwisata Kab. Bintan (Pelatihan B. Inggris)
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja di lingkungan pemerintah daerah dilakukan secara manual	dokumentasi teknologi secara manual
5.	Bimtek Inovasi	Pernah 1 tahun 2 Kali melakukan Bimtek	Dokumentasi Bimtek Pelatihan Peningkatan Pramuwisata Kabupaten Bintan (Pelatihan Bahasa Inggris)
6.	Program Dan Kegiatan Di Renstra OPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan pengembangan inovasi ke dalam Resntra dan telah dilaksanakan	Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Bintan Tahun 2016-2021
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi hanya berjalan 1 OPD	Dokumentasi Jejaring Inovasi

8.	Replikasi	Pernah 1 Kali di replikasi di daerah lain	Pemerintah Kabupaten Siak Adopsi Inovasi Kabupaten Bintan
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman Teknis	English in-house training development
10.	Pengelola Inovasi	ada pengelola dan Ditetapkan dengan SK OPD	SK Pengelola Pelatihan Peningkatan Kualitas Pramuwisata Kabupaten Bintan (Pelatihan Bahasa Inggris)
11.	Ketersediaan Informasi Layanan	informasi diakses melalui telp	screenshot Layanan Pelatihan melalui Media Sosial (WA Group)
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	terdapat layanan pengaduan pengguna melalui "media sosial"	screenshot Layanan pengaduan Pelatihan melalui Media Sosial (WA Group)
13.	Tingkat Partisipasi Stakeholder	inovasi dilakukan dengan melibatkan masyarakat dan akademisi serta media massa	partisipasi stakeholder
14.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Email/Media Sosial	screenshot Layanan Pelatihan melalui Media Sosial (WA Group)
15.	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	Hasil inovasi dapat dilakukan dalam waktu hitungan 1-2 hari	dokumentasi kemudahan proses inovasi
16.	Online Sistem	ada dukungan melalui informasi website atau sosial media	screenshot informasi media sosial
17.	Kecepatan Inovasi	Proses inovasi dapat dilakukan dalam waktu hitungan 1-2 bulan	dokumentasi akses inovasi daerah dalam satuan waktu
18.	Kemanfaatan Inovasi	hasil manfaatnya dirasakan 1-100 orang	Pelatihan Peningkatan Kualitas Pramuwisata Kab. Bintan (Pelatihan Bahasa Inggris)
19.	Tingkat Kepuasan penggunaan inovasi daerah	hasil pengukuran kepuasan pengguna dari evaluasi Survei	Survei Pelatihan

20.	Sosialisasi Kebijakan	Ada Foto	Dokumentasi Sosialisasi Kebijakan
21.	Kualitas Inovasi Daerah	Ada Upload Video	Pelatihan Pramuwisata Bahasa Inggris

3.3.10 Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS)

1. PROFIL INOVASI

1.1 Nama Inovasi

POKDARWIS

1.2 Tahapan Inovasi

Implementasi

1.3 Inisiator Inovasi Daerah

OPD – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

1.4 Jenis Inovasi

Non Digital

1.5 Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

1.6 Urusan Inovasi Daerah

Pariwisata, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Tenaga Kerja

1.7 Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Pembangunan kepariwisataan memerlukan dukungan dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan di bidang pariwisata. Masyarakat adalah salah satu unsur penting pemangku kepentingan untuk bersama-sama dengan Pemerintah dan kalangan usaha/ swasta bersinergi melaksanakan dan mendukung pembangunan kepariwisataan. Oleh karena itu pembangunan kepariwisataan harus memperhatikan posisi, potensi dan peran masyarakat baik sebagai subjek atau pelaku maupun penerima

manfaat pengembangan, karena dukungan masyarakat turut menentukan keberhasilan jangka panjang pengembangan kepariwisataan.

Dukungan masyarakat dapat diperoleh melalui penanaman kesadaran masyarakat akan arti penting pengembangan kepariwisataan. Untuk itu, dibutuhkan proses dan pengkondisian untuk mewujudkan masyarakat yang sadar wisata. Masyarakat yang sadar wisata akan dapat memahami dan mengaktualisasikan nilai-nilai penting yang terkandung dalam Sapta Pesona. Sapta Pesona merupakan kondisi yang harus diwujudkan dalam rangka menarik minat wisatawan berkunjung ke suatu daerah atau wilayah di Negara Indonesia. Sapta Pesona terdiri dari tujuh unsur yaitu aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah dan kenangan.

Terdapat banyak titik destinasi wisata di Kabupaten Bintan namun masih belum mendapatkan perhatian bagi masyarakat sehingga perlu untuk memberikan ransangan agar munculnya kelompok sadar wisata. hal ini bertujuan untuk memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat itu sendiri agar bisa menjadi mandiri dan juga dapat menumbuhkan destinasi wisata baru di kabupaten Bintan.

1.8 Tujuan Inovasi Daerah

Adapun tujuan POKDARWIS sebagai berikut :

1. Meningkatkan posisi dan peran masyarakat sebagai subjek atau pelaku penting dalam pembangunan kepariwisataan, serta dapat bersinergi dan bermitra dengan pemangku kepentingan terkait dalam meningkatkan kualitas perkembangan kepariwisataan di Kabupaten Bintan.
2. Membangun dan menumbuhkan sikap dan dukungan positif masyarakat sebagai tuan rumah melalui perwujudan nilai-nilai Sapta Pesona bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan di Kabupaten Bintan dan manfaatnya bagi pembangunan daerah maupun kesejahteraan masyarakat terutama bagi anggota pokdarwis.
3. Memperkenalkan, melestarikan dan memanfaatkan potensi daya tarik wisata yang ada di Kabupaten Bintan.

1.9 Manfaat Yang Diperoleh

Terciptanya destinasi wisata dengan iklim industri pariwisata yang kondusif sesuai dengan nilai yang terkandung dalam Sapta Pesona sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan warga terutama bagi anggota Pokdarwis dan juga dapat memberikan dampak yang positif pendapatan Kabupaten Bintan.

1.10 Hasil Inovasi

Terbentuknya POKDARWIS yang mengaplikasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Pesona sebagai upaya untuk menciptakan lingkungan dan suasana kondusif yang mampu mendorong tumbuh dan berkembangnya industri pariwisata di Kabupaten Bintan.

2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.40
Indeks Inovasi POKDARWIS

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK OPD	Pengukuhan Kelompok Sadar Wisata Kabupaten Bintan
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 31 keatas	Pengukuhan Kelompok Sadar Wisata Kabupaten Bintan
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran untuk kegiatan inovasi dalam tahapan sudah dilaksanakan dan sudah di evaluasi	Pemantauan, Pendataan dan evaluasi objek kawasan pariwisata
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja di lingkungan pemerintah daerah dilakukan secara manual	dokumentasi teknologi secara manual
5.	Bimtek Inovasi	Pernah 1 tahun 2 Kali melakukan Bimtek	Dokumentasi Bimtek
6.	Program Dan Kegiatan Di Renstra OPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan pengembangan	Rencana program dan kegiatan serta pendanaan

		inovasi ke dalam Resntra dan telah dilaksanakan	
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi hanya berjalan 3 OPD atau lebih	Dokumentasi Jejaring Inovasi
8.	Replikasi	Pernah 1 Kali di replikasi di daerah lain	Pemerintah Kabupaten Siak Adopsi Inovasi Kabupaten Bintan
9.	Pedoman Teknis	-	Tidak Tersedia
10.	Pengelola Inovasi	ada pengelola dan Ditetapkan dengan SK OPD	Pengukuhan Kelompok Sadar Wisata Kabupaten Bintan
11.	Ketersediaan Informasi Layanan	informasi diakses melalui telp	WA Group Pokdarwis
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	terdapat layanan pengaduan pengguna melalui "media sosial"	WA Group Pokdarwis
13.	Tingkat Partisipasi Stakeholder	inovasi dilakukan dengan melibatkan masyarakat dan akademisi	dokumentasi Partisipasi stakeholder
14.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Email/Media Sosial	media layanan informasi melalui WA Group Pokdarwis
15.	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	-	Tidak Tersedia
16.	Online Sistem	ada dukungan melalui informasi website atau sosial media	WA Group POKDARWIS
17.	Kecepatan Inovasi	-	Tidak Tersedia
18.	Kemanfaatan Inovasi	hasil manfaatnya dirasakan diatas 201 orang ketas	Dokumentasi penerima manfaat
19.	Tingkat Kepuasan penggunaan inovasi daerah	-	Tidak Tersedia
20.	Sosialisasi Kebijakan	Ada Foto	Dokumentasi Sosialisasi Kebijakan
21.	Kualitas Inovasi Daerah	Ada Upload Video	Pokdarwis

3.3.11 Desa Wisata

1. PROFIL INOVASI

1.1 Nama Inovasi

Desa Wisata

1.2 Tahapan Inovasi

Implementasi

1.3 Inisiator Inovasi Daerah

OPD – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

1.4 Jenis Inovasi

Non Digital

1.5 Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

1.6 Urusan Inovasi Daerah

Pariwisata, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perdagangan, Perindustrian.

1.7 Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Industri Pariwisata merupakan salah satu sektor penggerak perekonomian di Kabupaten Bintan. Kabupaten Bintan merupakan daerah yang mengandalkan sajian wisata bahari dan sport tourism dan memiliki kawasan wisata yang bertaraf Internasional yaitu kawasan Lagoi. Selain memiliki kawasan Lagoi, Bintan memiliki berbagai potensi yang besar dan atraksi tersendiri di wilayahnya untuk pengembangan industri pariwisata. Pariwisata sebagai fokus pengembangan menjadi peluang bagi wilayah disekitarnya untuk mulai menyiapkan diri karena eksesnya bukan saja berpusat pada wilayah yang dikembangkan tetapi akan tersebar pada semua wilayah terdekat. Pemerintah harus mampu membaca dan memanfaatkan peluang program implementasi dari potensi wilayahnya dan mendorong untuk tumbuhnya industri pariwisata baru selain kawasan

Lagoi. Sebagai penyangga kawasan yang berfokus pada sektor pariwisata, maka perlu dilakukan pengembangan pariwisata terutama untuk membangun desa wisata (*rural tourism*) yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dengan pendekatan Community Based Tourism (CBT) dan menganut pada nilai-nilai Sapta Pesona.

Desa wisata merupakan salah satu daya tarik pariwisata yang saat ini sedang digaungkan pemerintah pusat maupun daerah dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Kekayaan alam dan budaya lokal masyarakat yang masih terus hidup hingga kini menjadi potensi yang sangat mendukung dalam pengembangan desa wisata. Pengembangan sebuah desa wisata tentu akan menyokong pengelolaan desa menjadi lebih optimal meskipun dalam perjalanannya menghadapi berbagai tantangan untuk menuju pariwisata berkelanjutan.

Keberadaan desa wisata dalam perjalanan pembangunan pariwisata sudah sedemikian penting. Desa wisata sudah mampu mewarnai variasi destinasi yang lebih dinamis dalam suatu kawasan pariwisata sehingga pariwisata tidak selalu terjebak dalam trend pengembangan bercorak mass tourism. Dalam konteks kepariwisataan Kabupaten Bintan, perkembangan desa wisata menjadi bagian tak terpisahkan dari pasang-surut perkembangan pariwisata.

Melalui desa wisata, pariwisata membuktikan keberpihakannya kepada semangat pro job, pro growth, dan pro poor (pariwisata sebagai penyerap tenaga kerja pedesaan, sebagai generator pertumbuhan ekonomi wilayah, dan sebagai alat pengentasan kemiskinan).

1.8 Tujuan Inovasi Daerah

Adapun tujuan dibentuknya Desa Wisata sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan posisi dan peran masyarakat sebagai subjek atau pelaku penting dalam pembangunan kepariwisataan, serta dapat bersinergi dan bermitra dengan pemangku kepentingan terkait dalam meningkatkan kualitas perkembangan kepariwisataan di Kabupaten Bintan.
2. Membangun dan menumbuhkan sikap dan dukungan positif

masyarakat sebagai tuan rumah melalui perwujudan nilai-nilai Sapta Pesona bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan di Kabupaten Bintan.

1.9 Manfaat Yang Diperoleh

Adapun manfaat terbentuknya Desa Wisata sebagai berikut :

1. Meningkatkan posisi dan peran masyarakat sebagai subjek industri pariwisata dan mendiversifikasikan destinasi wisata di Kabupaten Bintan.
2. Dapat memajukan taraf hidup masyarakat dan melestarikan Budaya dan Tradisi yang terdapat di desa.
3. Menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat desa.
4. Dapat menggerakkan perekonomian masyarakat pedesaan, meningkatkan keberadaan industri kecil menengah dan dapat mempromosikan produk lokal.
5. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur di Desa

1.10 Hasil Inovasi

Terbentuknya Desa Wisata dan terciptanya lapangan pekerjaan baru pada sektor industri pariwisata di Kabupaten Bintan.

2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.41
Indeks Inovasi Desa Wisata

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK OPD	Pembentukan Desa Wisata Kabupaten Bintan
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 31 keatas	Pembentukan Desa Wisata Kabupaten Bintan
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran untuk kegiatan inovasi dalam tahapan sudah dilaksanakan dan sudah di evaluasi	Pemantauan, Pendataan dan evaluasi objek kawasan pariwisata
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja di lingkungan pemerintah daerah dilakukan	dokumentasi teknologi secara manual

		secara manual	
5.	Bimtek Inovasi	Pernah 1 tahun 2 Kali melakukan Bimtek	Dokumentasi Bimtek
6.	Program Dan Kegiatan Di Renstra OPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan pengembangan inovasi ke dalam Resntra dan telah dilaksanakan	Rencana program dan kegiatan serta pendanaan
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi hanya berjalan 3 OPD atau lebih	Dokumentasi Jejaring Inovasi
8.	Replikasi	Pernah 1 Kali di replikasi di daerah lain	Pemerintah Kabupaten Siak Adopsi Inovasi Kabupaten Bintan
9.	Pedoman Teknis	-	Tidak Tersedia
10.	Pengelola Inovasi	ada pengelola dan Ditetapkan dengan SK OPD	Pembentukan Desa Wisata Kabupaten Bintan
11.	Ketersediaan Informasi Layanan	informasi diakses melalui telp	WA Group Desa Wisata
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	terdapat layanan pengaduan pengguna melalui "media sosial"	WA Group Desa Wisata
13.	Tingkat Partisipasi Stakeholder	inovasi dilakukan dengan melibatkan masyarakat dan akademisi	dokumentasi Partisipasi stakeholder
14.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Email/Media Sosial	media layanan informasi melalui WA Group Desa Wisata
15.	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	-	Tidak Tersedia
16.	Online Sistem	ada dukungan melalui informasi website atau sosial media	WA Group Desa Wisata
17.	Kecepatan Inovasi	-	Tidak Tersedia
18.	Kemanfaatan Inovasi	hasil manfaatnya dirasakan diatas 201 orang ketas	Dokumentasi penerima manfaat
19.	Tingkat Kepuasan penggunaan inovasi daerah	-	Tidak Tersedia
20.	Sosialisasi Kebijakan	Ada Foto	Dokumentasi Sosialisasi Kebijakan
21.	Kualitas Inovasi Daerah	Ada Upload Video	Desa Wisata Ekang Anculai

3.3.12 Fasilitasi dan Mediasi KUR bagi Usaha Mikro

1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi

Fasilitasi dan Mediasi KUR bagi Usaha Mikro

1.2. Tahapan Inovasi

Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah

OPD – Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan

1.4. Jenis Inovasi

Non Digital

1.5. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

1.6. Urusan Inovasi Daerah

Pemberdayaan masyarakat dan Desa, koperasi, usaha kecil, dan menengah, perdagangan, Keuangan

1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

UKM (Usaha Kecil Menengah) merupakan salah satu sektor yang memegang peranan penting dalam perekonomian dan dapat membantu dalam Pendapatan Asli Daerah. UKM merupakan suatu bentuk usaha kecil masyarakat yang pendiriannya berdasarkan inisiatif seseorang. Pertumbuhan UKM di Kabupaten Bintan cukup menjanjikan yang tersebar di setiap wilayah. Salah satu kendala yang dihadapi oleh UKM di Kabupaten Bintan dalam melakukan pengembangan usaha adalah berkaitan dengan aspek permodalan. Banyak pelaku UKM yang kurang memahami proses dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan bantuan modal dari pihak bank.

1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Pelaku UKM mendapatkan bantuan pendampingan dalam proses bantuan modal dari pihak bank.

1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Membantu pelaku UKM dalam menyiapkan persyaratan bantuan modal dari pihak bank dan melakukan pendampingan terhadap seluruh proses dari awal pengajuan hingga bantuan tersebut dicairkan.

1.10. Hasil Inovasi

Pelaku UKM mendapatkan bantuan modal dengan cepat dan mudah

2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.42
Indeks Inovasi Fasilitasi dan Mediasi KUR bagi Usaha Mikro

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	-	Tidak Tersedia
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	-	Tidak Tersedia
3.	Dukungan Anggaran	-	Tidak Tersedia
4.	Penggunaan IT	-	Tidak Tersedia
5.	Bimtek Inovasi	-	Tidak Tersedia
6.	Program Dan Kegiatan Di Renstra OPD	-	Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan
7.	Jejaring Inovasi	-	Tidak Tersedia
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	-	Tidak Tersedia
10.	Pengelola Inovasi	-	Tidak Tersedia
11.	Ketersediaan Informasi Layanan	-	Tidak Tersedia
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	-	Tidak Tersedia

13.	Tingkat Partisipasi Stakeholder	-	Tidak Tersedia
14.	Kemudahan Informasi Layanan	-	Tidak Tersedia
15.	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	-	Tidak Tersedia
16.	Online Sistem	-	Tidak Tersedia
17.	Kecepatan Inovasi	-	Tidak Tersedia
18.	Kemanfaatan Inovasi	-	Tidak Tersedia
19.	Tingkat Kepuasan penggunaan inovasi daerah	-	Tidak Tersedia
20.	Sosialisasi Kebijakan	Ada Foto	Sosialisasi
21.	Kualitas Inovasi Daerah	Ada Upload Video	Fasilitasi dan Mediasi KUR bagi Usaha Mikro

3.3.13 Informasi Bahan Pokok dan Penting

1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi

Informasi Bahan Pokok dan Penting

1.2. Tahapan Inovasi

Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah

OPD – Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan

1.4. Jenis Inovasi

Non Digital

1.5. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

1.6. Urusan Inovasi Daerah

Koperasi, usaha kecil, dan menengah, perdagangan, perindustrian

1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2019 berkaitan dengan pemberian informasi mengenai harga 18 barang pokok dan penting. Terdiri dari 11 barang pokok (beras; kedelai bahan baku tahu dan tempe; cabai; bawang merah; gula; minyak goreng; tepung terigu; daging sapi; daging ayam ras; telur ayam ras; dan ikan segar) dan 7 barang penting (benih seperti padi, jagung, dan kedelai; pupuk; gas elpiji 3 kilogram; triplek; semen; besi baja konstruksi; dan baja ringan). Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan menambahkan 5 item kebutuhan lainnya sebagai informasi tambahan.

1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Memberikan informasi barang pokok dan penting kepada masyarakat Kabupaten Bintan setiap 2 minggu sekali yang diinfokan melalui media cetak.

1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Masyarakat mengetahui informasi mengenai harga barang pokok dan penting di Kabupaten Bintan.

1.10. Hasil Inovasi

Membantu masyarakat Kabupaten Bintan untuk mendapatkan informasi mengenai harga barang pokok dan penting.

2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.43
Indeks Inovasi Informasi Bahan Pokok dan Penting

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	Informasi	Bukti Dukung
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	-	Tidak Tersedia

3.	Dukungan Anggaran	-	Tidak Tersedia
4.	Penggunaan IT	-	Tidak Tersedia
5.	Bimtek Inovasi	-	Tidak Tersedia
6.	Program Dan Kegiatan Di Renstra OPD	-	Tidak Tersedia
7.	Jejaring Inovasi	-	Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	-	Tidak Tersedia
10.	Pengelola Inovasi	-	Tidak Tersedia
11.	Ketersediaan Informasi Layanan	-	Tidak Tersedia
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	-	Tidak Tersedia
13.	Tingkat Partisipasi Stakeholder	-	Tidak Tersedia
14.	Kemudahan Informasi Layanan	-	Tidak Tersedia
15.	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	-	Tidak Tersedia
16.	Online Sistem	-	Tidak Tersedia
17.	Kecepatan Inovasi	-	Tidak Tersedia
18.	Kemanfaatan Inovasi	-	Tidak Tersedia
19.	Tingkat Kepuasan penggunaan inovasi daerah	-	Tidak Tersedia
20.	Sosialisasi Kebijakan	-	Tidak Tersedia
21.	Kualitas Inovasi Daerah	-	Tidak Tersedia

3.3.14 Jantenkaya (Jaminan Ketenagakerjaan Kader Posyandu)

1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi

Jantenkaya (Jaminan Ketenagakerjaan Kader Posyandu)

1.2. Tahapan Inovasi

Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah

OPD – Dinas Kesehatan

1.4. Jenis Inovasi

Non Digital

1.5. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

1.6. Urusan Inovasi Daerah

Kesehatan

1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Kader Posyandu merupakan anggota masyarakat yang dipilih dari dan oleh masyarakat, mau dan mampu bekerja bersama dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan secara sukarela.

Kader Posyandu memberikan pelayanan kepada Bayi, Balita, Ibu Hamil, dan Lansia akan tetapi belum memiliki jaminan perlindungan pada saat melakukan pelayanan kepada masyarakat. Kader posyandu merupakan salah satu instrumen yang langsung berhubungan dengan masyarakat yang membantu pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan terutama kepada ibu hamil, balita dan lansia.

Oleh karena itu, para kader Posyandu ini perlu mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan agar mereka merasa aman dan adanya kepastian dalam melaksanakan tugasnya.

1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Memberikan jaminan ketenagakerjaan kepada kader Posyandu.

1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Kader Posyandu yang memberikan pelayanan kepada masyarakat memperoleh Jaminan Kecelakaan kerja, jaminan kematian selama melaksanakan tugas sebagai kader posyandu.

1.10. Hasil Inovasi

Kader Posyandu memiliki jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan kecelakaan kerja.

2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.44
Indeks Inovasi Jantenkaya (Jaminan Ketenagakerjaan Kader Posyandu)

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK OPD	Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Kader Penggerak Posyandu di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan,
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 31 keatas	Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Kader Penggerak Posyandu di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran untuk kegiatan inovasi dalam tahapan sudah dilaksanakan dan sudah di evaluasi	Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja di lingkungan pemerintah daerah dilakukan secara manual	Inovasi dilakukan secara manual
5.	Bimtek Inovasi	Pernah 1 tahun 2 Kali melakukan Bimtek	BIMTEK dilakukan pada saat Kegiatan Jambore Kader

			Posyandu 2019 Kabupaten Bintan
6.	Program Dan Kegiatan Di Renstra OPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan pengembangan inovasi ke dalam Resntra dan telah dilaksanakan	Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi hanya berjalan 2 OPD	Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Kader Penggerak Posyandu di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan
8.	Replikasi	Pernah 1 Kali di replikasi di daerah lain	Replikasi Kabupaten Siak
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman Teknis dan dapat diakses secara online	Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Kader Penggerak Posyandu di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan
10.	Pengelola Inovasi	ada pengelola dan Ditetapkan dengan SK OPD	Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kesehatan dengan BPJS Kantor Cabang Tanjungpinang
11.	Ketersediaan Informasi Layanan	informasi melalui datang langsung	Setelah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, para kader posyandu dapat langsung memanfaatkannya
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	terdapat "call center" layanan pengaduan pengguna	Call Center RSUD Bintan
13.	Tingkat Partisipasi Stakeholder	inovasi dilakukan dengan	Melibatkan kader

		melibatkan masyarakat	posyandu sebagai peserta BPJS yang dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten Bintan
14.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Telp	Call Center RSUD Bintan
15.	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	Hasil inovasi dapat dilakukan dalam waktu hitungan 1-2 hari	Tidak Tersedia
16.	Online Sistem	-	Tidak Tersedia
17.	Kecepatan Inovasi	Proses inovasi dapat dilakukan dalam waktu hitungan 3-7 bulan	Tidak Tersedia
18.	Kemanfaatan Inovasi	hasil manfaatnya dirasakan diatas 201 orang ketas	Jumlah Kader Posyandu yang didaftarkan sebagai pererta BPJS Ketenagakerjaan
19.	Tingkat Kepuasan penggunaan inovasi daerah	-	Tidak Tersedia
20.	Sosialisasi Kebijakan	Ada Foto	Sosialisasi Program JANTENKAYA
21.	Kualitas Inovasi Daerah	Ada Upload Video	JANTENKAYA

3.3.15 Kartu Kendali Rekomendasi Pembelian Minyak Solar (Gas Oil)

1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi

Koordinator Pendamping KUBE (Kelompok Usaha Bersama) dan UEP (Usaha Ekonomi Produktif)

1.2. Tahapan Inovasi

Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah

OPD – Dinas Sosial

1.4. Jenis Inovasi

Non Digital

1.5. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

1.6. Urusan Inovasi Daerah

Koperasi, usaha kecil, dan menengah

1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Pendamping KUBE dan UEP merupakan program pusat yang ditempatkan di Kecamatan, Kelurahan dan Desa. Dengan wilayah kerja dan jarak tempuh yang luas sehingga pengangkatan koordinator KUBE dan UEP bermanfaat untuk memudahkan koordinasi dan komunikasi antara Dinas Sosial dengan para pendamping di tingkat Kecamatan. Para pendamping yang berjumlah 17 orang ini bertugas melakukan pendampingan Kepada KUBE yang berjumlah 300 kelompok (jumlah aktif dan tidak aktif) dan UEP sebanyak 850 orang. Pengangkatan koordinator ini dilakukan dengan melakukan evaluasi terhadap pendamping KUBE dan memilih satu orang yang berkinerja baik.

1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Agar komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial kepada para pendamping menjadi lebih terarah yang diwakilkan kepada koordinator yang telah ditunjuk.

1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Bermanfaat untuk meminimalisir kesalahan informasi dalam komunikasi karena dilakukan kepada g koordinator yang selanjutnya menyampaikan kepada para pendamping KUBE dan UEP, begitu juga sebaliknya Dinas Sosial dapat mengetahui perkembangan KUBE dan UEP yang disampaikan masing-masing pendamping melalui koordiantor tersebut; Dengan informasi tersebut Dinas Sosial dapat melakukan identifikasi awal permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing KUBE dan UEP.

1.10. Hasil Inovasi

Komunikasi dari Dinas Sosial kepada para pendamping maupun sebaliknya menjadi lebih terarah sehingga dapat mencapai tujuan bersama untuk mengatasi permasalahan yang ada dan juga dalam rangka mengembangkan KUBE dan UEP.

2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.45
Indeks Inovasi Kartu Kendali Rekomendasi Pembelian
Minyak Solar (Gas Oil)

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK OPD	Penunjukan pendamping Kelompok Usaha Bersama Kegiatan Pembinaan Kelompok Usaha Bersama dan Usaha Ekonomi Produktif Bagi Fakir Miskin Program Penanganan Fakir Miskin Kabupaten Bintan Tahun 2020
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	11-30 SDM	Susunan Pendamping Kelompok Usaha Bersama Kegiatan Pembinaan KUBE dan UEP bagi Fakir Miskin Program Penanganan Fakir Miskin Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2020
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran untuk kegiatan inovasi sudah ada sampai tahap pelaksanaan inovasi	Kegiatan Pembinaan KUBE dan UEP Fakir Miskin
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja di lingkungan pemerintah daerah dilakukan secara	Pelaksanaan kerja di lingkungan pemerintah daerah dilakukan

		manual	secara manual
5.	Bimtek Inovasi	Pernah 1 tahun 2 Kali melakukan Bimtek	BIMTEK Pendamping KUBE
6.	Program Dan Kegiatan Di Renstra OPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan pengembangan inovasi ke dalam Resntra	Kegiatan Pembinaan KUBE dan UEP Fakir Miskin
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi hanya berjalan 1 OPD	Penunjukan Pendamping Kelompok Usaha Bersama Kegiatan Pembinaan Kelompok Usaha Bersama dan Usaha Ekonomi Produktif Bagi Fakir Miskin Program Penanganan Fakir Miskin Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2020
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	-	Tidak Tersedia
10.	Pengelola Inovasi	ada pengelola dan Ditetapkan dengan SK OPD	Penunjukan Pendamping Kelompok Usaha Bersama Kegiatan Pembinaan Kelompok Usaha Bersama dan Usaha Ekonomi Produktif Bagi Fakir Miskin Program Penanganan Fakir Miskin Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2020
11.	Ketersediaan Informasi Layanan	informasi melalui datang langsung	informasi melalui datang langsung
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	-	Tidak Tersedia
13.	Tingkat Partisipasi Stakeholder	inovasi dilakukan dengan melibatkan masyarakat	Keterlibatan Masyarakat dalam Inovasi KUBE

14.	Kemudahan Informasi Layanan	-	Tidak Tersedia
15.	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	-	Tidak Tersedia
16.	Online Sistem	-	Tidak Tersedia
17.	Kecepatan Inovasi	Proses inovasi dapat dilakukan dalam waktu hitungan 3-7 bulan	Tidak Tersedia
18.	Kemanfaatan Inovasi	hasil manfaatnya dirasakan 100-200 orang	Manfaat Pendamping KUBE
19.	Tingkat Kepuasan penggunaan inovasi daerah	-	Tidak Tersedia
20.	Sosialisasi Kebijakan	Ada Foto	Sosialisasi Program
21.	Kualitas Inovasi Daerah	Ada Upload Video	Pendamping KUBE dan UEP

3.3.16 Koordinator Pendamping KUBE (Kelompok Usaha Bersama) dan UEP (Usaha Ekonomi Produktif)

1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi

Koordinator Pendamping KUBE (Kelompok Usaha Bersama) dan UEP (Usaha Ekonomi Produktif)

1.2. Tahapan Inovasi

Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah

OPD – Dinas Sosial

1.4. Jenis Inovasi

Non Digital

1.5. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

1.6. Urusan Inovasi Daerah

Koperasi, usaha kecil, dan menengah

1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Pendamping KUBE dan UEP merupakan program pusat yang ditempatkan di Kecamatan, Kelurahan dan Desa. Dengan wilayah kerja dan jarak tempuh yang luas sehingga pengangkatan koordinator KUBE dan UEP bermanfaat untuk memudahkan koordinasi dan komunikasi antara Dinas Sosial dengan para pendamping di tingkat Kecamatan. Para pendamping yang berjumlah 17 orang ini bertugas melakukan pendampingan Kepada KUBE yang berjumlah 300 kelompok (jumlah aktif dan tidak aktif) dan UEP sebanyak 850 orang. Pengangkatan koordinator ini dilakukan dengan melakukan evaluasi terhadap pendamping KUBE dan memilih satu orang yang berkinerja baik.

1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Agar komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial kepada para pendamping menjadi lebih terarah yang diwakilkan kepada koordinator yang telah ditunjuk.

1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Bermanfaat untuk meminimalisir kesalahan informasi dalam komunikasi karena dilakukan kepada g koordinator yang selanjutnya menyampaikan kepada para pendamping KUBE dan UEP, begitu juga sebaliknya Dinas Sosial dapat mengetahui perkembangan KUBE dan UEP yang disampaikan masing-masing pendamping melalui koordinator tersebut; Dengan informasi tersebut Dinas Sosial dapat melakukan identifikasi awal permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing KUBE dan UEP.

1.10. Hasil Inovasi

Komunikasi dari Dinas Sosial kepada para pendamping maupun sebaliknya menjadi lebih terarah sehingga dapat mencapai tujuan bersama untuk mengatasi permasalahan yang ada dan juga dalam rangka mengembangkan KUBE dan UEP.

2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.46
Indeks Inovasi Koordinator Pendamping KUBE (Kelompok Usaha Bersama) dan UEP (Usaha Ekonomi Produktif)

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK OPD	Penunjukan pendamping Kelompok Usaha Bersama Kegiatan Pembinaan Kelompok Usaha Bersama dan Usaha Ekonomi Produktif Bagi Fakir Miskin Program Penanganan Fakir Miskin Kabupaten Bintan Tahun 2020
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	11-30 SDM	Susunan Pendamping Kelompok Usaha Bersama Kegiatan Pembinaan KUBE dan UEP bagi Fakir Miskin Program Penangan Fakir Miskin Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2020
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran untuk kegiatan inovasi sudah ada sampai tahap pelaksanaan inovasi	Kegiatan Pembinaan KUBE dan UEP Fakir Miskin
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja di lingkungan pemerintah daerah dilakukan secara manual	Pelaksanaan kerja di lingkungan pemerintah daerah dilakukan secara manual
5.	Bimtek Inovasi	Pernah 1 tahun 2 Kali melakukan Bimtek	BIMTEK Pendamping KUBE
6.	Program Dan Kegiatan Di Renstra OPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan pengembangan inovasi ke dalam Resntra	Kegiatan Pembinaan KUBE dan UEP Fakir Miskin

7.	Jejaring Inovasi	Inovasi hanya berjalan 1 OPD	Penunjukan Pendamping Kelompok Usaha Bersama Kegiatan Pembinaan Kelompok Usaha Bersama dan Usaha Ekonomi Produktif Bagi Fakir Miskin Program Penanganan Fakir Miskin Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2020
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	-	Tidak Tersedia
10.	Pengelola Inovasi	ada pengelola dan Ditetapkan dengan SK OPD	Penunjukan Pendamping Kelompok Usaha Bersama Kegiatan Pembinaan Kelompok Usaha Bersama dan Usaha Ekonomi Produktif Bagi Fakir Miskin Program Penanganan Fakir Miskin Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2020
11.	Ketersediaan Informasi Layanan	informasi melalui datang langsung	informasi melalui datang langsung
12.	Penyelesaian Pengaduan Layanan	-	Tidak Tersedia
13.	Tingkat Partisipasi Stakeholder	inovasi dilakukan dengan melibatkan masyarakat	Keterlibatan Masyarakat dalam Inovasi KUBE
14.	Kemudahan Informasi Layanan	-	Tidak Tersedia
15.	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	-	Tidak Tersedia
16.	Online Sistem	-	Tidak Tersedia
17.	Kecepatan Inovasi	Proses inovasi dapat dilakukan dalam waktu hitungan 3-7 bulan	Tidak Tersedia

18.	Kemanfaatan Inovasi	hasil manfaatnya dirasakan 100-200 orang	Manfaat Pendamping KUBE
19.	Tingkat Kepuasan penggunaan inovasi daerah	-	Tidak Tersedia
20.	Sosialisasi Kebijakan	Ada Foto	Sosialisasi Program
21.	Kualitas Inovasi Daerah	Ada Upload Video	Pendamping KUBE dan UEP

3.3.17 Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKSLU) Rumah Bahagia Bintang

1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi

Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKSLU) Rumah Bahagia Bintang

1.2. Tahapan Inovasi

Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah

OPD – Dinas Sosial

1.4. Jenis Inovasi

Non Digital

1.5. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

1.6. Urusan Inovasi Daerah

Sosial

1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Keberhasilan pembangunan membawa peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat, sehingga usia harapan hidup meningkat, Kondisi positif tersebut membawa konsekwensi dengan meningkatnya jumlah penduduk

termasuk lanjut usia. Pemberian pelayanan sosial kepada lanjut usia perlu diperhatikan merdasarkan Keputusan Menteri Sosial RI Nomor :4/PRS-3/2007 Tentang Pedoman Pelayanan Sosial Lanjut Usia Dalam Panti.

LKSLU Rumah Bahagia Bintan beroperasi pada 17 Januari 2007 dan pada tanggal 11 juni 2013 Rumah Bahagia Bintan menjadi LKSLU Yayasan Rumah Bahagia Bintan dengan jumlah penghuni berjumlah 34 orang dimana jumlah lansia perempuan 24 orang dan jumlah lansia laki – laki 10 Orang. Saat ini penghuni Rumah Bahagia Bintan berjumlah 34 orang terdiri dari nenek 24 dan kakek 10 orang .

LKSLU Rumah Bahagia Bintan juga mulai tahun 2010 ikut memberi pelayanan dan pembinaan kepada para lansia tidak mampu yang berada diluar panti Rumah Bahagia Bintan dan wilayah Kabupaten Bintan lainnya sebanyak 17 orang dan saat ini LKSLU Rumah Bahagia Bintan sudah mempunyai binan lanjut usia diluar panti tahun 2020 sebanyak 60 orang.

1.8. Tujuan Inovasi Daerah

1. Memberikan tempat yang nyaman bagi para lanjut usia untuk menjalani hari tua;
2. Meningkatkan perhatian dan pelayanan bagi para penghuni Rumah Bahagia;
3. Sebagai tempat bimbingan Mental-Spritual dan Kerohanian;
4. Menjadikan penghuni Rumah Bahagia yang mandiri dan produktif; dan
5. Memberikan kualitas hidup penghuni Rumah Bahagia diusia tua

1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Para orang lanjut usia yang ada di Kabupaten Bintan memiliki rumah untuk mereka tempati dengan mendapatkan pelayanan yang maksimal.

1.10. Hasil Inovasi

Menyediakan tempat/rumah bagi para orang lanjut usia yang ada di Kabupaten Bintan agar mereka bisa mendapatkan pelayanan yang baik

pada saat usia lanjut. Hal ini dibuktikan dengan jumlah orang lanjut usia yang tinggal di Rumah Bahagia Bintang sebanyak 34 orang. Selain itu Rumah Bahagia Bintang sudah mempunyai binan lanjut usia diluar panti tahun 2020 sebanyak 60 orang

2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.47
Indeks Inovasi LKSLU Rumah Bahagia Bintang

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK OPD	Surat Perpanjangan Tanda Pendaftaran
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	11-30 SDM	Penunjukan Pengurus Panti Rumah Bahagia Bintang Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Kabupaten Bintang 2020
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran untuk kegiatan inovasi sudah ada sampai tahap pelaksanaan inovasi	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja di lingkungan pemerintah daerah dilakukan secara manual	Pelaksanaan Kerja di Rumah Bahagia dilakukan secara manual
5.	Bimtek Inovasi	-	Tidak Tersedia
6.	Program Dan Kegiatan Di Renstra OPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan pengembangan inovasi ke dalam Resntra	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi hanya berjalan 1 OPD	Penunjukan Pengurus Panti Rumah Bahagia Bintang Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Kabupaten Bintang 2020

8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman Teknis	Profil Rumah Bahagia
10.	Pengelola Inovasi	ada pengelola dan Ditetapkan dengan SK kepala daerah	Penunjukan Pengurus Panti Rumah Bahagia Bintang Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Kabupaten Bintang 2020
11.	Ketersediaan Informasi Layanan	informasi diakses melalui telp	Profil Rumah Bahagia
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	terdapat "call center" layanan pengaduan pengguna	Call Center Rumah Bahagia
13.	Tingkat Stakeholder Partisipasi	inovasi dilakukan dengan melibatkan masyarakat	Keterlibatan masyarakat dalam inovasi
14.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Telp	Call Center Rumah Bahagia
15.	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	Hasil inovasi dapat dilakukan dalam waktu hitungan 1-2 hari	Profil Rumah Bahagia
16.	Online Sistem	-	Tidak Tersedia
17.	Kecepatan Inovasi	Proses inovasi dapat dilakukan dalam waktu hitungan 3-7 bulan	Tidak Tersedia
18.	Kemanfaatan Inovasi	hasil manfaatnya dirasakan 1-100 orang	Data Penghuni Rumah Bahagia
19.	Tingkat Kepuasan penggunaan inovasi daerah	-	Tidak Tersedia
20.	Sosialisasi Kebijakan	Ada Foto	Dokumentasi Rumah Bahagia
21.	Kualitas Inovasi Daerah	Ada Upload Video	LKSLU Rumah Bahagia Bintang

3.3.18 Patroli Bersepeda

1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi

Patroli Bersepeda

1.2. Tahapan Inovasi

Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah

OPD – Satuan Polisi Pamong Praja

1.4. Jenis Inovasi

Non Digital

1.5. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

1.6. Urusan Inovasi Daerah

Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat

1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Patroli bersepeda dilakukan untuk memaksimalkan penegakkan Peraturan Daerah (Perda) sekaligus menjaga ketertiban umum dan perlindungan terhadap masyarakat di Kabupaten Bintan. Patroli sepeda ini dilakukan di Kecamatan Bintan Utara dan Kecamatan Bintan Timur. Patroli sepeda terdiri 4 personel ini dilakukan setiap pagi baik di Tanjunguban Kecamatan Bintan Utara (2 personel) dan Kijang Kecamatan Bintan Timur (2 personel). Patroli sepeda ini dimulai sekitar pukul 07.30 WIB dengan keluar masuk lorong dan gang. Lalu patroli sepeda kembali ke pos sekitar pukul 09.00 sampai jam 10.00 WIB.

1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Penegakkan Peraturan Daerah (Perda) sekaligus menjaga ketertiban

umum dan perlindungan terhadap masyarakat di Kabupaten Bintan yang dapat menjangkau tempat-tempat dengan akses yang sempit seperti gang atau lorong yang sulit dilewati dengan kendaraan bermotor.

1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Menjangkau wilayah-wilayah tertentu yang tidak dapat diakses dengan kendaraan bermotor sehingga tugas Satpol PP dapat lebih maksimal.

1.10. Hasil Inovasi

Efisien anggaran operasional karena langsung bisa masuk ke lorong atau gang kecil serta dapat menyelamatkan anggota Satpol PP itu sendiri

2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.48
Indeks Inovasi Patroli Bersepeda

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	-	Tidak Tersedia
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	1-10 SDM	Pengelola Inovasi berjumlah 4 orang
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran untuk kegiatan inovasi sudah ada sampai tahap pelaksanaan inovasi	Tidak Tersedia
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja di lingkungan pemerintah daerah dilakukan secara manual	Inovasi dilakukan secara manual
5.	Bimtek Inovasi	-	Tidak Tersedia
6.	Program Dan Kegiatan Di Renstra OPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan pengembangan inovasi ke dalam Resntra dan telah dilaksanakan	Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bintan 2016-2021
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi hanya berjalan 1 OPD	Patroli sepeda hanya dilakukan 4 orang anggota Satpol PP
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	-	Tidak Tersedia

10.	Pengelola Inovasi	ada Pengelola namun Tidak ditetapkan dengan SK OPD	Pengelola inovasi berjumlah 4 orang
11.	Ketersediaan Informasi Layanan	informasi melalui datang langsung	Informasi didapatkan langsung pada saat kegiatan berlangsung
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	-	Tidak Tersedia
13.	Tingkat Partisipasi Stakeholder	-	Tidak Tersedia
14.	Kemudahan Informasi Layanan	-	Tidak Tersedia
15.	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	-	Tidak Tersedia
16.	Online Sistem	-	Tidak Tersedia
17.	Kecepatan Inovasi	-	Tidak Tersedia
18.	Kemanfaatan Inovasi	-	Tidak Tersedia
19.	Tingkat Kepuasan penggunaan inovasi daerah	-	Tidak Tersedia
20.	Sosialisasi Kebijakan	Ada Foto	Sosialisasi dilakukan pada saat patroli
21.	Kualitas Inovasi Daerah	Ada Upload Video	Patroli Bersepeda

3.3.19 Pelayanan Koperasi 24 Jam

1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi

Pelayanan Koperasi 24 Jam

1.2. Tahapan Inovasi

Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah

OPD – Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan

1.4. Jenis Inovasi

Non Digital

1.5. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

1.6. Urusan Inovasi Daerah

Koperasi, usaha kecil, dan menengah, perdagangan, Keuangan

1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau Badan Hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Artinya koperasi tidak semata-mata bertujuan mencari keuntungan dari setiap kegiatan yang dilakukan, akan tetapi lebih dari pada itu yaitu memberi pelayanan kepada anggotanya. Oleh sebab itu semakin aktif Anggota koperasi maka akan semakin maju koperasinya. Keaktifan anggota koperasi buan saja dilihat dari aktif dalam hal simpan pinjam saja akan tetapi kalau Koperasi Serba Usaha maka anggota nya juga turun berperan aktif terhadap pertumbuhan dan kemajuan koperasi tersebut. Dan juga adanya keterlibatan secara langsung para anggota pada saat dilaksanakan RAT (Rapat Anggota Tahunan), anggota memberikan masukan serta kritik terhadap laporan keuangan yang dilaporkan pengurus dan pengawas, serta memberikan masukan juga terhadap rencana kerja yang dibuat oleh pengurus untuk satu tahun kedepan.

Saat ini di kabupaten Bintan terdapat sebanyak 239 Kop. Koperasi dengan rincian koperasi aktif sebanyak 142 Koperasi dan Sisanya 97 tidak aktif. Sedangkan yang melaksanakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) sebanyak 53 Koperasi.

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas maka menjadi latar belakang diadakan dan dilaksanakan inovasi pelayanan koperasi 24 jam.

1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Memberikan bantuan pendampingan dan konsultasi dalam rangka membantu koperasi dalam penyiapan administrasi, pelaporan dan lain-lain agar menjadi koperasi yang sehat.

1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Para pengurus koperasi dapat berkonsultasi dengan pendamping dengan

mudah tanpa terbatas waktu.

1.10. Hasil Inovasi

Kegiatan pendampingan koperasi dapat dilakukan tanpa terbatas waktu (24 jam) dan tanpa harus bertatap muka.

2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.49
Indeks Inovasi Pelayanan Koperasi 24 Jam

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	-	Tidak Tersedia
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	-	Tidak Tersedia
3.	Dukungan Anggaran	-	Tidak Tersedia
4.	Penggunaan IT	-	Tidak Tersedia
5.	Bimtek Inovasi	-	Tidak Tersedia
6.	Program Dan Kegiatan Di Renstra OPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan pengembangan inovasi ke dalam Resntra dan telah dilaksanakan	Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan
7.	Jejaring Inovasi	-	Tidak Tersedia
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	-	Tidak Tersedia
10.	Pengelola Inovasi	-	Tidak Tersedia
11.	Ketersediaan Informasi Layanan	-	Tidak Tersedia
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	-	Tidak Tersedia
13.	Tingkat Partisipasi Stakeholder	-	Tidak Tersedia
14.	Kemudahan Informasi Layanan	-	Tidak Tersedia
15.	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	-	Tidak Tersedia

16.	Online Sistem	-	Tidak Tersedia
17.	Kecepatan Inovasi	-	Tidak Tersedia
18.	Kemanfaatan Inovasi	-	Tidak Tersedia
19.	Tingkat Kepuasan penggunaan inovasi daerah	-	Tidak Tersedia
20.	Sosialisasi Kebijakan	-	Tidak Tersedia
21.	Kualitas Inovasi Daerah	-	Tidak Tersedia

3.3.20 Peningkatan SDM (Sumber Daya manusia) Forum Kewaspadaan Dini Pemerintah Kabupaten Bintan

1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi

Peningkatan SDM (Sumber Daya manusia) Forum Kewaspadaan Dini Pemerintah Kabupaten Bintan

1.2. Tahapan Inovasi

Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah

OPD – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

1.4. Jenis Inovasi

Non Digital

1.5. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

1.6. Urusan Inovasi Daerah

Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, sosial, persandian, Pendidikan dan Pelatihan

1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Anggota dalam Forum Kewaspadaan Dini Pemerintah Kabupaten Bintan

selain berasal dari unsur masyarakat tetapi juga berasal dari perwakilan dari OPD yang di Kabupate Bintan. Perwakilan yang berasal dari OPD tidak semuanya memiliki kemampuan intelijen yang berguna dalam melakukan pendeteksian pendeteksian dan pencegahan dini situasi ancaman, gangguan, hambatan yang terjadi dimasyarakat. Selain itu, perlu juga dipahami bagaimana mekanisme yang perlu dilakukan jika hal-hal yang tidak diinginkan berkaitan dengan ancaman, gangguan, hambatan sehingga mampu meminimalisir kemungkinan resiko yang terjadi. Oleh karena itu diperlukan kegiatan yang dapat menyatukan persepsi diantara anggota tersebut guna agar dapat melakukan pendeteksian dan pencegahan dini situasi ancaman, gangguan, hambatan.

1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Agar setiap anggota Forum Kewaspadaan Dini memiliki kesepahaman dalam mencapai tujuan bersama yaitu pendeteksian dan pencegahan dini situasi ancaman, gangguan, hambatan.

1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Pelatihan ini bermanfaat bagi anggota Forum Kewaspadaan Dini agar setiap individu memahami langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam melakukan pelaporan dan upaya pendeteksian dan pencegahan dini situasi ancaman, gangguan, hambatan.

1.10. Hasil Inovasi

Menyatukan persepsi setiap anggota dalam Forum Kewaspadaan Dini sehingga dapat memahami tugas, pokok dan fungsinya dalam upaya pendeteksian dan pencegahan dini situasi ancaman, gangguan, hambatan.

2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.50

Indeks Inovasi Peningkatan SDM (Sumber Daya manusia) Forum Kewaspadaan Dini Pemerintah Kabupaten Bintanj

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	Perkada	Pembentukan Pusat Komunikasi, Informasi

			Kewaspadaan Dini Kabupaten Bintan
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	-	Tidak Tersedia
3.	Dukungan Anggaran	-	Tidak Tersedia
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja di lingkungan pemerintah daerah dilakukan secara manual	Pelatihan dilakukan secara manual
5.	Bimtek Inovasi	Pernah 1 tahun 2 Kali melakukan Bimtek	BIMTEK dilakukan sekaligus pada saat kegiatan Peningkatan SDM (Sumber Daya manusia) Forum Kewaspadaan Dini Pemerintah Kabupaten Bintan
6.	Program Dan Kegiatan Di Renstra OPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan pengembangan inovasi ke dalam Resntra dan telah dilaksanakan	Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bintan 2016-2021
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi hanya berjalan 3 OPD atau lebih	Narasumber melibatkan beberapa unsur dan kementerian pusat, Peserta pelatihan merupakan perwakilan OPD dan unsur masyarakat
8.	Replikasi	Pernah 1 Kali di replikasi di daerah lain	Studi Komparatif
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman Teknis	Jadwal Kegiatan Pelatihan Intelijen Badan Kesbangpol Kabupaten Bintan Tahun 2019

10.	Pengelola Inovasi	-	Tidak Tersedia
11.	Ketersediaan Informasi Layanan	informasi melalui datang langsung	Informasi mengenai inovasi didapatkan pada saat pelaksanaan kegiatan
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	informasi melalui datang langsung	Informasi mengenai inovasi didapatkan pada saat pelaksanaan kegiatan
13.	Tingkat Partisipasi Stakeholder	inovasi dilakukan dengan melibatkan masyarakat	Terdapat peserta pelatihan yang merupakan perwakilan unsur masyarakat
14.	Kemudahan Informasi Layanan	Hasil inovasi dapat dilakukan dalam waktu hitungan 1-2 hari	Hasil Inovasi didapatkan langsung pada saat pelatihan
15.	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	Hasil inovasi dapat dilakukan dalam waktu hitungan 1-2 hari	Hasil Inovasi didapatkan langsung pada saat pelatihan
16.	Online Sistem	ada dukungan melalui informasi website atau sosial media	informasi mengenai pelatihan dapat diakses di web https://bakesbangpol.bintankab.go.id/
17.	Kecepatan Inovasi	Proses inovasi dapat dilakukan dalam waktu hitungan 3-7 bulan	Tidak Tersedia
18.	Kemanfaatan Inovasi	hasil manfaatnya dirasakan 1-100 orang	dokumentasi Peningkatan SDM
19.	Tingkat Kepuasan penggunaan inovasi daerah	-	Tidak Tersedia
20.	Sosialisasi Kebijakan	Ada Foto	Sosialisasi dilakukan pada saat kegiatan pelatihan
21.	Kualitas Inovasi Daerah	Ada Upload Video	Forum Kewaspadaan Dini

3.3.21 Promosi Produk Melalui Chanel Youtube BOESKU INDONESIA

1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi

Promosi Produk Melalui Chanel Youtube BOESKU INDONESIA

1.2. Tahapan Inovasi

Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah

OPD – Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan

1.4. Jenis Inovasi

Digital

1.5. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

1.6. Urusan Inovasi Daerah

Pemberdayaan masyarakat dan Desa, koperasi, usaha kecil, dan menengah, perdagangan, perindustrian

1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Pertumbuhan usaha kecil dan menengah di Kabupaten Bintan terus mengalami peningkatan, sehingga produk-produk yang dihasilkan juga beraneka ragam. Salah satu kendala yang dihadapi para pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) adalah kesulitan dalam melakukan promosi dan pemasaran produk UMKM yang mereka hasilkan.

Penyebabnya adalah terbatasnya SDM (Sumber Daya Manusia) yang memiliki kemampuan dalam bidang IT (Informasi dan Teknologi) dan Design Grafis. Hal ini diperlukan agar produk yang dihasilkan menarik dan bisa dipasarkan secara luas (melalui media sosial).

1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Membantu pelaku UMKM di Kabupaten Bintan dalam memasarkan produk.

1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Pelaku UMKM di Kabupaten Bintan dapat memasarkan produknya melalui

media massa dengan tampilan yang menarik.

1.10. Hasil Inovasi

Produk yang dihasilkan oleh para pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Bintan dapat dipromosikan secara menarik dengan cakupan wilayah promosi yang luas

2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.51
Indeks Inovasi Promosi Produk Melalui
Chanel Youtube BOESKU INDONESIA

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	-	Tidak Tersedia
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	-	Tidak Tersedia
3.	Dukungan Anggaran	-	Tidak Tersedia
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja di lingkungan pemerintah daerah sudah didukung system informasi online/ daring	Chanel Youtube BOESKU INDONESIA
5.	Bimtek Inovasi	Pernah 1 tahun 2 Kali melakukan Bimtek	BIMTEK dan Sosialisasi Chanel Youtube BOESKU INDONESIA
6.	Program Dan Kegiatan Di Renstra OPD	-	Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan
7.	Jejaring Inovasi	-	Tidak Tersedia
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	-	Tidak Tersedia

10.	Pengelola Inovasi	-	Tidak Tersedia
11.	Ketersediaan Informasi Layanan	informasi layanan dapat diakses secara online	Chanel Youtube BOESKU INDONESIA,
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan		Chanel Youtube BOESKU
13.	Tingkat Partisipasi Stakeholder		INDONESIA
14.	Kemudahan Informasi Layanan	terdapat layanan pengaduan pengguna melalui "media sosial"	Chanel Youtube BOESKU INDONESIA
15.	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	inovasi dilakukan dengan melibatkan masyarakat	Chanel Youtube BOESKU INDONESIA
16.	Online Sistem	Layanan Email/Media Sosial	Chanel Youtube BOESKU INDONESIA
17.	Kecepatan Inovasi	-	Tidak Tersedia
18.	Kemanfaatan Inovasi	ada dukungan melalui informasi website atau sosial media	Chanel Youtube BOESKU INDONESIA
19.	Tingkat Kepuasan penggunaan inovasi daerah	-	Tidak Tersedia
20.	Sosialisasi Kebijakan	Ada Foto	Sosialisasi Promosi Produk Melalui Chanel Youtube BOESKU INDONESIA
21.	Kualitas Inovasi Daerah	Ada Upload Video	Video Chanel Youtube BOESKU INDONESIA

3.3.22 Road Show Anti Narkoba

1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi

Road Show Anti Narkoba

1.2. Tahapan Inovasi

Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah

OPD – Dinas Pemuda dan Olahraga

1.4. Jenis Inovasi

Non Digital

1.5. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

1.6. Urusan Inovasi Daerah

Kesehatan, kepemudaan dan olah raga

1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Badan Peredaran narkoba yang semakin hari semakin meningkat. Salah satu yang dijadikan target dalam peredaran narkoba adalah kalangan remaja terutama pada kalangan pelajar. Tingginya angka penyalahgunaan narkoba pada remaja saat ini semakin membuat resah para orangtua.

Oleh karenanya Pemerintah Kabupaten Bintan melalui Dinas Pemuda dan Olahraga melakukan road show anti narkoba ke sekolah-sekolah. Gerakan road show anti narkoba ini merupakan satu dari beberapa langkah, untuk melawan dan memerangi narkoba di lingkungan pelajar dan pemuda Bintan. Antisipasi perlu dilakukan, karena Bintan berdekatan langsung dengan negara tetangga.

Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada pelajar mengenai bahaya narkoba. Sehingga para pelajar bisa menjadi duta anti narkoba yang nantinya dapat berperan serta dalam mensosialisasikan bahaya narkoba di tengah-tengah masyarakat. Hal ini diharapkan dapat menciptakan generasi muda Bintan yang cemerlang. Adapun yang menjadi latar belakang dalam kegiatan ini:

1. Narkoba penyebarannya melalui remaja yang coba coba;
2. Masa remaja sering terjadi ketidakstabilan emosi maupun kejiwaan;
3. Masalah remaja yang sering menggunakan narkoba berasal dari keluarga yang memiliki sejarah kekerasan dalam rumah tangga dan

dibesarkan dari keluarga broken home atau memiliki masalah perceraian, sedang stres atau depresi dan memiliki kepribadian yang tidak stabil dan mudah terpengaruh; dan

4. kehidupan remaja masa kini memang memprihatinkan karena pergaulan bebas.

1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Menjadikan remaja sebagai duta anti narkoba atau kader anti narkoba dan mencari tahu apa dampak atau bahaya narkoba terhadap remaja.

1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Memberikan pemahaman akan bahaya narkoba.

1.10. Hasil Inovasi

Menurunkan angka pengguna narkoba di Kabupaten Bintan

2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.52
Indeks Inovasi Road Show Anti Narkoba

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	-	Tidak Tersedia
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	11-30 SDM	Penetapan Panitia Non PNS Pelaksana Kegiatan Roadshow Anti Narkoba Kabupaten Bintan Tahun 2018,
3.	Dukungan Anggaran		
4.	Penggunaan IT	Penetapan Panitia PNS Pelaksana Kegiatan Roadshow Anti Narkoba Kabupaten Bintan Tahun 2018	
5.	Bimtek Inovasi	-	Tidak Tersedia
6.	Program Dan Kegiatan Di Renstra OPD	Pelaksanaan kerja di lingkungan pemerintah	Kegiatan Roadshow Anti Narkoba

		daerah dilakukan secara manual	Kabupaten Bintan Tahun 2018 dilakukan secara manual
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi hanya berjalan 3 OPD atau lebih	Pelibatan Unsur Kesehatan dan Pihak Kepolisian dalam Kegiatan Roadshow Anti Narkoba Kabupaten Bintan Tahun 2018
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman Teknis	Jadwal Kegiatan Roadshow Anti Narkoba Kabupaten Bintan Tahun 2018
10.	Pengelola Inovasi	ada pengelola dan Ditetapkan dengan SK OPD	Penetapan Panitia PNS Pelaksanaan Kegiatan Roadshow Anti Narkoba Kabupaten Bintan Tahun 2018, Penetapan Panitia Non PNS Pelaksanaan Kegiatan Roadshow Anti Narkoba Kabupaten Bintan Tahun 2018
11.	Ketersediaan Layanan Informasi	informasi melalui datang langsung	Informasi didapatkan langsung pada saat kegiatan berlangsung
12.	Penyelesaian Pengaduan Layanan	-	Tidak Tersedia
13.	Tingkat Partisipasi Stakeholder	inovasi dilakukan dengan melibatkan masyarakat	Kegiatan Roadshow Anti Narkoba Kabupaten Bintan Tahun 2018 melibatkan para pelajar
14.	Kemudahan Layanan Informasi	Layanan Email/Media	Informasi mengenai Roadshow Anti

		Sosial	Narkoba Kabuapten Bintan 2018 diliput oleh media massa
15.	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	Hasil inovasi dapat dilakukan dalam waktu hitungan 1-2 hari	Hasil inovasi bisa langsung dirasakan pada saat Kegiatan Roadshow Anti Narkoba Kabupaten Bintan 2018
16.	Online Sistem	ada dukungan melalui informasi website atau sosial media	Informasi mengenai Kegiatan Roadshow Anti Narkoba Kabupaten Bintan 2018 diliput oleh media massa
17.	Kecepatan Inovasi	Proses inovasi dapat dilakukan dalam waktu hitungan 3-7 bulan	Tidak Tersedia
18.	Kemanfaatan Inovasi	hasil manfaatnya dirasakan 1-100 orang	Daftar Peserta Kegiatan Roadshow Anti Narkoba Kabupaten Bintan 2018
19.	Tingkat Kepuasan penggunaan inovasi daerah	-	Tidak Tersedia
20.	Sosialisasi Kebijakan	Ada Foto	Sosialisasi dilakukan berbarengan dengan Kegiatan Roadshow Anti Narkoba Kabupaten Bintan 2018
21.	Kualitas Inovasi Daerah	Ada Upload Video	Kegiatan Roadshow Anti Narkoba Kabupaten Bintan Tahun 2018

3.3.23 Rumah Singgah bagi Orang dengan Gangguan Jiwa

1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi

Rumah Singgah bagi Orang dengan Gangguan Jiwa

1.2. Tahapan Inovasi Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah OPD – Dinas Sosial

1.4. Jenis Inovasi Non Digital

1.5. Bentuk Inovasi Daerah Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

1.6. Urusan Inovasi Daerah Sosial

1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Rumah singgah Kabupaten Bintan selain digunakan untuk menampung orang terlantar juga diperuntukan bagi orang dengan gangguan jiwa yang tidak memiliki keluarga di Kabupaten Bintan atau memiliki keluarga di Bintan namun mereka enggan untuk mengurus orang dengan gangguan jiwa tersebut.

Hal ini perlu dilakukan untuk menciptakan ketentraman di lingkungan masyarakat, dan agar para orang dengan gangguan jiwa ini mendapatkan penannganan yang layak.

1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Menampung orang dengan gangguan jiwa yang tidak memiliki keluarga di Kabupaten Bintan atau memiliki keluarga di Bintan namun mereka enggan untuk mengurus orang dengan gangguan jiwa tersebut. Hal ini dilakukan untuk menjaga ketentraman bagi masyarakat Kabupaten Bintan.

1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Orang-Orang dengan gangguan jiwa dapat ditampung dan mendapatkan

penanganan yang layak.

1.10. Hasil Inovasi

Rumah Singgah ini juga dimanfaatkan sebagai tempat bagi orang dengan gangguan jiwa yang tidak memiliki keluarga di Kabupaten Bintan atau memiliki keluarga di Bintan namun mereka enggan untuk mengurus orang dengan gangguan jiwa tersebut.

2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.53
Indeks Inovasi Rumah Singgah bagi Orang dengan Gangguan Jiwa

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK OPD	Penunjukan Pengurus dan Penjaga Shelter bagi Orang Terlantar dan Orang dengan Gangguan Jiwa pada Rumah Bahagia Bintan Tahun 2020
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	1-10 SDM	Penunjukan Pengurus dan Penjaga Shelter bagi Orang Terlantar dan Orang dengan Gangguan Jiwa pada Rumah Bahagia Bintan Tahun 2020
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran untuk kegiatan inovasi sudah ada sampai tahap pelaksanaan inovasi	Perlindungan Sosial bagi Orang Terlantar
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja di lingkungan pemerintah daerah dilakukan secara manual	Alur Pelayanan Orang Terlantar
5.	Bimtek Inovasi	-	Tidak Tersedia
6.	Program Dan Kegiatan Di Renstra OPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan pengembangan inovasi ke	Perlindungan Sosial bagi Orang Terlantar

		dalam Resntra	
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi hanya berjalan 1 OPD	Penunjukan Pengurus dan Penjaga Shelter bagi Orang Terlantar dan Orang dengan Gangguan Jiwa pada Rumah Bahagia Bintang Tahun 2020
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	-	Tidak Tersedia
10.	Pengelola Inovasi	ada pengelola dan Ditetapkan dengan SK OPD	Penunjukan Pengurus dan Penjaga Shelter bagi Orang Terlantar dan Orang dengan Gangguan Jiwa pada Rumah Bahagia Bintang Tahun 2020
11.	Ketersediaan Layanan Informasi	informasi melalui datang langsung	Tidak Tersedia
12.	Penyelesaian Pengaduan Layanan	-	Tidak Tersedia
13.	Tingkat Partisipasi Stakeholder	inovasi dilakukan dengan melibatkan masyarakat	Tidak Tersedia
14.	Kemudahan Layanan Informasi	-	Tidak Tersedia
15.	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	Hasil inovasi dapat dilakukan dalam waktu hitungan 3-7 hari	Tidak Tersedia
16.	Online Sistem	-	Tidak Tersedia
17.	Kecepatan Inovasi	Proses inovasi dapat dilakukan dalam waktu hitungan 3-7 bulan	Tidak Tersedia
18.	Kemanfaatan Inovasi	hasil manfaatnya dirasakan 1-100 orang	Tidak Tersedia
19.	Tingkat Kepuasan penggunaan inovasi daerah	-	Tidak Tersedia

20.	Sosialisasi Kebijakan	-	Tidak Tersedia
21.	Kualitas Inovasi Daerah	Ada Upload Video	Tidak Tersedia

3.3.24 Rumah Singgah Bagi Orang Terlantar

1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi

Rumah Singgah Bagi Orang Terlantar

1.2. Tahapan Inovasi

Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah

OPD – Dinas Sosial

1.4. Jenis Inovasi

Non Digital

1.5. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

1.6. Urusan Inovasi Daerah

Sosial

1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Latar belakang inovasi Rumah Singgah adalah mulai munculnya beberapa orang terlantar yang berada di wilayah Kabupaten Bintan. Hal ini disebabkan salah satunya karena Kabupaten Bintan sebagai salah satu daerah transit/ persinggahan dari wilayah-wilayah lain (dikarenakan Kabupaten Bintan memiliki melalui Pelabuhan Kijang yang penumpangnya berasal dari dari daerah-daerah lain) atau masuk melalui pelabuhan tikus yang sangat banyak di wilayah Kabupaten Bintan yang terjadi hampir setiap tahun.

Setiap orang terlantar akan ditampung di Rumah Singgah maksimal 14 hari dan kemudian dipulangkan ke daerah asal dengan melakukan koordinasi antara Dinas Sosial Kabupaten Bintan dengan Dinas Sosial dari daerah asal orang terlantar tersebut. Sehingga orang-orang tersebut bisa dikembalikan ke daerah asal mereka.

1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Menampung orang-orang terlantar yang mayoritas berasal dari luar Kabupaten Bintan. Hal ini dilakukan untuk menjaga ketentraman bagi masyarakat Kabupaten Bintan.

1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Orang-Orang terlantar yang datang dari luar Bintan mendapatkan penanganan yang layak.

1.10. Hasil Inovasi

Tersedianya tempat/wadah bagi orang-orang terlantar yang ada di Bintan sebelum mereka dikirim kembali ke wilayah asal.

2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.54
Indeks Inovasi Rumah Singgah Bagi Orang Terlantar

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK OPD	Penunjukan Pengurus dan Penjaga Shelter bagi Orang Terlantar dan Orang dengan Gangguan Jiwa pada Rumah Bahagia Bintan Tahun 2020
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	1-10 SDM	Penunjukan Pengurus dan Penjaga Shelter bagi Prang Terlantar dan Orang dengan Gangguan Jiwa pada Rumah Bahagia Bintan Tahun 2020

3.	Dukungan Anggaran	Anggaran untuk kegiatan inovasi sudah ada sampai tahap pelaksanaan inovasi	Perlindungan Sosial bagi Orang Terlantar
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja di lingkungan pemerintah daerah dilakukan secara manual	Alur Pelayanan Orang Terlantar
5.	Bimtek Inovasi	-	Tidak Tersedia
6.	Program Dan Kegiatan Di Renstra OPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan pengembangan inovasi ke dalam Resntra	Perlindungan Sosial bagi Orang Terlantar
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi hanya berjalan 1 OPD	Penunjukan Pengurus dan Penjaga Shelter bagi Orang Terlantar dan Orang dengan Gangguan Jiwa pada Rumah Bahagia Bintang Tahun 2020
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman Teknis	Pemulangan Orang terlantar
10.	Pengelola Inovasi	ada pengelola dan Ditetapkan dengan SK OPD	Penunjukan Pengurus dan Penjaga Shelter bagi Orang Terlantar dan Orang dengan Gangguan Jiwa pada Rumah Bahagia Bintang Tahun 2020
11.	Ketersediaan Informasi Layanan	informasi melalui datang langsung	Tidak Tersedia
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	-	Tidak Tersedia
13.	Tingkat Partisipasi Stakeholder	-	Tidak Tersedia
14.	Kemudahan Informasi Layanan	-	Tidak Tersedia
15.	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	Hasil inovasi dapat dilakukan dalam waktu	SOP Pemulangan Orang Terlantar

		hitungan 3-7 hari	
16.	Online Sistem	-	Tidak Tersedia
17.	Kecepatan Inovasi	Proses inovasi dapat dilakukan dalam waktu hitungan 3-7 bulan	Tidak Tersedia
18.	Kemanfaatan Inovasi	hasil manfaatnya dirasakan 1-100 orang	Tidak Tersedia
19.	Tingkat Kepuasan penggunaan inovasi daerah	-	Tidak Tersedia
20.	Sosialisasi Kebijakan	-	Tidak Tersedia
21.	Kualitas Inovasi Daerah	-	Tidak Tersedia

3.3.25 Secanting Beras

1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi

Secanting Beras

1.2. Tahapan Inovasi

Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah

OPD – Dinas Sosial

1.4. Jenis Inovasi

Non Digital

1.5. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

1.6. Urusan Inovasi Daerah

Sosial

1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Saat itu Bupati Bintan melihat masih banyak masyarakat Kabupaten Bintan yang tergolong kurang mampu namun tidak termasuk dalam daftar penerima bantuan Beras Miskin dari pemerintah. Selain itu, mayoritas PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang bekerja di Kabupaten Bintan berdomisili di Kota Tanjungpinang. Agar setiap PNS di Kabupaten Bintan memiliki kontribusi dalam membantu masyarakat Bintan maka Bupati memutuskan agar setiap PNS Kabupaten Bintan menyumbangkan 1 kg beras setiap bulan.

1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Melibatkan setiap PNS yang ada di Kabupaten Bintan untuk membantu masyarakat kurang mampu yang ada di Kabupaten Bintan.

1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Membantu masyarakat tidak mampu yang ada di Kabupaten Bintan dalam hal pemenuhan kebutuhan pokok terutama beras dengan melibatkan peran serta PNS Kabupaten Bintan.

1.10. Hasil Inovasi

Masyarakat tidak mampu di kabupaten Bintan dapat merasakan bantuan beras namun bukan yang didapatkan melalui program Beras Miskin oleh Pemerintah.

2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.55
Indeks Inovasi Secanting Beras

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	Perkada	Surat Edaran Nomor: 460/DINSOS/170 tentang Pelaksanaan Program Secanting Beras Kabupaten Bintan
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 31 keatas	Susunan Tim Koordinasi Program Secanting Beras Kabupaten Bintan

3.	Dukungan Anggaran	-	Tidak Tersedia
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja di lingkungan pemerintah daerah dilakukan secara manual	pengumpulan dan penyaluran beras dilakukan secara manual
5.	Bimtek Inovasi	Pernah 1 tahun 2 Kali melakukan Bimtek	BIMTEK dilakukan sekaligus launching program Secanting Beras
6.	Program Dan Kegiatan Di Renstra OPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan pengembangan inovasi ke dalam Resntra dan telah dilaksanakan	Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Bintan 2016-2021
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi hanya berjalan 3 OPD atau lebih	Susunan Tim Koordinasi Program Secanting Beras Kabupaten Bintan
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman Teknis	Surat Edaran Nomor: 460/DINSOS/170 tentang Pelaksanaan Program Secanting Beras Kabupaten Bintan
10.	Pengelola Inovasi	ada pengelola dan Ditetapkan dengan SK kepala daerah	Pembentukan Tim Koordinasi Program Secanting Beras Kabupaten Bintan
11.	Ketersediaan Informasi Layanan	informasi melalui datang langsung	Informasi mengenai pelayanan disampaikan pada saat launching program
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	-	Tidak Tersedia
13.	Tingkat Partisipasi Stakeholder	inovasi dilakukan dengan melibatkan masyarakat	Masyarakat sebagai penerima manfaat program secanting

			beras
14.	Kemudahan Informasi Layanan	-	Tidak Tersedia
15.	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	-	Tidak Tersedia
16.	Online Sistem	-	Tidak Tersedia
17.	Kecepatan Inovasi	Proses inovasi dapat dilakukan dalam waktu hitungan 3-7 bulan	Tidak Tersedia
18.	Kemanfaatan Inovasi	hasil manfaatnya dirasakan diatas 201 orang ketas	Manfaat Program Secanting Beras dirasakan oleh seluruh masyarakat Bintan yang kurang mampu
19.	Tingkat Kepuasan penggunaan inovasi daerah	-	Tidak Tersedia
20.	Sosialisasi Kebijakan	Ada Foto	Sosialisasi dilakukan berbarengan dengan launching Program Secanting Beras
21.	Kualitas Inovasi Daerah	Ada Upload Video	Innovative Government Award# Program - Secanting Beras Kabupaten Bintan

3.3.26 SIMPAD (Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah)

1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi

SIMPAD (Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah)

1.2. Tahapan Inovasi

Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah

OPD – Badan Pendapatan Daerah

1.4. Jenis Inovasi

Digital

1.5. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

1.6. Urusan Inovasi Daerah

Keuangan

1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Komponen pajak daerah ini merupakan komponen yang sangat menjanjikan dan selama ini pendapatan yang berasal dari perolehan hasil pajak daerah merupakan komponen yang memberikan sumbangan yang besar dalam struktur pendapatan yang berasal dari pendatan asli daerah. Komponen pajak daerah ini merupakan komponen yang sangat menjanjikan dan selama ini pendapatan yang berasal dari perolehan hasil pajak daerah merupakan komponen yang memberikan sumbangan yang besar dalam struktur pendapatan yang berasal dari pendatan asli daerah. Inovasi SIMPAD (Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah) ini dibuat untuk mempermudah pelaporan yang berkaitan dengan pendapatan daerah dari sektor pajak. Adapun 11 jenis pajak yang termasuk dalam pelayanan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan yakni pajak hotel; pajak restoran; pajak hiburan; pajak reklame; pajak penerangan jalan; pajak mineral bukan logam dan batuan; pajak parkir; pajak air tanah; pajak sarang burung walet; pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

1.8. Tujuan Inovasi Daerah

1. Terciptanya tertib administrasi pengelolaan pendapatan Daerah;
2. Dapat meningkatkan pendapatan Daerah, khususnya yang bersumber dari Pajak dan Retribusi Daerah;
3. Dapat mengurangi tingkat kebocoran Pajak dan Retribusi Daerah;

4. Dapat meningkatkan pelayanan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
5. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah; dan
6. Dapat menyajikan laporan dengan cepat dan akurat.

1.9. Manfaat Yang Diperoleh

1. Para wajib pajak dapat dengan mudah melaporkan kewajiban pajaknya secara transparan dan akuntabel;
2. Pelaporan pajak dan retribusi dapat dilakukan dengan cepat dan akurat;
3. Meningkatnya PAD dan meminimalisir kebocoran dari pajak dan retribusi.

1.10. Hasil Inovasi

Dengan kemudahan sistem yang ada para wajib menjadi lebih mudah dalam melakukan pelaporan secara cepat dan akurat. Selain itu inovasi dengan pelaporan yang akurat dapat meningkatkan PAD dari sektor pajak dan retribusi serta meminimalisir kebocoran.

2. INDIKATOR INOVASI

Tabel. 3.56

SIMPAD (Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah)

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	-	Tidak Tersedia
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	-	Tidak Tersedia
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran untuk kegiatan inovasi dalam tahapan sudah dilaksanakan dan sudah di evaluasi	Renstra Badan Pendapatan Daerah 2016-2021
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja di lingkungan pemerintah daerah sudah didukung system informasi online/	Pelaksanaan kerja di lingkungan pemerintah daerah sudah didukung system informasi

		daring	online/ daring
5.	Bimtek Inovasi	-	Tidak Tersedia
6.	Program Dan Kegiatan Di Renstra OPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan pengembangan inovasi ke dalam Resntra dan telah dilaksanakan	Renstra Badan Pendapatan Daerah 2016-2021
7.	Jejaring Inovasi	-	Tidak Tersedia
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	-	Tidak Tersedia
10.	Pengelola Inovasi	-	Tidak Tersedia
11.	Ketersediaan Informasi Layanan	informasi layanan dapat diakses secara online	informasi layanan dapat diakses secara online
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	terdapat "call center" layanan pengaduan pengguna	terdapat "call center" layanan pengaduan pengguna
13.	Tingkat Partisipasi Stakeholder	inovasi dilakukan dengan melibatkan masyarakat	inovasi dilakukan dengan melibatkan masyarakat
14.	Kemudahan Informasi Layanan	layanan melalui aplikasi online	layanan melalui aplikasi online
15.	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	-	Tidak Tersedia
16.	Online Sistem	ada dukungan melalui web aplikasi	web SIMPAD (Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah)
17.	Kecepatan Inovasi	-	Tidak Tersedia
18.	Kemanfaatan Inovasi	-	Tidak Tersedia
19.	Tingkat Kepuasan penggunaan inovasi daerah	-	Tidak Tersedia
20.	Sosialisasi Kebijakan	-	Tidak Tersedia
21.	Kualitas Inovasi Daerah	Ada Upload Video	SIMPAD (Sistem Informasi Manajemen

			Pendapatan Daerah)
--	--	--	--------------------

3.3.27 Budidaya Ulat Maggot Black Soldier Fly Secara Terpadu Desa Teluk Bakau

1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi

Budidaya Ulat Maggot Black Soldier Fly Secara Terpadu Desa Teluk Bakau

1.2. Tahapan Inovasi

Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah

Masyarakat

1.4. Jenis Inovasi

Non Digital

1.5. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

1.6. Urusan Inovasi Daerah

lingkungan hidup, pemberdayaan masyarakat dan Desa

1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Salah satu tantangan terbesar dalam usaha peternakan adalah efisiensi biaya pakan ternak. Umumnya, rata-rata biaya pakan menghabiskan 70-80% dari total biaya produksi ternak, dan biaya pakan menjadi salah satu faktor yang paling dominan dalam menentukan keuntungan usaha peternakan. Bagi para peternak di Indonesia, masalah ini selalu membayangi sejak dahulu, dimana pakan ternak di Indonesia dikenal mahal karena produk bahan baku utamanya didapat melalui jalur import. Mahalnya

pakan ternak ini dipengaruhi oleh bahan baku pakan itu sendiri, yakni tepung ikan sebagai sumber protein. Tingginya permintaan, terbatasnya produksi, serta ditambah pula dengan konsumsi ikan yang tinggi, mengakibatkan semakin berkurangnya bahan baku produksi pakan dan semakin meningkatkan harga tepung ikan.

Berangkat dari permasalahan bahan baku pakan ternak serta permasalahan sampah organik yang ada di Desa Teluk Bakau, maka, Bapak Muhammad Irpan, seorang peternak ayam Kampung (ayam buras) sekaligus sebagai salah seorang manager di sebuah resort yang ada di Desa Teluk Bakau, berusaha mencari solusi. Berbekal pengetahuan dan informasi yang diperoleh tentang budidaya ulat maggot dari lalat Black Soldier Fly, maka, Bapak Muhammad Irpan berusaha melakukan percobaan-percobaan untuk menghasilkan alternatif pakan bagi ternak serta sebagai pengurai sampah organik desa dengan memanfaatkan sampah-sampah organik yang berasal dari sampah rumah tangga, hotel dan resort, serta rumah makan sebagai pakan larva/maggot.

Telah diketahui bahwa larva pada fase pre-pupa dan pupa dari lalat Black Soldier Fly (*Hermetia Illicens*) merupakan salah satu alternatif sumber pakan yang memenuhi persyaratan sebagai sumber protein. Larva merupakan salah satu jenis pakan alami yang memiliki protein tinggi. Larva mengandung 41-42% protein kasar, 31-35% ekstrak eter, 14-15% abu, 4,8-5,1% kalsium, dan 0,60-0,63% fosfor dalam bentuk kering. Berdasarkan kandungan protein tersebut, maka larva Black Soldier Fly atau maggot ini layak untuk dijadikan sebagai sumber protein bahan pakan untuk mensubstitusi penggunaan tepung ikan.

Inovasi yang dilakukan oleh Bapak Muhammad Irpan menempati peringkat ke-3 pada Lomba Teknologi Tepat Guna (TTG) yang diadakan di tingkat Kabupaten Bintan. Tidak hanya itu, pada lomba TTG tingkat Provinsi Kepulauan Riau, Inovasi yang dilakukan oleh Bapak Muhammad Irpan bahkan menempati peringkat ke-2. Melihat Keberhasilan Bapak Muhammad Irpan, Pemerintah Desa Teluk

Bakau beserta Pos Pelayanan Teknologi (POSYANTEK) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Teluk Bakau menetapkan bahwa budidaya

ulat maggot perlu di kembangkan sebagai salah satu produk unggulan Desa Teluk Bakau. Tidak hanya itu, budidaya ulat maggot juga terdaftar dalam Program Inovasi Desa dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.

1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Budidaya ulat maggot Black Soldier Fly bertujuan untuk memenuhi permintaan pakan ternak alternatif bagi ikan dan unggas; serta sebagai pengurai sampah organik desa di Desa Teluk Bakau.

1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Budidaya ulat maggot Black Soldier Fly memiliki manfaat untuk memenuhi kebutuhan pakan ternak alternatif bagi ikan dan unggas; serta bermanfaat sebagai pengurai sampah organik desa di Desa Teluk Bakau.

1.10. Hasil Inovasi

Budidaya ulat maggot Black Soldier Fly berhasil menjadi pakan ternak alternatif bagi ikan dan unggas, serta berhasil menjadi pengurai sampah organik di Desa Teluk Bakau. Selain itu, kegiatan budidaya maggot secara terpadu juga berhasil menghasilkan produk inovatif unggulan desa yang bernilai tambah dan bernilai ekonomi.

2. INDIKATOR INOVASI

Tabel 3.57

Indeks Inovasi Budidaya Ulat Maggot Black Soldier Fly Secara Terpadu Desa Teluk Bakau

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
-----	---------------	-----------	--------------

1.	Regulasi Inovasi Daerah	-	Tidak Tersedia
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	-	Tidak Tersedia
3.	Dukungan Anggaran	-	Tidak Tersedia
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja di lingkungan pemerintah daerah dilakukan secara manual	Penggunaan IT Budidaya Ulat Maggot
5.	Bimtek Inovasi	Pernah 1 tahun 2 Kali melakukan Bimtek	BIMTEK/Pelatihan/Sosialisasi Budidaya Ulat Maggot
6.	Program Dan Kegiatan Di Renstra OPD	-	Tidak Tersedia
7.	Jejaring Inovasi	-	Tidak Tersedia
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	-	Tidak Tersedia
10.	Pengelola Inovasi	-	Tidak Tersedia
11.	Ketersediaan Informasi Layanan	informasi diakses melalui telp	Ketersediaan Informasi Layanan Budidaya Ulat Maggot
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	terdapat "call center" layanan pengaduan pengguna	Penyelesaian Layanan Pengaduan Budidaya Ulat Maggot
13.	Tingkat Partisipasi Stakeholder	inovasi dilakukan dengan melibatkan masyarakat	Tingkat Partisipasi Stakeholder dalam Budidaya Ulat Maggot
14.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Telp	Kemudahan Informasi Layanan Budidaya Ulat Maggot
15.	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	-	Tidak Tersedia
16.	Online Sistem	-	Tidak Tersedia
17.	Kecepatan Inovasi	-	Tidak Tersedia
18.	Kemanfaatan Inovasi	hasil manfaatnya dirasakan diatas 201 orang ketas	Kemanfaatan Inovasi Budidaya Ulat Maggot
19.	Tingkat Kepuasan penggunaan inovasi	-	Tidak Tersedia

	daerah		
20.	Sosialisasi Kebijakan	Ada Foto	Sosialisasi Budidaya Ulat Maggot
21.	Kualitas Inovasi Daerah	Ada Upload Video	Budidaya Ulat Maggot Black Soldier Fly Secara Terpadu

3.3.28 Kerajinan Cangkang Gonggong Desa Sebong Lagoi

1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi

Kerajinan Cangkang Gonggong Desa Sebong Lagoi

1.2. Tahapan Inovasi

Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah

Masyarakat

1.4. Jenis Inovasi

Non Digital

1.5. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

1.6. Urusan Inovasi Daerah

pemberdayaan masyarakat dan Desa

1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Desa Sebong Lagoi, Kecamatan Teluk sebong adalah salah satu desa yang terletak di daerah dataran tinggi yang berdekatan dengan pantai di Kabupaten Bintan. Letak Desa Sebong Lagoi berdekatan dengan pantai dan berada dalam Kawasan Wisata Terpadu Bintan Lagoon mendorong salah seorang warga desa, Sukriadi (31 tahun), untuk berinovasi. Inovasi Bapak Sukriadi adalah dalam bentuk pemanfaatan limbah cangkang Gonggong menjadi produk kerajinan tangan untuk mengurangi

pencemaran disekitar pantai.

Bapak Sukriadi, yang sehari-hari bekerja sebagai karyawan swasta, juga menjadi pengrajin dalam mengolah kerajinan cangkang Gonggong. Bapak Sukriadi juga membuka sebuah galeri souvenir yang diberi nama “Aok Malay”. Produk inovatif Bapak Sukriadi dalam mengolah limbah cangkang Gonggong adalah gantungan kunci, tempelan magnet kulkas, serta produk kerajinan lainnya.

Berkat ketekunan dan keuletannya, Bapak Sukriadi mampu menghasilkan pendapatan tambahan dengan cara mengolah limbah cangkang Gonggong dengan bermodalkan cangkang Gonggong, cat, pena warna, lem, magnet dan ring. Semua limbah diolah menjadi kerajinan yang mampu bersaing dan menjadi karya seni bernilai jual tinggi.

1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Tujuan inovasi yang dilakukan oleh Bapak Sukriadi adalah untuk mengurangi limbah cangkang Gonggong disekitar pantai Desa Sebong Lagoi. Disamping itu, tujuan lainnya adalah untuk mendapatkan sumber pendapatan lainnya bagi meningkatkan tingkat perekonomian.

1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Manfaat inovasi yang dilakukan oleh Bapak Sukriadi adalah tersedianya sumber pemasukan tambahan bagi meningkatkan perekonomian keluarga dan warga masyarakat desa, serta berkurangnya limbah cangkang Gonggong disekitar pantai Desa Sebong Lagoi.

1.10. Hasil Inovasi

Hasil inovasi yang dilakukan Bapak Sukriadi adalah menghasilkan produk unggulan dan inovatif Desa Sebong Lagoi dengan memanfaatkan limbah cangkang Gonggong. Manfaat lainnya adalah tersedianya sumber pemasukan tambahan bagi meningkatkan perekonomian keluarga dan warga masyarakat desa, serta berkurangnya limbah cangkang Gonggong disekitar pantai Desa Sebong Lagoi.

2. INDIKATOR INOVASI

Tabel 3.58
Indeks Inovasi Kerajinan Cangkang Gonggong Desa Sebong Lagoi

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	-	Tidak Tersedia
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	-	Tidak Tersedia
3.	Dukungan Anggaran	-	Tidak Tersedia
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja di lingkungan pemerintah daerah dilakukan secara manual	Penggunaan IT
5.	Bimtek Inovasi	-	Tidak Tersedia
6.	Program Dan Kegiatan Di Renstra OPD	-	Tidak Tersedia
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi hanya berjalan 2 OPD	Jejaring Inovasi
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	-	Tidak Tersedia
10.	Pengelola Inovasi	-	Tidak Tersedia
11.	Ketersediaan Informasi Layanan	informasi diakses melalui telp	Ketersediaan Informasi Layanan
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	terdapat "call center" layanan pengaduan pengguna	Penyelesaian Layanan Pengaduan
13.	Tingkat Partisipasi Stakeholder	inovasi dilakukan melibatkan masyarakat	Tingkat Partisipasi Stakeholder
14.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Telp	Kemudahan Informasi Layanan
15.	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	-	Tidak Tersedia
16.	Online Sistem	-	Tidak Tersedia
17.	Kecepatan Inovasi	-	Tidak Tersedia
18.	Kemanfaatan Inovasi	hasil manfaatnya dirasakan diatas 201 orang ketas	Kemanfaatan Inovasi
19.	Tingkat Kepuasan penggunaan inovasi daerah	-	Tidak Tersedia
20.	Sosialisasi Kebijakan	-	Tidak Tersedia

21.	Kualitas Inovasi Daerah	Ada Upload Video	Kerajinan Cangkang Gonggong Desa Sebong Lagoi
-----	-------------------------	------------------	---

3.3.29 Budidaya Lebah Madu Kelulut Desa Lancang Kuning

1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi

Budidaya Lebah Madu Kelulut Desa Lancang Kuning

1.2. Tahapan Inovasi

Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah

Masyarakat

1.4. Jenis Inovasi

Non Digital

1.5. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

1.6. Urusan Inovasi Daerah

pemberdayaan masyarakat dan Desa

1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Kondisi geografis Desa Lancang Kuning sebagian besar merupakan wilayah hutan sehingga cocok untuk membudidayakan lebah madu, khususnya jenis lebah madu kelulut (*Trigona Itama*). Lebah madu kelulut merupakan lebah madu yang tidak menyengat serta berukuran kecil. Umumnya, koloni lebah dapat ditemukan pada batang - batang pohon, ruas bambu, lubang di tanah, atau bebatuan sebagai rumah tempat lebah berkembang biak. Suhu ideal yang disukai oleh lebah

kelulut berkisar antara 18-24 derajat celcius, dengan kelembaban sekitar 60-70%.

Lebah kelulut menyukai lingkungan yang banyak memiliki tanaman atau pepohonan yang menghasilkan bunga sebagai sumber makanannya. Lebah kelulut mengumpulkan sari bunga (nektar) di sekitar koloninya hingga radius antara 100m-500 meter. Lebah kelulut menghasilkan madu dengan memiliki rasa asam manis yang berkhasiat jika dikonsumsi.

Potensi yang dihasilkan oleh lebah madu jenis ini sangat menggiurkan apalagi jika dibudidayakan secara baik dan benar, madu lebah kelulut dapat dijual dengan harga Rp. 100.000,- per botol ukuran 250 ml, atau bahkan lebih mahal lagi.

Oleh karenanya, dengan melihat potensi ekonomi melalui budidaya lebah madu kelulut, masyarakat Desa Lancang Kuning kemudian bersama-sama membudidayakan sekaligus melestarikan lebah madu kelulut dengan tujuan untuk membangun perekonomian desa ke depannya.

Budidaya lebah madu kelulut Desa Lancang Kuning juga terdaftar dalam Program Inovasi Desa dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Dengan terdaftarnya budidaya lebah madu kelulut dalam Program Inovasi Desa, diharapkan produktivitas serta kualitas madu kelulut yang dihasilkan oleh Desa Lancang Kuning, dapat meningkat serta berkontribusi bagi kemakmuran desa.

Untuk itu, Pemerintah Desa Lancang Kuning juga turut berpartisipasi, khususnya dalam pengadaan bahan baku seperti botol kemasan berbahan kaca yang berukuran minimalis yang sesuai dengan permintaan konsumen. Selain itu, Pemerintah Desa Lancang Kuning juga mengikutsertakan usaha peternakan lebah madu kelulut kedalam program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dengan begitu, diharapkan produk madu kelulut Desa Lancang Kuning dapat memperluas pemasaran hingga keluar

daerah.

1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Budidaya lebah madu kelulut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Lancang Kuning.

1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Budidaya lebah madu kelulut bermanfaat dalam meningkatkan pendapatan masyarakat Desa Lancang Kuning melalui penjualan madu lebah kelulut, serta melalui daya tarik wisata lokasi peternakan lebah madu.

1.10. Hasil Inovasi

Budidaya lebah madu kelulut berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Lancang Kuning melalui penjualan produk madu lebah kelulut, serta melalui peningkatan daya tarik wisata lokasi peternakan lebah madu.

2. INDIKATOR INOVASI

Tabel 3.59

Indeks Inovasi Budidaya Lebah Madu Kelulut Desa Lancang Kuning

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	-	Tidak Tersedia
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	-	Tidak Tersedia
3.	Dukungan Anggaran	-	Tidak Tersedia
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja di lingkungan pemerintah daerah dilakukan secara manual	Penggunaan IT Budidaya Lebah Madu
5.	Bimtek Inovasi	-	Tidak Tersedia
6.	Program Dan Kegiatan Di Renstra OPD	-	Tidak Tersedia

7.	Jejaring Inovasi	Inovasi hanya berjalan 3 OPD atau lebih	Jejaring Inovasi
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	-	Tidak Tersedia
10.	Pengelola Inovasi	-	Tidak Tersedia
11.	Ketersediaan Informasi Layanan	informasi diakses melalui telp	Ketersediaan Informasi Layanan Budidaya Lebah Madu
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	terdapat "call center" layanan pengaduan pengguna	Penyelesaian Layanan Pengaduan Budidaya Lebah Madu
13.	Tingkat Partisipasi Stakeholder	inovasi dilakukan dengan melibatkan masyarakat	Tingkat Partisipasi Stakeholder Budidaya Lebah Madu
14.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Telp	Kemudahan Informasi Layanan Budidaya Lebah Madu
15.	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	-	Tidak Tersedia
16.	Online Sistem	-	Tidak Tersedia
17.	Kecepatan Inovasi	-	Tidak Tersedia
18.	Kemanfaatan Inovasi	hasil manfaatnya dirasakan 1-100 orang	Kemanfaatan Inovasi Budidaya Lebah Madu
19.	Tingkat Kepuasan penggunaan inovasi daerah	-	Tidak Tersedia
20.	Sosialisasi Kebijakan	Ada Foto	Sosialisasi Inovasi
21.	Kualitas Inovasi Daerah	Ada Upload Video	Budidaya Lebah Madu Kelulut Desa Lancang Kuning

3.3.30 Dendeng Ikan Tamban Desa Dendun

1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi

Dendeng Ikan Tamban Desa Dendun

1.2. Tahapan Inovasi Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah Masyarakat

1.4. Jenis Inovasi Non Digital

1.5. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

1.6. Urusan Inovasi Daerah pemberdayaan masyarakat dan Desa

1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Pemerintah Desa Dendun, Kecamatan Mantang, melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Desa dan BUMDes, aktif dalam usaha pengolahan ikan tamban segar menjadi dendeng ikan tamban. Usaha ini dirintis oleh ibu-ibu yang memanfaatkan ikan tamban dari hasil tangkapan nelayan yang ada di Desa Dendun untuk diolah menjadi dendeng ikan. Inisiatif dan ide pengolahan dendeng ikan berawal dari melimpahnya ikan tamban yang di dapat dari nelayan Desa Dendun, terutama saat musim panen. Dari usaha pengolahan ini, hasil tangkapan nelayan tersebut dimanfaatkan menjadi bahan baku produk unggulan desa yang inovatif dan tahan lama, serta bernilai tambah, yaitu dalam bentuk dendeng ikan tamban.

Hasil olahan dendeng ikan tamban juga cukup menjanjikan karena meningkatkan pendapatan nelayan, ibu-ibu anggota KUBE Desa, serta masyarakat desa secara umum. Disamping itu, mengingat Desa Dendun letak geografisnya di kelilingi oleh lautan dengan hasil tangkapan nelayan yang melimpah, maka, tidak salah jika usaha olahan ikan tamban menjadi produk unggulan daerah yang inovatif dan bernilai tambah ini diberi apresiasi.

Dendeng Tamban khas Desa Dendun juga terdaftar dalam Program Inovasi Desa dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.

1.8. Tujuan Inovasi Daerah

tujuan inovasi adalah untuk memanfaatkan ikan tamban hasil tangkapan nelayan, terutama pada saat musim panen, untuk menjadi produk unggulan desa yang inovatif dan bernilai tambah. Disamping itu, tujuan lainnya adalah untuk meningkatkan pendapatan nelayan, ibu-ibu anggota KUBE Desa, serta masyarakat Desa Dendun secara umum.

1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Manfaat yang diperoleh adalah terserapnya ikan tamban hasil tangkapan nelayan Desa Dendun, terutama pada saat musim panen untuk kemudian di olah menjadi produk unggulan desa yang inovatif dan bernilai tambah. Manfaat lainnya adalah meningkatnya pendapatan nelayan, ibu-ibu anggota KUBE Desa, serta masyarakat Desa Dendun secara umum.

1.10. Hasil Inovasi

Hasil inovasi adalah: Desa Dendun memiliki produk unggulan desa yang inovatif dan bernilai tambah. Hasil lainnya adalah termanfaatkannya ikan tamban hasil tangkapan nelayan, terutama pada saat musim panen serta meningkatnya pendapatan nelayan, ibu-ibu anggota KUBE Desa, dan masyarakat Desa Dendun secara umum.

2. INDIKATOR INOVASI

Tabel 3.60
Indeks Inovasi Dendeng Ikan Tamban Desa Dendun

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	-	Tidak Tersedia
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	-	Tidak Tersedia
3.	Dukungan Anggaran	-	Tidak Tersedia

4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja di lingkungan pemerintah daerah dilakukan secara manual	Penggunaan IT
5.	Bimtek Inovasi	-	Tidak Tersedia
6.	Program Dan Kegiatan Di Renstra OPD	-	Tidak Tersedia
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi hanya berjalan 1 OPD	Jejaring Inovasi
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	-	Tidak Tersedia
10.	Pengelola Inovasi	-	Tidak Tersedia
11.	Ketersediaan Informasi Layanan	informasi diakses melalui telp	Ketersediaan Informasi Layanan
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	terdapat "call center" layanan pengguna	Penyelesaian Layanan Pengaduan
13.	Tingkat Partisipasi Stakeholder	inovasi dilakukan dengan melibatkan masyarakat	Tingkat Partisipasi Stakeholder
14.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Telp	Kemudahan Informasi Layanan
15.	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	-	Tidak Tersedia
16.	Online Sistem	-	Tidak Tersedia
17.	Kecepatan Inovasi	-	Tidak Tersedia
18.	Kemanfaatan Inovasi	hasil manfaatnya dirasakan diatas 201 orang ketas	Kemanfaatan Inovasi
19.	Tingkat Kepuasan penggunaan inovasi daerah	-	Tidak Tersedia
20.	Sosialisasi Kebijakan	-	Tidak Tersedia
21.	Kualitas Inovasi Daerah	Ada Upload Video	Dendeng Ikan Tamban Desa Dendun

3.3.31 Pengolahan Salak Desa Lancang Kuning

1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi

Pengolahan Salak Desa Lancang Kuning

1.2. Tahapan Inovasi

Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah

Masyarakat

1.4. Jenis Inovasi

Non Digital

1.5. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

1.6. Urusan Inovasi Daerah

pemberdayaan masyarakat dan Desa

1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Desa Lancang Kuning terletak di Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Bintan. Desa dengan penduduk sekitar 1.503 jiwa ini disamping memiliki potensi pengembangan peternakan lebah madu kelulut, juga memiliki produk unggulan lainnya, yaitu buah salak. Potensi buah salak di Desa Lancang Kuning juga melimpah karena hampir setiap rumah masyarakat desa memiliki pohon salak. Namun, potensi buah salak tersebut memerlukan inovasi untuk dapat bermanfaat bagi pembangunan desa, terutama dalam pengolahan buah salak yang melimpah jumlahnya agar menjadi produk-produk inovatif yang memiliki nilai jual tambah.

Inisiatif untuk melakukan inovasi muncul dari KUBE Bawal Desa Lancang Kuning. Inisiatif tersebut muncul karena masyarakat umumnya mengkonsumsi buah salak sebagai buah segar, sedangkan permintaan pasar cenderung menginginkan produk kreatif yang dapat menarik pembeli. KUBE Bawal kemudian memanfaatkan buah salak sebagai bahan baku untuk memproduksi produk inovatif bernilai tambah seperti aneka kue, cake salak, dodol salak, dan kurma salak.

Tidak hanya itu, pemerintah Desa Lancang Kuning juga memberikan dukungan atas inisiatif untuk menghasilkan produk unggulan dengan menerbitkan peraturan desa tentang produk unggulan desa yaitu olahan kuliner yang berbahan baku buah salak.

Kuliner Khas Bintang Berbahan Baku Buah Salak di Desa Lancang Kuning juga terdaftar dalam Program Inovasi Desa dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.

1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Tujuan inovasi adalah untuk mengantisipasi melimpahnya hasil panen buah salak yang tidak terjual serta bertujuan untuk menciptakan produk inovatif berupa kuliner berbahan baku salak. Tujuan lainnya yang ingin dicapai adalah peningkatan pendapatan masyarakat melalui pemanfaatan potensi desa, yaitu buah salak menjadi aneka olahan kuliner.

1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Manfaat inovasi adalah hasil panen buah salak yang melimpah dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku olahan kuliner, serta meningkatkan pendapatan masyarakat desa melalui penjualan produk-produk kuliner inovatif.

1.10. Hasil Inovasi

Hasil inovasi adalah meningkatnya pemanfaatan buah salak sebagai bahan baku olahan kuliner, serta meningkatnya pendapatan masyarakat desa melalui penjualan produk-produk kuliner inovatif.

2. INDIKATOR INOVASI

Tabel 3.61
Indeks Inovasi Pengolahan Salak Desa Lancang Kuning

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	-	Tidak Tersedia
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	-	Tidak Tersedia
3.	Dukungan Anggaran	-	Tidak Tersedia

4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja di lingkungan pemerintah daerah dilakukan secara manual	Penggunaan IT
5.	Bimtek Inovasi	-	Tidak Tersedia
6.	Program Dan Kegiatan Di Renstra OPD	-	Tidak Tersedia
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi hanya berjalan 3 OPD atau lebih	Jejaring Inovasi
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	-	Tidak Tersedia
10.	Pengelola Inovasi	-	Tidak Tersedia
11.	Ketersediaan Informasi Layanan	informasi diakses melalui telp	Ketersediaan Informasi Layanan
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	terdapat "call center" layanan pengaduan pengguna	Penyelesaian Layanan Pengaduan
13.	Tingkat Partisipasi Stakeholder	inovasi dilakukan dengan melibatkan masyarakat	Tingkat Partisipasi Stakeholder
14.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Telp	Kemudahan Informasi Layanan
15.	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	-	Tidak Tersedia
16.	Online Sistem	-	Tidak Tersedia
17.	Kecepatan Inovasi	-	Tidak Tersedia
18.	Kemanfaatan Inovasi	hasil manfaatnya dirasakan diatas 201 orang ketas	Kemanfaatan Inovasi
19.	Tingkat Kepuasan penggunaan inovasi daerah	-	Tidak Tersedia
20.	Sosialisasi Kebijakan	Ada Foto	Sosialisasi Inovasi
21.	Kualitas Inovasi Daerah	Ada Upload Video	Pengolahan Kuliner Salak Bintang

3.3.32 Peningkatan Pemanfaatan Taman Bacaan Masyarakat Desa Toapaya Utara

1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi

Peningkatan Pemanfaatan Taman Bacaan Masyarakat Desa Toapaya Utara

1.2. Tahapan Inovasi

Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah

Masyarakat

1.4. Jenis Inovasi

Non Digital

1.5. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

1.6. Urusan Inovasi Daerah

pemberdayaan masyarakat dan Desa

1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Desa Toapaya Utara yang terletak di Kecamatan Toapaya, Kabupaten Bintan, melakukan inovasi untuk meningkatkan mutu pendidikan dan kreatifitas masyarakat setempat dengan melakukan peningkatan pemanfaatan Taman Bacaan Masyarakat (TBM). Selama ini, pemanfaatan TBM hanya sebatas sebagai tempat penyediaan buku-buku bacaan, serta jarang dikunjungi oleh masyarakat desa. Ditambah pula dengan kegiatan anak-anak setempat yang lebih banyak beraktifitas dan menghabiskan waktu belajar dirumah masing-masing serta les secara individu, menjadikan TMB Desa Toapaya Utara semakin jarang dikunjungi. Oleh karenanya, Desa Toapaya Utara mengambil inisiatif untuk memfokuskan tempat kegiatan belajar atau les anak-anak pada satu tempat, yaitu di TBM.

Melalui inisiatif dan inovasi peningkatan pemanfaatan TMB, TBM yang didirikan pada tahun 2008 tersebut, kini menjadi pusat kegiatan dan informasi pendidikan bagi masyarakat serta anak-anak Desa Toapaya Utara dengan berbagai kegiatan, seperti latihan Drum Band anak, les

anak-anak, latihan menari, serta membuat keterampilan. Tidak sampai disitu, TBM Desa Toapaya Utara juga melakukan pembenahan diri yakni dengan melakukan seleksi tenaga pengajar, serta menyediakan insentif murni bagi tenaga pengajar dari APBDes Toapaya Utara.

TBM Desa Toapaya Utara juga terdaftar dalam Program Inovasi Desa dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.

1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Tujuan inovasi daerah adalah untuk meningkatkan pemanfaatan TBM Desa Toapaya Utara agar menjadi pusat informasi dan pendidikan bagi masyarakat serta anak-anak desa.

1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Manfaat inovasi adalah TBM Desa Toapaya Utara menjadi pusat informasi dan pendidikan bagi masyarakat serta anak-anak desa. Manfaat lainnya adalah anak-anak desa mendapatkan berbagai kegiatan, seperti latihan Drum Band anak, les anak-anak, latihan menari, serta membuat keterampilan.

1.10. Hasil Inovasi

Hasil inovasi adalah TBM Desa Toapaya Utara menjadi pusat informasi dan pendidikan bagi masyarakat serta anak-anak desa. Manfaat lainnya adalah anak-anak desa mendapatkan berbagai kegiatan, seperti latihan Drum Band anak, les anak-anak, latihan menari, serta membuat keterampilan.

2. INDIKATOR INOVASI

Tabel 3.62

Indeks Inovasi Peningkatan Pemanfaatan Taman Bacaan Masyarakat Desa Toapaya Utara

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	-	Tidak Tersedia

2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	-	Tidak Tersedia
3.	Dukungan Anggaran	-	Tidak Tersedia
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja di lingkungan pemerintah daerah dilakukan secara manual	Penggunaan IT
5.	Bimtek Inovasi	-	Tidak Tersedia
6.	Program Dan Kegiatan Di Renstra OPD	-	Tidak Tersedia
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi hanya berjalan 2 OPD	Jejaring Inovasi
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	-	Tidak Tersedia
10.	Pengelola Inovasi	-	Tidak Tersedia
11.	Ketersediaan Informasi Layanan	informasi diakses melalui telp	Ketersediaan Informasi Layanan
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	terdapat "call center" layanan pengaduan pengguna	Penyelesaian Layanan Pengaduan
13.	Tingkat Partisipasi Stakeholder	inovasi dilakukan dengan melibatkan masyarakat	Tingkat Partisipasi Stakeholder
14.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Telp	Kemudahan Informasi Layanan
15.	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	-	Tidak Tersedia
16.	Online Sistem	-	Tidak Tersedia
17.	Kecepatan Inovasi	-	Tidak Tersedia
18.	Kemanfaatan Inovasi	hasil manfaatnya dirasakan diatas 201 orang ketas	Kemanfaatan Inovasi
19.	Tingkat Kepuasan penggunaan inovasi daerah	-	Tidak Tersedia
20.	Sosialisasi Kebijakan	-	Tidak Tersedia
21.	Kualitas Inovasi Daerah	Ada Upload Video	Taman Bacaan Masyarakat Terpadu

3.3.33 Ekowisata Desa Toapaya Selatan

1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi

Ekowisata Desa Toapaya Selatan

1.2. Tahapan Inovasi

Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah

Masyarakat

1.4. Jenis Inovasi

Non Digital

1.5. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

1.6. Urusan Inovasi Daerah

pemberdayaan masyarakat dan Desa

1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Desa Toapaya Selatan merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Toapaya, Kabupaten Bintan. Desa Toapaya Selatan memiliki luas wilayah sebesar 9,18 km² serta dihuni oleh 3.263 jiwa penduduk. Inovasi yang dilakukan oleh Desa Toapaya Selatan berupa pengembangan daerah wisata berbasis alam (ekowisata) yang memanfaatkan lahan serta potensi alam desa bernama TOSELA (Toapaya Selatan) Ekowisata. Inovasi desa dilatarbelakangi oleh potensi alam yang belum dimanfaatkan secara optimal, tingginya tingkat pengangguran dikalangan remaja, serta belum optimalnya Badan Usaha Milik Desa dalam menghasilkan PADes (Pendapatan Asli Desa).

Dengan semangat inovasi, Pemerintah Desa Toapa Selatan, melalui Permendagri Nomor 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, berinisiatif menganggarkan belanja pengadaan barang berupa *boat* (kapal), *All Terrain Vehicle* (kendaraan segala medan), atraksi panahan, sepeda

serta tenda kemping dengan tujuan untuk mengembangkan potensi wisata desa berbasis masyarakat (*community based ecotourism*).

Kegiatan Ekowisata Desa Toapaya Selatan juga dikelola oleh BUMDes Mitra Karya Sejahtera yang besinergi dengan pemerintahan Desa Toapaya Selatan dan masyarakat desa. Tujuan akhir dari sinergitas antara Pemerintah Desa Toapaya Selatan, BUMDes Mitra Karya Sejahtera, dan masyarakat desa adalah meningkatnya PADes, serta mensejahterakan masyarakat Desa Toapaya Selatan.

Ekowisata Desa Toapaya Selatan terdaftar dalam Program Inovasi Desa dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.

1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Tujuan inovasi adalah untuk mengembangkan potensi alam desa yang belum dimanfaatkan secara optimal. Tujuan lainnya adalah untuk membuka lapangan pekerjaan guna menurunkan tingkat pengangguran dikalangan remaja, serta memberdayakan Badan Usaha Milik Desa dalam menghasilkan PADes (Pendapatan Asli Desa).

1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Manfaat inovasi adalah potensi alam desa dapat dimanfaatkan secara optimal, terbukanya lapangan pekerjaan bagi remaja desa, serta diberdayakannya Badan Usaha Milik Desa dalam menghasilkan PADes (Pendapatan Asli Desa).

1.10. Hasil Inovasi

Hasil inovasi adalah termanfaatkannya potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia Desa Toapaya Selatan. Hasil lainnya adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa, aparatur pemerintahan desa, serta lembaga masyarakat desa karena bertambahnya sumber PADes. Disamping itu, Desa Toapaya Selatan juga mampu menjadi desa mandiri dengan pengelolaan objek ekowisata desa, tersedianya fasilitas

usaha yang beragam dalam menunjang perekonomian masyarakat desa, serta meningkatnya aset desa melalui kegiatan-kegiatan ekowisata.

2. INDIKATOR INOVASI

Tabel 3.63
Indeks Inovasi Ekowisata Desa Toapaya Selatan

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	-	Tidak Tersedia
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	-	Tidak Tersedia
3.	Dukungan Anggaran	-	Tidak Tersedia
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja di lingkungan pemerintah daerah dilakukan secara manual	Penggunaan IT
5.	Bimtek Inovasi	-	Tidak Tersedia
6.	Program Dan Kegiatan Di Renstra OPD	-	Tidak Tersedia
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi hanya berjalan 3 OPD atau lebih	Jejaring Inovasi
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	-	Tidak Tersedia
10.	Pengelola Inovasi	-	Tidak Tersedia
11.	Ketersediaan Informasi Layanan	informasi diakses melalui telp	Ketersediaan Informasi Layanan Desa Wisata Toapaya Selatan
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	terdapat "call center" layanan pengaduan pengguna	Layanan Pengaduan
13.	Tingkat Partisipasi Stakeholder	inovasi dilakukan dengan melibatkan masyarakat dan akademisi serta media massa	Partisipasi Stakeholder
14.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Telp	Kemudahan Informasi Layanan
15.	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	-	Tidak Tersedia
16.	Online Sistem	-	Tidak Tersedia
17.	Kecepatan Inovasi	-	Tidak Tersedia

18.	Kemanfaatan Inovasi	hasil manfaatnya dirasakan diatas 201 orang ketas	Kemanfaatan Inovasi
19.	Tingkat Kepuasan penggunaan inovasi daerah	-	Tidak Tersedia
20.	Sosialisasi Kebijakan	Ada Foto	Sosialisasi Inovasi
21.	Kualitas Inovasi Daerah	Ada Upload Video	Ekowisata Desa Toapaya Selatan

3.3.34 Destinasi Wisata Telaga Biru Desa Busung

1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi

Destinasi Wisata Telaga Biru Desa Busung

1.2. Tahapan Inovasi

Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah

Masyarakat

1.4. Jenis Inovasi

Non Digital

1.5. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

1.6. Urusan Inovasi Daerah

pemberdayaan masyarakat dan Desa

1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Desa Busung merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan Seri Kuala Lobam, Kabupaten Bintan. Desa Busung memiliki luas wilayah 19,13 km²

serta memiliki potensi alam untuk dapat dimanfaatkan sebagai objek wisata. Salah satu potensi alam tersebut adalah Telaga Biru yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa sebagai objek wisata.

Telaga Biru, sebagai produk wisata inovatif, merupakan eks tambang pasir yang tidak dikelola sejak lama. Oleh karenanya, masyarakat Desa Busung berinisiatif untuk memanfaatkan hamparan pasir dan telaga buatan dari aktifitas pertambangan diatas lahan milik swasta menjadi objek wisata.

Sebagai objek wisata, Telaga Biru dikunjungi oleh wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. Masyarakat Desa Busung membuka objek wisata dengan menambah fasilitas pendukung serta atraksi lainnya untuk menarik minat pengunjung. Tidak lupa pula, Pemerintah Desa Busung bekerjasama dengan pihak pemilik lahan dalam kepengurusan surat izin pinjam pakai lahan untuk dimanfaatkan sebagai objek wisata. Untuk pengelolaan objek wisata tersebut, Pemerintah Desa Busung juga membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Dengan dialihfungsikannya lahan eks tambang pasir menjadi objek wisata Telaga Biru, perekonomian masyarakat Desa Busung dapat meningkat serta menjadi sumber pendapatan asli daerah desa (PADes).

Objek Wisata Telaga Biru Desa Busung terdaftar dalam Program Inovasi Desa dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.

1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Inovasi bertujuan untuk mengalihfungsikan lahan bekas tambang pasir menjadi objek wisata. Disamping itu, tujuan lainnya adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa melalui pengelolaan dan pemanfaatan objek wisata yang dikelola secara swadaya oleh masyarakat desa dan BUMDes.

1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Manfaat yang diperoleh adalah terciptanya objek wisata baru dari alihfungsi lahan bekas tambang pasir menjadi objek wisata Telaga Biru. Manfaat lainnya adalah terciptanya lapangan pekerjaan, serta

meningkatnya perekonomian masyarakat desa dan pendapatan asli desa yang bersumber dari kunjungan wisatawan ke objek wisata.

1.10. Hasil Inovasi

Hasil inovasi adalah terciptanya objek wisata Telaga Biru yang terletak di Desa Busung. Hasil lainnya adalah meningkatnya perekonomian masyarakat desa dan pendapatan asli desa yang bersumber dari kunjungan wisatawan ke objek wisata desa.

2. INDIKATOR INOVASI

Tabel 3.64
Indeks Inovasi Destinasi Wisata Telaga Biru Desa Busung

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	-	Tidak Tersedia
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	11-30 SDM	Pembentukan Kelompok Gurun Telaga Biru Desa Busung Tahun 2018
3.	Dukungan Anggaran	-	Tidak Tersedia
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja di lingkungan pemerintah daerah dilakukan secara manual	Penggunaan IT
5.	Bimtek Inovasi	-	Tidak Tersedia
6.	Program Dan Kegiatan Di Renstra OPD	-	Tidak Tersedia
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi hanya berjalan 3 OPD atau lebih	Jejaring Inovasi
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	-	Tidak Tersedia
10.	Pengelola Inovasi	ada Pengelola namun Tidak ditetapkan dengan SK OPD	SK Kepada Desa Busung Tentang Pembentukan Kelompok Gurun Telaga Biru Desa Busung Tahun 2018
11.	Ketersediaan Informasi Layanan	informasi diakses melalui telp	Ketersediaan Informasi Layanan
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	terdapat "call center" layanan pengaduan pengguna	Layanan Pengaduan

13.	Tingkat Partisipasi Stakeholder	inovasi dilakukan dengan melibatkan masyarakat dan akademisi serta media massa	Tingkat Partisipasi Stakeholder
14.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Telp	Ketersediaan Informasi Layanan
15.	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	-	Tidak Tersedia
16.	Online Sistem	-	Tidak Tersedia
17.	Kecepatan Inovasi	-	Tidak Tersedia
18.	Kemanfaatan Inovasi	hasil manfaatnya dirasakan diatas 201 orang ketas	Kemanfaatan Inovasi
19.	Tingkat Kepuasan penggunaan inovasi daerah	-	Tidak Tersedia
20.	Sosialisasi Kebijakan	-	Tidak Tersedia
21.	Kualitas Inovasi Daerah	Ada Upload Video	Destinasi Wisata Telaga Biru dan Gurun Pasir

3.3.35 Teh Ilalang Desa Air Glubi

1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi

Teh Ilalang Desa Air Glubi

1.2. Tahapan Inovasi

Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah

Masyarakat

1.4. Jenis Inovasi

Non Digital

1.5. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

1.6. Urusan Inovasi Daerah

pemberdayaan masyarakat dan Desa

1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Desa Air Glubi terletak di Kecamatan Bintan Pesisir, Kabupaten Bintan. Mayoritas masyarakat Desa Air Glubi sebagian bekerja sebagai Nelayan dan sebagiannya lagi bekerja sebagai Petani. Masyarakat Desa Air Glubi yang bekerja sebagai petani mengelola lahan pertanian dengan menanam sayur-sayuran, tanaman palawija, dan tanaman obat untuk memenuhi kebutuhan perekonomian. Namun, sebagaimana petani pada umumnya, petani di Desa Air Glubi menghadapi resiko tanaman pengganggu (gulma). Gulma, dalam hal ini adalah tumbuhan alang-alang atau ilalang, merupakan tumbuhan yang kehadirannya tidak di inginkan pada lahan pertanian karena menurunkan hasil yang bisa dicapai oleh tanaman produksi, dan untuk menghilangkan tumbuhan pengganggu tersebut, petani kerap menggunakan bahan kimia yang tidak hanya dapat menimbulkan efek negatif pada kesehatan, namun juga dapat menambah beban finansial bagi petani.

Pada awalnya, petani Desa Air Glubi merasa sangat terganggu dengan adanya tumbuhan ilalang tersebut. Namun, berkat keterampilan dan kerja sama Ibu-ibu kelompok Tanaman Obat Keluarga (TOGA) Ilalang Desa Air Glubi, tumbuhan ilalang dapat diolah dan dibuat menjadi serbuk teh minuman kesehatan.

Inovasi untuk mengubah tumbuhan gulma menjadi produk inovatif dimulai dari inisiatif Kelompok TOGA Ilalang untuk menghasilkan suatu produk rumah tangga yang bernilai ekonomi serta dapat meningkatkan pendapatan masyarakat Desa Air Glubi. Dengan berbekal pengetahuan serta informasi yang didapat melalui internet, ketua beserta anggota kelompok TOGA Ilalang melakukan berbagai percobaan sehingga berhasil menghasilkan produk kesehatan berbahan baku tumbuhan ilalang. Hal ini dapat dicapai dengan cara mencampur tumbuhan obat seperti daun pandan wangi, kulit kayu manis, kencur dan kunyit dengan akar

tumbuhan ilalang. Semua bahan di haluskan dan di campur dengan komposisi tertentu sehingga menjadi minuman sehat Teh Ilalang.

Tidak sampai disitu, Pemerintah Desa Air Glubi juga memberikan legalitas kegiatan kelompok Toga Ilalang sebagai penghargaan atas inovasi dan inisiatif kelompok tersebut dengan mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa Air Glubi. Pemerintah Desa juga berharap bahwa produk yang dihasilkan dapat berkembang dan menjadi produk unggulan desa yang bernilai jual dan mampu bersaing di pasaran. Kedepannya, Pemerintah Desa juga berharap Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dapat berperan dalam memasarkan produk minuman kesehatan tersebut. Teh Ilalang Desa Air Glubi juga termasuk dalam Program Inovasi Desa dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Kini, berkat keterampilan dan inisiatif dari ibu-ibu kelompok TOGA Ilalang, tumbuhan gulma yang semula mengganggu petani menjadi produk inovatif, yaitu minuman sehat yang ramah lingkungan serta bernilai ekonomi.

1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Tujuan dari pengembangan produk inovatif berupa Teh Ilalang adalah untuk membantu mengatasi tanaman gulma pengganggu petani. Tujuan lainnya adalah untuk menciptakan produk unggulan yang sehat, ramah lingkungan, serta bernilai tambah bagi peningkatan perekonomian masyarakat Desa Air Glubi.

1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Manfaat inovasi teh ilalang adalah untuk membantu mengatasi tanaman gulma pengganggu petani. Selain itu, manfaat lainnya adalah terciptanya produk unggulan yang sehat, ramah lingkungan, serta bernilai tambah yang meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Air Glubi. Pengembangan produk inovatif ini juga membantu meningkatkan kerjasama antar kelompok dan kelembagaan yang ada di Desa Air Glubi seperti Pemerintah Desa, BUMDES, dan Pos Pelayanan Teknologi Desa (POSYANTEKDES).

1.10. Hasil Inovasi

Inovasi ini menghasilkan sebuah produk inovatif unggulan yang sehat, ramah lingkungan, serta bernilai tambah, yaitu teh ilalang. Hasil lainnya adalah berkurangnya tanaman gulma pengganggu petani sebagai bahan baku teh ilalang, serta meningkatnya perekonomian masyarakat Desa Air Glubi melalui pemasaran produk teh ilalang.

Meningkatkan sinergitas dan kerjasama antar kelompok dan kelembagaan yang ada di Desa Air glubi seperti Pemerintah Desa, BUMDES, dan Pos Pelayanan Teknologi Desa (POSYANTEKDES) juga tidak lepas dari kegiatan pengembangan teh ilalang.

2. INDIKATOR INOVASI

Tabel 3.65
Indeks Inovasi Teh Ilalang Desa Air Glubi

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	-	Tidak Tersedia
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	1-10 SDM	Pembentukan Kelompok Asuhan Mandiri Ilalang Desa Air Glubi Kecamatan Bintang Pesisir Kabupaten Bintang Tahun Anggaran 2019
3.	Dukungan Anggaran	-	Tidak Tersedia
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja di lingkungan pemerintah daerah dilakukan secara manual	Penggunaan IT
5.	Bimtek Inovasi	-	Tidak Tersedia
6.	Program Dan Kegiatan Di Renstra OPD	-	Tidak Tersedia
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi hanya berjalan 3 OPD atau lebih	Jejaring Inovasi
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	-	Tidak Tersedia
10.	Pengelola Inovasi	ada pengelola dan Ditetapkan dengan SK OPD	SK Pengelola

11.	Ketersediaan Informasi Layanan	informasi diakses melalui telp	Informasi Layanan Teh Ilalang
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	terdapat "call center" layanan pengaduan pengguna	Layanan Pengaduan
13.	Tingkat Partisipasi Stakeholder	inovasi dilakukan dengan melibatkan masyarakat	Partisipasi Masyarakat
14.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Telp	Kemudahan Informasi Layanan
15.	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	-	Tidak Tersedia
16.	Online Sistem	-	Tidak Tersedia
17.	Kecepatan Inovasi	-	Tidak Tersedia
18.	Kemanfaatan Inovasi	hasil manfaatnya dirasakan diatas 201 orang ketas	Kemanfaatan Inovasi Teh Ilalang Desa Air Glubi
19.	Tingkat Kepuasan penggunaan inovasi daerah	-	Tidak Tersedia
20.	Sosialisasi Kebijakan	-	Tidak Tersedia
21.	Kualitas Inovasi Daerah	Ada Upload Video	Teh Ilalang Desa Air Glubi Kabupaten Bintan

3.3.36 Pipanisasi Bawah Laut Desa Kampung Melayu

1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi

Pipanisasi Bawah Laut Desa Kampung Melayu

1.2. Tahapan Inovasi

Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah

Masyarakat

1.4. Jenis Inovasi

Non Digital

1.5. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

1.6. Urusan Inovasi Daerah

pemberdayaan masyarakat dan Desa

1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Inovasi pipanisasi air bersih bawah laut dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan air bersih di Desa Kampung Melayu, Kecamatan Tambelan. Hal ini karena masyarakat Desa Kampung Melayu mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan air bersih terutama pada musim kemarau. Masyarakat Desa Kampung Melayu bermukim disebuah pulau dan oleh karena itu, salah satu cara untuk mendapatkan air bersih adalah dengan mengambil langsung di pulau lainnya yang memiliki sumber air bersih. Untuk itu, masyarakat Desa Kampung Melayu mengambil inisiatif untuk memasang pipa bawah laut agar dapat mengakses sumber air bersih di pulau seberang yang tidak berpenghuni.

Dengan begitu, kebutuhan air bersih masyarakat desa terpenuhi, baik untuk keperluan rumah tangga, maupun untuk keperluan lainnya.

Pipanisasi Bawah Laut Desa Kampung Melayu terdaftar dalam Program Inovasi Desa dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.

1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Tujuan inovasi adalah untuk menyediakan air bersih bagi masyarakat Desa Kampung Melayu, serta untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa.

1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Manfaat yang diperoleh adalah tersedianya air bersih bagi masyarakat Desa Kampung Melayu yang berasal dari sumber mata air di pulau seberang. Manfaat lainnya adalah meningkatnya kualitas hidup masyarakat desa karena memiliki akses ke sumber air bersih yang dapat digunakan untuk keperluan rumah tangga, maupun keperluan lainnya.

1.10. Hasil Inovasi

Hasil inovasi adalah terpenuhinya kebutuhan air bersih masyarakat Desa Kampung Melayu, serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat desa.

2. INDIKATOR INOVASI

Tabel 3.66

Indeks Inovasi PIPANISASI BAWAH LAUT DESA KAMPUNG MELAYU

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	-	Tidak Tersedia
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	-	Tidak Tersedia
3.	Dukungan Anggaran	-	Tidak Tersedia
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja di lingkungan pemerintah daerah dilakukan secara manual	Penggunaan IT
5.	Bimtek Inovasi	-	Tidak Tersedia
6.	Program Dan Kegiatan Di Renstra OPD	-	Tidak Tersedia
7.	Jejaring Inovasi	-	Tidak Tersedia
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	-	Tidak Tersedia
10.	Pengelola Inovasi	-	Tidak Tersedia
11.	Ketersediaan Informasi Layanan	-	Tidak Tersedia
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	-	Tidak Tersedia
13.	Tingkat Partisipasi Stakeholder	-	Tidak Tersedia
14.	Kemudahan Informasi Layanan	-	Tidak Tersedia
15.	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	-	Tidak Tersedia
16.	Online Sistem	-	Tidak Tersedia
17.	Kecepatan Inovasi	-	Tidak Tersedia
18.	Kemanfaatan Inovasi	-	Tidak Tersedia
19.	Tingkat Kepuasan penggunaan inovasi daerah	-	Tidak Tersedia
20.	Sosialisasi Kebijakan	-	Tidak Tersedia
21.	Kualitas Inovasi Daerah	-	Tidak Tersedia

3.3.37 Sedotan Bambu Ramah Lingkungan Desa Pengudang

1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi

Sedotan Bambu Ramah Lingkungan Desa Pengudang

1.2. Tahapan Inovasi

Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah

Masyarakat

1.4. Jenis Inovasi

Non Digital

1.5. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

1.6. Urusan Inovasi Daerah

pemberdayaan masyarakat dan Desa

1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Berawal dari keinginan untuk mengurangi sampah plastik, terutama sedotan plastik (*plastic straw*), Bapak Kamilus menghasilkan produk inovatif, yaitu sedotan bambu ramah lingkungan dengan memanfaatkan tanaman bambu tamiang.

Melalui penawaran seorang salah seorang anggota keluarga yang bekerja di salah satu hotel di wilayah wisata terpadu Kabupaten Bintan, produk inovatif tersebut kemudian dipromosikan ke hotel dan resort. Tidak lama, pihak hotel dan resort kemudian menjalin hubungan kerjasama untuk mempromosikan produk yang mendukung keberlanjutan dan pengurangan produk plastik ini.

Langkah awal yang harus di tempuh dalam memproduksi sedotan bambu yaitu, mencari bahan dasar bambu yang masih hijau lalu di jemur \pm 1 minggu (jika cuaca panas) atau terkadang membutuhkan waktu sekitar \pm 10 hari agar bambu tersebut benar-benar dalam kondisi kering. Ketika

bambu sudah berubah warna menjadi kuning kecoklatan, dilakukan pemotongan bambu dengan menggunakan bor listrik agar proses pemotongan menjadi rapi (tidak retak/ pecah). Bambu yang sudah terpotong sepanjang 15 cm kemudian dikikis, baik dibagian luar maupun dibagian dalam bambu. Setelahnya, bambu dihaluskan dengan amplas. Setelah benar-benar halus dan sama rata, langkah selanjutnya yaitu pembersihan agar sedotan bambu menjadi steril saat digunakan. Jika sudah bersih dan steril, sedotan bambu siap untuk digunakan. Adapun perawatan untuk produk tersebut agar tahan lama yaitu di cuci dengan pasir pantai, kemudian direndam dengan air panas.

Kini, Bapak Kamilus telah menjalin kerjasama dengan pengelola hotel dan resort seperti Nikoi Island, Cempedak Island, Banyan Tree, Bintan Resort Cakrawala, Yayasan Ecology, serta komunitas-komunitas peduli lingkungan. Sedotan Bambu Ramah Lingkungan Desa Pengudang terdaftar dalam Program Inovasi Desa dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.

1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Tujuan inovasi ini adalah untuk mengurangi sampah plastik, terutama sedotan plastik (*plastic straw*) yang mencemari pantai dan lautan di sekitar Desa Pengudang

1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Manfaat yang diperoleh adalah berkurangnya penggunaan plastik, terutama sedotan plastik (*plastic straw*) yang mencemari pantai dan lautan di sekitar Desa Pengudang. Manfaat lainnya yang diperoleh adalah meningkatnya pendapatan masyarakat Desa Pengudang karena kerjasama dalam penjualan dan promosi produk sedotan bambu bersama hotel dan resort di wilayah Kabupaten Bintan.

1.10. Hasil Inovasi

Hasil inovasi adalah terciptanya produk inovatif khas Desa Pengudang dalam bentuk sedotan bambu ramah lingkungan yang digunakan oleh

hotel dan resort di wilayah Kabupaten Bintan. Hasil lainnya adalah berkurangnya sampah plastik (*plastic straw*) yang menjadi pencemar di laut dan pantai serta meningkatnya pendapatan masyarakat Desa Pengudang yang bersumber dari hasil penjualan produk sedotan bambu.

2. INDIKATOR INOVASI

Tabel 3.67
Indeks Inovasi Sedotan Bambu Ramah Lingkungan Desa Pengudang

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	-	idak Tersedia
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	-	idak Tersedia
3.	Dukungan Anggaran	-	idak Tersedia
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja di lingkungan pemerintah daerah dilakukan secara manual	enggunaan IT
5.	Bimtek Inovasi	-	idak Tersedia
6.	Program Dan Kegiatan Di Renstra OPD	-	idak Tersedia
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi hanya berjalan 2 OPD	ejaring Inovasi
8.	Replikasi	-	idak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	-	idak Tersedia
10.	Pengelola Inovasi	-	idak Tersedia
11.	Ketersediaan Informasi Layanan	informasi diakses melalui telp	etersediaan Informasi Layanan
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	terdapat "call center" layanan pengaduan pengguna	enyelesaian Layanan pengaduan
13.	Tingkat Partisipasi Stakeholder	inovasi dilakukan dengan melibatkan masyarakat	ingkat Partisipasi stakeholder
14.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Telp	emudahan Informasi Layanan
15.	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	Hasil inovasi dapat dihasilkan dalam waktu hitungan 8 hari keatas	emudahan Proses inovasi
16.	Online Sistem	-	idak Tersedia
17.	Kecepatan Inovasi	-	idak Tersedia

18.	Kemanfaatan Inovasi	hasil manfaatnya dirasakan 1-100 orang	Kemanfaatan Inovasi
19.	Tingkat Kepuasan penggunaan inovasi daerah	-	Tidak Tersedia
20.	Sosialisasi Kebijakan	Ada Foto	Sosialisasi Inovasi
21.	Kualitas Inovasi Daerah	Ada Upload Video	edotan Bambu Ramah lingkungan Desa engudang

3.3.38 Varietas Unggul Baru (VUB) Salak Sari Intan

1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi

Varietas Unggul Baru (VUB) Salak Sari Intan

1.2. Tahapan Inovasi

Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah

OPD - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

1.4. Jenis Inovasi

Non Digital

1.5. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

1.6. Urusan Inovasi Daerah

pertanian

1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Salak Sari Intan merupakan Varietas Unggul Baru (VUB) yang merupakan hasil kerjasama antara Balitbangtan dengan Kabupaten Bintan melalui kegiatan pemuliaan parsitipatif yang menghasilkan calon VUB salak. Salak

Sari Intan diakui sebagai VUB dengan nama Salak Sari Intan 48, Salak Sari Intan 295, dan Salak Sari Intan 541. Ketiga jenis salak tersebut mempunyai keunggulan rasa manis, daging buah tebal, tidak sepat walaupun buah masih muda dan sangat harum serta disukai oleh konsumen. Keunggulan salak tersebut membuat petani di wilayah Kabupaten Bintan sangat antusias untuk mengembangkannya.

Dinas Pertanian Kabupaten Bintan menindaklanjuti hasil kerjasama dengan membuat blok pondasi sebagai sumber perbanyakan benih Salak Sari Intan. Kegiatan untuk menghasilkan VUB tidak hanya berhenti sampai pada proses pendaftaran varietas saja, namun juga pada bagaimana VUB ini bisa berkembang di masyarakat dalam skala luas dan memberikan dampak positif terhadap ekonomi masyarakat serta melakukan pengembangan di tingkat pengguna. Hal ini mengingat lokasi Kabupaten Bintan yang strategis karena berhadapan dengan negara ASEAN terkait dengan peluang pasar untuk menjadikan Salak Sari Intan sebagai produk unggulan Bintan dan mampu bersaing dalam perdagangan internasional.

Inisiasi pengembangan salak Sari Intan di Bintan dimulai dengan penanaman salak di Desa E kang Anculai, Kecamatan Teluk Sebung (kelompok Tani Jaya Patih) dan Kelurahan Toapaya Asri, Kecamatan Toapaya, Kabupaten Bintan (kelompok Tani Maju Jaya). Setiap kelompok tani menanam 100 rumpun Salak Sari Intan.

Sejak dirilis pada tahun 2009, Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan telah melakukan perbanyakan benih dan pohon induk Salak Sari Intan dan telah dikembangkan secara intensif sekarang ini. Balitbangtan bekerjasama dengan Pemda Bintan telah melakukan beberapa terobosan untuk percepatan pengembangan varietas unggul Salak Sari Intan tersebut yaitu sosialisasi, promosi, pendaftaran pohon induk, percepatan produksi benih, bantuan benih pada petani, pendampingan budidaya dan menginisiasi penangkar benih.

1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Tujuan pengembangan Salak Sari Intan adalah untuk mendapatkan Varietas Unggul Baru (VUB) buah salak untuk menjadi ikon Kabupaten Bintan. Disamping itu, mengingat lokasi Kabupaten Bintan yang strategis karena berhadapan dengan negara ASEAN, pengembangan VUB buah salak juga terkait dengan peluang pasar untuk menjadikan Salak Sari Intan sebagai produk unggulan Bintan dan mampu bersaing dalam perdagangan internasional.

1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Manfaat pengembangan Salak Sari Intan adalah Kabupaten Bintan memiliki Varietas Unggul Baru (VUB) buah salak untuk menjadi ikon Kabupaten Bintan. Manfaat lainnya adalah Kabupaten Bintan memiliki produk unggulan daerah berupa buah salak varietas unggul yang mampu bersaing dalam perdagangan internasional serta VUB diharapkan memberikan dampak positif terhadap ekonomi masyarakat.

1.10. Hasil Inovasi

Hasil inovasi pengembangan Salak Sari Intan adalah terciptanya Varietas Unggul Baru (VUB) buah salak yang menjadi ikon Kabupaten Bintan. Hasil lainnya adalah pengembangan VUB buah salak juga terkait dengan peluang pasar untuk menjadikan Salak Sari Intan sebagai produk unggulan Bintan dan mampu bersaing dalam perdagangan internasional.

2. INDIKATOR INOVASI

Tabel 3.68
Indeks Inovasi Varietas Unggul Baru (VUB) Salak Sari Intan

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	-	Tidak Tersedia
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	-	Tidak Tersedia
3.	Dukungan Anggaran	-	Tidak Tersedia
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja di lingkungan pemerintah daerah dilakukan secara manual	Penggunaan IT

5.	Bimtek Inovasi	Pernah 1 tahun 2 Kali melakukan Bimtek	BIMTEK/Pelatihan/Sosialisasi
6.	Program Dan Kegiatan Di Renstra OPD	-	Tidak Tersedia
7.	Jejaring Inovasi	-	Tidak Tersedia
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	-	Tidak Tersedia
10.	Pengelola Inovasi	-	Tidak Tersedia
11.	Ketersediaan Informasi Layanan	informasi melalui datang langsung	Ketersediaan Informasi Layanan
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	terdapat layanan pengaduan melalui pengguna "aplikasi pengaduan"	Penyelesaian Layanan Pengaduan
13.	Tingkat Partisipasi Stakeholder	inovasi dilakukan dengan melibatkan masyarakat dan akademisi serta media massa	Tingkat Partisipasi Stakeholder
14.	Kemudahan Informasi Layanan	-	Tidak Tersedia
15.	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	-	Tidak Tersedia
16.	Online Sistem	-	Tidak Tersedia
17.	Kecepatan Inovasi	-	Tidak Tersedia
18.	Kemanfaatan Inovasi	hasil manfaatnya dirasakan diatas 201 orang ketas	Kemanfaatan Inovasi
19.	Tingkat Kepuasan penggunaan inovasi daerah	-	Tidak Tersedia
20.	Sosialisasi Kebijakan	Ada Foto	Sosialisasi Kebijakan, Sosialisasi Inovasi
21.	Kualitas Inovasi Daerah	Ada Upload Video	Varietas Unggul Baru (VUB) Salak Sari Intan

3.3.39 Sang Maestro (Alat Peraga KB Pria)

1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi

Sang Maestro (Alat Peraga KB Pria)

1.2. Tahapan Inovasi

Implementasi

1.3. Inisiator Inovasi Daerah

Aparatur Sipil Negara (ASN)

1.4. Jenis Inovasi

Non Digital

1.5. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

1.6. Urusan Inovasi Daerah

kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana

1.7. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Sang Maestro adalah alat peraga KB pria yang dikembangkan oleh ASN Kabupaten Bintan atas nama Rachmadi, SEI yang merupakan ASN dilingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Bintan. Inovasi ini dilatarbelakangi oleh sulitnya memberikan pemahaman tentang KB pria kepada masyarakat secara umum. Sulitnya pemberian pemahaman kepada masyarakat dikarenakan masih adanya rasa sungkan dan tabu untuk menunjukkan alat reproduksi pria, terutama dalam kegiatan sosialisasi alat kontrasepsi.

Alat peraga reproduksi pria dengan nama Sang Maestro kemudian menjadi solusi bagi penyuluh KB, bidan, dan para guru untuk dapat meningkatkan pemahaman masyarakat dan siswa sekolah mengenai alat reproduksi dan KB pria. Sang Maestro merupakan penunjang untuk keberhasilan penyuluhan serta pengajaran di dalam kelas. Melalui inovasi berupa alat peraga Sang Maestro, diharapkan agar para kader dan penyuluh KB, serta

para guru disekolah dalam memberikan penyuluhan dan pemahaman kepada masyarakat dan siswa dengan lebih mudah, murah, dan efektif.

1.8. Tujuan Inovasi Daerah

Tujuan inovasi adalah untuk mempermudah kader dan penyuluh KB dalam menjelaskan proses pelaksanaan KB Tubektomi dan KB Vasektomi. Inovasi ini juga bertujuan agar para guru disekolah dapat memberi penjelasan mengenai alat reproduksi pria kepada para siswa dengan mudah dan tidak vulgar. Alat peraga Sang Maestro juga dibuat dengan menggunakan bahan-bahan bekas yang mudah ditemui, serta dapat menjadi alternatif alat peraga yang murah dan efisien.

1.9. Manfaat Yang Diperoleh

Manfaat Sang Maestro adalah mempermudah kader dan penyuluh KB dalam memberikan penjelasan mengenai proses pelaksanaan KB Tubektomi dan KB Vasektomi kepada masyarakat. Sang Maestro juga bermanfaat agar para guru disekolah dapat memberi penjelasan mengenai alat reproduksi pria kepada para siswa dengan mudah dan tidak vulgar. Alat peraga Sang Maestro juga dibuat dengan menggunakan bahan-bahan bekas yang mudah ditemui, serta dapat menjadi alternatif alat peraga yang murah dan efisien, serta menghemat biaya.

1.10. Hasil Inovasi

Sang Maestro menghasilkan alat peraga KB pria dan alat peraga reproduksi pria yang mudah, murah, efisien, dan tidak vulgar sehingga meningkatkan kemampuan penyuluh dan kader KB, serta para guru dalam memberikan penyuluhan dan pemahaman kepada masyarakat secara umum, serta kepada para siswa di sekolah.

2. INDIKATOR INOVASI

Tabel 3.69
Indeks Inovasi Sang Maestro (Alat Peraga KB Pria)

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	Perkada	Penunjukan Motivator Keluarga

			Berencana Pria Tahun 2017
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	1-10 SDM	Penunjukan Motivator Keluarga Berencana Pria Tahun 2017
3.	Dukungan Anggaran	-	Tidak Tersedia
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja di lingkungan pemerintah daerah dilakukan secara manual	Pelaksanaan Kegiatan Motivator KB
5.	Bimtek Inovasi	Pernah 3 tahun 9 Kali melakukan Bimtek	Pelaksanaan Kegiatan Motivator KB (Penyuluhan)
6.	Program Dan Kegiatan Di Renstra OPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan pengembangan inovasi ke dalam Resntra dan telah dilaksanakan	Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi hanya berjalan 3 OPD atau lebih	Jejaring Inovasi
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	-	Tidak Tersedia
10.	Pengelola Inovasi	ada pengelola dan Ditetapkan dengan SK kepala daerah	Penunjukan Motivator Keluarga Berencana Pria Tahun 2017
11.	Ketersediaan Informasi Layanan	informasi melalui datang langsung	Penunjukan Motivator Keluarga Berencana Pria Tahun 2017
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	terdapat "call center" layanan pengaduan pengguna	Penyelesaian Layanan Pengaduan
13.	Tingkat Partisipasi Stakeholder	inovasi dilakukan dengan melibatkan masyarakat	Pelaksanaan Kegiatan Motivator KB (Penyuluhan bersama Masyarakat)
14.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Telp	Kemudahan Informasi Layanan
15.	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	-	Tidak Tersedia
16.	Online Sistem	-	Tidak Tersedia

17.	Kecepatan Inovasi	-	Tidak Tersedia
18.	Kemanfaatan Inovasi	hasil manfaatnya dirasakan diatas 201 orang ketas	Pelaksanaan Kegiatan Motivator KB (Penyuluhan bersama Masyarakat), Manfaat Inovasi Sang Maestro
19.	Tingkat Kepuasan penggunaan inovasi daerah	-	Tidak Tersedia
20.	Sosialisasi Kebijakan	Ada Foto	Pelaksanaan Kegiatan Motivator KB (Penyuluhan bersama Masyarakat)
21.	Kualitas Inovasi Daerah	Ada Upload Video	Penyuluhan KB Pria Menggunakan Sang Maestro

3.4 Rekapitulasi Usulan Inovasi Kabupaten Bintan

Tabel 3.70
Rekapitulasi Usulan Inovasi Kabupaten Bintan

NO	OPD	Nama Inovasi	Keterangan
1	Dinas Lingkungan Hidup	Pengolahan Sampah Organik Menggunakan Ulat Maggot	2021
2	Dinas Tenaga Kerja	MOU Penempatan Tenaga Kerja	2021
3	Dinas Tenaga Kerja	Sistem Pedataan Pencaker dan Pelayanan AK 1 (Kartu Kuning)	2021
4	Dinas Tenaga Kerja	Pendataan Perusahaan dan Tenaga Kerja	2021
5	SATPOL PP	SATPOL PP Pariwisata	2021
6	Dinas Perpustakaan dan Arsip	Mobil Pustaka Keliling	2021
7	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pelaporan, Aduan Gangguan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU)	2021
8	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kebutuhan Data Perumahan Kabupaten Bintan	2022
9	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Status Kepemilikan Lahan/Tanah Kabupaten Bintan;	2022
10	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Sistem Aplikasi dalam Usulan-usulan Kegiatan Berupa Rencana Kerja melalui Musrenbang	2022
11	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Aplikasi Pengaduan Masalah Persampahan dan Kebersihan Jalan	2022
12	Kelurahan Tanjung Uban	Manggar Abadi (Kerajinan Sisik atau Kerang)	Tidak ada Data
13	Kelurahan Tanjung Uban	Sakera Bersenyum (Kerajinan Sisik, Kerang dan Mutiara)	Tidak ada Data
14	Kelurahan Tanjung Uban	Balai Tenun Manggar Bertahta	Tidak ada Data

Berdasarkan pendataan yang dilakukan dalam rangka pemenuhan inovasi daerah tahun 2020 terdapat beberapa inovasi yang telah siap untuk diselenggarakan baik pada tahun 2021 dan juga pada tahun 2022. Selain itu, juga terdapat inovasi daerah yang baru sebatas ide atau gagasan dan masih dalam tahap perencanaan yang ditargetkan bisa disetujui pada tahun 2021.

Mengacu pada data yang ditunjukkan pada tabel 3.70 terdapat 11 usulan inovasi baru dan 3 inovasi yang telah diselenggarakan namun tidak memiliki data pendukung yang dapat membuktikan sebuah inovasi. Adapun 11 usulan inovasi daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 dan 2022 tersebar di 5 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Bintan.

BAB IV

ANALISA INOVASI DAERAH KABUPATEN BINTAN

Aspek input merupakan salah satu aspek indikator yang digunakan dalam inovasi daerah. Aspek input ini terdiri dari Visi-Misi; Lembaga Kelitbangan; Penghargaan Bagi Inovator; Regulasi; Kepedulian Sumber Daya Manusia; Dukungan Anggaran; CSR dan Pengelolal Inovasi.

Dukungan visi misi Pemerintah Kabupaten Bintan diperlukan sebagai bentuk komitmen Pemerintah Daerah dalam pengembangan inovasi daerah. Adapun Visi Kabupaten Bintan yakni: “Terwujudnya Kabupaten Bintan yang Madani dan Sejahtera Melalui Pencapaian Bintan Gemilang 2025 (Gerakan Melangkah Maju di Bidang Kelautan, Pariwisata, dan Kebudayaan)”. Dari visi ini dapat dilihat bahwa fokus pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan terletak pada tiga bidang utama, yakni kelautan, pariwisata dan kebudayaan walaupun juga pembangunan tetap dilakukan pada bidang-bidang lainnya.

Dilihat data inovasi yang terkumpul dan diikutsertakan pada perlombaan inovasi daerah hanya ada 13 inovasi yang berhubungan dengan ketiga bidang tersebut. Dibidang pariwisata dan kebudayaan hanya ada 12 inovasi dan 1 inovasi dibidang kelautan.

Dari 13 inovasi dibidang pariwisata, terdapat sembilan inovasi yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bintan. Adapun inovasi-inovasi tersebut adalah sebagai berikut: 1) POKDARWIS (Kelompok Sadar Wisata); 2) Desa Wisata; 3) Pelatihan Peningkatan Pramuwisata Kabupaten Bintan (Pelatihan Bahasa Inggris); 4) Pelatihan Manajemen *Homestay*/Pondok Wisata; 5) Pelatihan Pemandu Wisata Alam *Trekking*; 6) Pelatihan Pemandu Wisata Budaya Kuliner; 7) Pelatihan Pemandu Wisata Budaya Pedesaan; dan 9) Pelatihan Tata Kelola Destinasi Wisata. Sementara tiga inovasi bidang pariwisata lainnya dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bintan dengan melibatkan masyarakat dalam bentuk pemberdayaan yang yakni: 1) Ekowisata Desa Toapaya Selatan; 2) Telaga Biru Desa Busung; dan 3) Teh

Ilalang Desa Air Glubi. Adapun untuk inovasi yang berhubungan dengan bidang kelautan dan dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Bintan adalah inovasi Kartu Kendali Rekomendasi Pembelian Minyak Solar (Gas Oil) yang berlaku 6 Bulan. Walaupun pada saat ini urusan kelautan merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi.

Untuk inovasi yang dilakukan selama tahun 2017 hingga tahun 2019 ini jumlahnya sebanyak 69 inovasi. Jika dilihat dari jumlah inovasi yang dilaksanakan oleh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan dalam rangka mencapai visi Kabupaten Bintan tersebut perlu adanya penambahan inovasi terutama yang berkaitan dengan ketiga bidang (Kelautan, Pariwisata, dan Kebudayaan). Visi dan Misi yang dimiliki sebuah daerah juga merupakan bentuk keseriusan Pemerintah dalam pengembangan inovasi di daerah.

Namun, sebelum pada tahapan itu perlu kiranya setiap OPD di Kabupaten Bintan memiliki persepsi dan pandangan yang sama mengenai inovasi. Karena masing-masing OPD terkadang memiliki persepsi yang berbeda mengenai inovasi. Hal inilah yang menyebabkan inovasi yang dihasilkan oleh OPD terkadang tidak sejalan dan tidak dapat secara maksimal mendukung pencapaian visi misi Kabupaten Bintan. Penyamaan persepsi ini juga perlu dilakukan agar setiap inovasi yang dihasilkan oleh masing-masing OPD yang ada di Kabupaten Bintan dapat saling mendukung dan dapat berkelanjutan. Selama ini, inovasi yang ada dilaksanakan oleh OPD yang ada di Kabupaten Bintan terkesan berjalan sendiri-sendiri dan tidak terkoordinasikan dengan baik.

Masih ada yang beranggapan bahwa inovasi haruslah dalam bentuk yang digital (web, aplikasi, dll) serta inovasi haruslah dalam bentuk teknologi. Padahal jika kita melihat pada pengertian inovasi itu sendiri, inovasi bisa dalam beberapa pengertian (*Innovate We Can*, Avianti Fontana, 2009:19-20) yakni: Menciptakan sesuatu yang baru; Menghasilkan hanya ide-ide baru; Menghasilkan ide, metode, alat baru; Memperbaiki sesuatu yang sudah ada; Menyebarkan ide-ide baru; Mengadopsi sesuatu yang baru yang sudah

dicoba secara sukses di tempat lain; Melakukan sesuatu dengan cara yang baru; Mengikuti pasar; Melakukan perubahan; Menarik orang-orang inovatif; dan Melihat sesuatu dari perspektif yang berbeda.

1. Regulasi

Inovasi dan regulasi adalah satu paket, dua sisi dari mata uang yang sama, yakni mata uang peningkatan kinerja pelayanan. Inovasi yang baik adalah inovasi yang dilakukan berdasarkan regulasi yang dibuat oleh Pemerintah.

Sebagai bentuk keseriusan Pemerintah Daerah terhadap inovasi yang dilakukan ditunjukkan dengan dukungan dikeluarkannya regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan inovasi baik yang dilakukan oleh OPD maupun individu. Regulasi ini dapat berupa Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati maupun Surat Keputusan Kepala OPD. Selama ini, kebanyakan inovasi yang dilaksanakan oleh OPD di Kabupaten Bintan tidak memiliki regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan. Sehingga secara formal yuridis kurang memiliki kekuatan hukum.

Indikator regulasi ini dilengkapi dengan bukti dukung tertinggi yakni Peraturan Daerah diberi bobot 21, Peraturan Kepala daerah diberi bobot 14 dan SK OPD mendapat bobot 7. Regulasi merupakan indikator dengan pembobotan tertinggi. Untuk dimensi ini Kabupaten Bintan memperoleh nilai 406 dan berada di urutan 94 secara nasional.

2. Ketersediaan SDM (Sumber Daya Manusia)

Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen paling penting agar sebuah organisasi dapat berjalan dengan baik. Tanpa adanya SDM yang berkualitas, organisasi akan sulit untuk berjalan baik meskipun sumber daya yang lain telah terpenuhi. SDM diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Inovasi yang dilaksanakan oleh sebuah OPD juga membutuhkan SDM dalam pelaksanaannya. Ketersediaan SDM ini perlu diperjelas baik secara jumlah maupun tugas pokok dan fungsi dari masing-masing SDM dalam pelaksanaan SDM dan ini harus bisa dibuktikan dengan Surat Keputusan

(regulasi). Pelaksanaan inovasi oleh OPD di Kabupaten Bintan sudah didukung oleh SDM yang berkualitas. Namun dukungan SDM tersebut belum atau tidak dapat dibuktikan dengan dokumen resmi.

Dokumen pendukung mengenai ketersediaan SDM harus mencantumkan jumlah SDM yang berhubungan dengan inovasi. Semakin banyak SDM yang terlibat maka nilainya semakin tinggi. Jika 1-10 SDM yang terlibat maka diberi bobot 3, 11-30 SDM berbobot 6 dan jika lebih dari 31 keatas maka diberi bobot 9. Untuk indikator ketersediaan SDM Pemerintah Kabupaten Bintan memperoleh nilai 237 dan berada di urutan 79 secara nasional.

3. Dukungan Anggaran

Dukungan anggaran adalah sebuah keniscayaan untuk berinovasi. Anggaran yang dimaksudkan meliputi anggaran dalam proses perencanaan, pelaksanaan inovasi bahkan anggaran untuk melakukan evaluasi terhadap inovasi sehingga inovasi tersebut menjadi lebih baik. Dukungan anggaran juga diperlukan dalam pengembangan inovasi agar sebuah inovasi dapat berkelanjutan.

Akibat tidak adanya regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan inovasi juga menyebabkan minimnya dukungan anggaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dalam pengembangan sebuah inovasi. Dukungan anggaran tersebut terdapat pada Rencana Strategis masing-masing OPD dan masuk ke dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Inovasi yang dilakukan oleh OPD di Kabupaten Bintan masih belum mendapatkan dukungan anggaran secara maksimal meskipun ada beberapa inovasi yang sudah mendapatkan dukungan anggaran. Inovasi yang dilakukan masih dilaksanakan dengan cara-cara yang tidak memerlukan biaya dan swadaya dari masing-masing OPD.

Jika kita lihat dari sudut pandang yang berbeda hal ini tentu saja merupakan sebuah inovasi karena mampu dilakukan tanpa harus bergantung pada dukungan dana dari Pemerintah Daerah. Namun karena inovasi daerah ini merupakan bentuk pembaruan dalam penyelenggaraan

pemerintahan daerah, maka dukungan anggaran menjadi faktor penting untuk dapat melihat sejauh mana Pemerintah Daerah berkomitmen dalam sebuah inovasi.

Indikator ini dibuktikan dengan dokumen APBD yang memuat anggaran inovasi. Bobot 5 diberikan jika anggaran untuk kegiatan inovasi sudah ada dalam tahap perencanaan, jika sudah dilaksanakan dan dievaluasi diberi bobot 10 dan berbobot 15 jika anggaran untuk kegiatan inovasi dalam tahapan sudah dilaksanakan dan sudah di Evaluasi. Untuk indikator dukungan anggaran Pemerintah Kabupaten Bintan memperoleh nilai 530 dan berada di urutan 63 secara nasional.

4. Penggunaan IT

Teknologi Informasi memang sangat membantu untuk memecahkan banyak permasalahan termasuk dalam pelayanan publik. Teknologi informasi ini dapat meliputi berbagai hal mulai dari yang sangat kompleks dengan penyiapan sarana dan prasarana pendukung, penggunaan web dari masing-masing OPD atau hanya sekedar memanfaatkan aplikasi dan media-media sosial (*facebook, whatsapp, telegram, dll*) yang telah ada.

Minimnya dukungan anggaran juga berdampak kepada masih adanya inovasi yang dilakukan oleh OPD di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bintan yang dilakukan secara manual tanpa adanya penggunaan teknologi informasi. Sebagian inovasi yang dilakukan masih dilakukan secara manual. Padahal dalam perkembangan teknologi hari ini, Pemerintah daerah dapat memanfaatkan teknologi informasi dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan kepada publik.

Jika pelaksanaan kerja di lingkungan pemerintah daerah sudah didukung sistem informasi online/daring diberi bobot tertinggi yakni 6, berikutnya jika pelaksanaan kerja di lingkungan pemerintah daerah menggunakan perangkat elektronik diberi bobot 4 dan bobot terendah 2 diberikan jika pelaksanaan kerja di lingkungan pemerintah daerah dilakukan secara manual. Secara keseluruhan, untuk indikator penggunaan IT Pemerintah Kabupaten Bintan berada di urutan 68 dengan nilai 220.

5. Bimtek (Bimbingan Teknis)

Bimbingan Teknis (Bimtek) adalah suatu kegiatan dimana para peserta diberi pelatihan-pelatihan yang bermanfaat dalam meningkatkan kompetensi peserta pelatihan. Bimtek ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan kompetensi pengelola agar dapat melaksanakan inovasi secara maksimal.

Permasalahan dalam pelaksanaan inovasi di Kabupaten Bintan adalah ketiadaan pengelola inovasi sehingga menyebabkan tidak adanya pelatihan/bimbingan teknis (Bimtek) yang diberikan dalam rangka pelaksanaan dan pengembangan inovasi. Sebagian besar pengelola tersebut mempelajari inovasi secara mandiri karena juga teknologi yang banyak digunakan pada inovasi di Kabupaten Bintan masih sangat sederhana dan bersifat manual sehingga tidak membutuhkan bimtek. Sebuah inovasi akan diberikan bobot 9 apabila pernah dilakukan 9 kali bimtek dalam 3 tahun, apabila bimtek pernah dilakukan 4 kali selama 2 tahun maka memperoleh bobo 6. Sedangkan bobot terendah 3 diberikan jika bimtek hanya dilakukan 2 kali dalam 1 tahun. Pada indikator bimtek inovasi, Pemerintah Kabupaten Bintan berada di urutan 95 dengan perolehan nilai 102.

6. Renstra Program Dan Kegiatan Di Renstra OPD

Renstra (Rencana Strategis) OPD merupakan dokumen yang memuat rencana kegiatan dari OPD dalam rangka mewujudkan RPJMD (rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Oleh karena itu, inovasi yang akan dilakukan oleh OPD juga haruslah tertulis di dalam Renstra OPD masing-masing. Renstra ini dapat digunakan sebagai dokumen perencanaan maupun evaluasi OPD dan melihat bagaimana pelaksanaan kegiatan di OPD terutama berkaitan dengan inovasi.

Pelaksanaan inovasi di Kabupaten Bintan pada saat ini belum semua tercantum pada Renstra masing-masing OPD, sehingga sulit untuk membuktikan apakah inovasi yang dilakukan memang termasuk dalam kegiatan OPD tersebut dan apakah inovasi tersebut mendapatkan dukungan anggaran. Selain itu, hal ini juga menyebabkan sebuah inovasi

tidak dapat diketahui perkembangannya dan sulit untuk dilakukan evaluasi.

Bobot penilaian pada indikator ini dilakukan dengan tingkat kriteria apabila Pemerintah Daerah menuangkan “rencana” pengembangan inovasi dalam Renstra maka akan memperoleh bobot 4; Pemerintah Daerah sudah menuangkan pengembangan inovasi ke dalam Renstra berbobot 8; dan apabila Pemerintah Daerah sudah menuangkan pengembangan inovasi ke dalam Renstra dan telah dilaksanakan akan memperoleh bobot tertinggi yakni 12. Untuk indikator ini posisi Pemerintah Kabupaten Bintan berada pada urutan 43 secara nasional dengan nilai 556.

7. Jejaring Inovasi

Jejaring inovasi disini ialah keterlibatan dan interaksi berbagai pihak dalam pelaksanaan inovasi, semakin banyak pihak yang terlibat maka penilaian terhadap sebuah inovasi semakin tinggi. Pihak yang terlibat bisa saja antar OPD maupun antar Pemerintah Daerah, atau melibatkan pelayanan publik lainnya.

Pelaksanaan inovasi di Kabupaten Bintan oleh OPD mayoritas hanya melibatkan 1 OPD pelaksana saja hanya beberapa inovasi yang keterlibatan OPD nya lebih dari 1 sehingga penilaian untuk indikator jejaring inovasi tidak maksimal. Hanya saja tidak banyak dokumen yang bisa digunakan untuk membuktikan adanya jejaring sosial dalam pelaksanaan inovasi OPD di Kabupaten Bintan.

Penilaian terhadap indikator ini akan dilakukan dengan menghitung jumlah OPD yang terlibat dalam inovasi. Apabila dalam pelaksanaan sebuah inovasi melibatkan 3 OPD maka akan mendapatkan nilai 6, jika 2 OPD bernilai 4 dan jika inovasi hanya melibatkan 1 OPD diberi nilai 2. Pemerintah Kabupaten Bintan pada indikator jejaring inovasi ini mendapatkan nilai 306 dan berada pada posisi 46 secara nasional.

8. Replikasi

Replikasi dapat diartikan sebagai suatu tindakan menjiplak/meniru mengambil informasi yang sudah tersedia sebelumnya yang selanjutnya disampaikan dan dikembangkan melalui pemikiran sendiri. Sementara yang dimaksud dengan replikasi Inovasi adalah proses adopsi atau adaptasi inovasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, baik sebagian maupun secara keseluruhan yang ditransfer dari organisasi asal kepada organisasi penerima (replikator). Semakin banyak replikasi yang dilakukan terhadap sebuah inovasi, maka nilai inovasi tersebut semakin tinggi.

Program/kegiatan inovasi daerah yang telah berhasil dilakukan oleh Pemerintah Daerah dapat direplikasi di Daerah lain melalui tahapan prosedur dan mekanisme tertentu dengan mempertimbangkan kondisi dan karakteristik wilayah, sosiologis dan kebudayaan, serta potensi daerah yang akan mereplikasi inovasi daerah. Tetapi, hal ini tentu saja harus mampu dibuktikan dengan dokumen pendukung seperti perjanjian kerjasama, pemberitaan media, dan dokumen lain yang bisa membuktikan. Pada inovasi OPD di Kabupaten Bintan hanya ada beberapa inovasi yang direplikasi oleh daerah lain. Namun ada beberapa inovasi yang direplikasi tidak mampu dibuktikan dengan dokumen pendukung.

Pada indikator ini, sebuah inovasi memperoleh bobot 6 jika sebuah inovasi direplikasi oleh daerah lain sebanyak 3 kali. Bobot 4 jika 2 kali direplikasi daerah lain. Dan apabila sebuah inovasi hanya 1 kali direplikasi oleh daerah lain maka akan mendapat bobot 2. Pada indikator ini, pemerintah Kabupaten Bintan memperoleh nilai 30 dan berada di urutan 74.

9. Pedoman Teknis

Pedoman teknis merupakan ketentuan dasar yang memberi arah bagaimana sebuah inovasi daerah harus dilakukan. Sebuah inovasi haruslah memiliki satu acuan dasar dalam proses pelaksanaannya dan agar tujuan inovasi dapat segera tercapai secara efektif dan efisien. Dalam pelaksanaannya belum semua inovasi yang dilakukan oleh OPD di Kabupaten Bintan memiliki acuan dasar berupa pedoman teknis. Terdapat

juga beberapa inovasi sudah memiliki rancangan pedoman teknis. Pedoman teknis dari masing-masing inovasi yang dilaksanakan belum bisa dibuktikan dengan dokumen pendukung dan tidak bisa diakses oleh publik.

Pada indikator ini, sebuah inovasi ini akan diberi bobot 2 jika telah terdapat rancangan pedoman teknis. Sebuah inovasi yang telah memiliki pedoman teknis diberi bobot 4 dan apabila pedoman teknis dapat diakses secara online maka akan diberikan bobot tertinggi yakni 6. Pemerintah Kabupaten Bintan pada indikator pedoman teknis memperoleh nilai 120 dan berada di urutan 95.

10. Pengelola Inovasi

Sebagai salah satu penopang kesuksesan pelaksanaan inovasi daerah adalah ketersediaan SDM (Sumber Daya Manusia) sebagai pengelola inovasi. Perkembangan teknologi saat ini melahirkan cara baru dalam menyelesaikan pekerjaan di berbagai sektor, termasuk juga di bidang pemerintahan. Kondisi ini kemudian menuntut adanya SDM yang kreatif, inovatif serta berdaya saing.

Namun, tidak semua inovasi yang dilaksanakan oleh OPD yang ada di Kabupaten Bintan memiliki pengelola secara resmi. Jikapun ada pengelola inovasi tetapi tidak didukung dengan surat keputusan penunjukan pengelola inovasi. Hal ini tentu dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan inovasi. Apabila dalam pelaksanaan inovasi ditemukan kendala maka tidak ada pihak yang mengetahuinya dan tidak ada pihak yang dapat dihubungi untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Penilaian pada indikator ini dilakukan dengan cara apabila sebuah inovasi telah memiliki pengelola namun tidak ditetapkan dengan SK OPD diberi bobot 2, bobot 4 akan diberikan jika pengelola inovasi ditetapkan dengan SK OPD, dan apabila pengelola inovasi ditetapkan dengan SK Kepala daerah maka akan diberikan nilai bobot 6. Pada indikator pengelola inovasi, Pemerintah Kabupaten Bintan berada di urutan 62 secara nasional dengan nilai 194.

11. Ketersediaan Informasi Layanan

Untuk memudahkan masyarakat mengetahui tentang pelaksanaan inovasi maka informasi layanan mengenai inovasi tersebut haruslah tersedia. Informasi mengenai inovasi dapat disiapkan secara manual maupun disediakan pada web OPD maupun Pemerintah Daerah sehingga memudahkan masyarakat mengakses dan mendapatkan informasi mengenai layanan. Informasi layanan dapat berisi waktu pelaksana inovasi, pihak pelaksana inovasi, tempat pelaksanaan inovasi dan informasi lainnya yang berguna bagi masyarakat.

Inovasi yang dilaksanakan di Kabupaten Bintan sebagian besar telah memiliki informasi layanan. Namun informasi tersebut masih tersedia secara manual dan tersedia pada *banner*, spanduk, maupun papan pengumuman yang ada di masing-masing OPD pelaksana inovasi. Sehingga informasi tersebut bersifat terbatas bagi masyarakat yang datang berkunjung ke OPD. Ada juga beberapa inovasi yang dapat diakses oleh masyarakat tanpa harus datang ke OPD dengan memanfaatkan web yang dimiliki OPD.

Pada indikator ini, sebuah inovasi akan mendapatkan bobot maksimal 6 jika informasi layanan dapat diakses secara online. Untuk inovasi yang informasinya dapat diakses melalui telpon diberi bobot 4, dan bobot terendah 2 jika informasi didapatkan dengan datang langsung. Pemerintah Kabupaten Bintan pada indikator ini menempati urutan 59 dengan nilai 254.

12. Penyelesaian Layanan Pengaduan

Setiap inovasi yang dilaksanakan belum tentu dapat memberikan hasil maksimal dan memuaskan semua pihak. Terdapat berbagai kendala dan kekurangan dalam pelaksanaan inovasi, baik sarana prasarana, sistem yang digunakan maupun perilaku pelaksana inovasi yang dapat diterima oleh pengguna inovasi. Ketidakpuasan ini dapat disampaikan dalam bentuk

aduan yang harus ditampung serta ditindaklanjuti oleh pengelola inovasi sehingga dapat memberikan kepastian terhadap aduan yang disampaikan.

Inovasi yang dilaksanakan di Kabupaten Bintan juga tidak terlepas dari aduan-aduan yang disampaikan oleh masyarakat. Aduan tersebut kebanyakan masih disampaikan secara langsung ke OPD pelaksana dan penanggungjawab inovasi. Hal ini tentu tidak efektif karena setiap aduan harus disampaikan secara langsung. OPD tidak memanfaatkan web maupun *call center* OPD untuk menampung aduan dari masyarakat serta tidak tersedianya pegawai yang secara khusus mengelola layanan pengaduan ini. Dengan perkembangan teknologi hari ini, OPD juga dapat memanfaatkan media sosial maupun membuat aplikasi yang khusus menampung aduan masyarakat terhadap inovasi.

Bobot tertinggi pada indikator ini adalah 6 yang diberikan jika inovasi memiliki “aplikasi pengaduan” yang dapat dimanfaatkan sebagai wadah dan sarana pengaduan bagi pengguna inovasi. Apabila pada inovasi telah terdapat layanan pengaduan pengguna melalui “media sosial” diberi bobot 4 dan memperoleh bobot 2 jika hanya terdapat “call center” yang digunakan dalam layanan pengaduan. Pada indikator penyelesaian layanan pengaduan ini, Pemerintah Kabupaten Bintan memperoleh nilai 174 dan berada pada posisi 61.

13. Tingkat Partisipasi Stakeholder

Tingkat Partisipasi Stakeholder dalam kegiatan inovasi ini adalah tindakan pihak-pihak tertentu dalam mengambil bagian pada kegiatan inovasi daerah. Setiap inovasi yang dilaksanakan melibatkan stakeholder baik masyarakat, akademisi dan media massa. Semakin banyak stakeholder yang terlibat maka inovasi akan semakin baik. Setiap stakeholder mempunyai peran yang berbeda pada setiap pelaksanaan inovasi. Keterlibatan mereka dalam sebuah inovasi dapat sebagai pengguna atau objek penerima manfaat, pelaksanaan inovasi hingga bisa berperan aktif pengusul inovasi. Media massa juga dapat berperan sebagai pihak yang menyebarkan informasi mengenai inovasi.

Pada pelaksanaan inovasi di Pemerintahan Kabupaten Bintan, hamper semua inovasi melibatkan masyarakat sebagai pengguna dan penerima manfaat dari inovasi. Ada beberapa inovasi yang diusulkan oleh masyarakat baik secara perorangan maupun kelompok. Perlu peran aktif dari OPD pelaksana inovasi untuk melibatkan akademisi dalam proses perencanaan inovasi dan media massa sebagai pihak yang membantu menyebarkan informasi mengenai inovasi. Kendala dalam indikator ini adalah kurangnya dokumen maupun foto kegiatan sebagai bukti pendukung.

Penilaian pada indikator ini dibagi menjadi 3 kategori yakni bobot 2 jika inovasi yang dilaksanakan hanya melibatkan masyarakat; inovasi yang dilakukan dengan melibatkan masyarakat dan akademisi diberi bobot 4; dan bobot 6 diberikan jika ada keterlibatan masyarakat dan akademisi serta media massa dalam pelaksanaan inovasi. Untuk indikator Tingkat Partisipasi Stakeholder ini Pemerintah Kabupaten Bintan berada pada urutan 53 dengan nilai 192.

14. Kemudahan Informasi Layanan

Informasi layanan sebuah inovasi berisi hal-hal penting seputar inovasi yang dibagikan kepada pengguna layanan. Informasi ini diperlukan layanan yang diterima sesuai dengan tujuan dan rencana dari inovasi. Salah satu aspek dari informasi layanan adalah kemudahan untuk memperoleh informasi mengenai layanan itu sendiri. Kemudahan tersebut berkaitan dengan bagaimana informasi ini didapatkan oleh masyarakat baik dilihat dari sisi waktu maupun tenaga yang dikeluarkan untuk memperoleh informasi tersebut.

Pada pelaksanaan inovasi daerah di Kabupaten Bintan, tidak banyak informasi mengenai layanan yang bisa diakses oleh masyarakat karena terbatasnya akses yang disediakan oleh OPD. Banyak inovasi yang tidak disertai dengan nomor telpon, alamat email dan media sosial maupun aplikasi online khusus berkaitan dengan inovasi yang dilaksanakan. Informasi layanan yang diperoleh masyarakat mengenai inovasi didapatkan dengan cara mendatangi langsung. Untuk memberi kemudahan kepada

masyarakat dalam memperoleh informasi layanan, setiap OPD bisa memanfaatkan web yang dengan menampilkan informasi yang berkaitan dengan inovasi pada web tersebut. Namun, tidak semua OPD memiliki web resmi dan dikelola secara baik. Sehingga informasi layanan tidak dapat diupload pada web tersebut.

Penilaian tertinggi pada indikator ini diberikan informasi mengenai layanan didapatkan melalui aplikasi online yang berbobot 6, jika informasi layanan diperoleh melalui layanan email maupun media sosial diberi bobot 4. Sedangkan informasi layanan hanya didapatkan melalui layanan telpon maka diberi bobot 2. Pemerintah Kabupaten Bintan untuk indikator ini memperoleh nilai 344 dan menempati urutan 73 secara nasional.

15. Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan

Sebuah inovasi yang dilaksanakan memiliki manfaat tidak hanya memberikan kemudahan dalam proses kerja namun juga memberi manfaat secara luas kepada masyarakat. Terdapat hal-hal baru yang dirasakan dengan dilaksanakannya inovasi baik pada pengguna inovasi maupun pelaksana inovasi. Semakin cepat manfaat yang dirasakan oleh masyarakat maka dapat dikatakan bahwa inovasi tersebut semakin baik.

Inovasi yang dilakukan di Kabupaten Bintan sudah dapat dirasakan tidak hanya oleh masyarakat tetapi juga pihak lainnya. Rentang waktu yang dibutuhkan untuk merasakan manfaat inovasi juga berbeda-beda. Khusus untuk inovasi pelayanan publik, hasil inovasi dapat langsung dirasakan oleh masyarakat pada saat itu juga. Namun, kendala utama pada indikator ini adalah terbatasnya bukti baik foto maupun dokumen pendukung yang dapat membuktikan lamanya waktu yang dibutuhkan sebuah inovasi agar bisa bermanfaat bagi masyarakat.

Sebuah inovasi yang dapat dirasakan manfaatnya dalam waktu 1-2 hari akan diberi bobot 12. Jika hasil inovasi dapat dirasakan dalam waktu 3 hingga 7 hari maka bobot penilaiannya adalah 8. Sedangkan bobot 4 akan diberikan kepada inovasi yang manfaatnya dapat dirasakan dalam waktu 8 hari keatas. Bobot nilai untuk indikator ini cukup besar jika dibandingkan

dengan indikator lainnya. Pada indikator ini Pemerintah Kabupaten Bintan memperoleh nilai 344 dan berada pada posisi 73.

16. Online Sistem

Perkembangan teknologi yang terjadi saat ini menuntut kita untuk dapat beradaptasi termasuk dalam pelaksanaan inovasi. Banyak inovasi yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi, salah satunya adalah dengan melakukan kegiatan inovasi tersebut secara online. Sistem online dapat mempermudah pelaksanaan kerja, mempersingkat waktu pelayanan, mengurangi penggunaan kertas dan dapat diakses tanpa dimana saja berada sehingga tujuan inovasi dapat dicapai secara efektif dan efisien.

Pada pelaksanaan inovasi yang dilakukan di Kabupaten Bintan tidak semua inovasi dilakukan dengan menggunakan sistem online. Terutama inovasi dibidang pelayanan publik dalam sektor kesehatan dan pendidikan masih dilakukan secara offline/manual. Informasi mengenai inovasi juga tidak dapat diakses pada web OPD pelaksana inovasi. Masih banyak OPD yang tidak memanfaatkan teknologi dalam pelaksanaan dan pengembangan inovasi. Hal ini tentu menjadi sisi negatif jika melihat perkembangan teknologi yang terjadi.

Pada indikator ini, sebuah inovasi memiliki jaringan prosedur yang dibuat secara daring. Apabila pelaksanaan inovasi mendapat dukungan melalui perangkat web aplikasi dan aplikasi mobile (android atau ios) berbobot nilai 12. Jika inovasi mendapat dukungan melalui web aplikasi diberi nilai 8. Bobot 4 akan diberikan jika sebuah inovasi hanya mendapatkan dukungan melalui informasi website atau media sosial. Indikator ini menempatkan Pemerintah Kabupaten Bintan pada urutan 72 secara nasional dengan nilai 256.

17. Kecepatan Inovasi

Kecepatan inovasi merupakan proses yang digunakan untuk mengakses inovasi daerah dalam satuan waktu. Batasan waktunya dibagi menjadi 3, yakni sangat cepat jika waktu pengerjaan inovasi kurang dari 6 bulan); cukup cepat apabila waktu pengerjaannya kurang dari 12 bulan; dan lambat

jika inovasi dikerjakan dalam waktu lebih dari 12 bulan. Sebuah inovasi membutuhkan waktu tertentu mulai dari tahap perencanaan hingga dapat dilaksanakan. Sebuah inovasi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Pasal 7 inisiatif inovasi daerah dapat berasal dari Kepala Daerah; Anggota DPRD; ASN; Perangkat Daerah; dan Anggota masyarakat. Proses pengajuan inovasi ini juga memerlukan waktu untuk dapat direalisasikan menjadi sebuah inovasi.

Informasi berkaitan dengan waktu pengajuan dan pelaksanaan inovasi yang dilakukan oleh OPD tidak didapatkan dengan pasti karena hampir semua inovasi tidak melalui proses pengajuan secara formal dengan melengkapi proposal. Waktu pelaksanaan inovasi berpatokan pada regulasi maupun dokumen terkait. Namun tidak semua inovasi memiliki dokumen tersebut. Sehingga sulit untuk membuktikan waktu ujicoba dan pelaksanaan inovasi oleh OPD.

Indikator ini memiliki kriteria penilaian berdasarkan jangka waktu. Apabila proses inovasi dapat dilakukan dalam waktu hitungan 8 bulan keatas hanya diberi bobot nilai 2; proses inovasi yang dilakukan dalam waktu hitungan 3-7 bulan berbobot 4; dan jika sebuah inovasi prosesnya memerlukan waktu hitungan 1-2 bulan diberi bobot 6. Pemerintah Kabupaten Bintan pada indikator ini memperoleh nilai 146 dan berada pada posisi 88 secara nasional.

18. Kemanfaatan Inovasi

Tujuan utama dari pelaksanaan inovasi adalah memberi manfaat bagi penggunanya. Semakin banyak pihak yang merasakan manfaat sebuah inovasi maka inovasi tersebut dianggap semakin berhasil. Manfaat inovasi bisa didapatkan dengan berbagai bentuk baik peningkatan ekonomi, pemangkasan birokrasi, peningkatan pelayanan publik, dan manfaat lainnya.

Pelaksanaan inovasi di Kabupaten Bintan telah memberikan banyak manfaat tidak hanya bagi masyarakat (inovasi bidang pelayanan publik) dan ASN (inovasi bidang tata kelola Pemerintahan). Inovasi yang

dilaksanakan juga memberi manfaat bagi banyak orang baik masyarakat dan ASN. Namun kendala yang dihadapi adalah kurangnya bukti dokumen yang bisa menunjukkan bahwa inovasi yang dilaksanakan telah bermanfaat. Inovasi yang memberikan manfaat yang paling banyak dirasakan adalah inovasi di bidang pelayanan publik yang hasil manfaatnya dapat dirasakan lebih dari 200 orang.

Penilaian pada indikator ini dibagi menjadi 3 kategori. Nilai tertinggi 21 akan diberikan jika sebuah inovasi dapat dirasakan manfaatnya lebih dari 200 orang. Jika inovasi hanya dirasakan manfaatnya oleh 100-200 orang maka bobotnya adalah 14. Bobot terendah 7 akan diberikan jika sebuah inovasi dirasakan manfaatnya oleh 1-100 orang. Semakin banyak orang yang merasakan manfaat sebuah inovasi, maka nilai untuk inovasi tersebut semakin tinggi. Pada indikator ini, Pemerintah Kabupaten Bintan berada pada urutan 57 dengan nilai 959.

19. Tingkat Kepuasan penggunaan inovasi daerah

Kepuasan pengguna merupakan salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan dan pengembangan inovasi. Kepuasan pengguna juga menunjukkan adanya kesesuaian antara harapan seseorang dengan hasil yang diperoleh. Kepuasan pengguna inovasi sangat diperlukan untuk mengetahui sejauh mana inovasi ini bermanfaat dan menjadi perbaikan untuk pengembangan inovasi kedepannya. Semakin tinggi tingkat kepuasan sebuah inovasi maka dapat dikatakan inovasi tersebut semakin bermanfaat.

Inovasi-inovasi yang dilaksanakan di Kabupaten Bintan tentunya memberikan kepuasan bagi masyarakat dan pengguna inovasi lainnya. Terutama inovasi dalam bidang pelayanan publik yang langsung dapat dirasakan oleh masyarakat, misalnya di sektor pendidikan dan kesehatan. Namun hampir semua inovasi di Kabupaten Bintan tidak melakukan pengukuran terhadap kepuasan pengguna inovasi yang dilaksanakan. Hal inilah yang menjadi kendala utama pada indikator ini, karena tidak dapat membuktikan bahwa inovasi yang telah dilaksanakan memberi manfaat

bagi pengguna inovasi. Tingkat kepuasan pengguna inovasi dapat dibuktikan dengan testimony pengguna, hasil pengukuran kepuasan pengguna dari evaluasi survey dan hasil pengukuran kepuasan pengguna dari hasil penelitian.

Penilaian terhadap indikator tingkat kepuasan penggunaan inovasi daerah dibagi menjadi 3. Nilai tertinggi akan diberikan kepada inovasi yang dapat dibuktikan dengan hasil pengukuran kepuasan pengguna dari hasil penelitian, nilai yang diberikan adalah 12. Jika tingkat kepuasan pengguna inovasi dibuktikan dengan hasil evaluasi survey maka diberi nilai 8 dan nilai 4 akan diberikan jika hanya mampu dibuktikan dengan testimony pengguna. Untuk indikator ini, secara nasional Pemerintah Kabupaten Bintan berada pada posisi 57 dengan total nilai 284.

20. Sosialisasi Kebijakan

Pada umumnya, sosialisasi merupakan suatu proses bagaimana memperkenalkan sistem pada seseorang. Sosialisasi merupakan bagian penting dalam sebuah inovasi. Sosialisasi diperlukan agar substansi, tujuan dan manfaat dari sebuah inovasi bisa tersampaikan dan dipahami oleh pelaku inovasi maupun kelompok sasaran dari inovasi tersebut dan inovasi dapat diharapkan sebuah inovasi dapat dilaksanakan dengan maksimal.

Dalam konteks ini, sosialisasi yang dimaksudkan adalah memperkenalkan inovasi yang dilaksanakan oleh OPD di Kabupaten Bintan baik kepada para ASN, masyarakat maupun kepada pihak swasta. Karena banyak inovasi yang menjadikan ASN, masyarakat, dan pihak swasta sebagai pengguna atau penerima manfaat dari inovasi yang dilaksanakan. Selama ini, sosialisasi sudah dilakukan oleh OPD pelaksana inovasi di Kabupaten Bintan, namun hasil kegiatan sosialisasi ini tidak terdokumentasikan dengan baik. Sehingga sulit untuk membuktikan bahwa sosialisasi sudah terlaksana.

Sebuah inovasi yang telah disosialisasikan dapat dibuktikan dengan dokumen maupun foto dari kegiatan sosialisasi tersebut. Pembuktian ini akan mendapatkan bobot 9. Untuk indikator ini, hasil mengenai sosialisasi

mengenai inovasi sudah sangat baik. Hal ini ditunjukkan dengan nilai 495 yang menjadikan Pemerintah Kabupaten Bintan berada pada posisi 52 secara nasional.

21. Kualitas Inovasi Daerah

Secara sederhana, kualitas dapat diartikan sebagai tingkat baik atau buruknya, mutu, taraf atau derajat sesuatu. Sementara yang dimaksud dengan kualitas inovasi daerah yakni inovasi daerah yang diterapkan mengandung unsur kriteria kebaharuan, sesuai kewenangan dan dapat di replikasi. Artinya inovasi daerah yang baik haruslah memenuhi unsur-unsur tersebut. Hal ini dapat dibuktikan dengan menggunakan dokumen maupun video. Video yang dibuat haruslah mampu mendeskripsikan bagaimana proses pelaksanaan inovasi dan apa yang dihasilkan sebuah inovasi.

Sebagian besar inovasi yang dilakukan oleh OPD di Kabupaten Bintan belum seluruhnya memperlihatkan sisi kebaharuan dari sebuah inovasi. Sebagian besar masih merupakan tugas rutin dan program Pemerintah Pusat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Video yang dibuat untuk menggambarkan inovasi yang dilaksanakan masih berasal dari sumber yang terbatas, salah satunya dari sumber foto yang sangat sedikit sehingga tidak dapat menggambarkan pelaksanaan inovasi.

Video yang diupload sebagai bukti pada indikator ini memiliki bobot 18. Pada indikator kualitas inovasi daerah ini, Pemerintah Kabupaten Bintan memperoleh nilai 1224. Total 64 video yang diupload dari 69 inovasi. Secara nasional berada pada urutan 36.

Tabel 4.1

Daftar Usulan Inovasi berdasarkan Desk-Interview
di Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2020

No	Organisasi Perangkat Daerah	Usulan Inovasi
1	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	8
2	Dinas Lingkungan Hidup	1
3	Kelurahan Tanjunguban Utara	3
4	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	7
5	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	1
6	Badan Pendapatan Daerah	2
7	Dinas Kesehatan	5
8	Dinas Perikanan	1
9	Dinas Sosial	5
10	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	4
11	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	1
12	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	3
14	Satuan Polisi Pamong Praja	1
15	Sekretariat Daerah - Bagian Perekonomian	1
16	Dinas Pendidikan	5
17	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3
18	Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Daerah	1
19	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1
20	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2
21	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1
22	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	12
23	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1
24	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1
		72

Sumber: Hasil Pengumpulan Data melalui *Desk Interview*, Tahun 2020

Ada beberapa catatan penting terhadap usulan-usulan inovasi yang diberikan selama proses desk interview kepada organisasi perangkat daerah sebagaimana tercantum pada table diatas. Pertama adalah pemahaman terhadap inovasi yang diberikan sebagaimana merujuk pada aturan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah dan Permendagri Nomor 104 Tahun 2018 Tentang Penilaian Dan Pemberian Penghargaan Dan/Atau Insentif Inovasi Daerah. Ada beberapa catatan

penting terhadap usulan-usulan inovasi yang diberikan selama proses desk interview kepada organisasi perangkat daerah sebagaimana tercantum pada table diatas. Pertama adalah pemahaman terhadap inovasi yang diberikan sebagaimana merujuk pada aturan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah dan Permendagri Nomor 104 Tahun 2018 Tentang Penilaian Dan Pemberian Penghargaan Dan/Atau Insentif Inovasi Daerah. Selain itu juga OPD belum dapat melengkapi dokumen-dokumen inovasi yang ada. Dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014, pemerintah daerah harus melakukan inovasi, kemudian melaporkan inovasi tersebut ke Kemendagri. Kemudian didalam Permendagri 104 atau Permendagri 17 tahun 2016, ada kewajiban daerah untuk melaporkan, termaksud didalam LPPD. Lebih lanjut didalam Permendagri 13 tahun 2019 tentang laporan penyelenggara pemerintah daerah salah satu ringkasannya adalah inovasi daerah yang dilaporkan. Ini menjadi pekerjaan rumah tangga bagi Pemerintah Kabupaten Bintan untuk komitmen didalam melakukan inovasi daerah baik itu dari kepala daerah, DPRD, OPD, ASN maupun juga dari masyarakat.

Pada tahun 2020 pengisian data pada Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Bintan melalui website KEMENDAGRI terdapat perbaikan. Hal ini didukung dengan Kerjasama antara BAPPELITBANG Kabupaten Bintan dengan STISIPOL Raja Haji serta OPD terkait untuk Menyusun serta menginventarisir kondisi eksisting inovasi daerah yang dilakukan di wilayah administrasi pemerintah Kabupaten Bintan mulai tahun 2017-2019. Pada tahun sebelumnya berdasarkan profil inovasi yang dirilis oleh BAPPELITBANG partisipasi dan peran aktif OPD untuk menginventarisir perlu menjadi perhatian serius jika memang PEMKAB Bintan benar-benar ingin mewujudkan pemerintahan yang inovatif.

Gambar 4.1
Inovasi Daerah di Kabupaten Bintan pada Tahun 2019



Untuk tahun 2020 peningkatan dari isian inovasi daerah oleh Pemerintah Kabupaten Bintan mengalami lonjakan yang begitu signifikan berbanding pada tahun sebelumnya 2019. Mulai dari keterlibatan OPD walaupun dengan digesa oleh BAPPELITBANG namun Kerjasama dengan OPD patut juga diberikan apresiasi. Hal ini bisa dilihat diantara Kabupaten/Kota lainnya bahkan Provinsi Kepulauan Riau Bintan menempati posisi teratas.

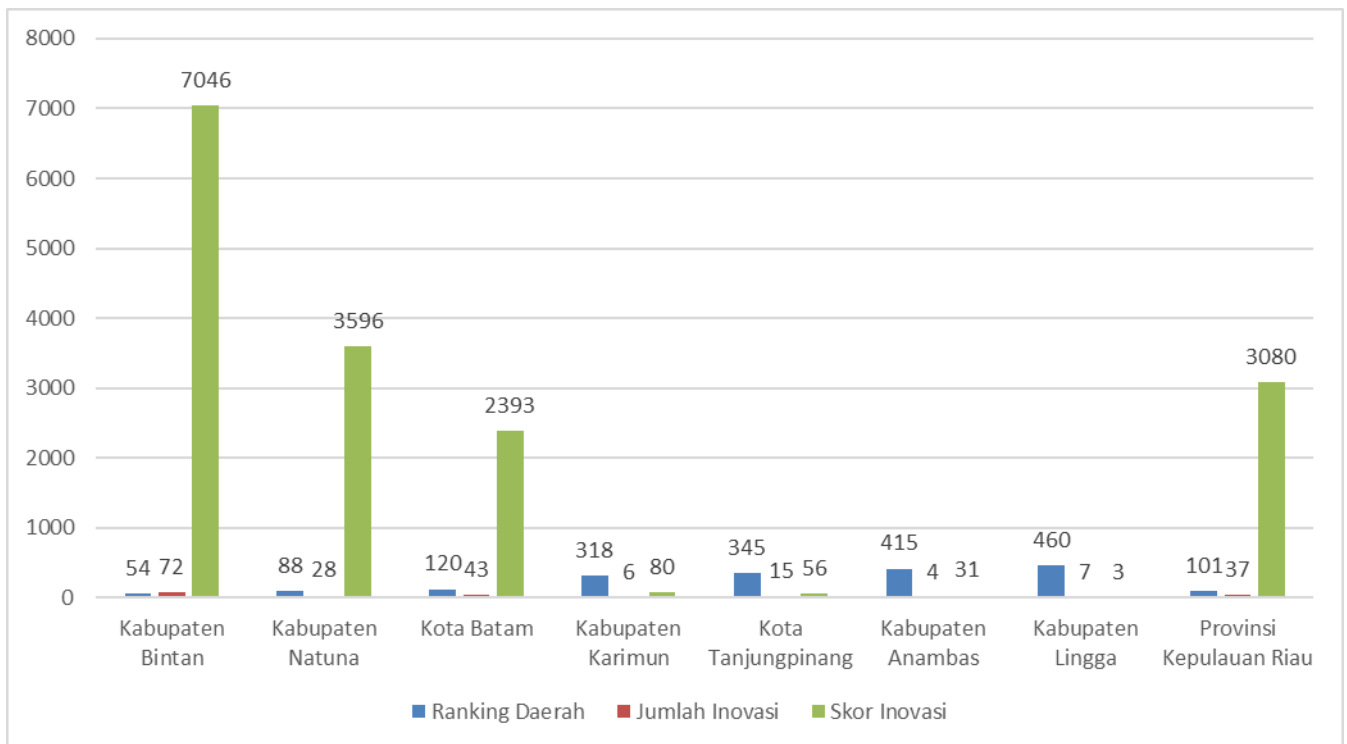
Tabel 4.2
Ranking Indeks Inovasi Daerah
Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020

No	Pemerintah Daerah	Ranking Daerah	Jumlah Inovasi	Skor Inovasi
1	Kabupaten Bintan	54	72	7046
2	Kabupaten Natuna	88	28	3596
3	Kota Batam	120	43	2393
4	Kabupaten Karimun	318	6	80
5	Kota Tanjungpinang	345	15	56
6	Kabupaten Anambas	415	4	31
7	Kabupaten Lingga	460	7	3
8	Provinsi Kepulauan Riau	101	37	3080

Sumber: Diolah dari <https://indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id/data-indeks>, Tahun 2020

Dari 72 Usulan Inovasi Daerah kepada KEMENDAGRI, pada dasarnya ini terbagi atas 2 (Dua) yaitu inovasi daerah dalam tata Kelola pemerintahan dan inovasi pada covid-19. Inovasi daerah usulan dari Pemerintah Kabupaten Bintan sebanyak 69 inovasi sedangkan untuk covid-19 sebanyak 3 (tiga) inovasi. Dari 69 inovasi daerah kesemuanya merupakan inovasi yang sudah diimplementasikan, sedangkan untuk covid-19 merupakan produk inovasi yang dalam tahapan ujicoba. Penilaian inovasi daerah selanjutnya oleh KEMENDAGRI dilakukan melalui Innovative Government Award (IGA) Tahun 2020.

Grafik 4.1
Perbandingan Capaian Indeks Inovasi Berdasarkan Ranking, Jumlah Inovasi dan Skor Inovasi Daerah Tahun 2020



Sumber: Diolah dari <https://indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id/data-indeks>, Tahun 2020

Apa yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten bintan pada dasarnya sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan Penilaian Indeks Inovasi Daerah dan Pemberian Penghargaan Innovative Government Award (IGA) Tahun 2020. IGA 2020 mendorong kompetisi positif antar pemerintah daerah guna mewujudkan peningkatan pembangunan dan pelayanan publik dengan

basis iklim kreatif dan inovatif. Implementasi inovasi daerah yang telah dilaksanakan oleh masing-masing Pemerintah Daerah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dinilai dan diberikan skor serta akan disusun peringkat daerah inovatif. Indikator Indeks Inovasi Daerah terdiri dari 2 (Dua) jenis indikator yaitu Indikator Satuan Pemerintah Daerah serta Indikator Satuan Inovasi Daerah. Bentuk-bentuk inovasi daerah ini dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, yaitu: (1) inovasi tata kelola pemerintah daerah serta (2) inovasi pelayanan publik dan atau inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Tabel 4.3
 Ranking Per-Indikator Satuan Pemda Kabupaten Bintang didalam Indeks Inovasi Daerah Tahun 2020

14 Capaian Indikator SPD-Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Bintang Tahun 2020			
No	Indikator	Ranking	Skor
1	Visi Misi	413	0
2	Tingkat Lembaga Kelitbang	222	6
3	Jumlah Inovasi Daerah Yang Dihasilkan	217	3
4	Kualitas Peningkatan Perizinan	97	6
5	Jumlah Pendapatan Perkapita	270	4
6	Jumlah Lapangan Kerja	204	2
7	Jumlah Peningkatan Investasi	113	6
8	Jumlah Peningkatan PAD	79	6
9	Opini BPK	156	6
10	Nilai Capaian LAKIP	130	4
11	Nilai IPM	171	6
12	Penghargaan Bagi Inovator	55	6
13	Optimalisasi CSR	229	1
14	Roadmap SiDA	147	4

Sumber: Diolah dari <https://indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id/data-indeks>, Tahun 2020

Terdapat 14 Indikator Penilaian SPD/Aspek Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Adapun 3 (Tiga) Besar Rangkaian dari capaian indikator 12

(Penghargaan), 8 (Peningkatan PAD) dan 4 (Kualitas Peningkatan Perizinan). Sedangkan untuk Indikator 1-Visi Misi adalah Skor terendah disebabkan tidak memuat “Inovasi” didalamnya.

Tabel 4.4
Ranking Per-Indikator Inovasi Kabupaten Bintang didalam Indeks Inovasi Daerah Tahun 2020

21 Capaian Indikator Inovasi-Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Bintang Tahun 2020			
No	Indikator	Ranking	Skor
1	Regulasi Inovasi Daerah	94	406
2	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	79	237
3	Dukungan Anggaran	63	530
4	Penggunaan IT	68	220
5	Bimtek Inovasi	95	102
6	Program Dan Kegiatan Di Renstra OPD	43	556
7	Jejaring Inovasi	46	306
8	Replikasi	74	30
9	Pedoman Teknis	95	120
10	Pengelola Inovasi	62	194
11	Ketersediaan Informasi Layanan	59	254
12	Penyelesaian Layanan Pengaduan	61	174
13	Tingkat Partisipasi Stakeholder	53	192
14	Kemudahan Informasi Layanan	62	198
15	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	73	344
16	Online Sistem	72	256
17	Kecepatan Inovasi	88	146
18	Kemanfaatan Inovasi	57	959
19	Tingkat Kepuasan penggunaan inovasi daerah	57	284
20	Sosialisasi Kebijakan	52	495
21	Kualitas Inovasi Daerah	36	1224

Sumber: Diolah dari <https://indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id/data-indeks>, Tahun 2020

Pada tahun 2020 Terdapat 21 Indikator Penilaian pada aspek pelaksanaan Inovasi Daerah. Indikator 21 (Kualitas Inovasi) adalah Skor tertinggi pelaksanaan inovasi daerah di Bintang sedangkan untuk 3 (Tiga) Besar Rangking capaian indikator 21 (Kualitas), 6 (Program dan Kegiatan renstra) dan 46 (Jejaring Inovasi).

Tabel 4.5
Komparasi Capaian Indikator SPD-Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Bintan
dengan Kab/Kota di Provinsi Kepulauan Riau

INDIKATOR	BINTAN		TANJUNGPINANG		LINGGA		BATAM		KARIMUN		KEP. ANAMBAS		NATUNA		KEPULAUAN RIAU	
	Ranking	Skor	Ranking	Skor	Ranking	Skor	Ranking	Skor	Ranking	Skor	Ranking	Skor	Ranking	Skor	Ranking	Skor
Visi Misi	413	0	323	3	490	0	148	3	316	3	290	3	147	3	19	3
Tingkat Lembaga Kelitbangan	222	6	358	6	484	0	223	6	430	3	337	6	401	3	124	6
Jumlah Inovasi Daerah Yang Dihasilkan	217	3	428	3	417	3	219	3	421	3	391	3	218	3	80	3
Kualitas Peningkatan Perizinan	97	6	459	0	453	0	313	0	455	0	229	2	312	0	237	0
Jumlah Pendapatan Perkapita	270	4	299	4	467	0	115	6	297	4	455	0	114	6	7	6
Jumlah Lapangan Kerja	204	2	175	4	455	0	66	6	458	0	434	0	65	6	4	6
Jumlah Peningkatan Investasi	113	6	275	2	455	0	115	6	274	2	272	2	114	6	10	6
Jumlah Peningkatan PAD	79	6	467	0	463	0	214	4	303	2	450	0	365	0	187	4
Opini BPK	156	6	359	6	482	0	158	6	353	6	325	6	157	6	10	6
Nilai Capaian Lakip	130	4	276	4	482	0	132	4	273	4	386	2	131	4	30	4
Nilai IPM	171	6	378	6	473	0	173	6	372	6	346	6	172	6	11	6
Penghargaan Bagi Inovator	55	6	457	0	451	0	368	0	226	4	436	0	273	2	141	4
Optimalisasi CSR	229	1	460	0	452	0	343	0	142	3	262	1	230	1	8	3
Roadmap SiDA	147	4	462	0	456	0	149	4	214	4	442	0	148	4	7	6

Sumber: Diolah dari <https://indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id/data-indeks>, Tahun 2020

Tabel 4.6
Komparasi Capaian Indikator Inovasi Daerah-Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Bintan dengan Kab/Kota di Provinsi Kepulauan Riau

NO	INDIKATOR	Bintan		Tanjungpinang		Lingga		Batam		Karimun		Kep. Anambas		Natuna		Kepulauan Riau	
		Ranking	Skor	Ranking	Skor	Ranking	Skor	Ranking	Skor	Ranking	Skor	Ranking	Skor	Ranking	Skor	Ranking	Skor
1	Regulasi Inovasi Daerah	94	406	304	14	393	0	119	301	328	14	460	0	150	210	90	420
2	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	79	237	234	42	395	0	118	162	319	9	462	0	111	168	74	258
3	Dukungan Anggaran	63	530	340	0	390	0	144	190	336	5	462	0	114	265	155	155
4	Penggunaan IT	68	220	183	56	394	0	95	148	327	6	462	0	109	126	104	132
5	Bimtek Inovasi	95	102	290	3	382	0	142	54	319	3	461	0	96	102	165	42
6	Program Dan Kegiatan Di Renstra OPD	43	556	334	0	387	0	151	132	434	0	462	0	113	212	128	172
7	Jejaring Inovasi	46	306	243	24	388	0	128	100	289	12	460	0	112	120	126	100
8	Replikasi	74	30	171	4	323	0	145	8	412	0	454	0	154	6	156	6
9	Pedoman Teknis	95	120	333	0	383	0	111	102	269	10	460	0	102	110	132	76
10	Pengelola Inovasi	62	194	229	24	388	0	137	76	325	4	462	0	118	96	131	80
11	Ketersediaan Informasi Layanan	59	254	246	22	392	0	92	158	323	6	462	0	102	130	115	118
12	Penyelesaian Layanan Pengaduan	61	174	254	10	379	0	105	94	290	6	461	0	112	84	136	60
13	Tingkat Partisipasi Stakeholder	53	192	268	10	388	0	120	78	332	2	460	0	112	84	221	22
14	Kemudahan Informasi Layanan	62	198	196	38	390	0	95	130	281	10	462	0	122	94	99	120
15	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	73	344	143	132	387	0	131	156	315	8	459	0	88	268	119	188
16	Online Sistem	72	256	224	36	380	0	89	196	308	8	462	0	128	128	85	204
17	Kecepatan Inovasi	88	146	202	36	384	0	139	76	323	4	459	0	94	140	174	50
18	Kemanfaatan Inovasi	57	959	187	182	388	0	111	448	290	42	459	0	103	504	115	441
19	Tingkat Kepuasan penggunaan inovasi daerah	57	284	243	20	378	0	108	132	295	8	458	0	115	108	114	112
20	Sosialisasi Kebijakan	52	495	301	9	386	0	90	297	294	18	460	0	120	216	133	180
21	Kualitas Inovasi Daerah	36	1224	264	72	399	0	95	504	250	108	461	0	100	486	163	234

Sumber: Diolah dari <https://indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id/data-indeks>, Tahun 2020

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Inovasi daerah merupakan kunci untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, daya saing daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Inovasi daerah menjadi salah satu alat yang digunakan dalam mengakselerasi peningkatan daya saing antar daerah. Dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan peluang pemerintah daerah untuk melakukan inovasi. Tepatnya pada pasal 386 yang menyatakan bahwa "dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi". Pemerintah daerah menjadi salah satu ujung tombak pelayanan publik yang wajib melakukan inovasi. Pelayanan publik yang inovatif akan meningkatkan pelayanan, pemberdayaan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan daya saing yang semakin tinggi. Kemampuan daya saing daerah yang tinggi pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk memotivasi setiap daerah agar terus melaksanakan dan mengembangkan inovasi, Kementerian Dalam Negeri berupaya mendorong seluruh Pemerintah Daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk melakukan inovasi daerah secara berkesinambungan dalam rangka memajukan daerah dan meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakatnya melalui kegiatan yang disebut Indeks Inovasi Daerah.

Pada Penyelenggaraan dan Fasilitasi Inovasi dan Teknologi ini terdapat 69 inovasi yang didaftarkan di web <https://indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id/> sebanyak 69 inovasi dan 14 inovasi lainnya yang terdata. 69 inovasi ini berdasarkan mendapatkan total nilai 7046 dan berada di urutan 54 secara nasional. Inovasi tersebut dinilai dengan menggunakan beberapa indikator yang terdapat pada Indeks Inputan Satuan Pemda dan Indeks Inputan Satuan Inovasi Daerah. Indeks

Inputan Satuan Pemda terdiri dari (1) Visi Misi; (2) Lembaga Kelitbagan; (3) Jumlah Inovasi Daerah yang Dihasilkan; (4) Kualitas Peningkatan Perizinan; (5) Jumlah Pendapatan Perkapita; (6) Jumlah Lapangan Kerja; (7) Jumlah Peningkatan Investasi; (8) Jumlah Peningkatan PAD; (9) Opini BPK; (10) Nilai Capaian Lakip; (11) Nilai IPM; (12) Penghargaan bagi Inovator; (13) Optimalisasi CSR; dan (14) Inovasi Daerah di RPJMD. Sedangkan indikator Indeks Inputan Satuan Inovasi Daerah yakni (1) Regulasi Inovasi Daerah; (2) Ketersediaan SDM terhadap Inovasi Daerah; (3) Dukungan Anggaran; (4) Penggunaan IT; (5) Sosialisasi Kebijakan; (6) Bimtek Inovasi; (7) Program dan Kegiatan di Renstra OPD; (8) Jejaring Inovasi; (9) Replika; (10) Kualitas Inovasi daerah; (11) Pedoman Teknis; (12) Pengelola Inovasi; (13) Ketersediaan Informasi Layanan; (14) Penyelesaian Layanan Pengaduan; (15) Tingkat Parisipasi Stakeholder; (16) Kemudahan Informasi Layanan; (17) Kemudahan Proses Inovasi yang Dihasilkan; (18) Online Sistem; (19) Kecepatan Inovasi; (20) Kemanfaatan Inovasi; dan (21) Tingkat Kepuasan Penggunaan Inovasi Daerah.

Tahun 2020 ini berdasarkan data komparasi yang diperoleh melalui web <https://indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id/> dengan nilai 7046, Kabupaten Bintan merupakan Kabupaten/Kota dengan nilai tertinggi di Provinsi Kepulauan Riau. Data Kabupaten/Kota dan Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut: Kota Tanjungpinang (jumlah inovasi 15, nilai 56, urutan 345); Kabupaten Lingga (jumlah inovasi 7, nilai 3, urutan 460); Kota Batam (jumlah inovasi 43, nilai 2393, urutan 120); Kabupaten Karimun (jumlah inovasi 6, nilai 80, urutan 318); Kabupaten Anambas (jumlah inovasi 4, nilai 31, urutan 415); Kabupaten Natuna (jumlah inovasi 28, nilai 3596, urutan 88); dan provinsi Kepulauan Riau (jumlah inovasi 37, nilai 3080, urutan 101).

Meskipun nilai yang didapatkan cukup memuaskan namun masih terdapat banyak kendala dalam pengisian data di web <https://indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id/>. Selain perbedaan persepsi dari masing-masing OPD terhadap inovasi, kendala utama adalah terbatasnya data maupun dokumen yang diberikan masing-masing OPD

untuk dapat di input pada web <https://indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id/> sedangkan pengisian masing-masing indikator harus dilengkapi dengan dokumen pendukung. Semakin banyak dokumen pendukung yang diinput maka nilai sebuah inovasi semakin tinggi.

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisa dengan menggunakan data yang didapatkan, maka rekomendasi yang dapat dilaksanakan untuk pelaksanaan dan pengembangan inovasi adalah sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi kembali dalam rangka penyatuan pemahaman (*Together understanding*) inovasi daerah.

Perbedaan persepsi mengenai inovasi menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan dan pengembangan inovasi dari masing-masing OPD. Oleh karena itu perlu dilakukan sosialisasi secara berkelanjutan mengenai apa yang dimaksud dengan inovasi dan pentingnya inovasi bagi Pemerintah daerah yang dilakukan oleh Bapelitbang sebagai *leading sector* pada kegiatan ini. Diharapkan dengan sosialisasi yang dilakukan tersebut maka setiap OPD memiliki pemahaman yang sama mengenai inovasi yang akan maupun yang telah dilaksanakan sehingga tujuan dari inovasi dapat tercapai secara maksimal.

2. Tidak lengkapnya dokumen dan data pendukung Inovasi Daerah sehingga di setiap OPD perlu melakukan penataan administrasi Inovasi Daerah.

Kelengkapan dokumen pendukung terhadap inovasi yang didaftarkan pada web <https://indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id/> merupakan aspek penilaian yang harus dipenuhi. Semakin lengkap dokumen pendukung yang diupload maka semakin tinggi nilai sebuah inovasi. Namun kenyataannya, banyak inovasi Kabupaten Bintan yang didaftarkan pada web <https://indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id/> tidak dilengkapi dengan dokumen pendukung sehingga nilai yang

diperoleh tidak maksimal. Inilah yang menjadi kendala utama yang harus menjadi perhatian bersama terutama setiap OPD yang menjadi pelaksana dan penanggungjawab inovasi tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukan penataan administrasi terhadap inovasi agar dokumen dari pelaksanaan sebuah inovasi dapat terdata dan dapat digunakan jika diperlukan. Setiap OPD juga dapat memanfaatkan website OPD yang mereka miliki untuk mempublikasikan inovasi yang dilakukan sehingga data-data tersebut juga bisa diakses oleh masyarakat. Mayoritas inovasi yang terdapat di setiap OPD tidak dapat melengkapi data pendukung yang dibutuhkan secara menyeluruh dan dimasa mendatang diharapkan kepada seluruh OPD dapat menyediakan data yang diperluakn tersebut. Adapun dokumen dan data pendukung yang diperlukan dalam melengkapi data tersebut dapat dilihat pada lampiran laporan ini.

3. Menyediakan anggaran pelaksanaan Inovasi Daerah (jika diperlukan).

Dukungan anggaran merupakan salah satu aspek penilaian sebuah inovasi. Masih banyak inovasi yang dilakukan oleh OPD di Kabupaten Bintan dilakukan tanpa adanya dukungan anggaran dan dilakukan. Banyak inovasi yang diusulkan tidak dapat terlaksana karena tidak didukung oleh anggaran yang memadai. Salah satu bentuk komitmen Pemerintah Daerah terhadap sebuah inovasi adalah dukungan anggaran agar inovasi bisa dilaksanakan dengan baik dan mencapai hasil yang maksimal. Dukungan anggaran tersebut sebaiknya tercantum dalam APBD Kabupaten Bintan.

4. Review Program yang mengacu pada Sistem Inovasi Daerah (SIDa)

SIDa adalah keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuh kembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintah daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha dan masyarakat di daerah. Oleh karena itu perlu kiranya dilakukan peninjauan kembali program-program yang

masuk kedalam Roadmap Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten Bintan Sehingga terjadi sinkronisasi terhadap inovasi yang akan dan telah dilaksanakan.

5. Peran aktif dan keterlibatan stakeholders (kepala daerah, anggota DPRD, aparatur sipil negara, Perangkat Daerah, dan anggota masyarakat) sebagai inisiator Inovasi Daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Pasal 7 inisiatif inovasi daerah dapat berasal dari Kepala Daerah; Anggota DPRD; ASN; Perangkat Daerah; dan Anggota masyarakat. Oleh karena itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut sebuah inovasi tidak hanya diinisiasi oleh OPD tetapi juga dapat diusulkan oleh stakeholders lainnya. Peran aktif ini yang perlu ditingkatkan mengingat selama ini inovasi yang ada di Kabupaten Bintan lebih banyak diinisiasi oleh OPD. Inisiasi ini juga harus dilengkapi dengan proposal inovasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adair, J. (1996). *Effective Innovation. How to Stay Ahead of the Competition*. London: PanBooks.
- Agusta, I., (2003). *Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif*. Bogor: Litbang Pertanian
- Bapelitbang. (2019). *Penyusunan Roadmap Sistem Inovasi Daerah (SIDA) Kabupaten Bintan*.
- Byrd, J & Brown, P.L. (2003). *The Innovation Equation Building Creativity and Risk Taking in Your Organization*. San Fransisco: Jossey-Bass/Pfeiffer. A Wiley Imprint.
- Creswell, J. W., (2014). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- De Jong, J & Hartog, D D. 2003. *Leadership as a determinant of innovative behaviour*. A Conceptual framework.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah
- Pusat Litbang Inovasi Daerah. (2019). *Buku Petunjuk Teknis Indeks Inovasi Daerah Tahun 2019*. Badan penelitian dan pengembangan Kementerian dalam negeri
- Resen, M. G. S. K. (2015). Inovasi Daerah (Refleksi dan Pengaturan Inovasi Daerah di Indonesia). *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 4 (4), 680–687.
- Setiawan, I. (2017). Implementasi Inovasi Daerah Di Kota Balikpapan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, II (2), 83–97.
- Suhada, B., & Ratmono, R. (2019). Desain Pengembangan Inovasi Daerah di Kabupaten Lampung Timur. *DERIVATIF: Jurnal Manajemen*, 13 (2).
- Tedjo, P. (2017). Inovasi Daerah, Kemandirian, dan Daya Saing Di Era Baru Pembangunan Otonomi Daeah. *Mimbar Administrasi*, 1(1), 41–49.

Lampiran

Pedoman Pengisian Innovation Government Award (IGA)

Indeks Inovasi Daerah

Pedoman Pengisian Innovation Government Award (IGA)
Indeks Inovasi Daerah

No	Indikator	Keterangan	Informasi (Pilih Parameter)	Data Pendukung	Jenis File
1	Regulasi Inovasi Daerah	Regulasi / Kebijakan yang ditetapkan untuk mendukung Inovasi Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. SK OPD (bobot = 7) 2. Perkada (bobot = 14) 3. Perda (bobot = 21) 	Dokumen SK/Peraturan	Dokumen
2	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Jumlah SDM yang melaksanakan inovasi daerah ini. jumlahnya ada berapa orang	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1-10 SDM (bobot = 3) 2. 11-30 SDM (bobot = 6) 3. Lebih dari 31 keta (bobot = 9) 	SK Kegiatan	Dokumen
3	Dukungan Anggaran	Anggaran untuk inovasi daerah dituangkan dalam APBD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anggaran untuk kegiatan inovasi sudah ada dalam tahap perencanaan (bobot = 5) 2. Anggaran untuk kegiatan inovasi sudah ada sampai tahap pelaksanaan inovasi (bobot = 10) 3. Anggaran untuk kegiatan inovasi dalam tahapan sudah dilaksanakan dan sudah di Evaluasi (bobot = 15) 	Dokumen Anggaran	Dokumen
4	Penggunaan IT	Penggunaan alat elektronik, teknologi dan sistem informasi dalam inovasi daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kerja di lingkungan pemerintah daerah dilakukan secara manual (bobot = 2) 2. Pelaksanaan kerja di lingkungan pemerintah daerah menggunakan perangkat elektronik (bobot = 4) 3. Pelaksanaan kerja di lingkungan pemerintah daerah sudah didukung system informasi online / daring (bobot = 6) 	Foto Kegiatan/ Gambar Screenshoot layar	foto / gambar
5	Bimtek Inovasi	Suatu kegiatan yang diberikan pengguna inovasi daerah kepada pelatihan yang bermanfaat dalam meningkatkan inovasi daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pernah 1 tahun 2 kali melakukan bimtek (bobot = 3) 2. Pernah 2 tahun 4 kali melakukan bimtek (bobot = 6) 3. Pernah 3 tahun 9 kali melakukan bimtek (bobot = 9) 	Foto Kegiatan/ Gambar Screenshoot layar	foto / gambar

6	Program Dan Kegiatan Di Renstra OPD	Inovasi Daerah masuk dalam program dan kegiatan Renstra OPD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah daerah menuangkan “rencana” pengembangan inovasi dalam Renstra (bobot = 4) 2. Pemerintah daerah sudah menuangkan pengembangan inovasi ke dalam Renstra (bobot = 8) 3. Pemerintah daerah sudah menuangkan pengembangan inovasi ke dalam Renstra dan telah dilaksanakan (bobot = 12) 	Dokumen Renstra	Dokumen
7	Jejaring Inovasi	Interaksi antar pelaku inovasi daerah. misalkan antar OPD, antar Pemda, atau melibatkan pelayanan publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inovasi hanya berjalan 1 OPD (bobot = 2) 2. Inovasi hanya berjalan 2 OPD (bobot = 4) 3. Inovasi hanya berjalan 3 OPD atau lebih (bobot = 6) 	Dokumen Laporan/Foto Kegiatan/ Gambar Screenshoot layar	Dokumen/Foto /Gambar
8	Replikasi	Inovasi daerah yang telah berhasil direplikasi ke daerah lain	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pernah 1 kali di replikasi di daerah lain (bobot = 2) 2. Pernah 2 kali di replikasi di daerah lain (bobot = 4) 3. Pernah 3 kali di replikasi di daerah lain (bobot = 6) 	Dokumen Kerja Sama	dokumen
9	Pedoman Teknis	Ketentuan dasar yang memberi arah bagaimana inovasi daerah harus dilakukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat “Rancangan” Pedoman Teknis (bobot = 2) 2. Telah Terdapat Pedoman Teknis (bobot = 4) 3. Telah Terdapat Pedoman Teknis dan dapat diakses secara online (bobot = 6) 	dokumen Pedoman Teknis	dokumen
10	Pengelola Inovasi	Pengelola inovasi ditetapkan dengan Surat Keputusan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada Pengelola namun tidak ditetapkan dengan SK OPD (bobot = 2) 2. Ada Pengelola dan ditetapkan dengan SK OPD (bobot = 4) 3. Ada Pengelola dan ditetapkan dengan SK Kepala Daerah (bobot = 6) 	Dokumen Laporan/Foto Kegiatan/ Gambar Screenshoot layar	Dokumen/Foto /Gambar
11	Ketersediaan Informasi Layanan	Kesiapan informasi layanan untuk dapat digunakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi melalui datang langsung (bobot = 2) 2. Informasi diakses melalui telp (bobot = 4) 3. Informasi layanan dapat diakses secara Online (bobot = 6) 	Dokumen Laporan/Foto Kegiatan/ Gambar Screenshoot layar	Dokumen/Foto /Gambar

12	Penyelesaian Layanan Pengaduan	Penyelesaian informasi/ pemberitahuan yang disampaikan oleh pengguna tentang inovasi daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat “call center” layanan pengaduan pengguna (bobot = 2) 2. Terdapat layanan pengaduan pengguna melalui “media sosial” (bobot = 4) 3. Terdapat layanan pengaduan pengguna melalui “aplikasi pengaduan” (bobot = 6) 	Dokumen Laporan/Foto Kegiatan/ Gambar Screenshoot layar	Dokumen/Foto /Gambar
13	Tingkat Partisipasi Stakeholder	Tindakan pihak pihak tertentu dalam mengambil bagian pada kegiatan inovasi daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inovasi dilakukan dengan melibatkan masyarakat (bobot = 2) 2. Inovasi dilakukan dengan melibatkan masyarakat dan akademisi (bobot = 4) 3. Inovasi dilakukan dengan melibatkan masyarakat dan akademisi serta media massa (bobot = 6) 	Dokumen Laporan/Foto Kegiatan/ Gambar Screenshoot layar	Dokumen/Foto /Gambar
14	Kemudahan Informasi Layanan	Tidak memerlukan banyak tenaga untuk memperoleh informasi layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Layanan Telp (bobot = 2) 2. Layanan Email/Media Sosial (bobot = 4) 3. Layanan Melalui Aplikasi Online (bobot = 6) 	Dokumen Laporan/Foto Kegiatan/ Gambar Screenshoot layar	Dokumen/Foto /Gambar
15	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	Tidak memerlukan banyak tenaga untuk melakukan inovasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil inovasi dapat dihasilkan dalam waktu hitungan 8 hari ke atas (bobot = 4) 2. Hasil inovasi dapat dilakukan dalam waktu 3-7 hari (bobot = 8) 3. Hasil inovasi dapat dilakukan dalam waktu 1-2 hari (bobot = 12) 	Dokumen Laporan/Foto Kegiatan/ Gambar Screenshoot layar	Dokumen/Foto /Gambar
16	Online Sistem	Jaringan prosedur yang dibuat secara daring	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada dukungan melalui informasi website atau media social (bobot = 4) 2. Ada dukungan melalui web aplikasi (bobot = 8) 3. Ada dukungan melalui perangkat web aplikasi dan aplikais mobile (android atau ios) (bobot = 12) 	Dokumen Laporan/Foto Kegiatan/ Gambar Screenshoot layar	Dokumen/Foto /Gambar

17	Kecepatan Inovasi	Proses yang digunakan untuk mengakses inovasi daerah dalam satuan waktu. yang dimaksud sangat lambat (waktunya pengerjaanya kurang dari 6 bulan) yang dimaksud cukup cepat (waktunya pengerjaanya kurang dari 12 bulan) yang dimaksud lambat (waktunya pengerjaanya lebih dari 12 bulan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses inovasi dapat dilakukan dalam waktu hitungan 8 bulan keatas (bobot = 2) 2. Proses inovasi dapat dilakukan dalam waktu hitungan 3-7 bulan (bobot = 4) 3. Proses inovasi dapat dilakukan dalam waktu hitungan 1-2 bulan (bobot = 6) 	Dokumen Laporan/Foto Kegiatan/ Gambar Screenshoot layar	Dokumen/Foto /Gambar
18	Kemanfaatan Inovasi	Inovasi daerah yang dihasilkan bermanfaat dan tidak menimbulkan pembenanan daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil manfaatnya dapat dirasakan 1-100 orang (bobot = 7) 2. Hasil manfaatnya dapat dirasakan 100-200 orang (bobot = 14) 3. Hasil manfaatnya dapat dirasakan diatas 201 orang (bobot = 21) 	Dokumen Laporan/Foto Kegiatan/ Gambar Screenshoot layar	Dokumen/Foto /Gambar
19	Tingkat Kepuasan penggunaan inovasi daerah	Ketersediaan tingkat kepuasan inovasi daerah dapat dirasakan sesuai dengan yang diharapkan pengguna	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil pengukuran kepuasan pengguna dari "testimoni pengguna" (bobot = 4) 2. Hasil pengukuran kepuasan pengguna dari evaluasi survey (bobot = 8) 3. Hasil pengukuran kepuasan pengguna dari hasil penelitian (bobot = 12) 	Dokumen Laporan/Foto Kegiatan/ Gambar Screenshoot layar	Dokumen/Foto /Gambar
20	Sosialisasi Kebijakan	Penyebarluasan informasi kebijakan inovasi daerah dari pemerintahan daerah kepada pengguna inovasi daerah (pengguna dapat Pegawai ASN atau Masyarakat) dengan mengunggah foto kegiatan inovasi daerah dan/atau pelaksanaan inovasi dimaksud.	Ada Foto (bobot = 9)	Foto Kegiatan/ Gambar Screenshoot layar	Foto/Gambar
21	Kualitas Inovasi Daerah	Kualitas inovasi Daerah dapat dibuktikan dengan video inovasi daerah (file MP4, Mov atau Avi)	Ada upload video (bobot = 18)	Video	Video